

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2021

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : drh. H. SAPTO DJATMIKO T. R, MM

Pangkat/NIP : Pembina Utama Muda/19670130 1992 1 002

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 dengan ini menyatakan

1. Data yang kami sampaikan dalam dokumen IKPLHD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 adalah benar dan valid.
2. Apabila terbukti tidak benar dan valid kami bersedia menerima sanksi.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya.

Ponorogo, Juli 2021

Mengetahui,

Bupati Ponorogo



H. SUGIRI SANCOKO, S.E M.M

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ponorogo



drh. H. SAPTO DJATMIKO. T. R, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670130 1992 1 002

PERNYATAAN PENETAPAN ISU PRIORITAS

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya dokumen IKPLHD ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan uraian secara jelas dan benar mengenai data dan informasi isu prioritas lingkungan Kabupaten Ponorogo serta pengelolaannya dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, disusun memuat isu prioritas daerah yang didasarkan pada proses partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Kabupaten Ponorogo. Bersama ini saya selaku Bupati Ponorogo menyatakan bahwa penetapan isu prioritas dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah (DIKPLHD) telah melibatkan organisasi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, Juni 2021

Bupati Ponorogo



H. Sugiri Sancoko, S.E. M.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. Dokumen ini menyediakan data dan informasi terkait lingkungan hidup selama kalender 2020, menguraikan secara jelas mengenai faktor pemicu (*driving force*), potensi tekanan yang terjadi (*pressure*), status/keadaan lingkungan hidup Kabupaten Ponorogo (*state*), dampak lingkungan yang terjadi (*impact*), dan tanggapan atau solusi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi potensi permasalahan dan dampak lingkungan yang terjadi (*response*). Kondisi lingkungan hidup yang terangkum dalam dokumen ini merupakan wujud aplikasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal keterbukaan informasi kepada publik.

Diharapkan DIKPLHD ini dapat berguna dalam menilai dan menentukan isu prioritas lingkungan hidup serta membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah, Kelompok Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga penyusunan dokumen ini dapat terlaksana dengan baik.

Ponorogo, Juni 2021

Bupati Ponorogo



H. Sugiri Sancoko, S.E. M.M

DAFTAR ISI

PAKTA INTEGRITAS	I
PERNYATAAN PENETAPAN ISU PRIORITAS	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PROFIL DAERAH.....	6
1.2.1. Gambaran Umum	6
1.2.3. Kondisi Topografi	12
1.2.4. Kondisi Klimatologis	13
1.2.5. Kondisi Hidrologi	14
1.2.6. Kondisi Demografis	16
1.3. GAMBARAN SINGKAT PROSES PENYUSUNAN ISU PRIORITAS.....	18
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	23
1.4.1. Maksud Kegiatan	23
1.4.2. Tujuan Kegiatan	23
1.5. RUANG LINGKUP PENULISAN	24
BAB II	32
ANALISIS DPSIR DALAM ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	32
2.1. TATA GUNA LAHAN	32
2.2. KUALITAS AIR	58
2.3. KUALITAS UDARA.....	113
2.4. RESIKO BENCANA	122
2.5. PARIWISATA.....	128
2.6. KELEMBAGAAN	131
BAB III	145
ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	145
3.1 METODE PENGUMPULAN DATA	147
3.2 METODE PENGUMPULAN DATA	150
3.3 PENYARINGAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP	153
3.4 ANALISIS ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	154
BAB IV	170
INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	170
4.1 INOVASI PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN BERDASARKAN ISU PRIORITAS	172
BAB V	182

PENUTUP	182
5.1 KESIMPULAN	182
5.2 RENCANA TINDAK LANJUT	184
DAFTAR PUSTAKA	186
LAMPIRAN TABEL.....	187
LAMPIRAN PETA SPATIAL	280
SUMBER : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. PONOROGO	280
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI.....	291
LAMPIRAN BIODATA	296

DAFTAR TABEL

Tabel I-1.	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.....	11
Tabel I -2.	Rata-rata hari hujan per Bulan dan Curah Hujan Rata-rata Bulanan kabupaten Ponorogo Tahun 2020	14
Tabel I -3.	Data Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	16
Tabel I -4.	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk Kabupaten Ponorogo Per Kecamatan Tahun 2020	17
Tabel II-1.	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status Tahun 2020	36
Tabel II-2.	Lahan Kritis di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.....	42
Tabel II-3.	Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 ..	43
Tabel II-4.	Lokasi Titik Pengambilan Sampel Tanah Tahun 2020	46
Tabel II-5.	Status Kerusakan Tanah Tahun 2020	47
Tabel II-6.	Status Kerusakan Tanah Tahun 2020	59
Tabel II-7.	Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2020	65
Tabel II-8.	Titik Lokasi Sumur di kabupaten Ponorogo Tahun 2020	70
Tabel II-9.	Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi ...	71
Tabel II-10.	Parameter Kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi ...	72
Tabel II-11.	Hasil Uji Kualitas Air Sumur Parameter Fisik di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	72
Tabel II-12.	Hasil Uji Kualitas Air Sumur Parameter Fisik di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	74
Tabel II-13.	Parameter Fisik, Kimia, Biologi Hasil Uji Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.....	87
Tabel II-14.	Nama Sungai dan Titik Pantau Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	89
Tabel II-15.	Nama Sungai dan Titik Pantau Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	91
Tabel II-16.	Uji Kualitas Udara Ambien Pada Parameter O3.....	120
Tabel II-17.	Uji Kualitas Udara Ambien Pada Parameter Pb	120
Tabel II-18.	Data bencana alam di Kabupaten Ponorogo.....	125
Tabel II-22.	Kegiatan Fisik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup	133
Tabel II-23.	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	134
Tabel II-24.	Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ponorogo.....	136
Tabel II-25.	Izin Mengelola Limbah B3.....	140
Tabel II-26.	Jenis TPA Sampah Domestik di Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2020.....	141
Tabel II-25.	Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga	143
Tabel II-26.	Status Pengaduan Masyarakat	144
Tabel III-1.	Kebutuhan Data IKPLHD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 - 2020	3
Gambar I-2.	Kesenian Reog Ponorogo.....	8
Gambar I-3.	Kesenian Gajah-gajahan.....	8
Gambar I-4.	Pembagian Administratif Kabupaten	9
Gambar I-5.	Grafik Prosentase Luas Kecamatan Kabupaten Ponorogo	10
Gambar I-6.	Peta Administrasi Kabupaten Ponorogo	12
Gambar I-7.	Grafik Prosentase Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.....	17
Gambar I-8.	Diagram Analisis DPSIR (<i>Driving Force-Pressure-State-Impact-Response</i>)	22
Gambar II-1.	Diagram Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama.....	33
Gambar II-2.	Grafik Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku.....	34
Gambar II-3.	Grafik Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan.....	35
Gambar II-4.	Grafik Ijin Pemanfaatan Hutan Kayu Berdasarkan Jumlahnya	37
Gambar II-5.	Grafik Ijin Pemanfaatan Hutan Kayu Berdasarkan Luasannya.....	37
Gambar II-6.	Grafik Ijin Pemanfaatan Hutan Bukan Kayu Berdasarkan Jumlahnya	38
Gambar II-7.	Grafik Ijin Pemanfaatan Hutan Bukan Kayu Berdasarkan Luasannya	39
Gambar II-8.	Grafik Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian	40
Gambar II-9.	Grafik Luasan Kawasan Lindung Terhadap Kawasan Bawahannya.....	41
Gambar II-10.	Grafik Luasan Kawasan perlindungan Setempat.....	41
Gambar II-11.	Lahan Kritis di Kabupaten Ponorogo	42
Gambar II-12.	Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo	44
Gambar II-13.	Grafik Luas Produksi Pertambangan Menurut Jenis Baha Galian .	45
Gambar II-14.	Peta Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa Kecamatan Balong	51
Gambar II-15.	Peta Unit Lahan Kecamatan Balong	52
Gambar II-16.	Peta Lokasi Titik Sampel Kecamatan Balong	53
Gambar II-17.	Peta Lokasi Titik Sampel Kecamatan Balong	54
Gambar II-18.	Foto Pengambilan Passive Sampel	55
Gambar II-19.	Foto Pengambilan Sampel Badan Air di Sungai Mungkungun	56
Gambar II-20.	Grafik Luas Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian	57
Gambar II-21.	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	61
Gambar II-22.	Grafik Prosentase Luasan Wilayah Kabupaten Ponorogo	62
Gambar II-23.	Grafik Jenis Penyakit Utama yang diderita penduduk Wilayah Kabupaten Ponorogo	63
Gambar II-24.	Grafik Jumlah Rumah Tangga Dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	64
Gambar II-25.	Grafik Panjang Sungai Di Kabupaten Ponorogo.....	66
Gambar II-26.	Grafik Debit Sungai Di Kabupaten Ponorogo	66
Gambar II-27.	Grafik Debit Sungai Di Kabupaten Ponorogo	67

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Gambar II-28. Grafik Volume Embung Di Kabupaten Ponorogo	68
Gambar II-29. Grafik Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar	69
Gambar II-30. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sumur Kabupaten Ponorogo Parameter Kimia Besi (Fe)	76
Gambar II-31. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sumur Kabupaten Ponorogo Parameter Kimia Mangan	77
Gambar II-32. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sumur Kabupaten Ponorogo Parameter Kimia Flourida	78
Gambar II-33. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sumur Kabupaten Ponorogo Parameter Kimia Nitrit sebagai N	79
Gambar II-34. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter Temperatur	80
Gambar II-35. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter pH	80
Gambar II-36. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter TDS	81
Gambar II-37. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter TSS.....	81
Gambar II-38. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter DO.....	82
Gambar II-39. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter BOD	82
Gambar II-40. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter COD	83
Gambar II-41. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter NO ₂	83
Gambar II-42. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter NO ₃	84
Gambar II-43. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter NH ₃	84
Gambar II-44. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter Fenol	85
Gambar II-45. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter Total Coliform	85
Gambar II-46. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter H ₂ S.....	86
Gambar II-47. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Temperatur	92
Gambar II-48. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Temperatur	93
Gambar II-49. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter pH	94
Gambar II-50. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter PH	94
Gambar II-51. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter TDS	95

Gambar II-52. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter TDS.....	96
Gambar II-53. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter TSS.....	97
Gambar II-54. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter TSS.....	97
Gambar II-55. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter DO.....	98
Gambar II-56. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter DO.....	99
Gambar II-57. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter BOD.....	100
Gambar II-58. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter BOD.....	100
Gambar II-59. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter COD.....	101
Gambar II-60. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter COD.....	102
Gambar II-61. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NO ₂	103
Gambar II-62. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NO ₂	103
Gambar II-63. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NO ₃	104
Gambar II-64. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NO ₃	105
Gambar II-65. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NH ₃	106
Gambar II-66. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NH ₃	106
Gambar II-67. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Fenol.....	107
Gambar II-68. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Fenol.....	108
Gambar II-69. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Minyak dan Lemak	109
Gambar II-70. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Minyak dan Lemak	109
Gambar II-71. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Total Coliform.....	110
Gambar II-72. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Total Coliform.....	111
Gambar II-73. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter H ₂ S.....	112
Gambar II-74. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter H ₂ S.....	112

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Gambar II-75. Grafik Suhu Udara rata – rata Bulanan	114
Gambar II-76. Perubahan Panjang Ruas Jalan	116
Gambar II-77. Uji Kualitas Udara Ambien pada Parameter SO ₂	117
Gambar II-78. Uji Kualitas Udara Ambien pada Parameter CO	118
Gambar II-79. Uji Kualitas Udara Ambien pada Parameter NO ₂	119
Gambar II-80. Jumlah Personil Lembaga Pengelolaan Hidup	132
Gambar II-81. Jumlah Staff Yang Mengikuti Diklat.....	133
Gambar II-82. Jumlah Rumah Tangga Miskin.....	139
Gambar II-83. Jumlah Bank Sampah	142
Gambar III-1. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Dalam Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	148
Gambar III-2. Diagram Alur Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	150
Gambar IV-1. Kegiatan Launching Program “Gerak Warok”	173
Gambar IV-2. Kegiatan Komunitas Ponorogo Resik.....	174
Gambar IV-3. Serah Terima Bantuan Sumur Resapan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.....	176
Gambar IV-4. Kegiatan Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo	177
Gambar IV-5. Kegiatan Penyerahan Alat Pencacah Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo	178
Gambar IV-4. Pusat Daur Ulang (PDU) Purbosuman Kabupaten Ponorogo	180
Gambar IV-11. Kegiatan Pengawasan Air Limbah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.....	181

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya	188
Tabel 2	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama	192
Tabel 3	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status	193
Tabel 4	Keadaan Flora dan Fauna	194
Tabel 5	Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar	198
Tabel 6	Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan	199
Tabel 7	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air	200
Tabel 8	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering	201
Tabel 9	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah	202
Tabel 10	Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove	203
Tabel 11	Luas dan Kerusakan Padang Lamun	204
Tabel 12	Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang	205
Tabel 13	Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian	206
Tabel 14	Jenis Pemanfaatan Lahan	207
Tabel 15	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian	208
Tabel 16	Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi	209
Tabel 17	Luas dan Kerusakan Lahan Gambut	210
Tabel 18	Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	211
Tabel 19	Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	212
Tabel 20	Perdagangan Satwa dan Tumbuhan	213
Tabel 21	Jumlah dan Ijin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	214
Tabel 22	Kualitas Air Sumur	216
Tabel 23	Kualitas Air Laut	219
Tabel 24	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan	220
Tabel 25	Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum	222
Tabel 26	Kualitas Air Hujan (kosong)	223
Tabel 27	Kondisi Sungai	224
Tabel 28	Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung	225
Tabel 29	Kualitas Air Sungai	226

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Tabel 30	Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung	232
Tabel 31	Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	233
Tabel 32	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan	234
Tabel 33	Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk	237
Tabel 34	Jumlah Rumah Tangga Miskin	238
Tabel 35	Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran	239
Tabel 36	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan	243
Tabel 37	Kualitas Udara Ambien	244
Tabel 38	Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga	245
Tabel 39	Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang di gunakan	246
Tabel 40	Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan	247
Tabel 41	Dokumen Izin Lingkungan	248
Tabel 42	Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3	251
Tabel 43	Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))	255
Tabel 44	Kebencanaan	257
Tabel 45	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk (Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	260
Tabel 46	Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	261
Tabel 47	Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari	262
Tabel 48	Jumlah Bank Sampah	263
Tabel 49	Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi	266
Tabel 50	Status Pengaduan Masyarakat	267
Tabel 51	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup	268
Tabel 52	Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan	269
Tabel 53	Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat	270
Tabel 54	Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	271
Tabel 55	Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat	272
Tabel 56	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	273

Tabel 57	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	274
Tabel 58	Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	275
Tabel 59	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	276
Tabel 60	Pendapatan Asli Daerah	278
Tabel 61	Inovasi Pengelolaan LH daerah	279

B. LAMPIRAN PETA SPATIAL

Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Ponorogo.....	280
Gambar 2	Peta Rencana Jalus Evakuasi Bencana Alam Kabupaten Ponorogo 2011- 2031	281
Gambar 3	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Ponorogo 2011- 2031	282
Gambar 4	Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Ponorogo 2011-2031.....	283
Gambar 5	Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Ponorogo 2011- 2031	284
Gambar 6	Peta Rawan Bencana Erosi Kabupaten Ponorogo 2011-2031.....	285
Gambar 7	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ponorogo 2011- 2031	286
Gambar 8	Peta Rencana Sebaran Penduduk Kabupaten Ponorogo 2011- 2031	287
Gambar 9	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Ponorogo 2011- 2031	288
Gambar 10	Peta Rencana Tutupan Lahan Kabupaten Ponorogo 2011- 2031	289

C. LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO 290

D. LAMPIRAN BIODATA 291

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peristiwa alam, kegiatan pembangunan dan perilaku manusia dalam mengeksploitasi serta menggunakan sumber-sumber daya alam secara tidak seimbang seringkali dapat menimbulkan dampak adanya masalah atau kerusakan lingkungan hidup.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu diperlukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan agar tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai penunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

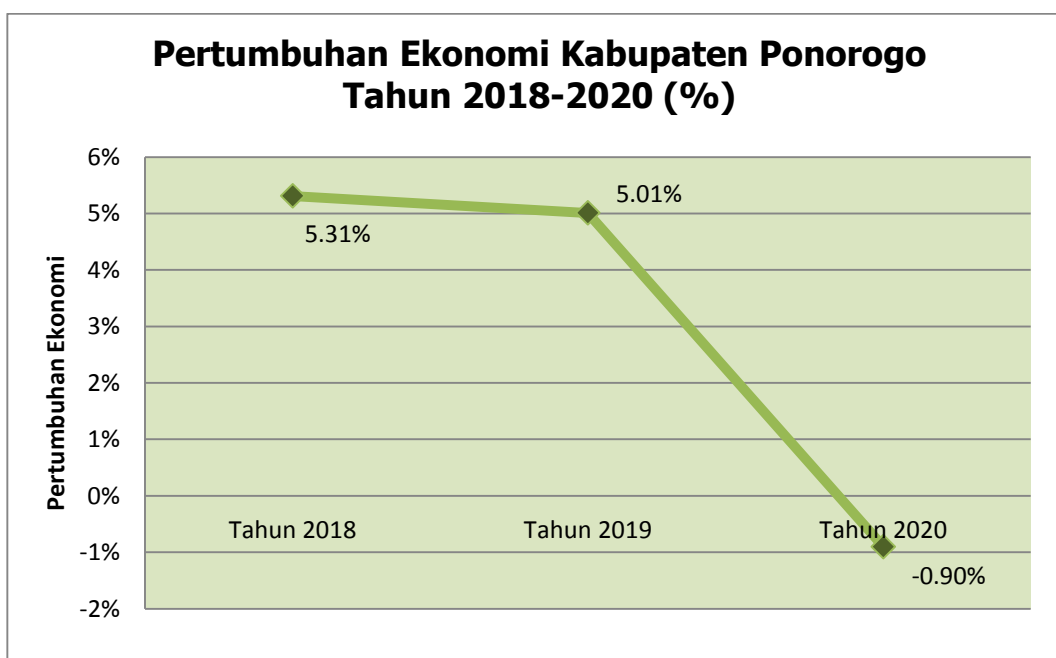
Manusia memiliki peran penting dalam tercapainya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Antara manusia dan lingkungan hidup tentunya memiliki hubungan yang erat karena manusia akan berinteraksi dan mempengaruhi alam dan lingkungannya sehingga timbul hubungan timbal balik baik positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, akan menjadi titik fokus kerja dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal-hal terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perkembangannya akan

menjadi isu utama yang harus menjadi perhatian oleh seluruh khalayak terutama bagi pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dan pemerintah akan memberikan pengaruh terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan menjadikan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan publik. Dampak – dampak yang ditimbulkan dari lingkungan akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, maka perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten. Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam upaya menangani pencemaran lingkungan terutama terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Pencemaran lingkungan ditimbulkan dari perubahan kualitas air, udara, serta timbulan sampah yang dihasilkan akibat pembangunan dan aktifitas masyarakat. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga mampu menjaga kualitas lingkungan hingga generasi mendatang.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aspek ekonomi memiliki kaitan erat dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Badan Pusat Statistik di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,90%. Pada Tahun 2018 angka Produk Domestik Regional Bruto atas (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 19.174.225,22 dan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 20.483.747,99 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 20.513.377,29. Peranan sektoral terhadap pembentukan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku menurut ADHB Tahun 2020, terbesar pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 27,68%, sedangkan peranan terkecil adalah sektor Informasi dan Komunikasi serta Industri Pengolahan yaitu sebesar 7,58%. Sementara angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berturut-turut pada Tahun 2018 hingga Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 13.619.571,90, Rp. 14.301.785,30 dan Rp. 14.168.621,37. Dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo selama 3 tahun ke belakang masing - masing 5,31% (Tahun 2018), 5,01% (Tahun 2019) dan -0,90% (Tahun 2020).



Gambar I-1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 - 2020

Selain tiga aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, harus di dukung dengan suatu sistem untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses data dan informasi lingkungan yang

memadai. Agar data dan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup suatu daerah dapat terwujud, Maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagai pijakan dalam pelaksanaan, pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Tujuan dari sistem informasi lingkungan hidup ini, selain mendukung pemerintah dalam program pelaksanaan, pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar masyarakat juga mengetahui terkait keadaan lingkungan sehingga antara pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28F telah tertuang yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian sesuai dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa wajib bagi pemerintah daerah untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi tersebut harus menggambarkan keadaan lingkungan hidup, baik penyebab dan dampak permasalahannya, maupun respon pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu berdasarkan pelaporan lingkungan berdasarkan pengumpulan data menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memantau kondisi lingkungan sehingga dapat dilakukan pengambilan kebijakan dan/ atau program untuk diterapkan dalam melakukan perbaikan maupun pengembangan di masa

yang akan datang dan sebagai alat untuk menjamin perlindungan kehidupan bagi generasi sekarang serta mendatang.

Berdasarkan amanah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga disebutkan bahwa telah ada pelimpahan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Disisi lain, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), pada pasal (62), mengamanatkan, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang memuat paling sedikit informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah sesuai yang diamanatkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mulai tahun 2016 pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Seiring perkembangan waktu dan perkembangan kebijakan pemerintah, pada tahun 2016 Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) merupakan syarat dan indikator untuk Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terkait kebijakan dan kinerjanya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya, penghargaan tersebut dinamakan Nirwasita Tantra yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia setiap tahunnya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) di Indonesia. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S156/Setjen/Datin/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017, Dokumen SLHD

berganti nama menjadi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).

Atas dasar uraian tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 dengan pendekatan metode DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*) sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal penyampaian pedoman DIKPLHD 2020. Dengan menerapkan metode DDPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Respons*) maka akan memudahkan pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam membentuk dan menerapkan kebijakan maupun menyusun program untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Ponorogo.

1.2. Profil Daerah

1.2.1. Gambaran Umum

Menurut buku Babad Ponorogo karya Poerwowidjojo, asal-usul nama Ponorogo didapatkan dari kesepakatan dalam musyawarah bersama antara Raden Bathoro Katong, Kyai Mirah, Selo Aji dan Joyodipo pada hari **Jum'at di tanah lapang dekat sebuah gumuk (wilayah katongan sekarang)**. Didalam musyawarah tersebut disepakati bahwa Ponorogo berasal dari dua kata yaitu *pramana / pramono* dan *raga / rogo*. *Pramana* berarti daya kekuatan, rahasia hidup, sedangkan *raga* berarti badan, jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan manusia tersimpan suatu rahasia hidup (*wadi*) berupa olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluwamah/lawamah, shufiah dan muthmainah. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri di mana pun dan kapan pun berada. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa *pana* berarti melihat dan *raga* berarti badan, raga, atau diri. Sehingga arti Panaraga

adalah "melihat diri sendiri" atau dalam kata lain disebut "wawas diri". Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan *Pramana Raga* yang akhirnya berubah menjadi *Panaraga* (Ponorogo).

Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 yang kemudian ditetapkan sebagai akan hari jadi Kabupaten Ponorogo. Kajian mendalam atas bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Batara Katong dan juga mengacu pada buku *Hand book of Oriental History* merupakan dasar untuk ditetapkannya hari jadi Kabupaten Ponorogo. Sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo di bawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan menjadi stabil dan pada tahun 1837 Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang.

Ponorogo memiliki banyak sekali kesenian daerah. Kesenian Reog merupakan kesenian asli dari daerah Kabupaten Ponorogo. Jika berhubungan dengan pernikahan maka yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Untuk hajatan khitanan atau sunatan, biasanya cerita pendekar. Adegan terakhir adalah singa barong, yang mana pelaku memakai topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota. Kesenian Reog Ponorogo ini terkenal hingga mancanegara. Selain Reog terdapat juga kesenian lain, yaitu Gajah-gajahan. Jenis kesenian ini mirip dengan hadroh atau samproh klasik, terutama alat-alat musiknya. Perbedaannya adalah terdapatnya sebuah patung gajah. Perbedaan lainnya adalah kesenian ini tidak memiliki pakem yang tetap mulai alat-alat musik, gerak tari, lagu, dan bentuk musiknya berubah seiring perkembangan zaman.



Gambar I-2. Kesenian Reog Ponorogo



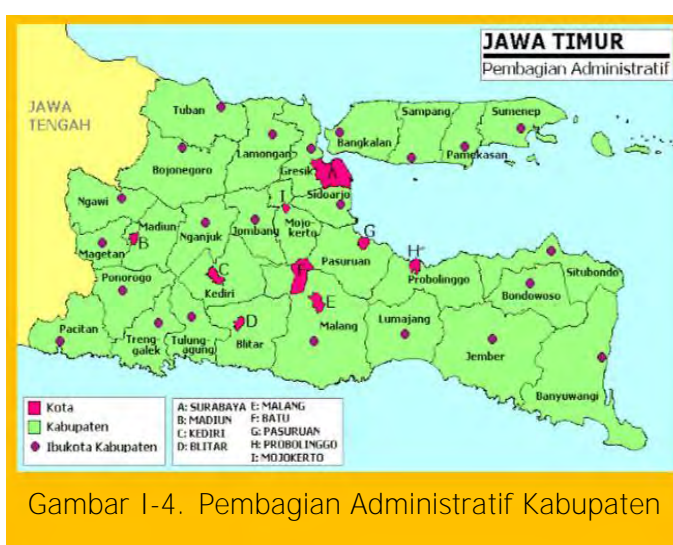
Gambar I-3. Kesenian Gajah-gajahan

Selain terkenal dengan kesenian Reog, Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai kota santri karena memiliki banyak pondok pesantren. Salah satu pondok pesantren yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak. Kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya masyarakat Ponorogo adalah Larung Risalah Doa, Grebeg Suro. Acara pesta rakyat yaitu Grebeg Suro dilaksanakan setiap tahun pada Bulan Suro (Muharram). Pada acara Grebeg Suro ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi yaitu Festival Reog Nasional, Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka dan Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel. Masyarakat Ponorogo memiliki adat-istiadat yang sangat khas yaitu, *becekan* (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan

makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau khitanan) dan sejarah (silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya Idul fitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua).

1.2.2. Letak Geografis dan Administratif Kabupaten Ponorogo

Ponorogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah atau lebih



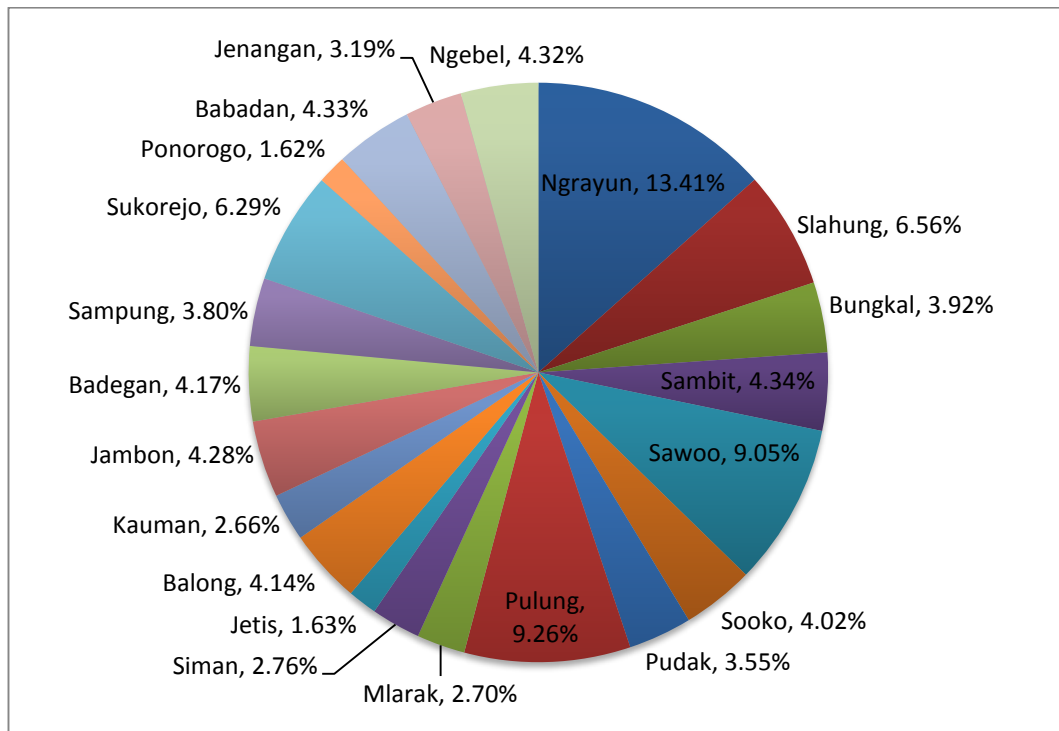
tepatnya 200 km arah barat daya dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, dan ± 800 km sebelah timur Ibu Kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo **terletak pada 111° 7'-111° 52' Bujur Timur dan 7°49'-8°20' Lintang Selatan**. Letak Kabupaten Ponorogo terhadap Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar I-3.

Adapun batas wilayah di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan

- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri
(Provinsi Jateng)

Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.377,29 km² dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan dan 307 kelurahan/desa dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Ngrayun sekitar 184,76 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ponorogo yaitu sebesar 22,31 km². Prosentase luas per-Kecamatan dapat dilihat pada Gambar I-5



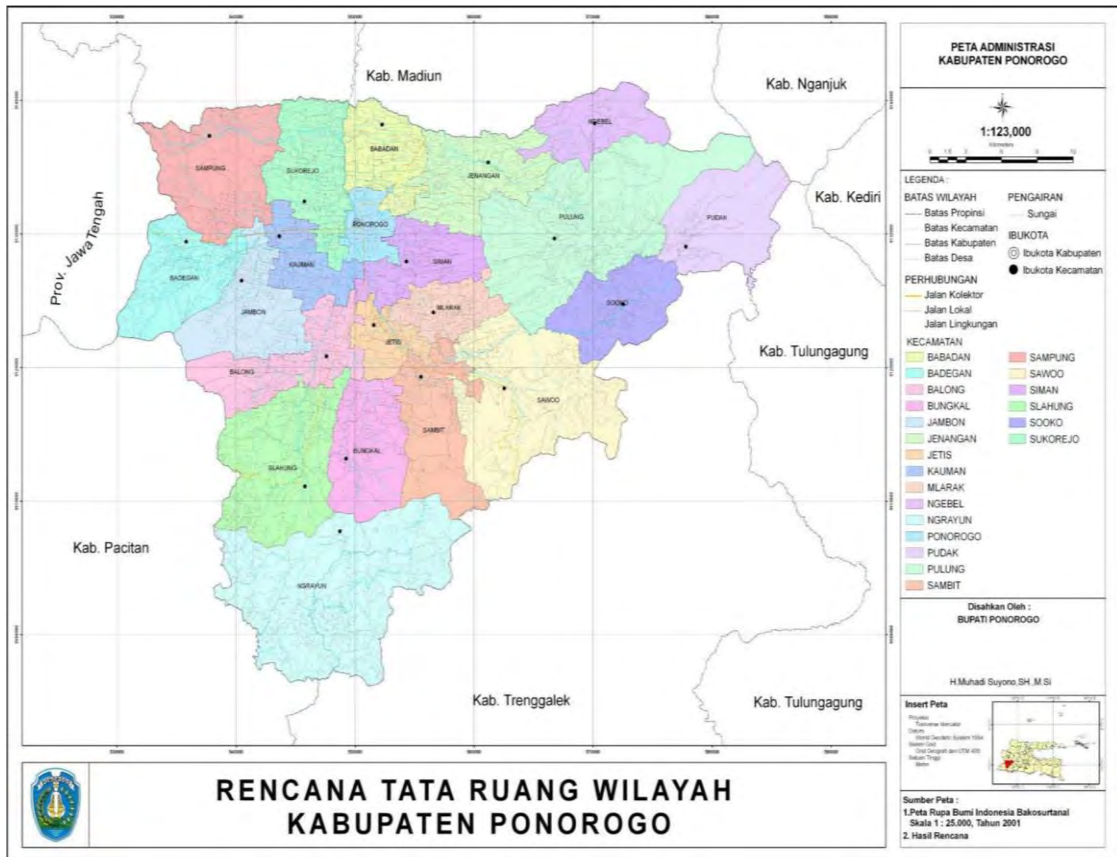
Gambar I-5. Grafik Prosentase Luas Kecamatan Kabupaten Ponorogo

Tabel I-1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (km²)	Jumah Desa/Kelurahan
1	Ngrayun	184,76	11
2	Slahung	90,34	22
3	Bungkal	54,01	19
4	Sambit	59,83	16
5	Sawoo	124,71	14
6	Sooko	55,33	6
7	Pudak	48,92	6
8	Pulung	127,55	18
9	Mlarak	37,20	15
10	Siman	37,95	18
11	Jetis	22,41	14
12	Balong	56,96	20
13	Kauman	36,61	16
14	Jambon	59,01	13
15	Badegan	57,48	10
16	Sampung	52,35	12
17	Sukorejo	86,61	18
18	Ponorogo	22,31	19
19	Babadan	59,58	15
20	Jenangan	43,93	17
21	Ngebel	59,44	8
Jumlah		1.377,29	307

Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2021

**LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO**



Gambar I-6. Peta Administrasi Kabupaten Ponorogo

1.2.3. Kondisi Topografi

Salah satu faktor untuk menentukan jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh penduduk adalah ketinggian tanah. Kabupaten Ponorogo berada pada ketinggian antara 25 m hingga 1000 m di atas permukaan laut. Namun sebagian besar berada diantara 100 m – 500 m di atas permukaan laut dengan kondisi topografi lahan yaitu dari datar sampai berbukit. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah kabupaten ponorogo yaitu 79 % terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut yaitu meliputi 242 Desa, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut yaitu meliputi 45 Desa dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m yaitu meliputi 20 Desa.

Topografi Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub-area, yaitu area dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk wilayah dataran tinggi memiliki suhu berkisar antara 18 s/d 26 derajat celcius dan untuk dataran

rendah memiliki suhu berkisar antara 27 s/d 31 derajat celcius. Diketahui 4 kecamatan yang terletak pada wilayah dataran tinggi meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah.

Lereng merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal yang dinyatakan dalam prosen (%). Sudut lereng yang terbentuk di Wilayah Kabupaten Ponorogo beragam yaitu dengan kondisi lereng dari kemiringan yang relatif datar yaitu 0 - 2% hingga kemiringan yang tajam yaitu lebih dari 40%.

Kabupaten Ponorogo dikelilingi barisan pegunungan yang bersambung mulai dari Gunung Wilis disebelah timur membentang kearah selatan dan berakhir pada Gunung Lawu disebelah barat. Di lereng Gunung Wilis terdapat sebuah danau alami yang terletak di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang dinamakan Telaga Ngebel. Menurut data yang tercatat, terdapat 17 sungai yang ada di Kabupaten Ponorogo, dengan panjang antara 4–58 km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan.

1.2.4. Kondisi Klimatologis

Kabupaten Ponorogo memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan dengan suhu udara $\pm 18^{\circ}\text{C} - 31^{\circ}\text{C}$. Curah hujan baik langsung maupun tak langsung akan mempengaruhi jenis dan pola tanam serta pola identitas penggunaan tanah dan ketersediaan air pada pengairan. Dari data yang ada, Kabupaten Ponorogo memiliki curah hujan yang tidak terlalu tinggi. Curah hujan tertinggi tahun 2020 terjadi pada bulan November, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim

yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha khususnya pada bidang pertanian. Curah hujan secara langsung akan mempengaruhi jenis dan pola tanam serta pola identitas penggunaan tanah dan tersedianya air untuk proses pengairan.

Rata-rata jumlah hari hujan tertinggi berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 21 hari, sedangkan untuk rata-rata jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September. Rata-rata hari hujan per Bulan dan curah hujan rata-rata bulanan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Tabel I-2.

Tabel I -2. Rata-rata hari hujan per Bulan dan Curah Hujan Rata-rata Bulanan kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Bulan	Rata-rata Hari Hujan Per Bulan (Hari)	Rata-rata Curah Hujan Per Bulan (mm)	Curah Hujan Terkecil (mm)	Curah Hujan Terbesar (mm)
Januari	16	16	1	114
Februari	21	21	1	107
Maret	19	17	1	108
April	10	14	-	78
Mei	10	18	1	113
Juni	3	11	1	57
Juli	2	6	1	25
Agustus	1	12	2	37
September	1	9	1	70
Oktober	9	12	1	102
November	13	22	1	142
Desember	18	16	-	114

Sumber : Kabupaten Ponorogo dalam Angka 2021

1.2.5. Kondisi Hidrologi

Hidrologi di Kabupaten Ponorogo terdiri atas sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan dan air hujan. Sebagian daerah yang mempunyai permukaan bergunung, air tanah pada umumnya didapat dari

mata air yang berasal dari kawasan pegunungan yang masih mempunyai kondisi jenis dari tumbuhan pepohonan yang cukup rapat.

Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Sungai memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai sumber irigasi bagi para petani, dan sebagai saluran pembuangan air. Kabupaten Ponorogo memiliki 17 sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi untuk kegiatan pertanian dikarenakan mata pencaharian utama masyarakat adalah petani. Wilayah Kabupaten Ponorogo dilalui oleh beberapa sungai. Namun, sungai ini belum sepenuhnya digunakan sebagai sumber irigasi untuk kegiatan pengairan pada pertanian, kecuali beberapa wilayah di tepi sungai yang telah memanfaatkannya. Beberapa sungai tersebut diantaranya yaitu :

- a. Sungai Keyang, arah aliran air dari tenggara menuju ke arah barat.
- b. Sungai Asin, arah aliran dari timur menuju ke arah barat.
- c. Sungai Slahung, arah aliran air dari selatan menuju ke arah utara.
- d. Sungai Sungkur dan Sungai Galak, arah aliran air dari barat menuju ke timur.
- e. Sungai Nglerep, arah aliran air dari timur menuju ke selatan.

Diantara beberapa sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Ponorogo, Sungai yang paling panjang adalah sungai Sungkur yang panjangnya mencapai 58,10 km, sedangkan sungai terpendek adalah sungai Bedingin dengan panjang 4 km. Kemudian, manfaat sungai terbesar yang digunakan sebagai irigasi yaitu sungai Asin yang berasal dari sumber air Tempuran. Yaitu sebesar 5.656 Ha. Sedangkan manfaat sungai yang paling sedikit yang digunakan sebagai irigasi yaitu Sungai Gonggang yang berasal dari sumber air Gonggang. dapat dilihat pada Tabel I-3.

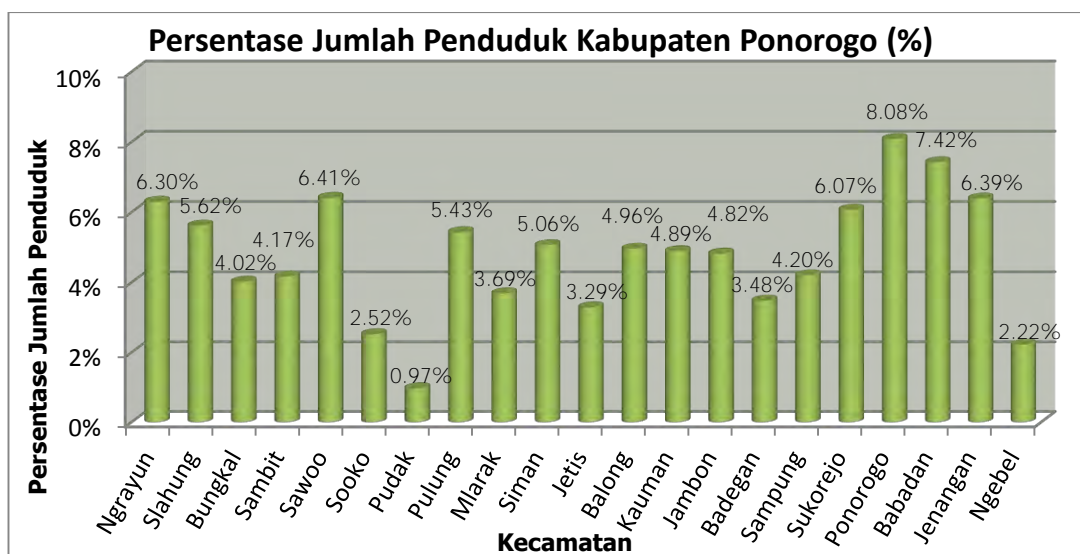
Tabel I -3. Data Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No	Nama Sungai	Asal Sumber Air	Panjang Sungai (km)	Manfaat Irigasi (Ha.)
1	Sungai Asin	Tempuran	36,80	5.656
2	Sungai Cemer	Nglegok	36,00	5.395
3	Sungai Gendol	Kegungpring	33,20	376
4	Sungai Keyang	Cawet	49,00	5.071
5	Sungai Bedingin	Cangkring	4,00	170
6	Sungai Nambang	Dukung	6,00	248
7	Sungai Slahung	Mati	35,90	4.154
8	Sungai Mayong	Ciwung	13,70	789
9	Sungai Pelem	Pelem	18,00	726
10	Sungai Munggu	Munggu	7,70	576
11	Sungai Domas	Klitik	12,40	590
12	Sungai Ireng	Tambul Umbul	7,00	174
13	Sungai Sungkur	Kresek	58,10	4.945
14	Sungai Galok	Gebang	29,70	2.980
15	Sungai Gonggang	Gonggang	36,00	25
16	Sungai Pucang	Pucang	15,00	198
17	Sungai Nglorok	-	-	644

Sumber : Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2020

1.2.6. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk pada bulan September 2020 adalah sebanyak 949.318. Tercantum pada Tabel I-4 , Dapat diketahui Kecamatan Ponorogo memiliki jumlah penduduk paling tinggi yaitu sebanyak 76.690 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling kecil terdapat pada Kecamatan Pudak yaitu 9.160 jiwa. Namun untuk tingkat pertumbuhan penduduk terbanyak yaitu dari kecamatan Jenangan, sedangkan yang terkecil dari kecamatan Mlarak. Prosentase jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada Gambar I-7.



Gambar I-7. Grafik Prosentase Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Tabel I -4. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk Kabupaten Ponorogo Per Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk (WNI+WNA)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Slahung	90,34	55.942	2,02	619
2	Ngrayun	184,76	62.889	3,84	340
3	Bungkal	54,01	39.513	0,84	732
4	Sambit	59,83	41.516	0,76	694
5	Sawoo	124,71	64.050	2,71	514
6	Sooko	55,33	25.118	0,60	454
7	Pulung	127,55	54.531	2,70	428
8	Mlarak	37,2	36.653	1,33	985
9	Jetis	22,41	32.525	1,25	1.451
10	Siman	37,95	48.204	0,98	1.270
11	Balong	56,96	48.997	0,53	860
12	Kauman	36,61	47.543	(0,26)	1.299
13	Badegan	57,48	34.008	(0,49)	592
14	Sampung	52,35	40.638	(0,68)	776
15	Sukorejo	86,61	58.428	(0,39)	675
16	Babadan	59,58	70.499	(1,11)	1.183
17	Ponorogo	22,31	77.440	(0,90)	3.471
18	Jenang	43,93	61.444	(0,80)	1.399
19	Ngebel	59,44	21.767	0,46	366
20	Jambon	59,01	47.149	0,50	799
21	Pudak	48,92	9.373	(0,05)	192
TOTAL		1377,29	978.227	0,68	710

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

1.3. Gambaran Singkat Proses Penyusunan Isu Prioritas

Isu Prioritas adalah isu yang akan menjadi fokus utama dalam penanganan perbaikan kualitas Lingkungan hidup di daerah. Isu Prioritas dalam lingkungan hidup merupakan sebuah tantangan atau suatu hal yang layak diberikan penanganan agar dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang di inginkan. Isu Prioritas ini akan di susun sedemikian rupa secara partisipatif dan dengan melibatkan stakeholder dan pemerintah setempat. Isu Prioritas akan menjadi dasar penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). Proses penentuan isu lingkungan hidup yang akan diangkat pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2020 melalui beberapa proses antara lain :

1. Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo tentang Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) Kabupaten Ponorogo.
2. Pada tahun 2021 dilakukan pembentukan Tim Pengumpulan Data dan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah yang anggotanya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Unit Pengelolaan Hutan Wilayah II.
3. Pengumpulan data primer berupa analisa laboratorium untuk kualitas air sungai, kualitas air danau/waduk/situ/embung, kualitas air sumur, kualitas air laut, kualitas air hujan, kualitas tanah untuk produksi biomassa, kualitas udara ambien, kualitas udara emisi, dan kualitas air limbah yang dilakukan selama tahun 2020.

4. Pengumpulan data sekunder dari stakeholder terkait tersebut dilakukan pada bulan Januari 2021.
5. Penyusunan data primer dan data sekunder yang dituangkan kedalam 61 Tabel Utama.
6. Penentuan isu prioritas lingkungan hidup dalam penyusunan DIKPLHD oleh kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pendapat pakar (*expert opinion*) melalui forum *Forum Group Discussion* (FGD).
7. Selanjutnya permasalahan isu prioritas lingkungan hidup tersebut dilakukan inventarisasi permasalahan dengan metode analisis DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Respons*)
8. Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Data Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam menentukan isu prioritas lingkungan hidup diperlukan metode analisis DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact- Response*). Tujuan analisis DPSIR adalah untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan lingkungan dan hubungan antara aktivitas manusia dan kemungkinan adanya perubahan lingkungan. Pendekatan ini didasarkan pada deskripsi Analisis DPSIR dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai faktor pemicu (*Driving Force*), tekanan terhadap lingkungan yang dihasilkan (*Pressure*), keadaan lingkungan (*State*), dampak yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan (*Impact*) serta kemungkinan adanya respon dari masyarakat (*Response*). Keuntungan dari analisis DPSIR ini adalah :

- a. Bersifat transparan untuk mempermudah mengetahui isu – isu yang sedang terjadi, sehingga dapat dikelompokkan menjadi isu prioritas untuk dilakukannya penanganan permasalahan dan perbaikan yang tepat.
- b. Memisahkan konsep – konsep dengan mengaitkan hubungan sebab – akibat

Pendekatan ini didasarkan pada konsep rantai hubungan sebab-akibat yang dimulai dengan aktivitas manusia (faktor pemicu) yang menyebabkan adanya tekanan terhadap lingkungan dan kemudian mengubah kualitas dan kuantitas sumber daya alam sehingga mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan masyarakat.

1. *Driving Force*

Driving Force mendeskripsikan keadaan sosial, demografi serta dan pengembangan ekonomi dalam masyarakat, selain itu *driving force* dapat berupa aktivitas manusia berupa kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan. Kebutuhan akan tempat tinggal dan makanan merupakan faktor pemicu utama, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam.

2. *Pressure*

Pressure merupakan akibat dari proses produksi atau konsumsi yang disebabkan oleh adanya faktor pemicu yakni aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat tekanan terhadap lingkungan bergantung pada faktor pemicu dan faktor faktor lain yang berkaitan dengan interaksi manusia dan lingkungannya. Beberapa aktivitas manusia yang dapat menimbulkan *pressure* yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan, perubahan dalam

penggunaan sumberdaya dan emisi (bahan kimia, limbah, radiasi, kebisingan) ke udara, air dan tanah.

3. *State*

State adalah hasil dari pressure terhadap lingkungan di suatu kawasan. *State* merupakan kondisi fisik, kimia dan biologis suatu kawasan misalnya tingkat pencemaran, degradasi sumberdaya dan lain-lain. Perubahan secara fisik, kimia atau biologis yang terjadi pada sumber daya alam dan lingkungan dalam suatu kawasan/daerah yang mempengaruhi kualitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakatnya.

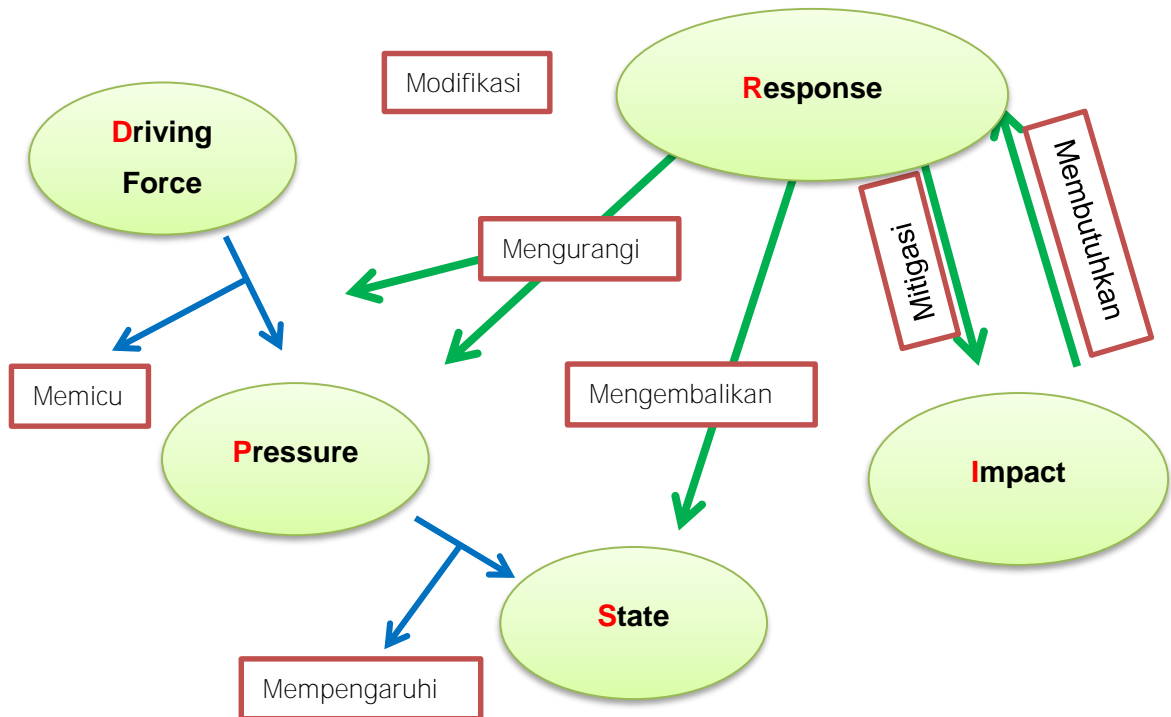
4. *Impact*

Setelah keadaan fisika, kimia dan biologi dari lingkungan berubah, maka akan berpengaruh terhadap fungsi dari lingkungan, seperti kualitas ekosistem dan kesehatan manusia, ketersediaan sumber daya dan *biodiversity*. *Impact* digunakan untuk mendeskripsikan perubahan-perubahan, dalam kondisi ini, polusi udara yang menyebabkan perubahan keseimbangan radiasi, peningkatan temperatur udara belum dapat dikatakan *impact*. Suatu keadaan bisa dikatakan *impact* jika ketersediaan spesies di udara, air, dan darat berubah dan dapat mempengaruhi manusia serta kesehatannya dalam menggunakan sumber daya.

5. *Response*

Response mengacu kepada respon-respon dari masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. Sebuah respon dari masyarakat atau pembuat kebijakan merupakan hasil dari dampak yang tidak diinginkan dan dapat mempengaruhi bagian mana saja dari sebuah rantai diantara *driving forces* dan *impacts*. Beberapa respon-respon dari masyarakat akan ditanggapi sebagai respon negatif karena respon-respon tersebut bertujuan membuat model baru yang lebih umum dalam pola konsumsi dan produksi. Respon-respon lain akan

ditanggapi sebagai respon positif apabila bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari produk-produk dan proses-proses, melalui pengembangan dan pelaksanaan teknologi yang sehat untuk masyarakat.



Gambar I-8. Diagram Analisis DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*)

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud Kegiatan

Maksud disusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Ponorogo adalah sebagai sumber informasi dan data dasar dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Ponorogo yang meliputi kondisi dan kecenderungan lingkungan, tekanan terhadap lingkungan, dan upaya pengelolaannya.

1.4.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Tersedianya informasi kinerja pengelolaan ataupun data-data terkait bidang lingkungan hidup sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di Kabupaten Ponorogo
2. Meningkatnya mutu informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik dan bentuk dari akuntabilitas;
3. Tersajinya gambaran secara nyata melalui data yang tersedia atau yang ditampilkan guna meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang kondisi lingkungan khususnya di Kabupaten Ponorogo.

1.5. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- Buku I, adalah buku yang menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Ringkasan Eksekutif maksimal terdiri atas 15 halaman.
- Buku II, adalah buku yang berisikan Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Laporan Utama ini disajikan dengan melakukan hubungan kausalitas antara unsur-unsur penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (*Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response Analysis*).

A. Sistematika Umum

Sistematika Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian Awal

Bagian awal terdiri atas:

- 1) Sampul memuat judul dan nama instansi penyusun.
- 2) Pernyataan memuat pernyataan bahwa isu prioritas Daerah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- 3) Kata Pengantar, uraian singkat penyusunan dokumen termasuk proses penyusunannya. Kata Pengantar ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- 4) Daftar Isi
- 5) Daftar Tabel
- 6) Daftar Gambar
- 7) Daftar Lampiran

Bagian Utama

Bagian utama terdiri atas:

1) Bab I Pendahuluan. Pendahuluan memuat mengenai : (a) Latar belakang ; (b) profil atau keadaan umum daerah termasuk kekhususan kondisi ekologisnya; (c) gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam sub bab ini dijelaskan pula proses perumusan dan pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas daerah; (d) maksud dan tujuan; dan (e) ruang lingkup penulisan

2) Bab II . Pada Bab II ini mengkategorikan Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response* Isu Lingkungan Hidup daerah ke dalam :

1. **Tata guna lahan.** Tata guna lahan berikut tutupan lahannya. Untuk daerah yang berada di wilayah pesisir dan laut, wajib memasukkan rencana pengelolaan pesisir dan laut. Data yang dituangkan dalam sub bab ini adalah yang berkaitan dengan tataguna lahan berikut perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Demikian juga terhadap daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, dituangkan juga data yang berkaitan pemanfaatan pesisir dan laut. Data tidak hanya angka nominal tetapi juga dengan prosentase (misalnya luas hutan lindung = 20.000 ha atau x % dari luas wilayah administrasi daerah ybs). Lengkapi juga data yang berkaitan dengan perizinan

penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya). Data dalam bentuk spasial (peta) wajib digunakan untuk mendukung. Analisis *driving force*, *pressure*, *state*, *impact*, dan *response* wajib didukung dengan data berkala (*time series*). Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Sebagai contoh pengurangan atau penurunan hutan lindung, *pressure*-nya dijelaskan dan didukung dengan data berkala (*time series*), demikian juga jelaskan *response* telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data. Data yang dapat digunakan untuk mendukung untuk PSR pada sub bab ini, antara lain Tabel 1 s/d Tabel 19. Data tambahan yang menunjang analisis ini juga dapat dituangkan disini.

2. **Kualitas air**. Data yang disajikan meliputi kualitas air sungai, air tanah, dan laut (kualitas air laut khusus bagi daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut). Contoh analisis air sungai tercemar industri tekstil, yang menjadi *driving force*-nya banyaknya industri tekstil yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, *pressure* adalah masih kurangnya industri yang memiliki IPAL, *response*-nya mendorong penataan industri agar membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data yang diperlukan untuk menunjang analisis *pressure*, *state*, dan *response*, antara lain kualitas air sungai, danau, air tanah, dan laut (khusus daerah yang berada di pesisir dan laut). Data kualitas DAS, jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi dan layanan air

bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, transportasi laut dan sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung untuk analisis ini adalah Tabel 22 s/d Tabel 48. Data tambahan yang menunjang analisis ini juga dapat dituangkan disini.

3. **Kualitas udara**. Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan pencemar. Contoh : kondisi udara ambien yang tercemar oleh logam berat, penyebabnya (pressure) adalah kondisi penggunaan BBM, kondisi kendaraan bermotor termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi industri pencemar. Pemicu (*driving force*) bisa karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak. Response dalam bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, tentunya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung minimal yang dapat digunakan untuk analisis adalah Tabel 33 s/d Tabel 61. Data tambahan yang menunjang analisis ini juga dapat dituangkan disini.

4. **Resiko bencana**. Bencana yang dimaksudkan bisa berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuh, banjir, longsor), bencana non alam (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi,

epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial). *Driving Force* diungkapkan dalam bentuk data yang terkait persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (land use), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau data lainnya yang menunjang. Data yang dituangkan dalam *response* adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan mutlak diperlukan untuk analisis pada sub bab ini. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data minimal yang digunakan adalah Tabel 3 s/d Tabel 58. Data tambahan yang menunjang analisis ini juga dapat dituangkan disini.

5. **Pariwisata.** Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang akan menimbulkan dampak pada perekonomian di wilayah kabupaten Ponorogo. Faktor pemicunya/ *driving force* dimulai dari keadaan Flora dan Fauna di wilayah Kabupaten Ponorogo, penangkaran satwa dan tumbuhan liar. Kemudian dari segi *pressure* ditampilkan luasan wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Untuk kondisi yang menunjukkan isu pada sektor pariwisata adalah mengetahui jumlah dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata serta kondisi danau/waduk/situ/embung. Dari kondisi pariwisata tersebut akan memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian akan dilakukan upaya pengelolaan lingkungan berupa pengawasan perizinan lingkungan. Data minimal yang digunakan adalah Tabel 4 s/d Tabel 61. Data tambahan yang menunjang analisis ini juga dapat dituangkan disini.

6. **Kelembagaan.** Data Jumlah penduduk menurut tingkatan Pendidikan menurut tingkatan pendidikan merupakan faktor pemicu dari isu kelembagaan. Kemudian dipengaruhi oleh jumlah personil lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan, dan jumlah staff fungsional yang mengikuti diklat. Data Kegiatan fisik yang dilakukan oleh instansi akan menimbulkan dampak terhadap anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya pemerintah memberikan apresiasi berupa penghargaan lingkungan hidup. Data minimal yang digunakan adalah Tabel 32 s/d Tabel 61. Data tambahan yang menunjang analisis ini juga dapat dituangkan disini.

7. **Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.** Yang menjadi Faktor pemicu dari pengelolaan sampah dan limbah B3 adalah jumlah penduduk. Kemudian data umlah rumah tangga miskin dan perusahaan yang mendapat ijin mengelola limbah B3 akan di masukkan kedalam *Pressure*. Di pengaruhi dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir dan jumlah bank sampah hingga menimbulkan dampak yaitu jumlah limbah padat cair berdasarkan sumber pencemarannya. Untuk *response* dari pemerintah antara lain data dokumen ijin lingkungan, pengasaran perizinan lingkungan, inovasi pengelolaan lingkungan hidup serta status pengaduan masyarakat. Data minimal yang digunakan adalah Tabel 34 s/d Tabel 53. Data tambahan yang menunjang analisis ini juga dapat dituangkan disini.

3) Bab III. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah. Isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data yang sebelumnya telah dijelaskan pada Bab II. Isu Prioritas ini dapat mengenai

pressure (berbagai penyebab terjadinya masalah, dapat berupa aspek-aspek sosial, ekonomi, birokrasi, kelembagaan maupun politik), *state* (kondisi atau potret LH pada saat dinilai), atau *response* (kebijakan, program maupun kegiatan yang berhubungan dengan jenis *pressure* yang ditetapkan untuk memperbaiki kondisi *state*). Isu prioritas paling banyak 5 (lima) dan paling sedikit 3 (tiga). Dalam merumuskan isu prioritas deskripsi kondisi terutama keunikan daerah harus diungkap dan menjadi bahan pertimbangan. Yang dapat dijadikan isu prioritas adalah : (1) pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup ataupun *pressure* sebagai penyebab-penyebabnya, dan/atau persoalan *response* yang dilakukan; dan (2) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (*urgent*). Muatan yang dituangkan dalam Bab Isu Prioritas adalah yang berkaitan dengan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas.

4) Bab IV. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik). Inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat harus dituangkan juga di dalam bab ini. Data yang mendukung dituangkan sejelas

mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang lingkungan hidup termasuk prosentasenya dibandingkan keseluruhan APBD. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan. Tabel 61 adalah inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

5) Bab V Penutup. Bab ini memuat intisari (simpulan) dari Bab II s/d Bab IV, dan rencana tindak lanjutnya termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan kepala daerah

6) Daftar Pustaka. Semua pustaka yang diacu wajib dituangkan dalam daftar pustaka. Pustaka yang diacu harus memenuhi kriteria relevan, mutakhir, dan primer.

7) Lampiran. Keseluruhan data utama dan data tambahan wajib dicantumkan dalam lampiran sesuai dengan tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bagian Akhir

Bagian akhir penulisan adalah berupa lampiran-lampiran yang relevan dengan penulisan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, seperti perhitungan data, peta, foto, keputusan kepala daerah yang terkait penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun.

Jenis data minimal yang harus ada dalam penyajian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah adalah sebagaimana tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) atau website www.menlhk.go.id.

BAB II

ANALISIS DPSIR DALAM ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai isu-isu lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Ponorogo yang berhubungan dengan tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan, dan tata kelola. Penjelasan dilengkapi dengan analisis *driving force*, *pressure*, *state*, *impact*, dan *response*.

2.1. Tata Guna Lahan

Perkembangan sebuah Kabupaten/Kota akan mempengaruhi tata guna lahan di kawasan wilayah tersebut. Kabupaten Ponorogo memiliki 1.371,78 km² yang terbagi atas berbagai macam penggunaan lahan. Berdasarkan penggunaan tanahnya, Kabupaten Ponorogo terbagi atas lima macam penggunaan tanah, yaitu (1) Lahan non pertanian, (2) Lahan sawah, (3) Lahan kering, (4) Lahan perkebunan, (5) Lahan hutan, (6) Lahan badan air. Namun jika dilihat dari jenis pemanfaatan lahannya terbagi menjadi 4 jenis yaitu tambang, perkebunan, pertanian dan pemanfaatan hutan.

a) Driving Force

Berdasarkan Data dari BPN Kabupaten Ponorogo, dapat diketahui Luas wilayah Kabupaten Ponorogo menurut penggunaan lahan utamanya. Dapat di ketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Ponorogo terluas masih berupa lahan sawah dengan luas 36.163,8 Ha. Luas lahan sawah tersebut merupakan 26,36 % dari luas lahan keseluruhan. Sementara luas yang

paling terkecil yaitu luas lahan badan air memiliki luas 680,95 atau 0,49% dari total luas keseluruhan. Berikut diagram penggunaan lahan utama di wilayah Kabupaten Ponorogo. Rincian penggunaan lahan utama dapat dilihat pada (**Lampiran Tabel 2**).



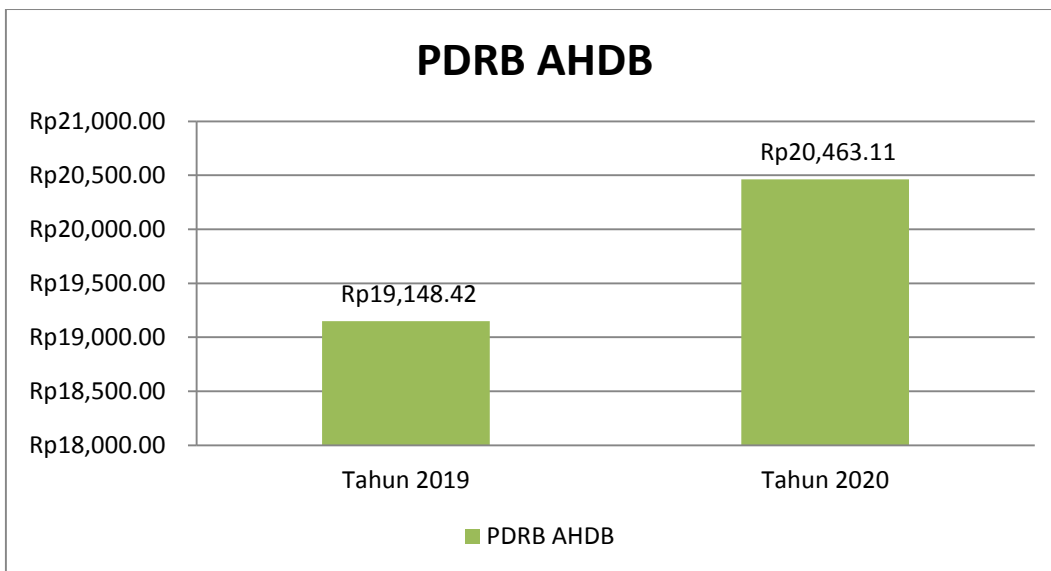
Sumber: BPN Kabupaten Ponorogo

Gambar II-1. Diagram Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Jika dilihat dari Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan maka Kabupaten Ponorogo, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo terjadi peningkatan dan penurunan. Pada Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku terjadi peningkatan yaitu tahun 2019 dengan nilai Rp.19.148,42 pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu dengan nilai Rp.20.463,11. Kemudian jika di lihat dari Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2018 dengan nilai 5,27% mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan nilai 5,01% kemudian mengalami

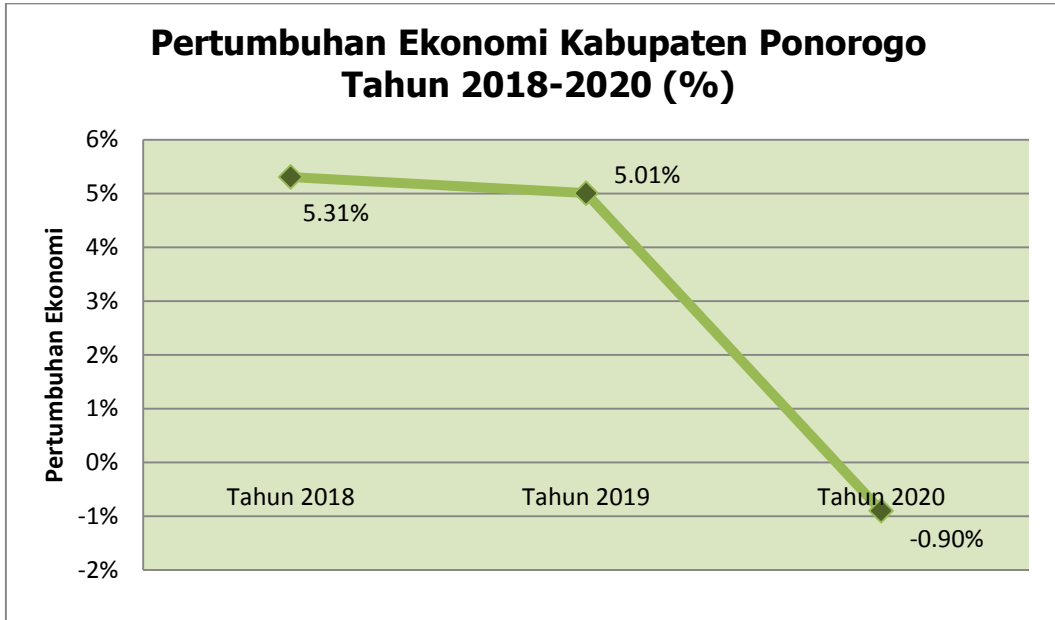
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

penurunan lagi pada tahun 2020 yaitu dengan nilai -0,90%. Rincian Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada (**Lampiran Tabel 56 dan Lampiran Tabel 57**). Berikut grafik Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Ponorogo.



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2020

Gambar II-2. Grafik Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2020

Gambar II-3. Grafik Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

b) Pressure

Tata guna lahan di Wilayah Kabupaten Ponorogo dapat di lihat dari luas lahan berdasarkan fungsi dan statusnya. Dari luas lahan tersebut dapat mempengaruhi jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Luas Hutan berdasarkan Fungsi dan Status dapat dilihat dari **(Lampiran Tabel 3)** kemudian untuk jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat dilihat pada **(Lampiran Tabel 18 dan Lampiran Tabel 19)**. Faktor pemicu dari perubahan tata guna lahan di wilayah Kabupaten Ponorogo juga dapat diketahui dari Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian yang dapat dilihat pada **(Lampiran Tabel 13)**.

Tabel II-1. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status Tahun 2020

No	Fungsi Hutan	Luas(Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	22.497,05
2.	hutan Lindung	16.510,69
3.	Taman Nasional	0
4.	Taman Wisata Alam	0
5.	Taman Buru	0
6.	Cagar Alam	218,4
7.	Suaka Margasatwa	0
8.	Taman Hutan Raya	0
9	Lainnya	7.401
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	0
2.	Hutan Hak / Hutan Rakyat	0
3.	Hutan Kota	123
4.	Taman Hutan Raya	0
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	0

Sumber : Bappeda Kabupaten Ponorogo, 2020

Pada Tabel Luas Hutan Berdasarkan Fungsi diatas dapat di ketahui luas hutan berdasarkan fungsi hutan di Kabupaten Ponorogo ada 3 yaitu hutan produksi dengan luas 22.497,05 Ha, Hutan Lindung dengan luas 16.510,69 Ha, Cagar alam dengan luas 218,4 Ha dan fungsi hutan lainnya sebesar 7.401 Ha. Namun jika dilihat berdasarkan status hutan, dapat diketahui dari data terdapat hutan Hutan Kota yaitu dengan luas 123 Ha. Karena berdasarkan fungsi hutan hutan dibagi menjadi hutan produksi dan hutan lindung, maka dapat dilihat pada grafik berikut terkait jumlah dan luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada grafik di bawah ini.



Sumber: Perum Perhutani Kabupaten Ponorogo, 2020

Gambar II-4. Grafik Ijin Pemanfaatan Hutan Kayu Berdasarkan Jumlahnya

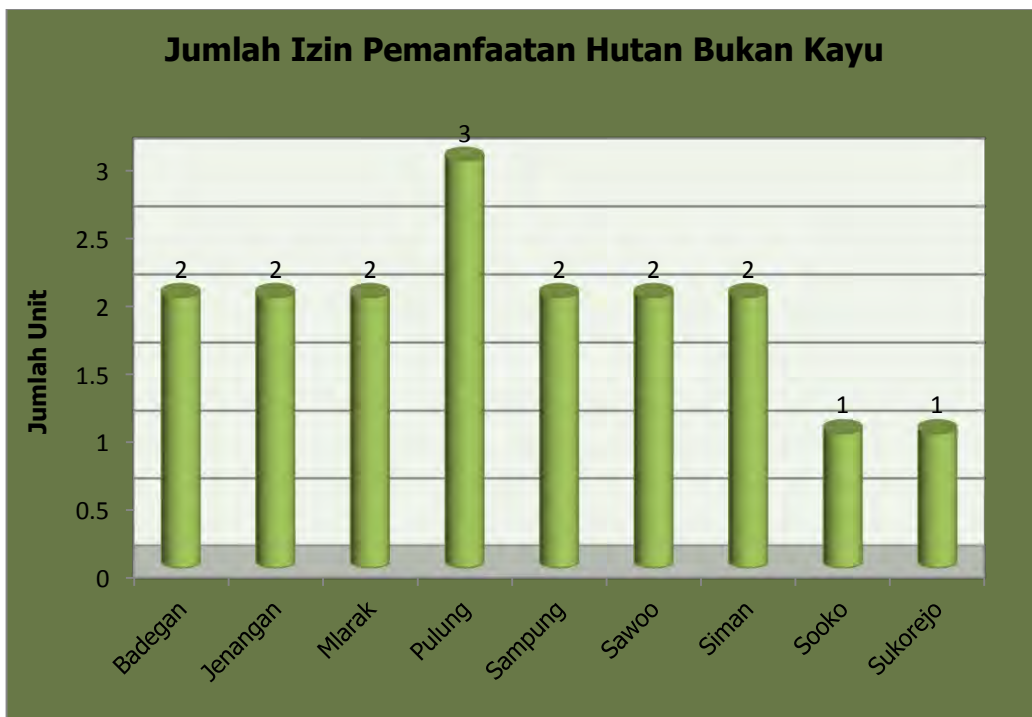


Sumber: Perum Perhutani Kabupaten Ponorogo, 2020

Gambar II-5. Grafik Ijin Pemanfaatan Hutan Kayu Berdasarkan Luasannya

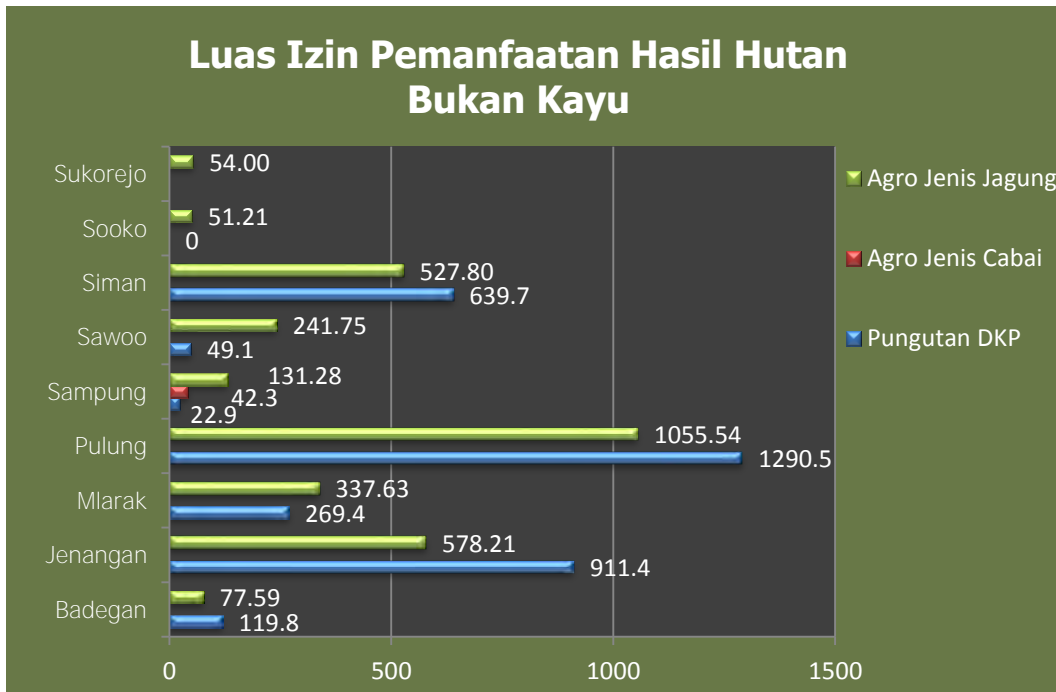
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Pada grafik diatas dapat diketahui kecamatan Sampung memiliki ijin jumlah produksi terbanyak dalam memanfaatkan hasil hutan yaitu 488,518 unit dengan luas 111,600 Ha. sedangkan yang tidak memiliki ijin jumlah produksi pemanfaatan hasil hutan ada Kecamatan Sawoo dan Kecamatan Jenangan tidak memiliki ijin luas pemanfaatan hasil hutan.



Sumber: Perum Perhutani Kabupaten Ponorogo, 2020

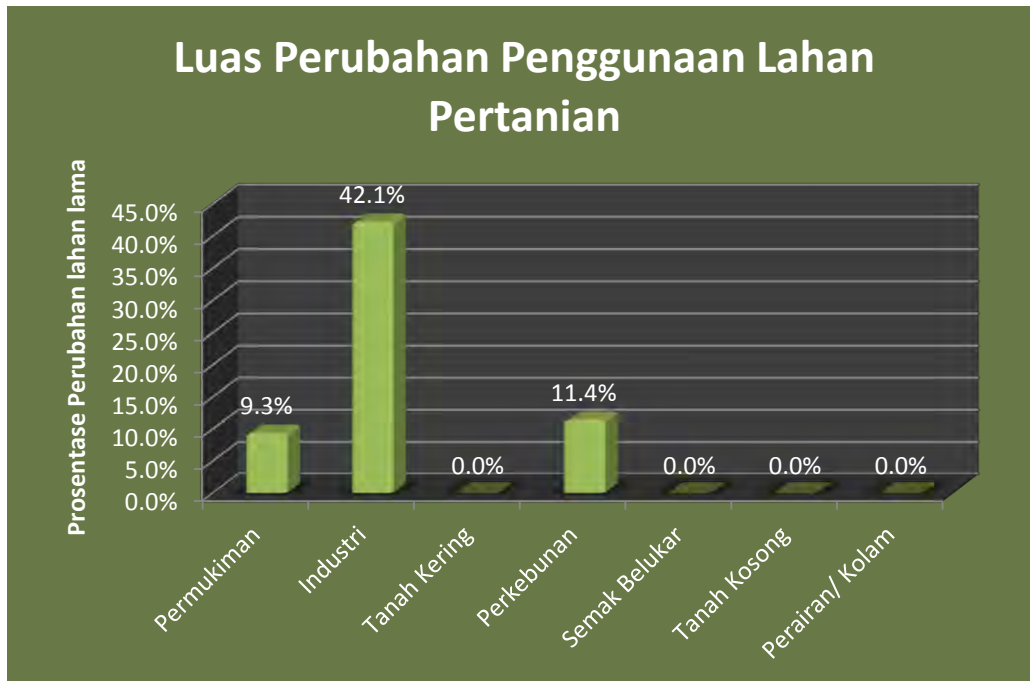
Gambar II-6. Grafik Ijin Pemanfaatan Hutan Bukan Kayu Berdasarkan Jumlahnya



Sumber: Perum Perhutani Kabupaten Ponorogo, 2020

Gambar II-7. Grafik Ijin Pemanfaatan Hutan Bukan Kayu Berdasarkan Luasannya

Dari Hasil Grafik Ijin Pemanfaatan hutan bukan kayu berdasarkan jumlahnya dan luasannya, Kecamatan Pulung masih menduduki nomor satu dengan jumlah 3 Unit dan dengan luas 2.346,04 Ha. Jika dilihat dari kedua tabel ijin pemanfaatan Hutan Kayu dan Ijin Pemanfaatan Bukan Kayu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Pulung mempunyai hutan kayu maupun hutan bukan kayu terluas dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.



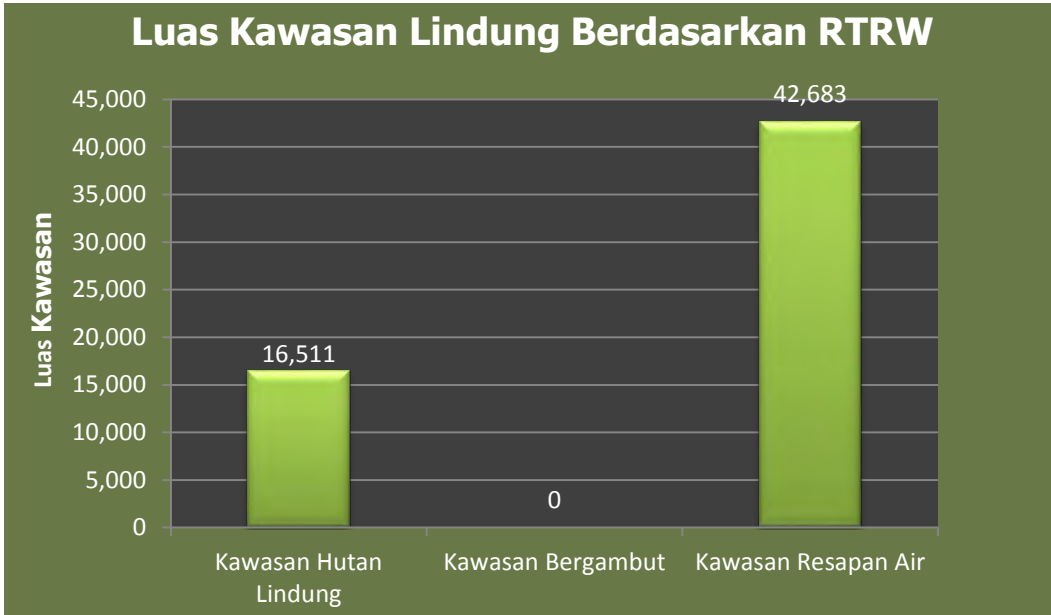
Sumber: BPN Kabupaten Ponorogo

Gambar II-8. Grafik Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

Salah satu faktor pemicu tata guna lahan yaitu dapat dilihat dari luas perubahan penggunaan lahan pertanian. Pada grafik diatas dapat diketahui perubahan lahan pertanian terbesar yaitu pada penggunaan industri. Grafik diatas menunjukkan prosentase perubahan luas lahan lama ke luas lahan baru. Perubahan luas terbesar pada penggunaan industri dengan prosentase 42,1%. Sedangkan untuk semak belukar, tanah kosong, dan perairan tidak ada perubahan luasan lahan.

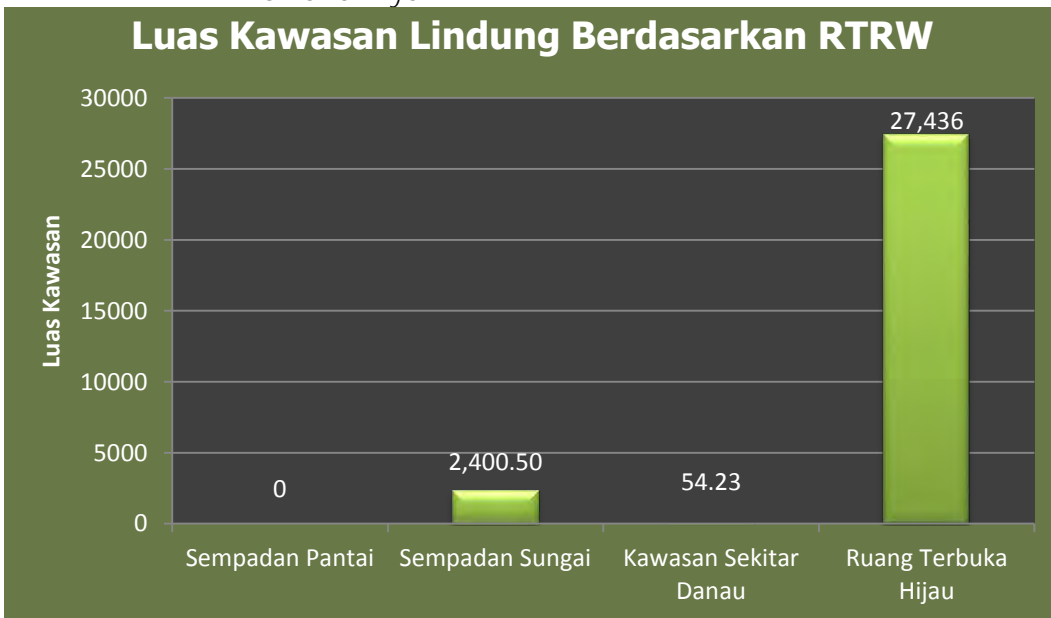
c) *State*

Kondisi suatu wilayah terkait lahannya dapat menimbulkan dampak terhadap tata guna lahan di wilayah tersebut. Kondisi tataguna lahan dapat dilihat dari kondisi lahan di wilayah kabupaten Ponorogo maupun pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo.



Sumber: Perum Perhutani Kabupaten Ponorogo

Gambar II-9. Grafik Luasan Kawasan Lindung Terhadap Kawasan Bawahannya



Sumber: Perum Perhutani Kabupaten Ponorogo

Gambar II-10. Grafik Luasan Kawasan perlindungan Setempat

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

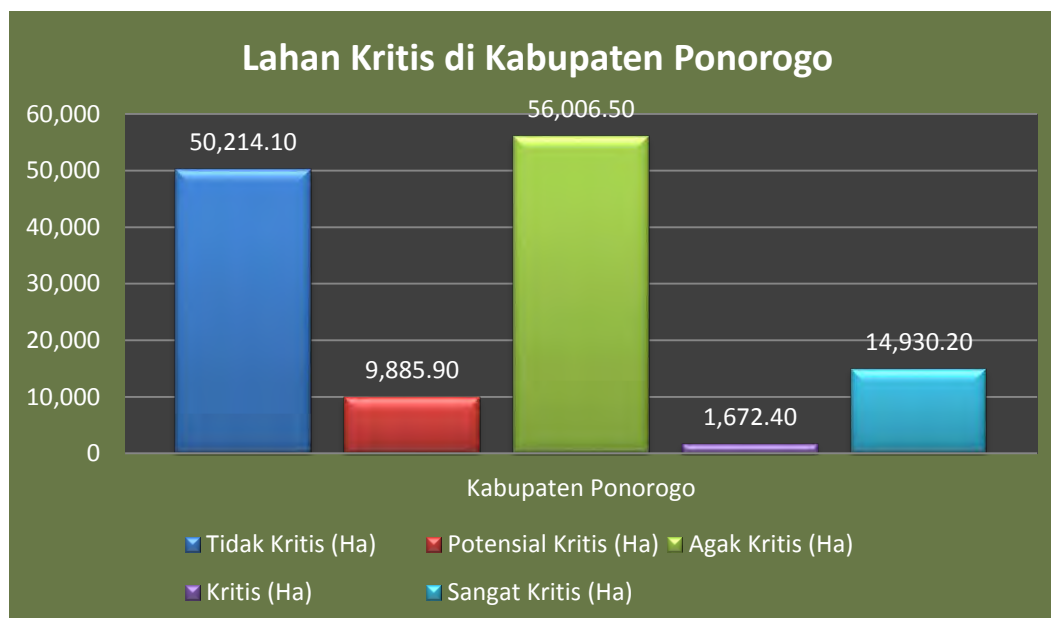
Berdasarkan grafik Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW maka dapat diketahui luasan kawasan resapan air mengalami peningkatan menjadi 42.683 dengan luasan kawasan hutan lindung sebesar 16.511. Sedangkan berdasarkan kawasan perlindungan setempat ruang terbuka hijau memiliki luasan 27.435,6, sedangkan kabupaten Ponorogo tidak memiliki luasan sempadan pantai dan luasan kawasan sekitar danau. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dapat dilihat lebih rinci pada **(Lampiran Tabel 1)**.

Berdasarkan data yang diperoleh, lahan kritis di kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-2. Lahan Kritis di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Kabupaten /Kec	Tidak Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)	
	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan
Kab. Ponorogo	50.214,10		9.885,90		56.006,50		1.672,40		14.930,20	

Sumber: BPDASHL Solo Kementerian LHK



Gambar II-11. Lahan Kritis di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPDAS HL Solo, kriteria kekritisan lahan pada kabupaten Ponorogo di bagi menjadi 5 kriteria. Jika diamati secara keseluruhan, Kabupaten Ponorogo lahan dengan kriteria agak kritis adalah kriteria yang memiliki lahan terluas dengan luas 56.006,50 Ha dan kriteria dengan luasan terendah yaitu pada lahan kritis.

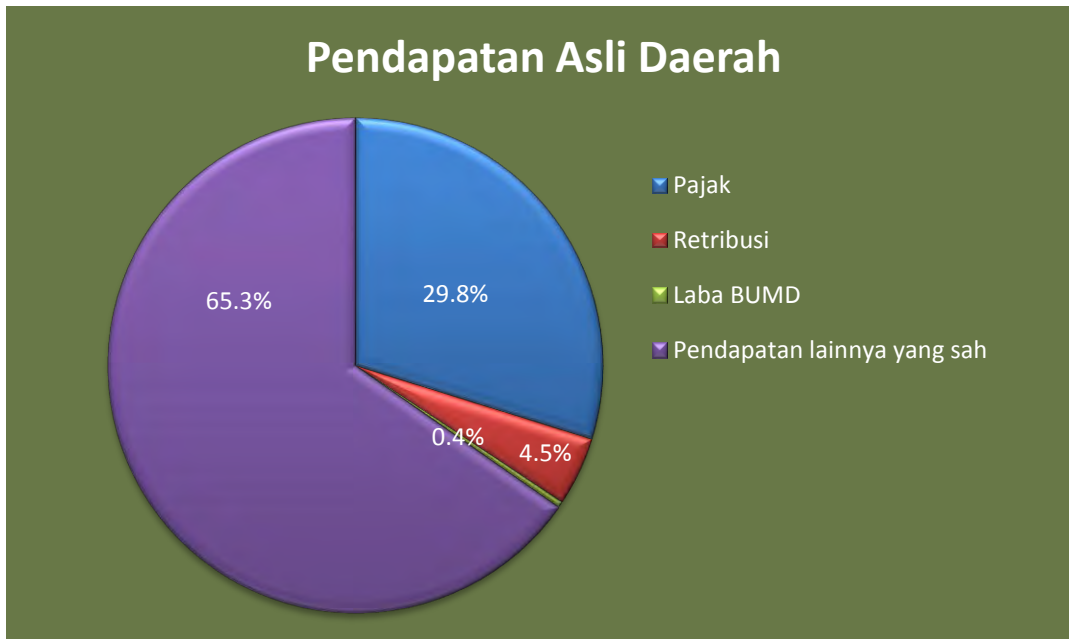
(Lampiran Tabel 6)

Tabel II-3. Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No	Jenis Pemanfaatan Lahan	Skala Usaha	Luas
1.	Tambang	Besar	-
		Menengah	-
		Kecil	-
		Rakyat	121,81
2.	Perkebunan	Besar	-
		Menengah	-
		Kecil	-
		Rakyat	7757,90
3.	Pertanian	Besar	-
		Menengah	-
		Kecil	-
		Rakyat	34801,00
4.	Pemanfaatan Hutan	Besar	-
		Menengah	-
		Kecil	-
		Rakyat	-

Sumber: BPS dan DLH Kabupaten Ponorogo

Pada tabel jenis pemanfaatan lahan diatas dapat diketahui kondisi pemanfaatan lahan tambang, perkebunan, pertanian. Data yang diperoleh yaitu jenis pemanfaatan lahan yang digunakan pada skala usaha rakyat. Hal ini menunjukkan adanya tataguna lahan Kabupaten Ponorogo paling banyak digunakan dalam skala usaha rakyat. Grafik ini dapat dilihat secara rinci pada **(Lampiran Tabel 14)**.



Sumber: BPS dan DLH Kabupaten Ponorogo

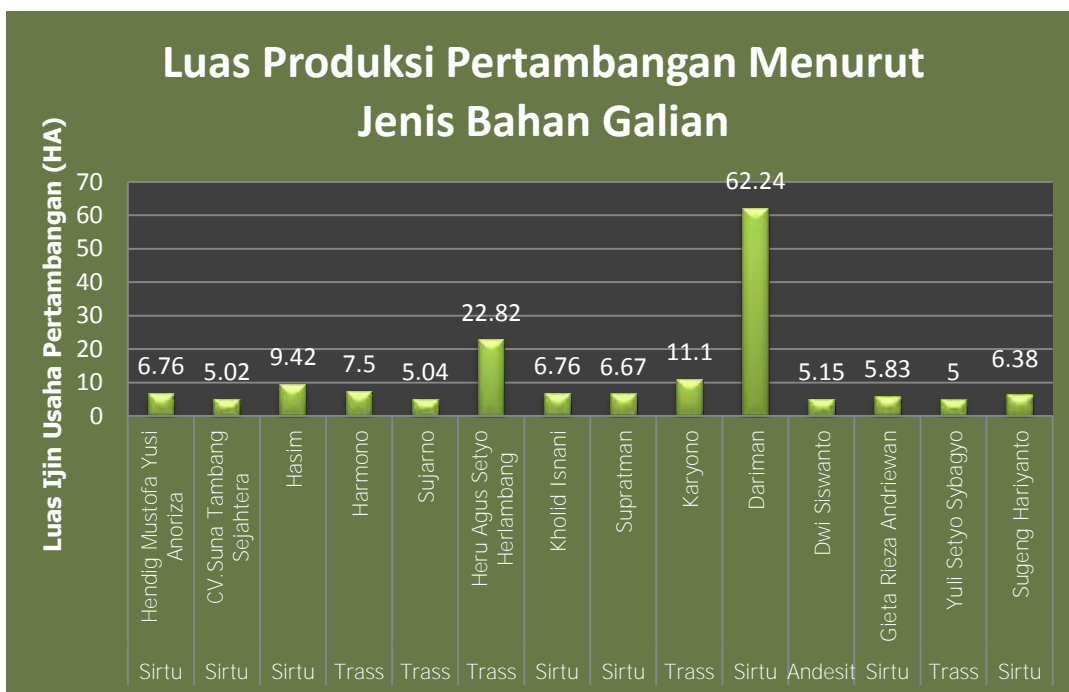
Gambar II-12. Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo

Pada grafik pendapatan asli daerah kabupaten Ponorogo diatas dapat diketahui sumber pendapatan yang paling terbanyak yaitu dari pendapatan lainnya yang sah dengan prosentase 65,3% dari total jumlah pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dipicu dari banyaknya jumlah ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Pendapatan asli daerah kabupaten Ponorogo secara rinci dapat dilihat pada **(Lampiran Tabel 60)**.

d) Impact

Setelah di jelaskan pada faktor pemicu maupun kondisi tata guna lahan di Kabupaten Ponorogo, maka dapat diketahui dampak yang ditimbulkan akibat isu – isu pada tata guna lahan. Pada grafik jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang sebelum sudah di jelaskan pada *pressure* , dapat dilihat dampak akibat perubahan dari tata guna lahan di wilayah Kabupaten

Ponorogo yaitu terdapat beberapa kecamatan yang memiliki lahan hutan hasil kayu maupun bukan kayu yang sudah memiliki ijin pemanfaatan hutan yang dapat di lihat secara rinci pada (**Lampiran tabel 18 dan Lampiran Tabel 19**). Dampak yang ditimbulkan akibat tataguna lahan juga berpengaruh terhadap luasan areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian yang dapat di lihat secara rinci pada (**Lampiran Tabel 15**).



Sumber: Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Gambar II-13. Grafik Luas Produksi Pertambangan Menurut Jenis Baha Galian

Karena terdapat beberapa faktor pemicu adanya perubahan tata guna lahan di wilayah Kabupaten Ponorogo, maka dampak yang ditimbulkan adalah banyaknya luasan ijin usaha pertambangan yang sudah di lakukan di beberapa perusahaan di Kabupaten Ponorogo. Perusahaan tambang Dariman dengan jenis bahan galian sirtu memiliki luasan ijin usaha pertambahan terluas dengan luas 62,24 Ha. sedangkan

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

yang memiliki luasan paling sedikit yaitu perusahaan Yuli Setyo Subagyo dengan luas izin usaha pertambangan 5 Ha. Grafik luasan izin usaha pertambangan dapat dilihat secara rinci pada **(Lampiran Tabel 15)**.

Kondisi dari tata guna lahan di wilayah kabupaten Ponorogo juga merupakan faktor pemicu dengan melihat status kerusakan tanah. Dari data status kerusakan tanah dapat diketahui kerusakan tanah pengelompokan penggunaan lahan yang dapat menyebabkan kerusakan tanah di wilayah Kabupaten Ponorogo. Untuk mengetahui kerusakan tanah dilakukan dengan pengambilan sampel di beberapa titik di kecamatan Balong. Pengambilan sampel menggunakan metode sesaat dan passive sampler. Menurut hasil keseluruhan dari sampel, pada parameter derajat pelulusan air dan redoks di beberapa sampel menunjukkan angka melebihi dari ambang batas dengan status tanah rusak sangat berat. Untuk parameter lainnya masih di bawah ambang batas sehingga tanah tidak mengalami kerusakan. Berdasarkan sampel yang diambil status tanah di Kecamatan Balong terbagi menjadi dua golongan yaitu tidak rusak dan rusak sangat berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **lampiran tabel 8**.

Tabel II-4. Lokasi Titik Pengambilan Sampel Tanah Tahun 2020

NO TITIK	UNIT LAHAN	DESA	Koordinat	
			LS	BT
1	1	Ngumpul	7 57' 12,4"	111 24' 02,1"
2	2	Ngendut	7 57' 52,7"	111 23' 26,9"
3	2	Purworejo	7 56' 05,1"	111 25' 26,9"
4	2	Ngraket	7 57' 39,7"	111 24' 37,6"
5	3	Karangpatihan	7 57' 25,3"	111 22' 33,8"
6	4	Tatung	7 55' 35,0"	111 25' 37,5"
7	5	Ngendut	7 57' 57,7"	111 22' 37,7"
8	6	Pandak	7 58' 24,5"	111 21' 41,7"
9	7	Karangpatihan	7 57' 26,4"	111 20' 50,6"
10	8	Karangpatihan	7 57' 43,6 "	111 21' 47,9"
11	9	Tatung	7 55' 15,2"	111 25' 24,2"

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

NO TITIK	UNIT LAHAN	DESA	Koordinat	
			LS	BT
12	10	Karangpatihan	7 57' 38,3"	111 20' 01,7"
13	11	Karangpatihan	7 57' 41,1"	111 20' 41,5"
14	12	Pandak	7 58' 41,0"	111 21' 55,6"
15	13	Pandak	7 58' 55,4"	111 22' 23,2"
16	14	Pandak	7 58' 20,6"	111 22' 08,2"
17	15	Pandak	7 59' 08,0"	111 22' 02,7"
18	16	Pandak	7 59' 05,0"	111 21' 38,7 "
19	17	Karangpatihan	7 57' 54,0"	111 20' 35,4"
20	18	Pandak	7 58' 36,8"	111 21' 46,7"
21	19	Karangmojo	7 56' 28,6"	111 26' 43,0"
22	19	Bajang	7 57' 12,5"	111 27' 30,0"
23	20	Ngampel	7 55' 14,8"	111 26' 58,3"
24	21	Tatung	7 55' 09,5"	111 26' 00,6"
25	22	Muneng	7 54' 49,5"	111 25' 49,8"

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, 2020

Tabel II-5. Status Kerusakan Tanah Tahun 2020

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/ Tidak
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	35 - 100 cm	Tidak Melebihi
2	Ketebalan Permukaan	< 40 %	0%	Tidak Melebihi
3.A	Komposisi Koloid	< 18 %	27,38 - 53,89 %	Tidak Melebihi
3.B	Komposisi Pasir Kuarsatik	> 80 %	14,48 - 33,03 %	Tidak Melebihi
4	Berat Volume	> 1,4 g/cm ³	0,92 - 1,39 cm	Tidak Melebihi
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	33,68 - 57,94 %	Tidak Melebihi
6	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	12,97 cm	Melebihi
			0,46 cm	Melebihi
			8,10 cm	Melebihi
			0,69 cm	Melebihi
			11,58 cm	Melebihi
			15,05 cm	Melebihi
			0,69 cm	Melebihi
			16,21 cm	Melebihi
			15,75 cm	Melebihi
0,46 cm	Melebihi			

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
			0,23 cm	Melebihi
			0,35 cm	Melebihi
			0,46 cm	Melebihi
7	pH (H ₂ O) 1:2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,76 - 7,42	Tidak Melebihi
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0,10 - 0,62	Tidak Melebihi
9	Redoks	< 200 mV	138 - 187 mV	Melebihi
		< 200 mV	275 - 384 mV	Tidak Melebihi
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	< 10 ² cfu/g tanah	Tidak Melebihi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, 2020

Jenis tanah dan sistem pengelolaan lahan di Kecamatan Balong mempunyai dampak pada kerusakan lahan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengamatan dan analisis tanah yang menunjukkan beberapa parameter melewati ambang baku kerusakan tanah, yaitu komposisi permeabilitas/derajat pululusan air dan potensial redoks di beberapa lokasi pengamatan.

Parameter permeabilitas tanah atau derajat pelulusan air dipengaruhi oleh tingkat ruang pori tanah dan kemampatan tanah. Derajat pelulusan air yang di luar ambang baku kerusakan adalah tanah yang mempunyai nilai di luar ambang baku. Hal ini menunjukkan bahwa derajat pelulusan air yang rendah akan menyebabkan air limpasan permukaan (*run off*) akan meningkat yang akan meningkatkan erosi. Jika erosi berlangsung besar maka akan berakibat pada kerusakan tanah. Demikian juga derajat pelulusan air yang

terlalu tinggi akan menyebabkan kemampuan menahan air yang rendah sehingga berpotensi kekurangan air pada tanaman. Langkah untuk memperbaiki permeabilitas tanah atau infiltrasi tanah dapat dilakukan dengan cara pemberian bahan organik.

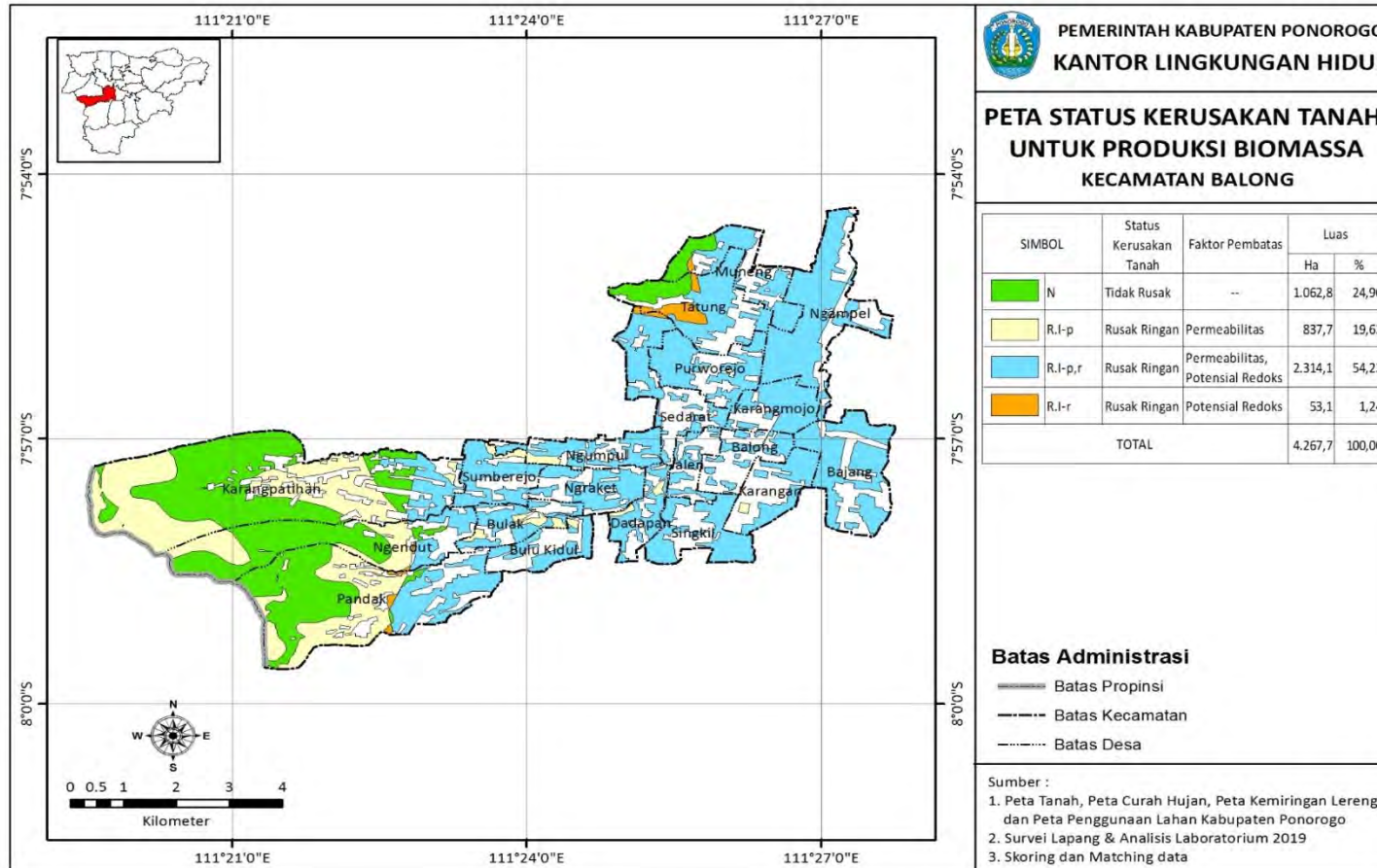
Parameter potensial redoks (reduksi-oksidasi) tergolong rusak karena mempunyai nilai kurang dari 200 mV. Hal ini disebabkan karena sebagian lahan merupakan lahan sawah yang sering mengalami proses penggenangan serta khususnya pada musim penghujan selain itu juga kemampuan tanah yang bersifat sulit meloloskan air. Akibat dari tanah yang tergenang dan permeabilitas lambat maka akan didominasi suasana reaksi reduksi dibanding oksidasi sehingga di lahan tersebut mempunyai nilai redoks yang rendah. Proses anaerob atau rendahnya nilai redoks berakibat pada proses dekomposisi bahan organik yang lambat, sehingga produksi biomassa di dalam tanah menjadi rendah. Namun jika ditinjau dari aspek penggunaan lahan, rendahnya nilai redoks merupakan hal yang wajar terutama pada tanah sawah, karena tanah sawah sering tergenang sehingga mempunyai nilai redoks yang rendah.

Usaha untuk meningkatkan status dari rusak ringan menjadi tidak rusak bisa ditempuh dengan pemberian bahan organik sebagai usaha pengembalian biomassa ke dalam tanah sekaligus menambah unsur hara di dalam tanah. Usaha ini bisa diartikan juga dengan pemupukan

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

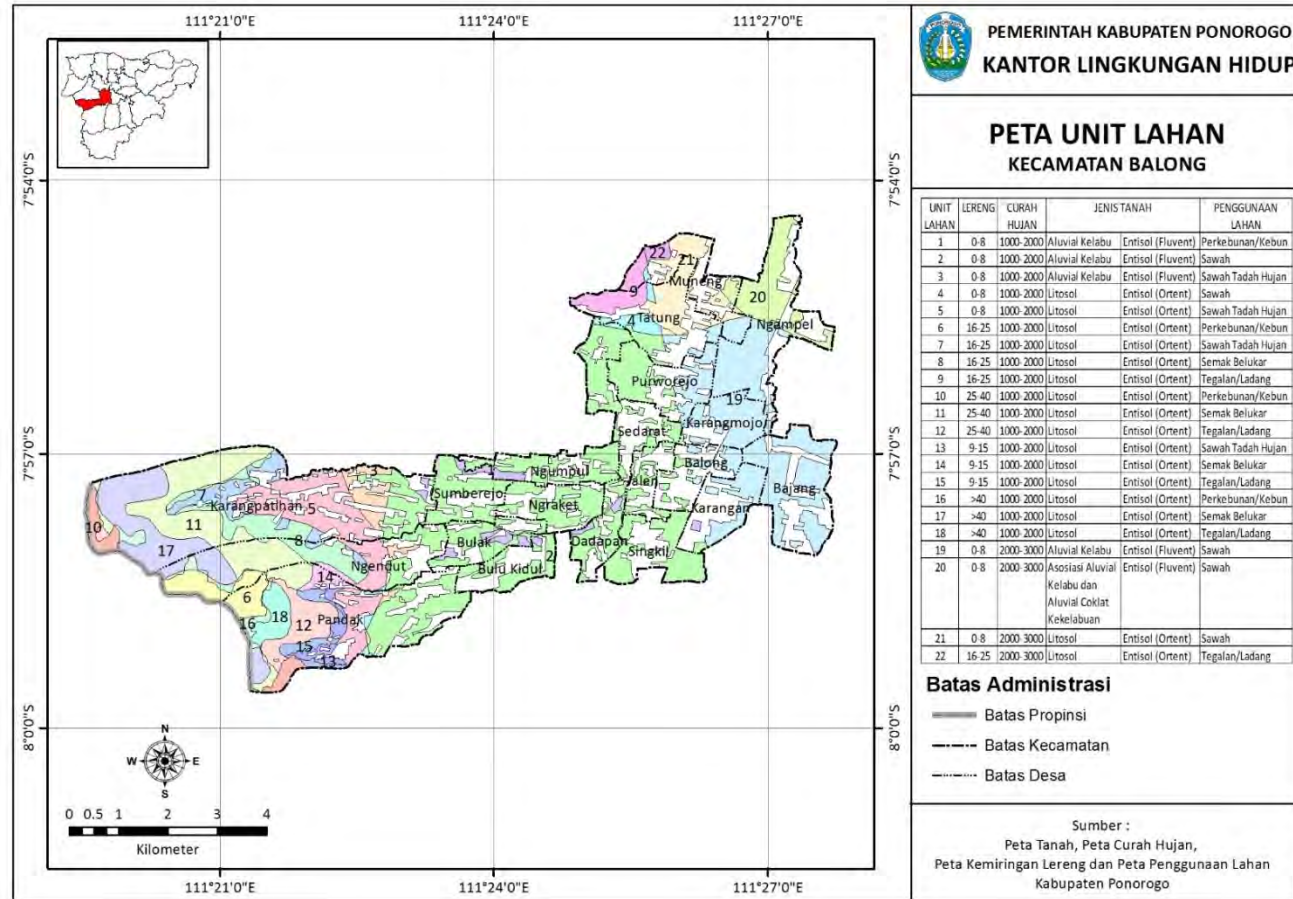
lahan secara organik, baik dari seresah hasil limbah budidaya pertanian seperti jerami ataupun dengan pemberian pupuk kandang dari kotoran ternak. Dengan penambahan bahan organik ke dalam tanah maka tanah akan terbentuk struktur yang baik, ruang pori makro meningkat, kemampuan menyerap air meningkat, permeabilitas tanah meningkat dan bobot isi tanah akan menurun

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



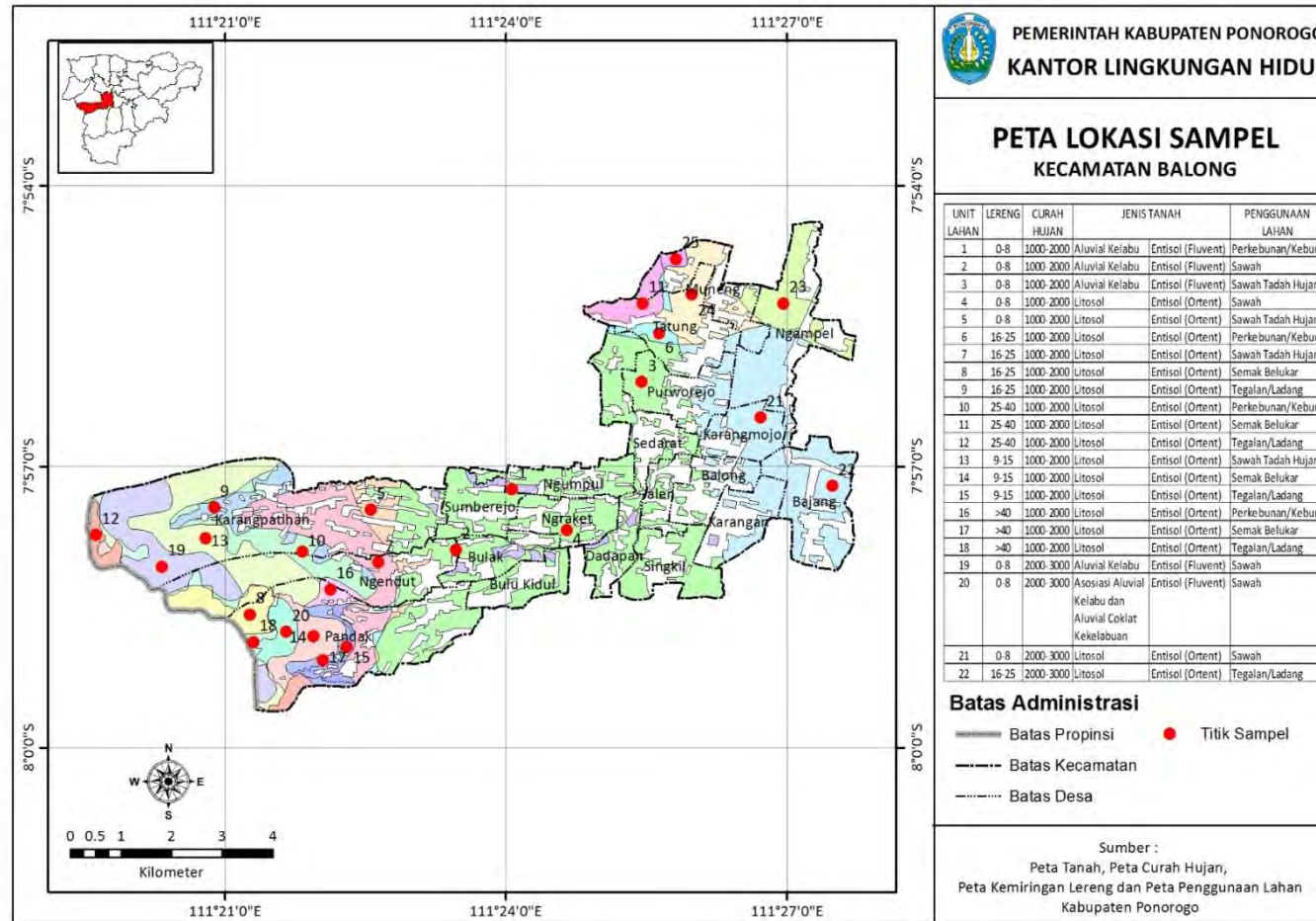
Gambar II-14. Peta Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa Kecamatan Balong

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



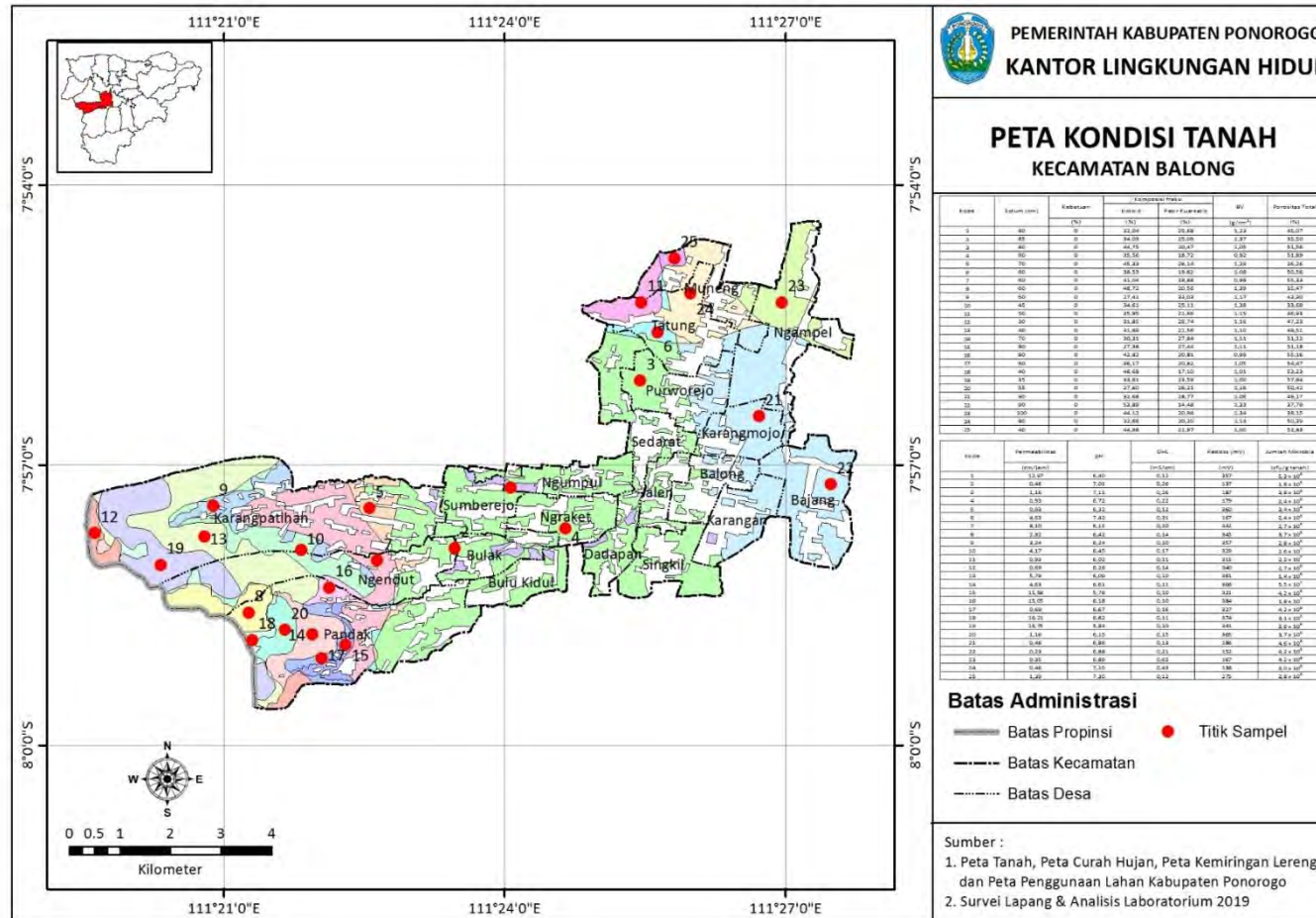
Gambar II-15. Peta Unit Lahan Kecamatan Balong

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



Gambar II-16. Peta Lokasi Titik Sampel Kecamatan Balong

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



Gambar II-17. Peta Lokasi Titik Sampel Kecamatan Balong



Gambar II-18. Foto Pengambilan Passive Sampel



Gambar II-19. Foto Pengambilan Sampel Badan Air di Sungai Mungkungan

e) *Response*

Upaya pemerintah dalam menghadapi isu – isu terkait tata guna lahan yaitu dengan melakukan realisasi kegiatan penghijaun dan reboisasi. Tujuan dari reboisasi adalah memanfaatkan kembali hutan yang sudah diambil hasil hutannya dengan melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Kegiatan ini nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo karena hasil hutan akan terus meningkat.



Sumber: UPT Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo, 2020

Gambar II-20. Grafik Luas Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

Pada grafik realisasi kegiatan reboisasi, pemerintah telah menetapkan target luasan untuk dilakukan reboisasi di masing – masing wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Jika dilihat dari grafik, seluruh Kecamatan telah merealisasikan sesuai dengan jumlah yang di targetkan untuk reboisasi. Grafik realisasi kegiatan reboisasi dapat dilihat secara rinci pada **(Lampiran Tabel 16)**.

Pada produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, Pada jenis produk hukum yaitu Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 telah di atur tata cara pemotongan pohon ayoman di tepi jalan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengangan isu – isu terkait tata guna lahan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut maka masyarakat mempunyai pedoman terkait tata cara pemotongan pohon ayoman di tepi

jalan. Produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tersebut dapat dilihat secara rinci pada **(Lampiran Tabel 58)**.

2.2. Kualitas Air

Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi, karena air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dengan begitu, air dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ada banyak jenis air tergantung dari unsur senyawa yang terkandung didalam air. Air sangat penting karena berperan dalam kelestarian alam beserta isinya.

Kabupaten Ponorogo melakukan pengukuran kualitas air pada air sumur, air sungai dan air waduk/situ/embung. Baku mutu yang digunakan untuk memantau kualitas air sungai dan air waduk adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk kualitas sumur baku mutu yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Pemandian Umum.

a. Driving Force

Ketersediaan air merupakan faktor yang penting untuk melangsungkan kehidupan makhluk hidup di bumi. Upaya pemenuhan kebutuhan air dapat mengambil air dari dalam tanah, air permukaan atau air hujan, tetapi dari ketiga sumber air tersebut air tanah yang banyak digunakan karena air tanah memiliki keunggulan yaitu kualitas airnya yang

lebih baik serta pengaruh akibat pencemaran yang relatif kecil. Kebutuhan air bagi manusia harus terpenuhi baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo, dapat diketahui data curah hujan tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Data curah hujan tersebut akan mempengaruhi kualitas air maupun ketersediaan air di Kabupaten Ponorogo pada bulan – bulan tertentu. Pada musim hujan jumlah ketersediaan air akan terpenuhi, tetapi jika pada musim kemarau, jumlah kebutuhan air akan berkurang karena curah hujan yang semakin menurun.

Tabel II-6. Status Kerusakan Tanah Tahun 2020

No	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	St Hjn Bangunsari	9	23	8	2	5	0	0	0	0	3	5	10
2	St Hjn Babadan	5	10	10	3	4	1	1	1	0	4	9	11
3	St Hjn Bollu	7	11	11	2	2	1	1	1	0	3	9	13
4	St Hjn Kesugihan	11	12	10	7	11	2	0	1	0	4	16	13
5	St Hjn Ngebel	11	15	14	10	15	0	1	0	0	8	14	12
6	St Hjn Talun	11	13	15	11	10	0	0	0	-	3	15	16
7	St Hjn Pulung	10	10	11	5	9	5	0	0	0	6	14	11
8	St Hjn Pudak	12	17	17	13	13	3	2	0	5	7	15	10
9	St Hjn Sooko	12	15	13	6	12	2	1	0	1	14	13	9
10	St Hjn S Bangun	9	12	10	5	5	0	-	0	0	1	9	8
11	St Hjn Sungkur	6	16	7	6	3	0	-	0	-	1	8	7
12	St Hjn Badegan	6	15	12	5	4	0	-	0	0	2	7	10
13	St Hjn Kauman	4	17	8	4	4	-	-	0	-	2	7	6
14	St Hjn Jenangan	5	15	9	5	5	-	-	1	-	2	9	10
15	St Hjn Menggare	10	13	17	3	3	1	0	0	0	2	5	9
16	St Hjn Balong	7	16	13	1	2	0	0	0	-	3	7	9
17	St Hjn Ngilo-ilo	9	16	9	1	2	1	0	0	-	5	5	10
18	St Hjn Ngrayun	12	17	14	2	3	3	0	-	-	1	2	9
19	St Hjn Sawoo	6	18	14	2	4	2	-	-	1	4	10	5
20	St Hjn Wilangan	11	23	11	4	5	2	0	0	0	3	12	11
21	St Hjn Kori	4	17	12	3	7	2	0	0	1	4	11	9
22	St Hjn Sewatu	10	21	9	2	7	1	1	-	0	2	6	8

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo, 2020

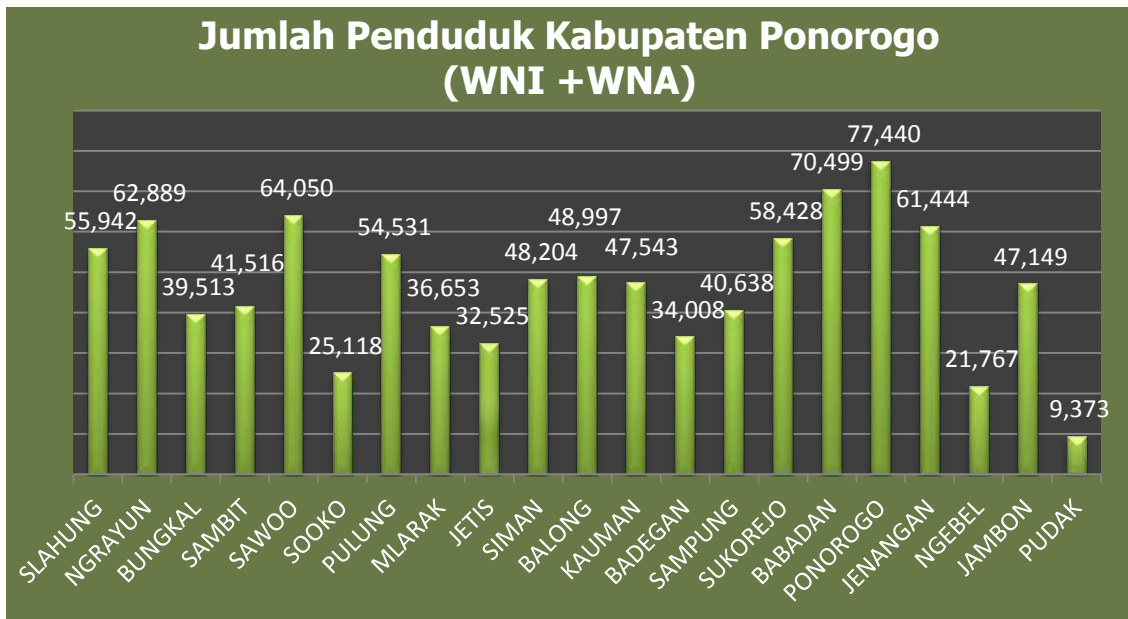
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Berdasarkan grafik curah hujan bulanan rata-rata Kabupaten Ponorogo dari bulan Januari hingga Desember tahun 2020, dapat diketahui curah hujan tertinggi yaitu pada bulan Februari yang diamati dari lokasi stasiun pengamatan Bangunsari dan Wilangan dengan curah hujan sebesar 23. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus dimana nilai curah hujan adalah 7 dan 4. Hal tersebut terjadi karena rendahnya curah hujan pada bulan tersebut. Jika di lihat dari grafik, curah hujan tinggi terjadi pada bulan Februari, Maret, November dan Desember. Namun, puncak curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari. Ketika curah hujan tinggi, maka kebutuhan air di wilayah Kabupaten Ponorogo akan tercukupi. curah hujan yang tinggi maupun yang rendah tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas air pada sungai, danau/waduk/situ/embung dan kualitas air pada sumur. Maka, perlu adanya pengukuran kualitas air. Grafik curah hujan bulanan rata-rata Kabupaten Ponorogo dapat dilihat secara rinci pada (**Lampiran Tabel 24**).

b. *Pressure*

Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah yaitu 1.371,78 km² dengan total jumlah penduduk sebanyak 978.227 Jiwa. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, diketahui Jumlah penduduk tertinggi yaitu pada Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 77.440 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu dari Kecamatan Pudak yaitu 9.373 jiwa. Kemudian jika dilihat dari luasan wilayahnya wilayah terbesar yaitu kecamatan Ngrayun dengan prosentase 13,41% dari total keseluruhan wilayah di Kabupaten Ponorogo, sedangkan luasan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Ponorogo 1,62%. Jika dibandingkan luasan wilayah dengan jumlah penduduk di

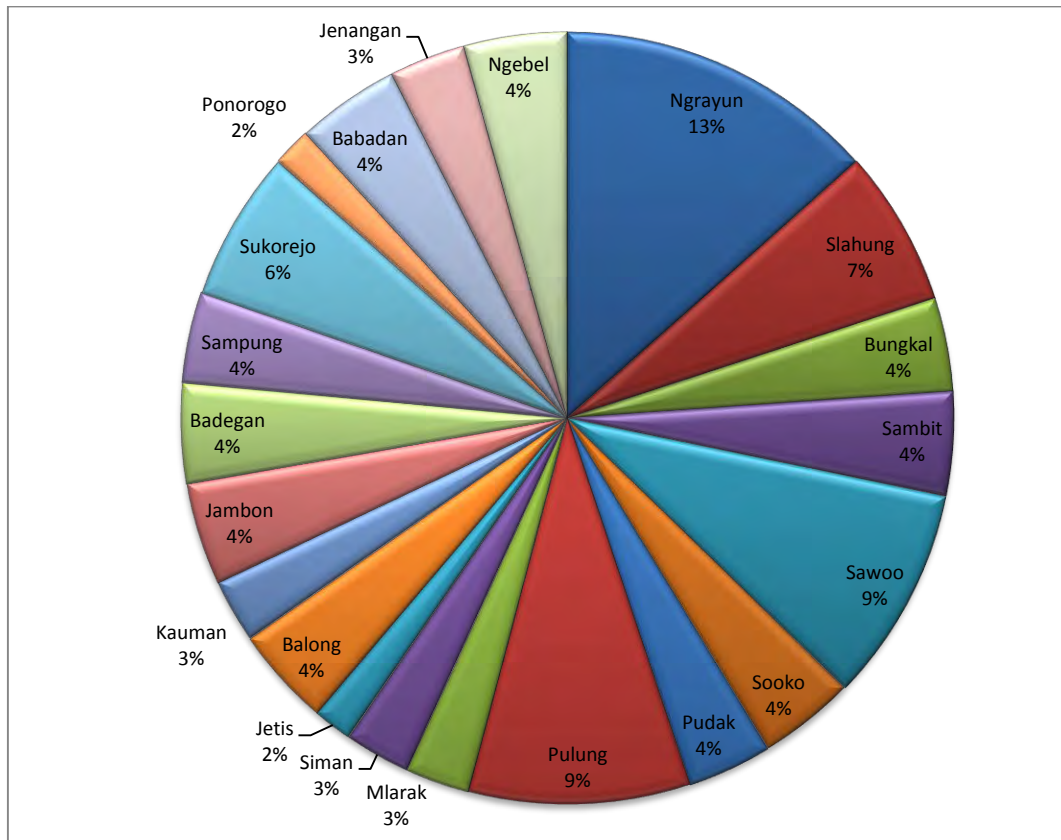
wilayah Kabupaten Ponorogo, yang krusial pada kecamatan Ponorogo. Karena Kecamatan Monorogo memiliki luas wilayah terkecil namun dengan jumlah penduduk yang tertinggi. hal ini merupakan tekanan dari kondisi wilayah kabupaten Ponorogo terhadap kualitas airnya yang akan digunakan oleh masyarakat di Wilayah Kabupaten Ponorogo. Rincian jumlah penduduk dan luasan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dengan rinci pada grafik Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan, dan pada (**Lampiran Tabel 45**).



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo , 2020

Gambar II-21. Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

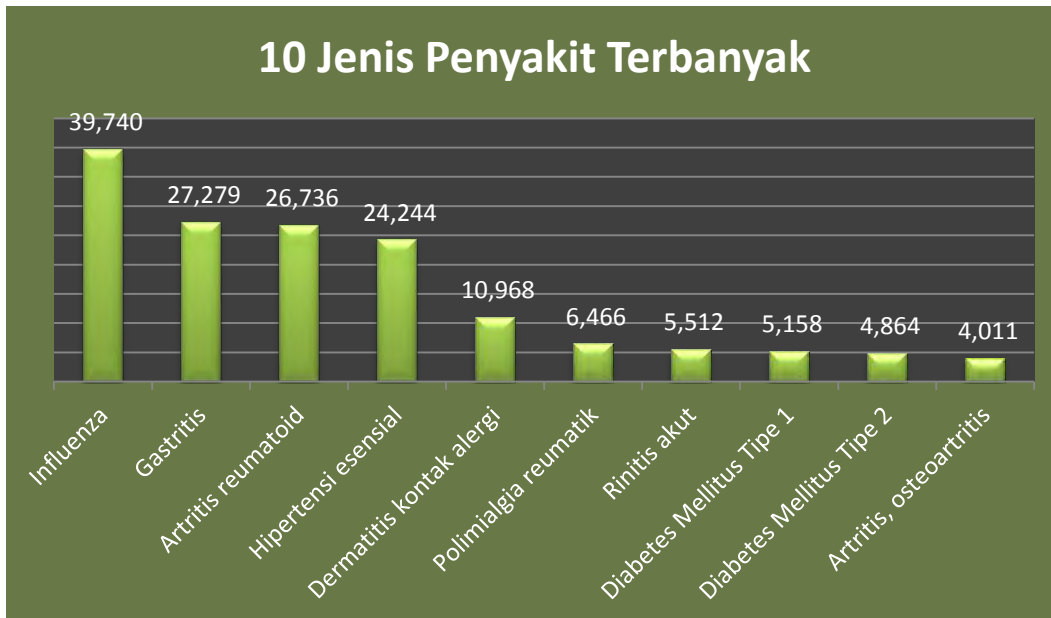
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, 2020

Gambar II-22. Grafik Prosentase Luasan Wilayah Kabupaten Ponorogo

Jika dilihat dari sudut kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo telah mengelompokkan beberapa jenis penyakit yang derita masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dari total jumlah penderita sebanyak 154.978 orang, terbanyak yaitu mengalami influenza yaitu sebanyak 39.740 orang. Sedangkan penyakit yang paling sedikit diderita yaitu penyakit athritis, osteoarthritis. Jenis – Jenis penyakit dapat di lihat dari Grafik Jenis Penyakit Utama yang diderita penduduk Kabupaten Ponorogo dan pada (**Lampiran tabel 33**).

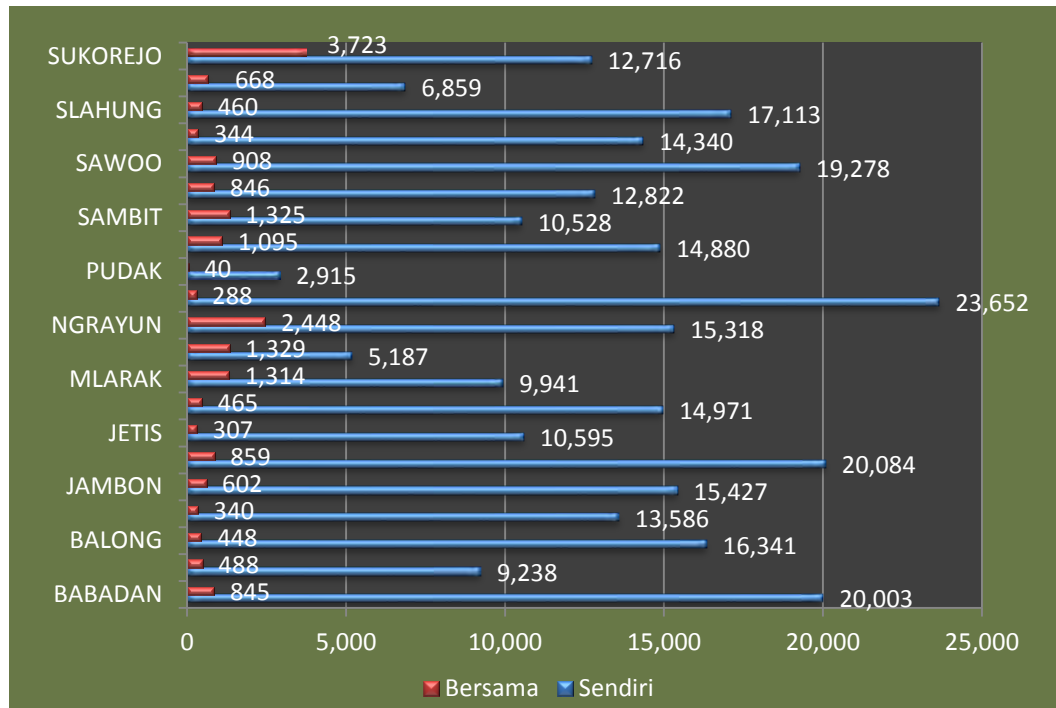


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Gambar II-23. Grafik Jenis Penyakit Utama yang diderita penduduk Wilayah Kabupaten Ponorogo

Kemudian, jika dilihat dari jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo telah mengelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu milik sendiri dan milik bersama. Berdasarkan grafik Jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar, diketahui kecamatan ponorogo dengan KK terbanyak memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri terbanyak yaitu dengan jumlah KK 23.940 dan jumlah fasilitas BAB sendiri dengan jumlah 23.652. Kemudian untuk fasilitas BAB terbesar yaitu pada kecamatan Ngrayun yaitu sebesar 2.377. Sedangkan untuk fasilitas BAB di sungai terbanyak yaitu wilayah Sawoo berjumlah 2.577. Rincian lebih jelasnya akan tertuang pada grafik jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar dan pada (**Lampiran Tabel 31**).

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Gambar II-24. Grafik Jumlah Rumah Tangga Dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Kualitas air di Wilayah Kabupaten Ponorogo juga akan ditekan pada sumber air minum untuk masyarakat Wilayah Kabupaten Ponorogo. Jika di lihat dari data sumber air minum di Kabupaten Ponorogo, sumber air minum terbanyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah sumur dengan pemakaian tertinggi yaitu jumlah rumah tangga di Kecamatan Babadan. Pada grafik tercantum nilai 0 yang berarti tidak ada data kecamatan yang menggunakan sumber air minum tersebut. Selain sumur, sumber air minum Ledeng/PDAM juga banyak di gunakan oleh masyarakat. Jumlah penggunaan sumber air minum tersebut dapat dilihat secara rinci pada grafik dan pada (**Lampiran tabel 25**).

Tabel II-7. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2020

KABUPATEN /KOTA	MATA AIR	LEDENG /PAM	SUMUR	SUNGAI	HUJAN	KEMASAN	LAINNYA
PONOROGO	8.459	71.857	164.845	0	54	9.684	12.768

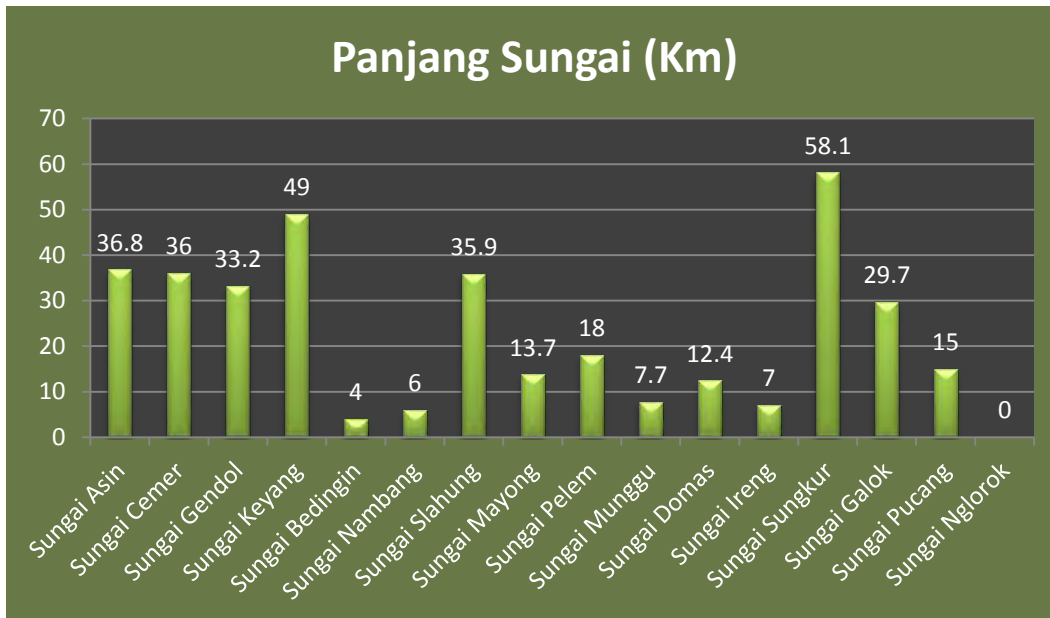
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, 2020

c. *State*

Ada beberapa unsur untuk mengetahui kondisi air di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo mempunyai sungai, dan danau/waduk/situ/embung.

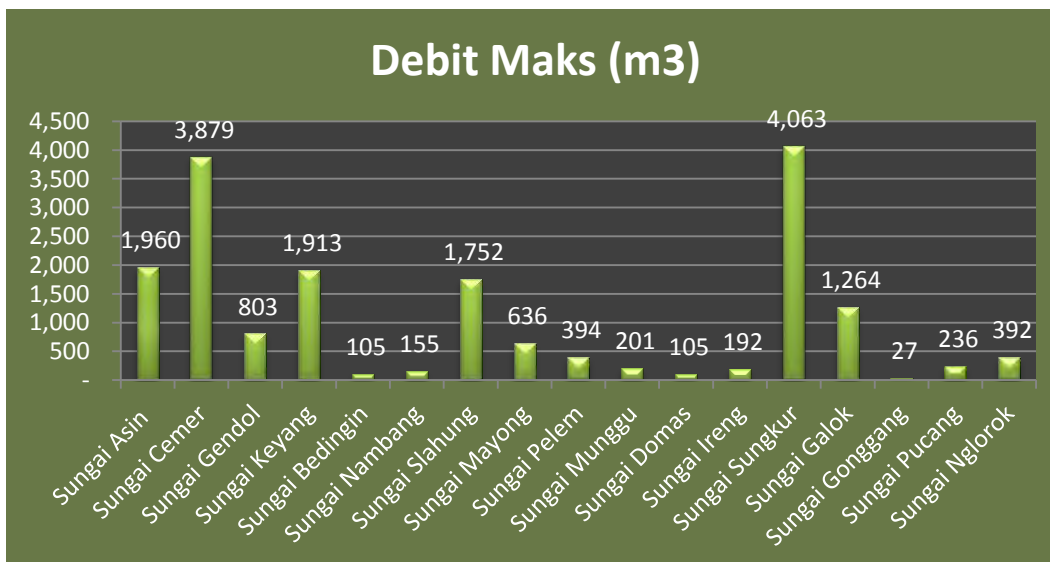
Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus – menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sungai juga merupakan sumber mata air. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo terdapat 16 sungai yang tersebar di beberapa kecamatan. Sungai terpanjang dengan panjang sungai 58,1 km adalah sungai sungkur dengan kedalaman sungai mencapai 5,07 m, debit air maksimum yang mampu ditampung adalah sebesar 4.063 m³ dan untuk debit air minimum adalah 0,20 m³. Sedangkan untuk sungai dengan dengan panjang paling pendek yaitu 4 km adalah sungai bendingin dengan debit air maksimum yang mampu ditampung adalah sebesar 105 m³. (**Lampiran Tabel 27**).

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



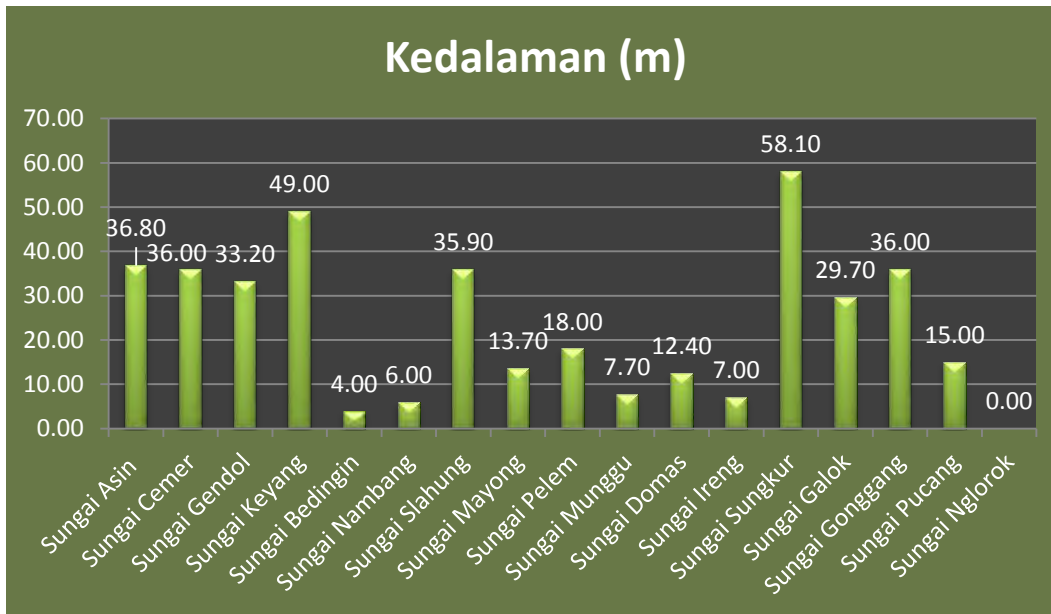
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo

Gambar II-25. Grafik Panjang Sungai Di Kabupaten Ponorogo



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo

Gambar II-26. Grafik Debit Sungai Di Kabupaten Ponorogo



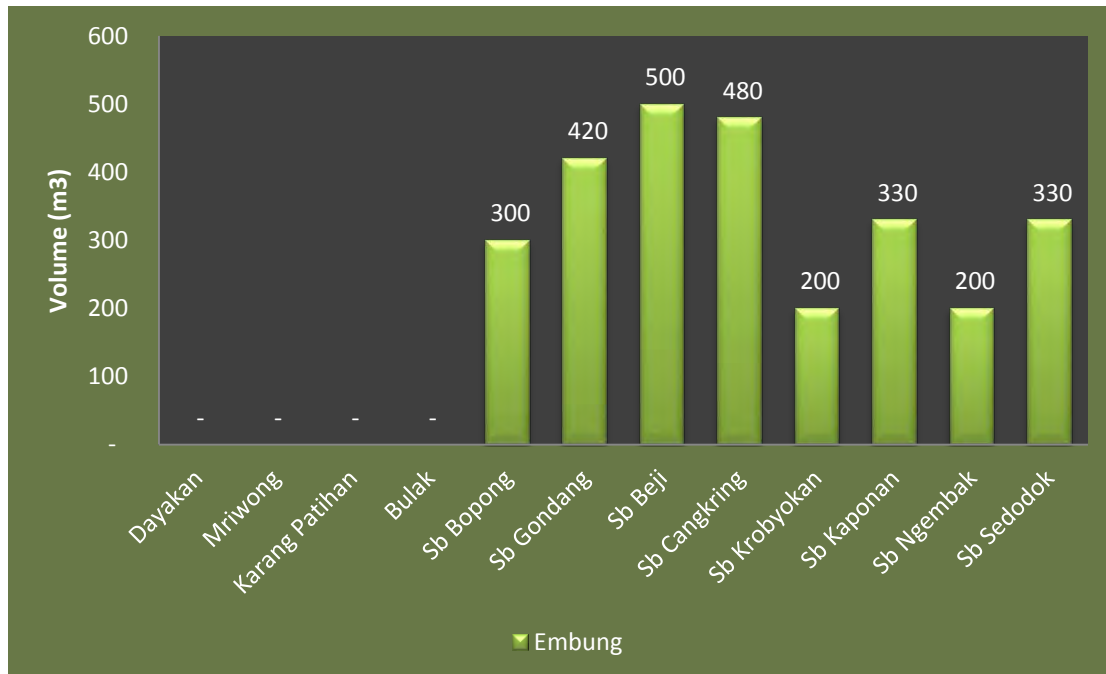
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo

Gambar II-27. Grafik Debit Sungai Di Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo mempunyai telaga dan embung sebagai sarana penampung air lainnya. Telaga Ngebel terletak di daerah pegunungan di Kecamatan Ngebel dengan luas telaga 150 ha dan volume 24.220.000 m³. Telaga Ngebel juga dimanfaatkan untuk irigasi sawah seluas ± 3.154 Ha dan sebagai PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) sebesar 2,25 MWH/tahun.

Selain Telaga Ngebel, terdapat pula potensi-potensi embung. Embung yang ada berasal dari sungai-sungai besar yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air baku. Adapun inventarisasi

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

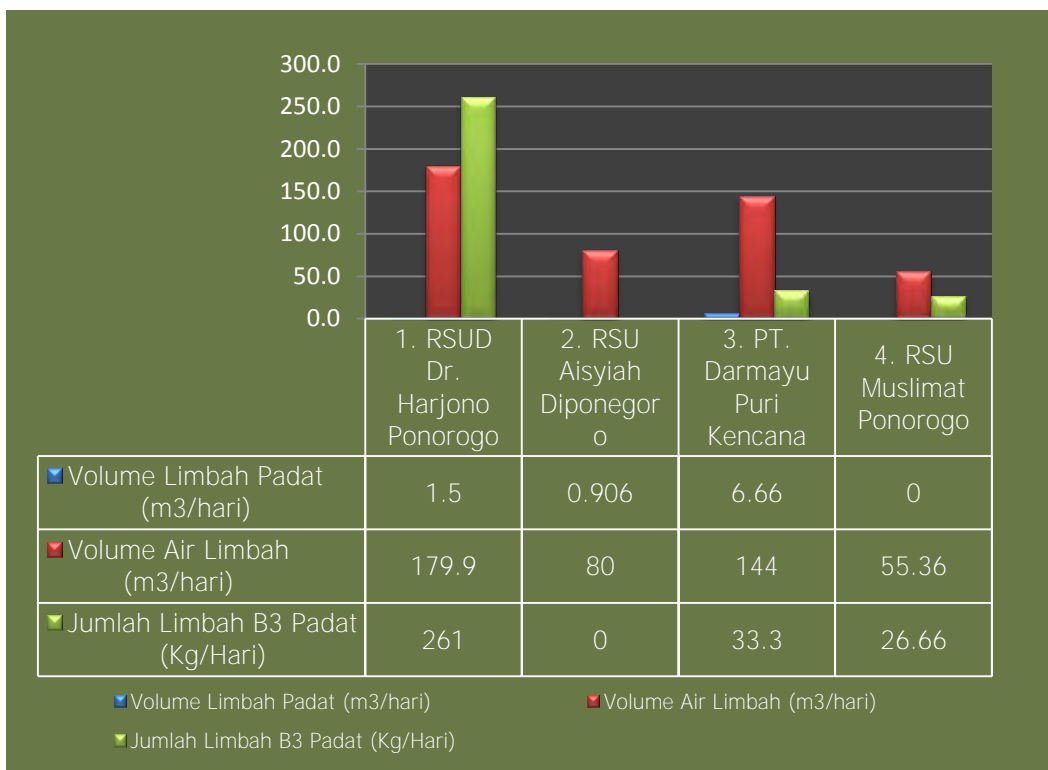


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo

Gambar II-28. Grafik Volume Embung Di Kabupaten Ponorogo

Potensi embung secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran Tabel 28**. Terdapat 12 potensi embung di Kabupaten Ponorogo dan berasal dari DAS (Daerah Aliran Sungai).

Jumlah Limbah Padat dan Cair akan memberikan gambaran terkait kualitas air sungai di Wilayah kabupaten Ponorogo. Dalam aspek perekonomian pasti terjadi peningkatan jumlah industri sehingga limbah yang ditimbulkan pasti akan terjadi peningkatan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, limbah terbanyak dihasilkan dari limbah cair yaitu dari RSUD Dr. Hardjono dengan volume limbah cair sebanyak 179,9 m³/hari (**Lampiran Tabel 35**)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Gambar II-29. Grafik Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar

d. *Impact*

Menjaga kualitas air sangat penting karena bila sumber air tercemar maka akan terjadi kerusakan lingkungan dan tingkat penurunan kualitas air yang akan berakibat pada tingkat kesehatan masyarakat. Dalam rangka memantau dan menjaga kualitas air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melakukan uji kualitas air pada 22 titik lokasi sumur di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

1. Kualitas Air Sumur

Hasil uji kualitas air sumur akan dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, Dan Pemandian Umum, perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil uji pada 27 titik sumur sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan atau tidak. Berikut ini adalah daftar 27 lokasi sumur yang telah dilakukan uji kualitas air yang juga dapat dilihat pada lampiran Tabel 22.

Tabel II-8. Titik Lokasi Sumur di kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No	Lokasi Sumur	Koordinat	
		Lintang	Bujur
1	Menur	-7.866558°	111.476781°
2	Polorejo	-7.835894°	111.484698°
3	Pijeran Siman	-7.885081°	111.511661°
4	Stadion	-7.864235°	111.476720°
5	Keniten	-7.843511°	111.474213°
6	Badegan Depan SMP	-7.873636°	111.335905°
7	Bungkal	-7.991235°	111.454772°
8	Slahung	-8.042388°	111.413463°
9	Babadan Kantor	-7.817048°	111.509953°
10	PlosoJenar	-7.870214°	111.419242°
11	Semanding	-7.889174°	111.406964°
12	Simo	-7.839113°	111.549768°
13	Trenceng	-7.857125°	111.549532°
14	Suren	-7.902546°	111.549938°
15	Candi	-7.913907°	111.564836°
16	Totokan	-7.910038°	111.553286°
17	Balong	-7.956186°	111.443221°
18	Prayungan	-7.966903°	111.562285°
19	Wotan 1	-7.870002°	111.620533°
20	Gokalang	-7.818587°	111.552383°
21	Tajug	-7.867142°	111.521896°
22	Mrican	-7.861355°	111.534049°
23	Jenangan Sampung	-7.806250°	111.332135°
24	Plunturan 1	-7.847832°	111.606645°
25	Sumber Banjarejo	-7.880385°	111.708669°
26	Ngemplak Sawoo	-7.982793°	111.576745°
27	Bungkal	-7.990570°	111.454888°

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum. Berikut ini adalah Tabel II-2 berisi daftar parameter wajib untuk parameter fisik yang harus diperiksa untuk keperluan higiene sanitasi.

Tabel II-9. Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
1.	Kekeruhan	NTU	25
2.	Warna	TCU	50
3.	Zat padat terlarut (<i>Total Dissolved Solid</i>)	mg/l	1000
4.	Suhu	°C	suhu udara ± 3 (22-28)
5.	Rasa	tidak berasa	-
6.	Bau	tidak berbau	-

Parameter biologi yang harus diperiksa untuk keperluan higiene sanitasi yang meliputi *total coliform dengan standar baku 50 CFU/100ml* dan *escherichia coli* dengan standar baku 0 CFU/100ml. Tabel II-3 berisi daftar parameter kimia yang harus diperiksa untuk keperluan higiene sanitasi yang meliputi 10 parameter wajib.

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Tabel II-10. Parameter Kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
1.	pH	mg/l	6,5 - 8,5
2.	Besi	mg/l	1
3.	Fluorida	mg/l	1,5
4.	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/l	500
5.	Mangan	mg/l	0,5
6.	Nitrat, sebagai N	mg/l	10
7.	Nitrit, sebagai N	mg/l	1
8.	Sianida	mg/l	0,1
9.	Deterjen	mg/l	0,05
10.	Pestisida total	mg/l	0,1

Berikut ini adalah hasil Hasil uji kualitas air sumur parameter fisik di 27 lokasi sumur Tahun 2020.

Tabel II-11. Hasil Uji Kualitas Air Sumur Parameter Fisik di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No	Lokasi Sumur	Temperatur (°c)	Kekeruhan	pH	Rasa	Bau	TDS
1	Menur	30	0,77	6,5	tdk berasa	tdk berbau	273
2	Polorejo	27	0,69	7,0	tdk berasa	tdk berbau	234
3	Pijeran Siman	28	2,55	7,0	tdk berasa	tdk berbau	264
4	Stadion	30	1,31	6,9	tdk berasa	tdk berbau	606
5	Keniten	29	0,00	6,8	tdk berasa	tdk berbau	206
6	Badegan Depan SMP	29	0,83	6,8	tdk berasa	tdk berbau	157
7	Bungkal	29	2,40	6,8	tdk berasa	tdk berbau	259
8	Slahung	28	0,24	6,5	tdk berasa	tdk berbau	269
9	Babadan Kantor	28	2,09	7,0	tdk berasa	tdk berbau	315
10	PlosoJenar	30	1,27	6,7	tdk berasa	tdk berbau	299
11	Semanding	29	0,00	7,0	tdk berasa	tdk berbau	553

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No	Lokasi Sumur	Temperatur (°c)	Kekeruhan	pH	Rasa	Bau	TDS
12	Simo	28	0,46	6,8	tdk berasa	tdk berbau	204
13	Trenceng	28	0,65	6,8	tdk berasa	tdk berbau	201
14	Suren	32	0,00	6,5	tdk berasa	tdk berbau	221
15	Candi	32	0,00	6,5	tdk berasa	tdk berbau	223
16	Totokan	28,5	2,78	6,8	tdk berasa	tdk berbau	155
17	Balong	29	0,44	6,8	tdk berasa	tdk berbau	286
18	Prayungan	33	0,0	7,0	tdk berasa	tdk berbau	266
19	Wotan 1	26	1,54	6,8	tdk berasa	tdk berbau	120
20	Gokalang	29	0,81	6,5	tdk berasa	tdk berbau	227
21	Tajug	28	2,61	7,0	tdk berasa	tdk berbau	264
22	Mrican	29	3,60	6,8	tdk berasa	tdk berbau	122
23	Jenangan Sampung	30	0,75	6,8	tdk berasa	tdk berbau	256
24	Plunturan 1	30	0,58	6,8	tdk berasa	tdk berbau	170
25	Sumber Banjarejo	28	0,04	7,0	tdk berasa	tdk berbau	143
26	Ngemplak Sawoo	28,5	0,58	6,8	tdk berasa	tdk berbau	168
27	Bungkal	29	2,40	6,8	tdk berasa	tdk berbau	259

Hasil perbandingan uji kualitas air sumur dengan baku mutu Permenkes No 32 Tahun 2017 parameter fisik adalah sebagai berikut :

1. Pada parameter fisik bau dan rasa hasil uji menunjukkan bahwa 27 lokasi sumur tidak berbau dan tidak berasa sehingga dapat dinyatakan memenuhi standar baku mutu (Tabel II-4).
2. Hasil uji parameter kekeruhan pada tertinggi yaitu sumur Mrican dengan 3.60 NTU dimana hasil tersebut jauh dibawah standar baku mutu yaitu 25 NTU sehingga dapat dinyatakan memenuhi standar baku mutu.
3. Pada parameter fisik temperature hasil uji menunjukkan bahwa 27 lokasi sumur sebagian besar tidak memenuhi standart baku mutu suhu sumur yaitu 28°C. Kemudian beberapa sumur yang memenuhi

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

standart baku mutu yang memiliki suhu tidak lebih dari 28 °C yaitu terdapat 9 sumur.

4. Pada parameter fisik warna hasil uji menunjukkan bahwa 27 lokasi sumur tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pengujian.
5. TDS merupakan ukuran zat terlarut (baik zat organik maupun anorganik) yang terdapat pada sebuah larutan. Umumnya berdasarkan definisi tersebut, seharusnya zat yang terlarut air (larutan) harus **melewati saringan yang berdiameter 22 µm. Parameter fisik TDS hasil uji menunjukkan bahwa 27 lokasi sumur memenuhi baku mutu dimana seluruh lokasi sumur mempunyai hasil uji TDS <1000 mg/l TCU. Hasil TDS tertinggi yaitu sebesar 606 mg/l yang terdapat pada lokasi stadion, sedangkan hasil terendah terdapat pada lokasi wotan 1 yaitu sebesar 120 mg/l.**

Berikut adalah grafik Hasil uji kualitas air sumur 27 lokasi parameter kimia (Nitrat atau NO₃ sebagai N, Fe, Mn, Flourida, Nitrit sebagai N) Kabupaten Ponorogo.

Tabel II-12. Hasil Uji Kualitas Air Sumur Parameter Fisik di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No	Lokasi Sumur	NO3 sebagai N (mg/L)	Baku Mutu NO3 sebagai N (mg/L)
1	Menur	0,0	10
2	Polorejo	0,0	10
3	Pijeran Siman	0,0	10
4	Stadion	-	10
5	Keniten	-	10
6	Badegan Depan SMP	-	10
7	Bungkal	0,0	10
8	Slahung	-	10
9	Babadan Kantor	0,0	10
10	PlosoJenar	-	10

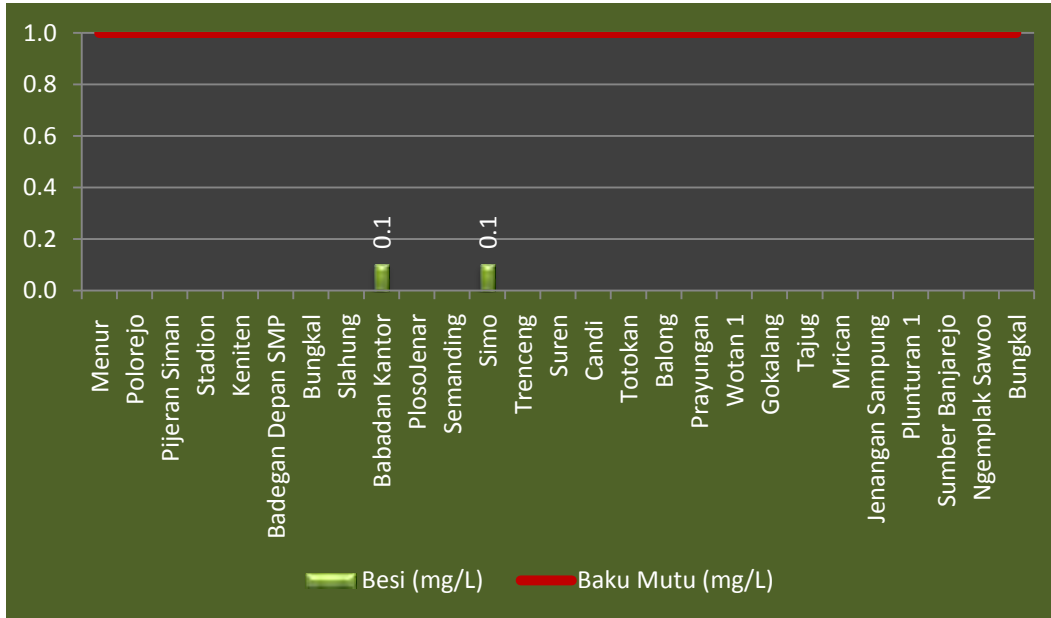
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No	Lokasi Sumur	NO3 sebagai N (mg/L)	Baku Mutu NO3 sebagai N (mg/L)
11	Semanding	-	10
12	Simo	0,0	10
13	Trenceng	0,0	10
14	Suren	0,0	10
15	Candi	0,0	10
16	Totokan	-	10
17	Balong	-	10
18	Prayungan	0,0	10
19	Wotan 1	0,0	10
20	Gokalang	0,0	10
21	Tajug	0,0	10
22	Mrican	0,0	10
23	Jenangan Sampung		10
24	Plunturan 1	0,0	10
25	Sumber Banjarejo	-	10
26	Ngemplak Sawoo	-	10
27	Bungkal	0,0	10

Sumber: PDAM Kab. Ponorogo, 2020

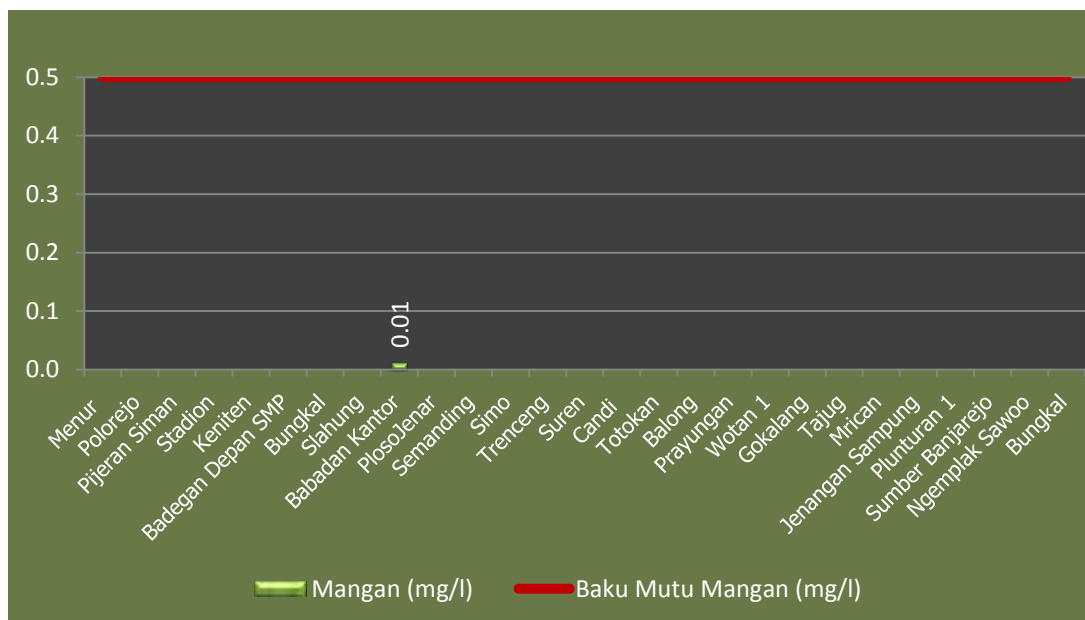
Dari Gambar diatas menunjukkan bahwa sebanyak 27 lokasi sumur memenuhi baku mutu dimana mempunyai hasil Nitrat sebagai N <10 mg/l yaitu sebesar 0. Sedangkan untuk lokasi lainnya tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pengujian.

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



Gambar II-30. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sumur Kabupaten Ponorogo Parameter Kimia Besi (Fe)

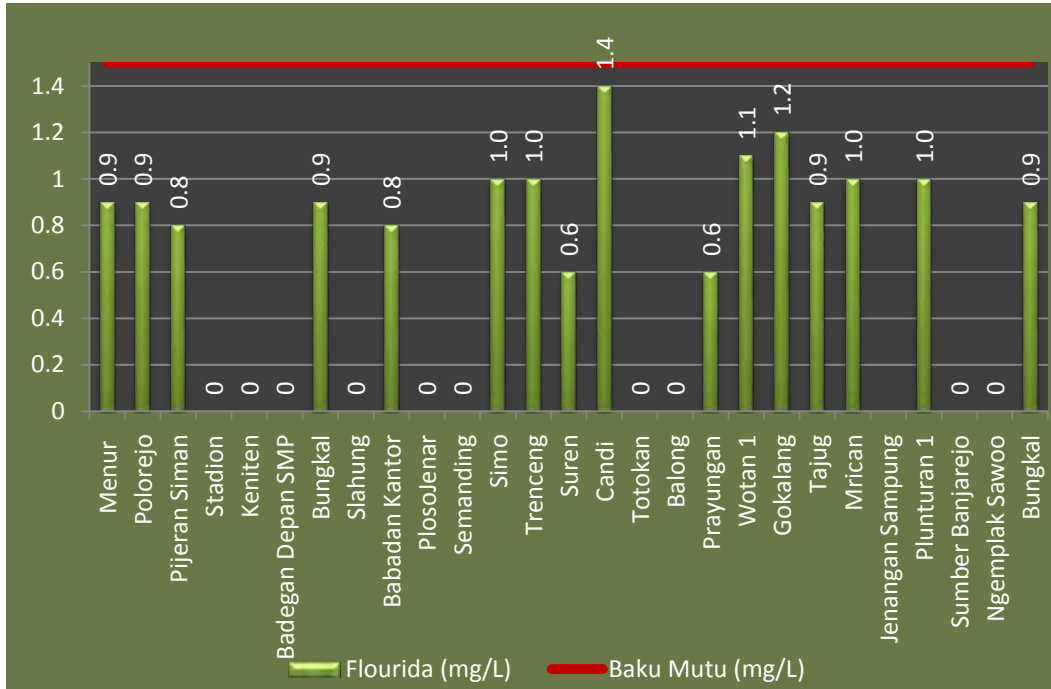
Berdasarkan Gambar diatas tersebut dapat diketahui bahwa kualitas air sumur lokasi Babadan kantor dan simo selama pemantauan Tahun 2020 telah memenuhi baku mutu pada parameter kimia besi (Fe) sebagai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, Dan Pemandian Umum. Sedangkan untuk lokasi lainnya tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pengujian.



Gambar II-31. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sumur Kabupaten Ponorogo Parameter Kimia Mangan

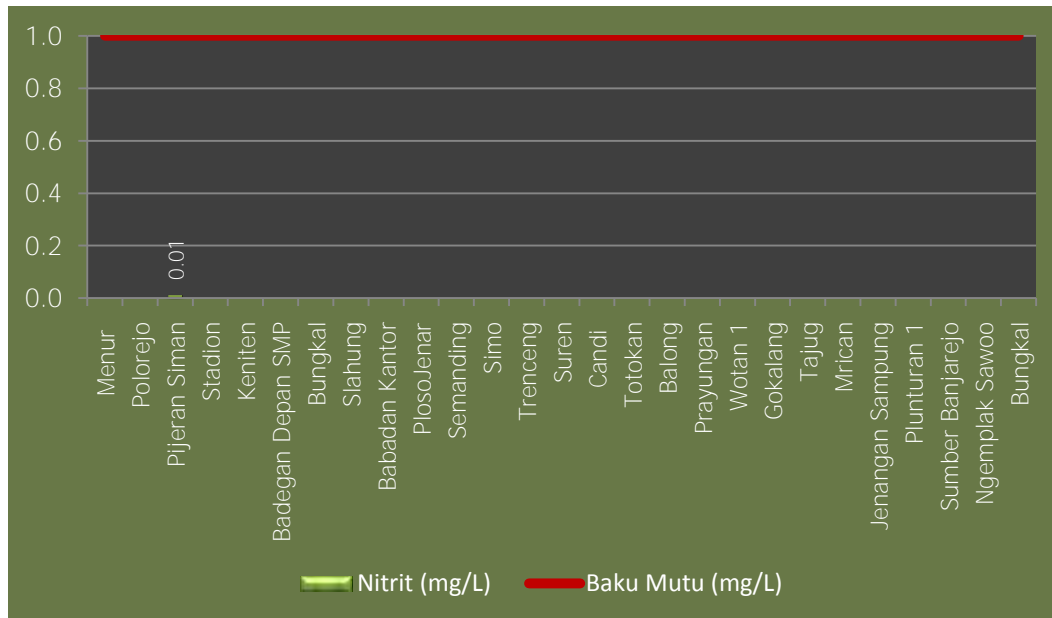
Berdasarkan Gambar diatas tersebut dapat diketahui bahwa kualitas air sumur lokasi Babadan Kantor selama pemantauan Tahun 2020 memenuhi baku mutu pada parameter kimia mangan sebagai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, Dan Pemandian Umum. Sedangkan untuk lokasi lainnya tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pengujian.

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



Gambar II-32. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sumur Kabupaten Ponorogo Parameter Kimia Flourida

Dari Gambar diatas menunjukkan bahwa beberapa lokasi sumur yang dilakukan pengujian telah memenuhi baku mutu dimana lokasi sumur tersebut mempunyai hasil flourida <1,5 mg/l. Sedangkan untuk lokasi yang tidak mempunyai nilai tidak dapat disimpulkan karena tidak adanya data.



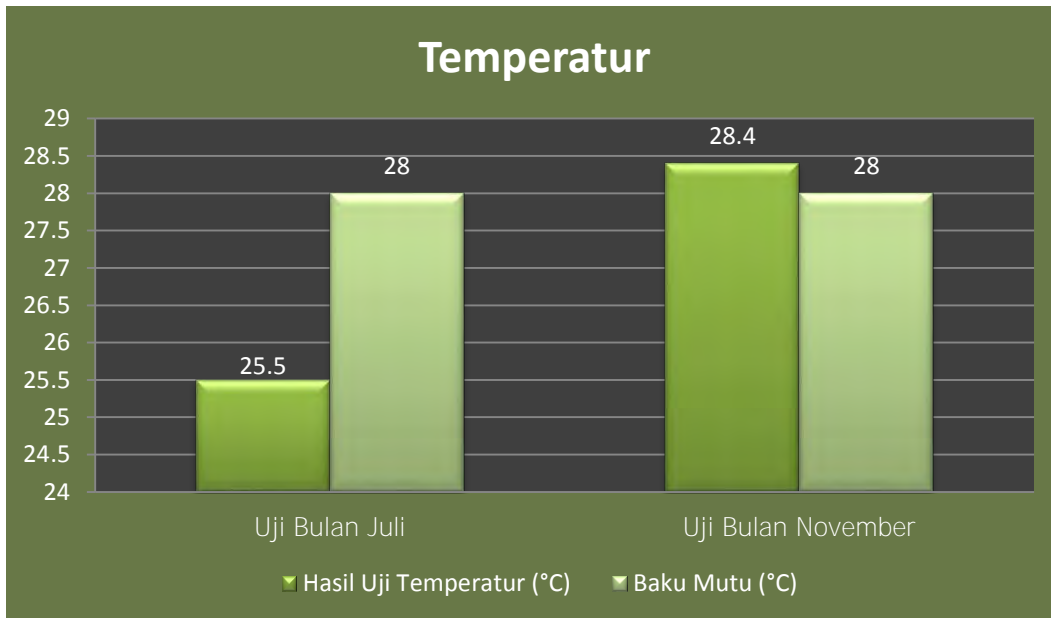
Gambar II-33. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sumur Kabupaten Ponorogo Parameter Kimia Nitrit sebagai N

Berdasarkan Gambar diatas tersebut dapat diketahui bahwa kualitas air beberapa lokasi sumur yang dilakukan pengujian telah memenuhi baku mutu memenuhi baku mutu pada parameter kimia nitrit sebagai N sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, Dan Pemandian Umum.

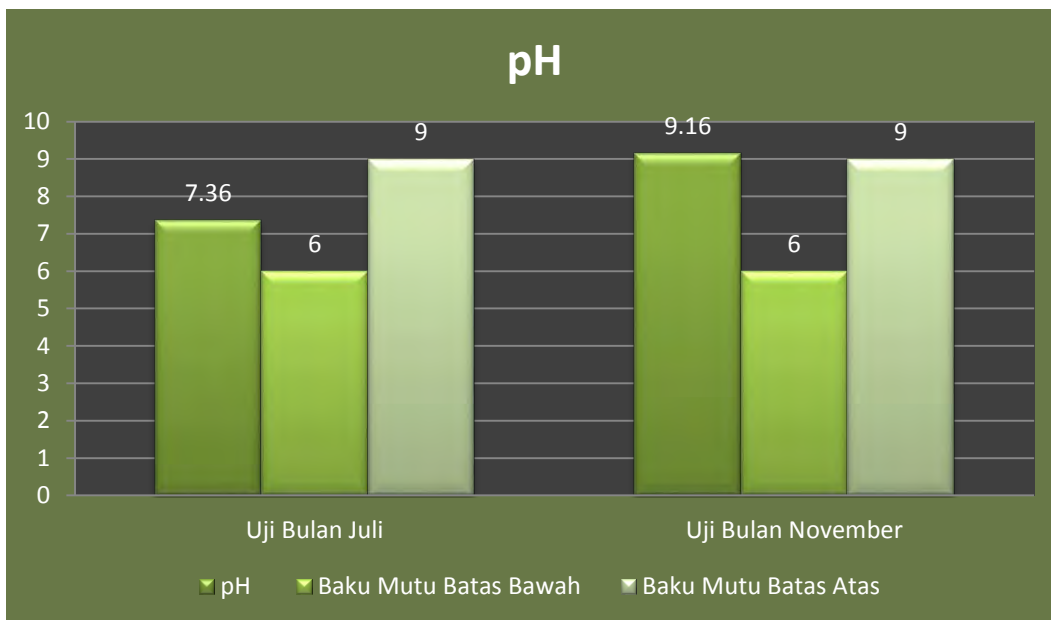
2. Kualitas Air Danau

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo melakukan uji kualitas air Danau Telaga Ngebel sebanyak 2 kali dalam Tahun 2020. Uji kualitas air yang pertama dilaksanakan pada bulan Juli, untuk uji yang kedua dilakukan pada bulan November Tahun 2020. Berikut ini adalah hasil uji kualitas air Telaga Ngebel.

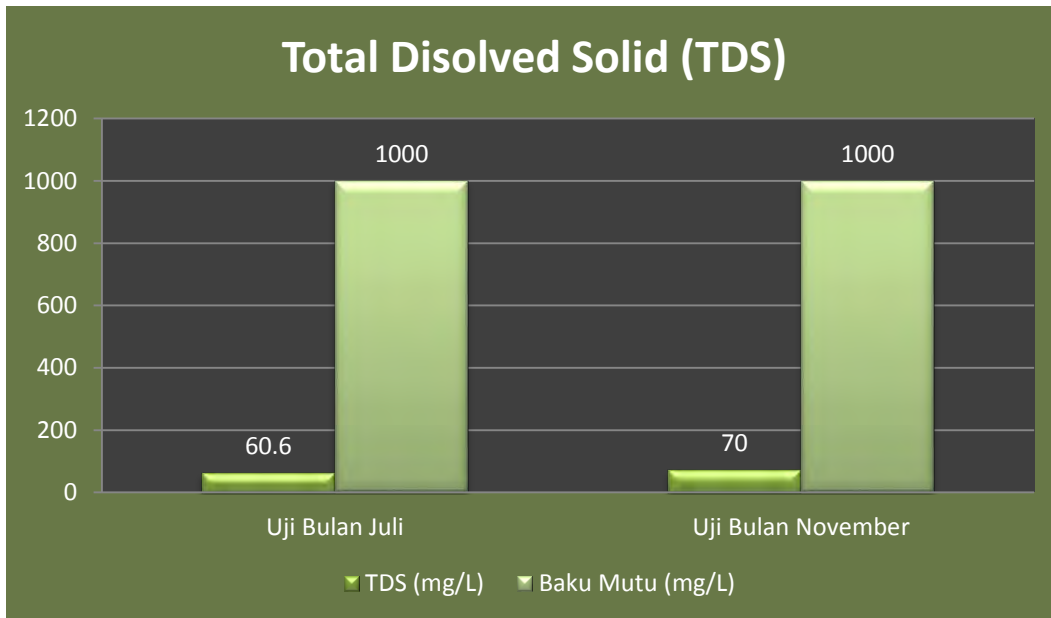
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



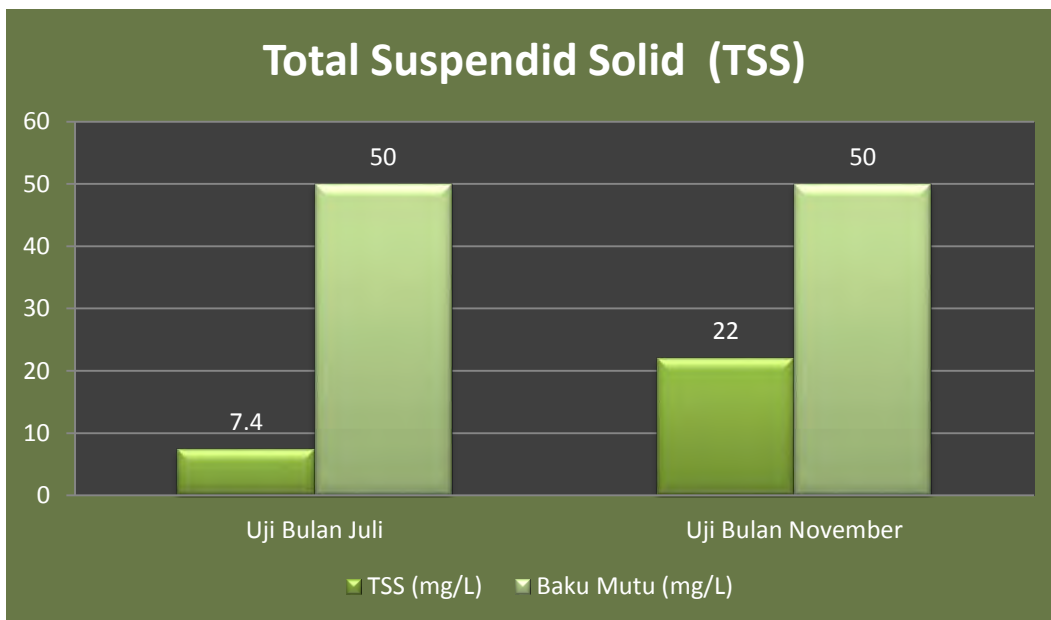
Gambar II-34. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter Temperatur



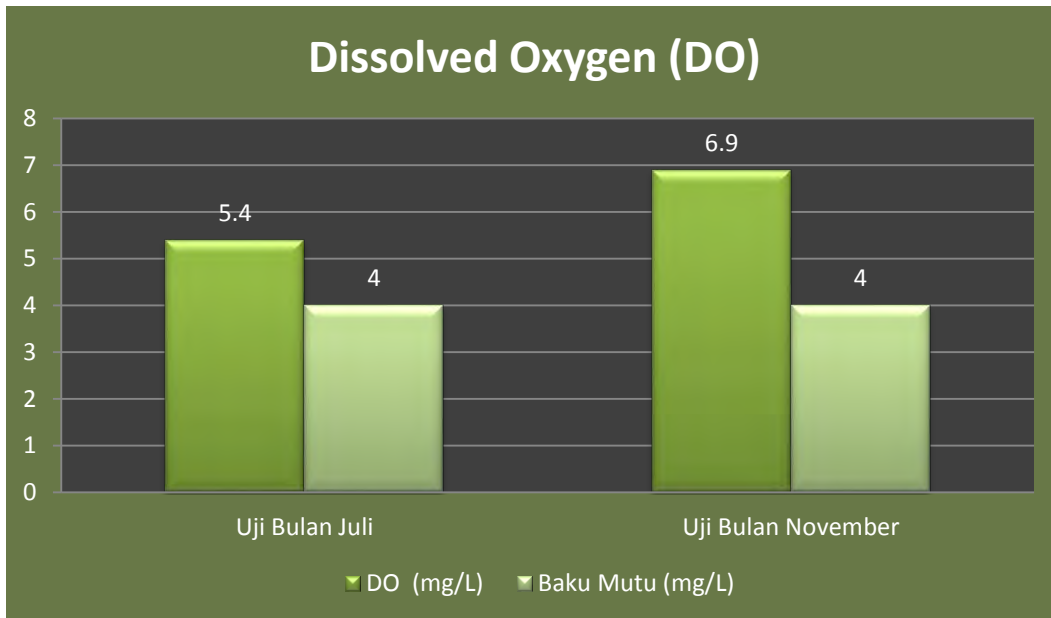
Gambar II-35. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter pH



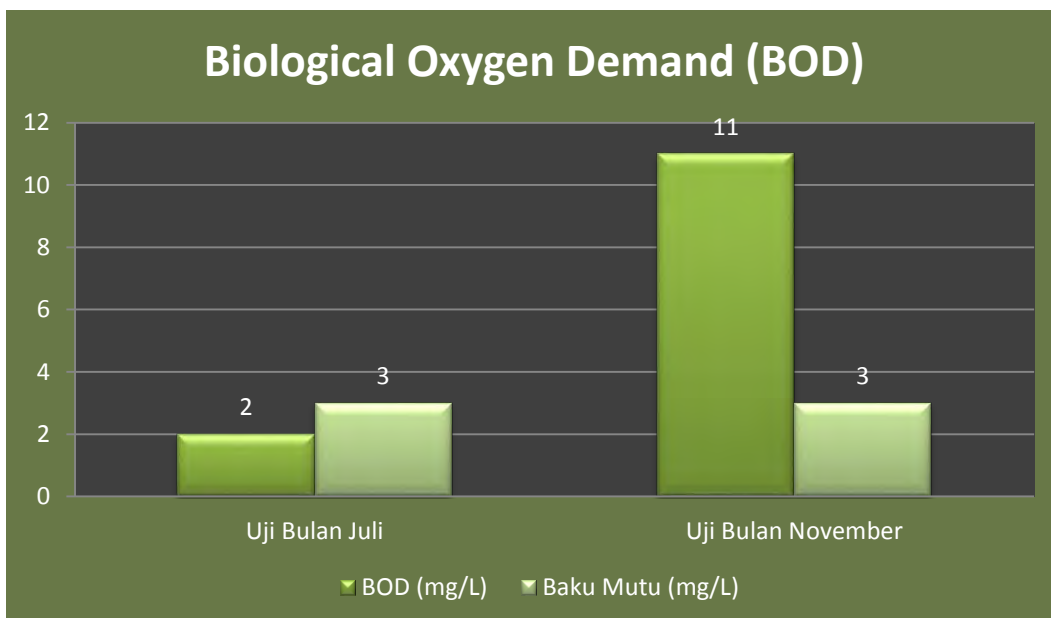
Gambar II-36. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter TDS



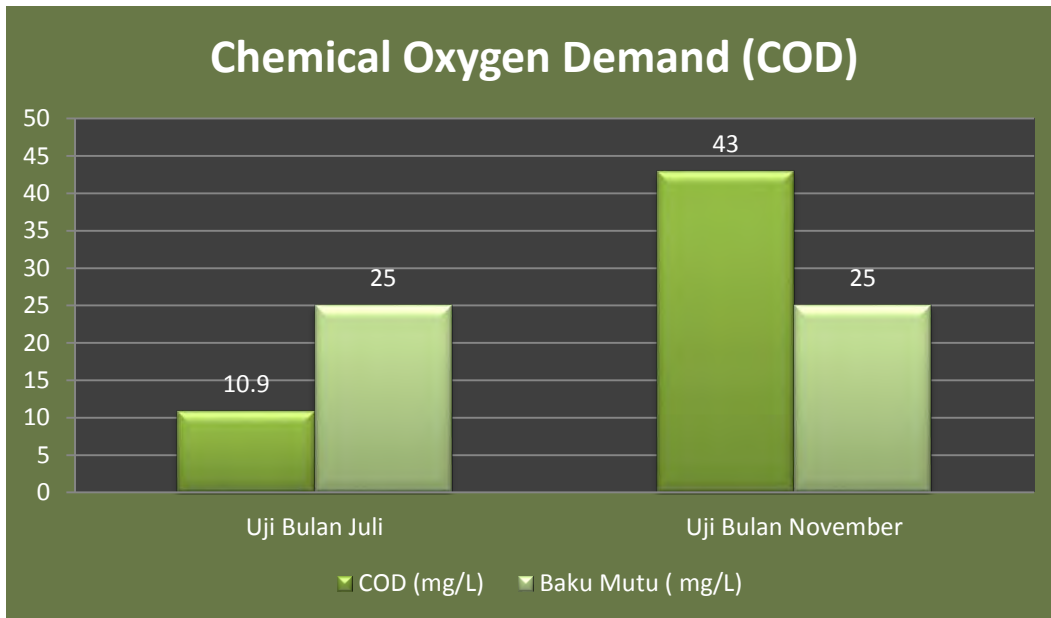
Gambar II-37. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter TSS



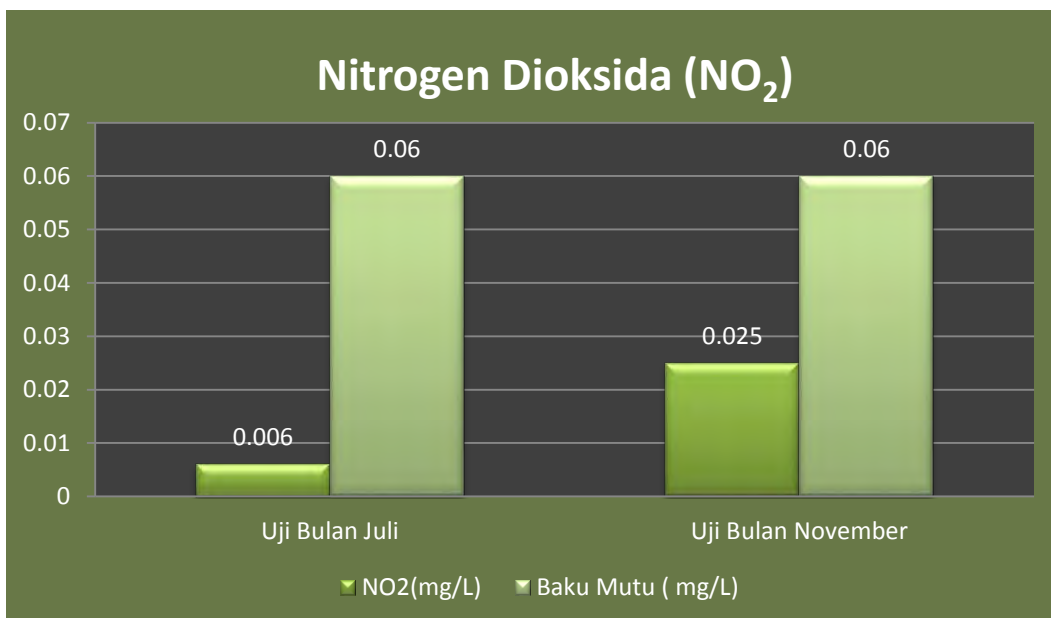
Gambar II-38. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter DO



Gambar II-39. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter BOD

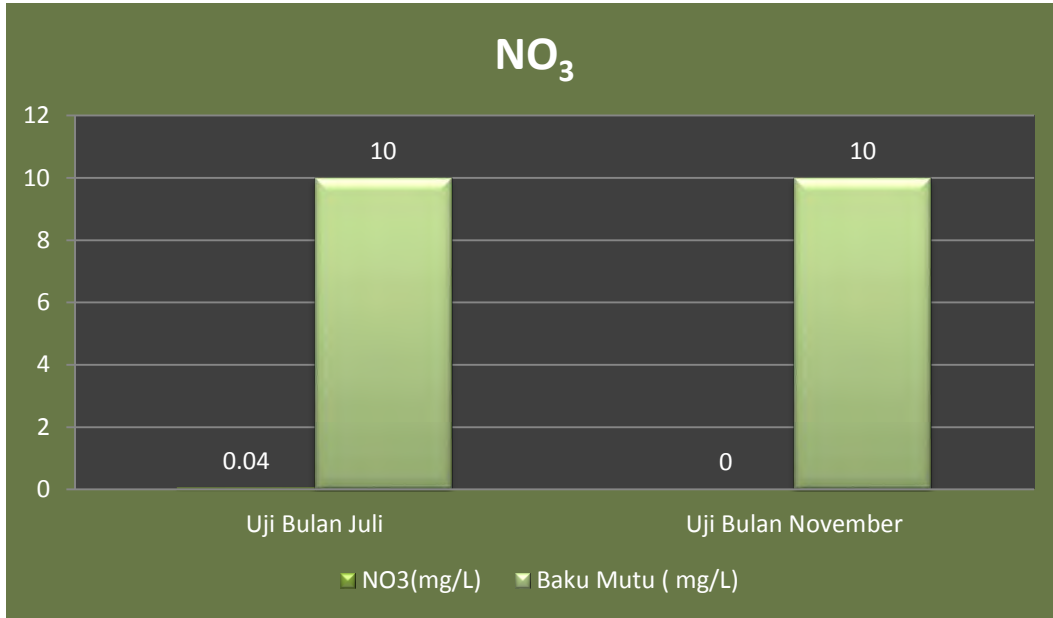


Gambar II-40. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter COD

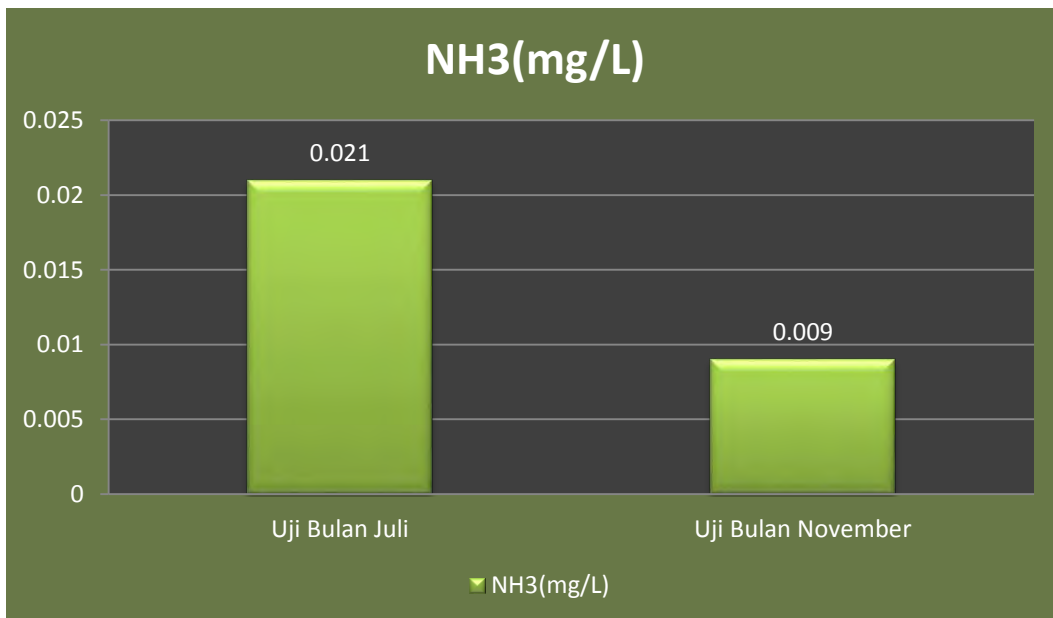


Gambar II-41. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter NO₂

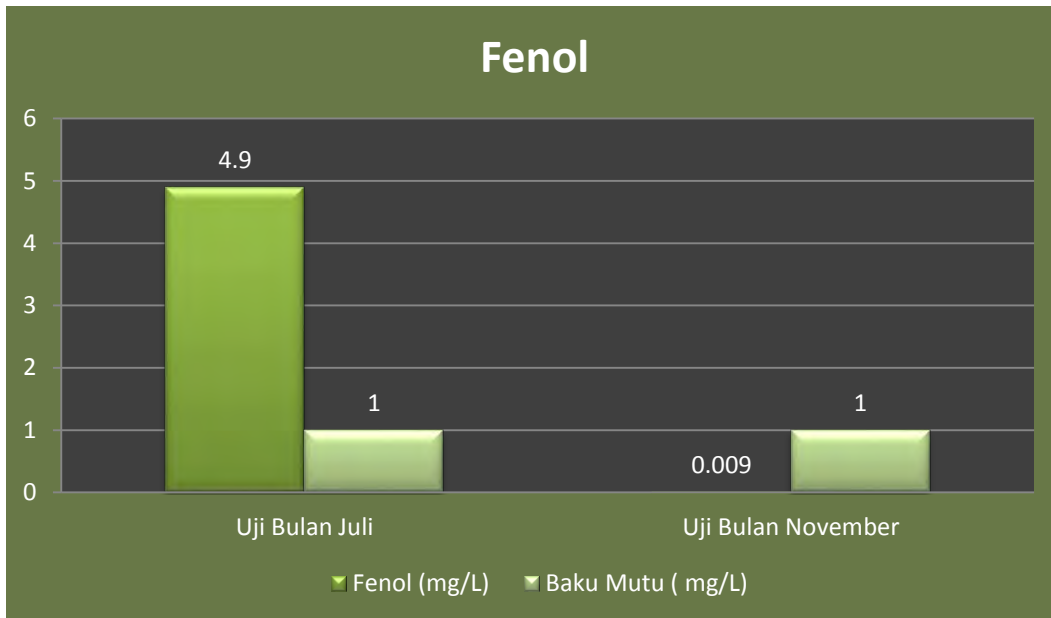
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



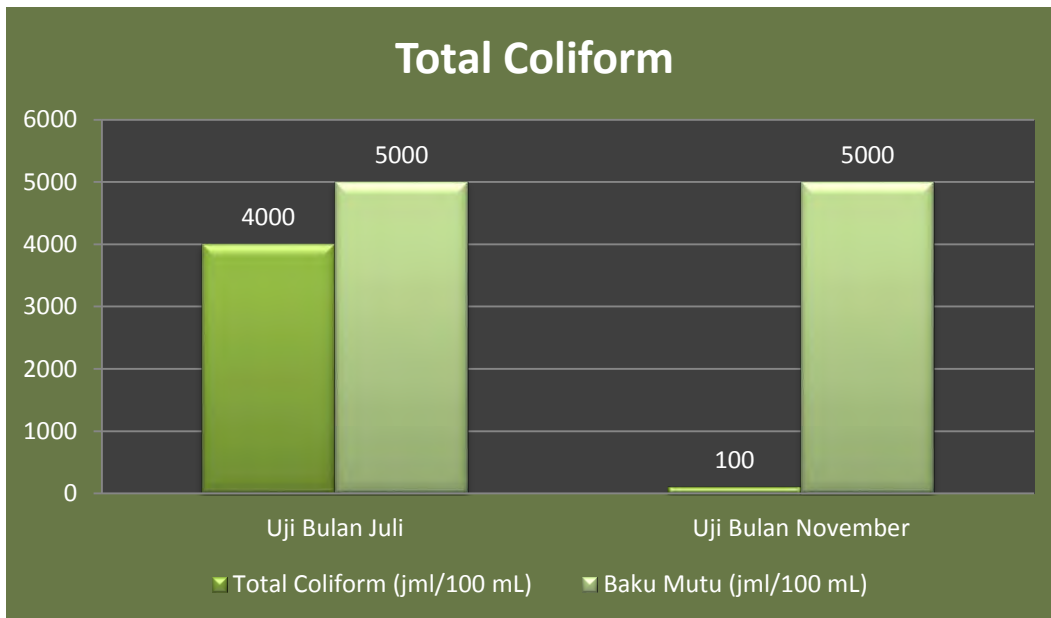
Gambar II-42. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter NO_3



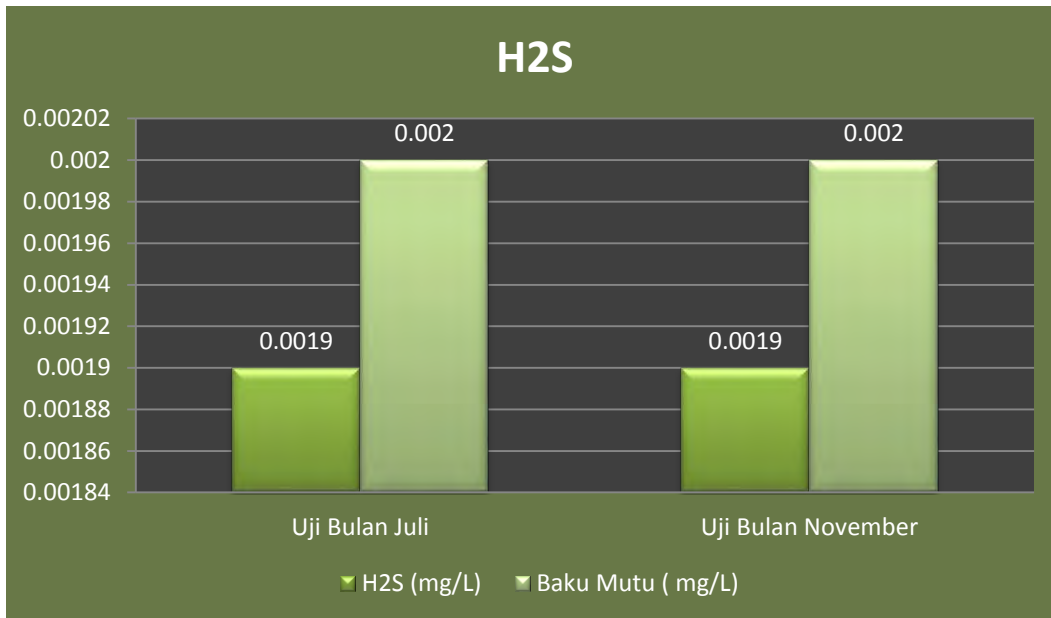
Gambar II-43. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter NH_3



Gambar II-44. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter Fenol



Gambar II-45. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter Total Coliform



Gambar II-46. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Parameter H₂S

Hasil uji kualitas air Telaga Ngebel (**Lampiran Tabel 30**) akan dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan peraturan tersebut Telaga Ngebel masuk kedalam klasifikasi mutu air kelas II yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Standar baku mutu yang digunakan meliputi parameter fisik, kimia dan biologi. Berikut ini adalah Tabel II-5 Parameter fisik, kimia dan biologi yang digunakan :

Tabel II-13. Parameter Fisik, Kimia, Biologi Hasil Uji Air Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

PARAMETER	SATUAN	KELAS II
FISIKA		
Temperatur	°C	Deviasi 3
Residu Terlarut	mg/L	1000
Residu Tersuspensi	mg/L	50
Kimia Anorganik dan Organik		
pH	mg/L	6-9
BOD	mg/L	3
COD	mg/L	25
DO	mg/L	4
N02	mg/L	0.06
NO3 sebagai N	mg/L	10
NH3-N	mg/L	-
Fenol	mg/L	1
Minyak dan Lemak	mg/L	1000
H2S	mg/L	0.002
Biologi		
Total Coliform	Jml/100 mL	5000

Hasil perbandingan uji kualitas air Telaga Ngebel dengan baku mutu Perda Jatim No 2 Tahun 2008 klasifikasi mutu air kelas II secara keseluruhan berada dibawah nilai baku mutu, kecuali pada beberapa parameter yaitu NH3, BOD dan Temperatur. Pada parameter DO jika semakin besar nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar, sehingga kualitas air Telaga Ngebel untuk parameter DO memenuhi nilai baku mutu.

Nilai standart Baku Mutu NH₃ berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur Kelas II yaitu 0

mg/L. Hasil Analisis Parameter NH_3 Kualitas air Telaga Ngebel titik sampel Pemantauan I dan titik sampel Pemantauan II adalah <0.002 dapat dilihat pada Gambar Grafik pemantauan hasil uji NH_3 .

Nilai standart Baku Mutu BOD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur Kelas II yaitu 3 mg/L. Hasil Analisis Parameter BOD Kualitas air Telaga Ngebel titik sampel Pemantauan I dan titik sampel Pemantauan II adalah 2 dan 11 dapat dilihat pada Grafik Pemantauan uji BOD.

Sedangkan Nilai standar Baku Mutu Temperatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur Kelas II yaitu $22-28^\circ\text{C}$. Hasil Analisis Parameter Temperatur Kualitas air Telaga Ngebel titik sampel titik sampel Pemantauan I dan II adalah $25,5^\circ\text{C}$ dan $28,4^\circ\text{C}$ dapat dilihat pada Grafik Pemantauan uji Temperatur.

3. Kualitas Air Sungai

Kegiatan pemantauan kualitas air pada sungai merupakan salah satu upaya pencegahan pencemaran air sungai yaitu upaya untuk menjaga dan melindungi kualitas air sungai. Kualitas air sungai di Kabupaten Ponorogo dipantau berdasarkan standar baku mutu yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.

Pemantauan kualitas air sungai Tahun 2020 dilakukan di 60 titik sungai (**Lampiran Tabel 29**) pada bulan Juni dan September dengan

titik pantau hulu dan hilir. Terdapat 18 parameter yang dianalisa yaitu temperature, pH, TDS, TSS, DO, BOD, COD, NO₂, NO₃, NH₃, Fenol, Minyak dan lemak, total coliform, deterjen, fecal coliform, total coliform, sianida, dan H₂S. Berikut ini adalah daftar nama sungai dan titik pantau pada garis lintang dan bujur :

Tabel II-14. Nama Sungai dan Titik Pantau Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No	Nama Sungai	Titik Pantau		Waktu Sampling (tgl/bln/th)
1	Sungai Mungkungan Hulu	-7,873303611	111,5088942	09/11/2020
2	Sungai Mungkungan Tengah	-7,874916111	111,4930969	09/11/2020
3	Sungai Mungkungan Hilir	-7,878019167	111,4614606	09/11/2020
4	Sungai Tambak Kemangi	-7,877734167	111,4615003	09/11/2020
5	Sungai Sungkur Hilir	-7,887728056	111,46152	09/11/2020
6	Sungai Sungkur Tengah	-7,878466389	111,3771	09/11/2020
7	Sungai Sungkur Hulu	-7,869253333	111,3096094	09/11/2020
8	Anak Kali Madiun	-7,7909	111,4474281	09/11/2020
9	Sungai Cemer Hilir	-7,857026389	111,4585867	09/11/2020
10	Sungai Tambak Kemangi Hulu	-7,855710833	111,4973597	09/11/2020
11	Sungai Cemer Tengah	-7,842648611	111,5043086	09/11/2020
12	Sungai Cemer Hulu	-7,820369167	111,5518572	09/11/2020
13	Sungai Slahung Hilir	-7,873900278	111,4468706	09/11/2020
14	Sungai Gendol Hilir	-7,897846389	111,4729831	10/11/2020
15	Sungai Keang Hilir	-7,872988333	111,45	11/10/2020
16	Sungai Genting Hilir	-7,90222	111,4541797	11/10/2020
17	Sungai Keang	-7,97901	111,5775314	11/10/2020
18	Sungai Keang	-7,953533889	111,5287639	11/10/2020
19	Sungai Keang	-7,940186667	111,5681056	11/10/2020
20	Sungai Gendol Hulu	-7,920855556	111,5611186	11/10/2020
21	Sungai Gendol Tengah	-7,917961111	111,4823028	11/10/2020
22	Kali Asin Hulu	-7,868669167	111,6557408	11/10/2020
23	Sungai Keang Hulu	-7,9095375	111,6731672	11/10/2020
24	Sungai Galok Hulu	-7,798041111	111,3638917	11/10/2020
25	Kali Asin Hilir	-7,783014722	111,453775	11/10/2020
26	Kali Asin Hulu	-7,792548611	111,5699294	11/10/2020
27	Kali Asin Tengah	-7,802816111	111,5234697	11/10/2020
28	Dam Tambak Kemangi Tengah	-7,904152222	111,4862983	11/10/2020

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No	Nama Sungai	Titik Pantau		Waktu Sampling (tgl/bln/th)
29	Dam Tambak Kemangi Tengah	-7,870816667	111,4862983	07/06/2020
30	Sungai Mangkujayan Hulu	-7,873303611	111,5088942	07/06/2020
31	Sungai Mangkujayan Tengah	-7,874916111	111,4930969	07/06/2020
32	Sungai Tambak Kemangi Hilir	-7,877734167	111,4615003	07/06/2020
33	Sungai Mangkujayan Hilir	-7,878019167	111,4614606	07/06/2020
34	Sungai Gendol Hilir	-7,897846389	111,4729831	07/06/2020
35	Sungai Tambak Kemangi Hulu	-7,855710833	111,4973597	07/06/2020
36	Sungai Keang Hilir	-7,872988333	111,45	07/06/2020
37	Sungai Slahung Hilir	-7,873900278	111,4468706	07/06/2020
38	Sungai Sungkur Hilir	-7,887728056	111,46152	07/06/2020
39	Sungai Cemer Hilir	-7,857026389	111,4585867	07/06/2020
40	Sungai Keang Hulu	-7,9095375	111,6731672	07/07/2020
41	Kali asin Hulu	-7,868669167	111,6557408	07/07/2020
42	Sungai Gendol Tengah	-7,917961111	111,4823028	07/07/2020
43	Sungai Keang	-7,97901	111,5775314	07/07/2020
44	Sungai Keang	-7,953533889	111,5287639	07/07/2020
45	Sungai Keang	-7,940186667	111,5681056	07/07/2020
46	Sunagi Gendol Hulu	-7,920855556	111,5611186	07/07/2020
47	Sungai Genting Hilir	-7,90222	111,4541797	07/08/2020
48	Sungai Slahung Hulu	-8,040639444	111,3924336	07/08/2020
49	Sungai Genting Hulu	-8,0390225	111,4561628	07/08/2020
50	Sungai Genting Tengah	-7,981933889	111,4505392	07/08/2020
51	Sungai Sungkur Tengah	-7,878466389	111,3937667	07/08/2020
52	Sungai Sungkur Hulu	-7,869253333	111,3096094	07/08/2020
53	Sungai Galok Hulu	-7,798041111	111,3638917	07/08/2020
54	Sungai Galok Hilir	-7,801717778	111,4393547	07/09/2020
55	Anak Kali Madiun	-7,7909	111,4474281	07/09/2020
56	Kali Asin Hilir	-7,783014722	111,453775	07/09/2020
57	Sungai Cemer Tengah	-7,842648611	111,5043086	07/09/2020
58	Sungai Cemer Hulu	-7,820369167	111,5518572	07/09/2020
59	Kali Asin Hulu	-7,792548611	111,5699294	07/09/2020
60	Kali Asin Tengah	-7,802816111	111,5234697	07/09/2020

Hasil uji kualitas air sungai (**Lampiran Tabel 29**) akan dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur **(Tabel II-7)**, berdasarkan peraturan tersebut sungai masuk kedalam klasifikasi mutu air kelas III yaitu kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi lahan pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Standar baku mutu yang digunakan meliputi parameter fisik, kimia dan biologi. Berikut ini adalah Tabel II-7 Parameter fisik, kimia dan biologi yang digunakan :

Tabel II-15. Nama Sungai dan Titik Pantau Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

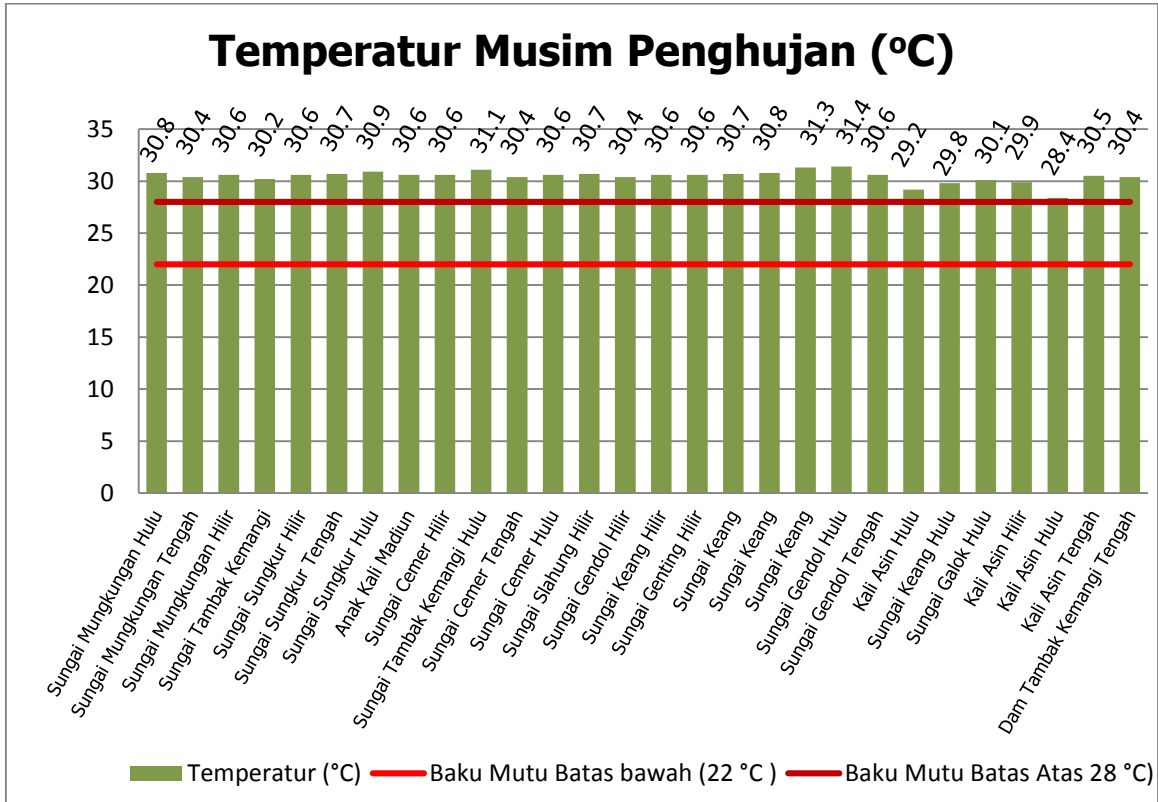
PARAMETER	SATUAN	KELAS III
FISIKA		
Temperatur	°C	Deviasi 3
Residu Terlarut	mg/L	1000
Residu Tersuspensi	mg/L	400
Kimia Anorganik dan Organik		
pH	mg/L	6-9
BOD	mg/L	6
COD	mg/L	50
DO	mg/L	3
N02	mg/L	0.06
NO3 sebagai N	mg/L	20
NH3-N	mg/L	-
Fenol	mg/L	1
Minyak dan Lemak	mg/L	1000
H2S	mg/L	0.002
Biologi		
Total Coliform	jml/100 mL	10000

Uji Kualitas sungai dalam 1 (satu) tahun, dilakukan dua kali yakni pada musim penghujan dan kemarau. Pada musim penghujan dilakukan

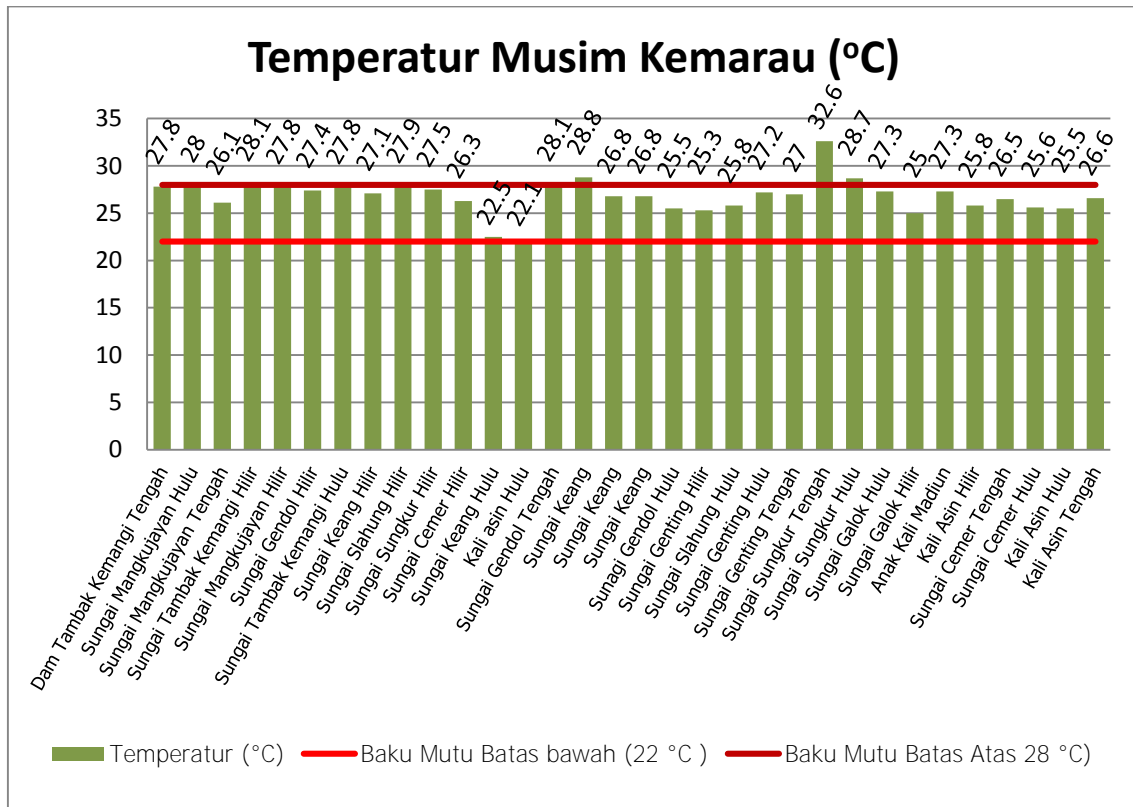
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

pada bulan Juni, Juli, Agustus, September. Sementara di musim kemarau dilakukan pengujian pada bulan Oktober dan November.

a) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter Temperatur



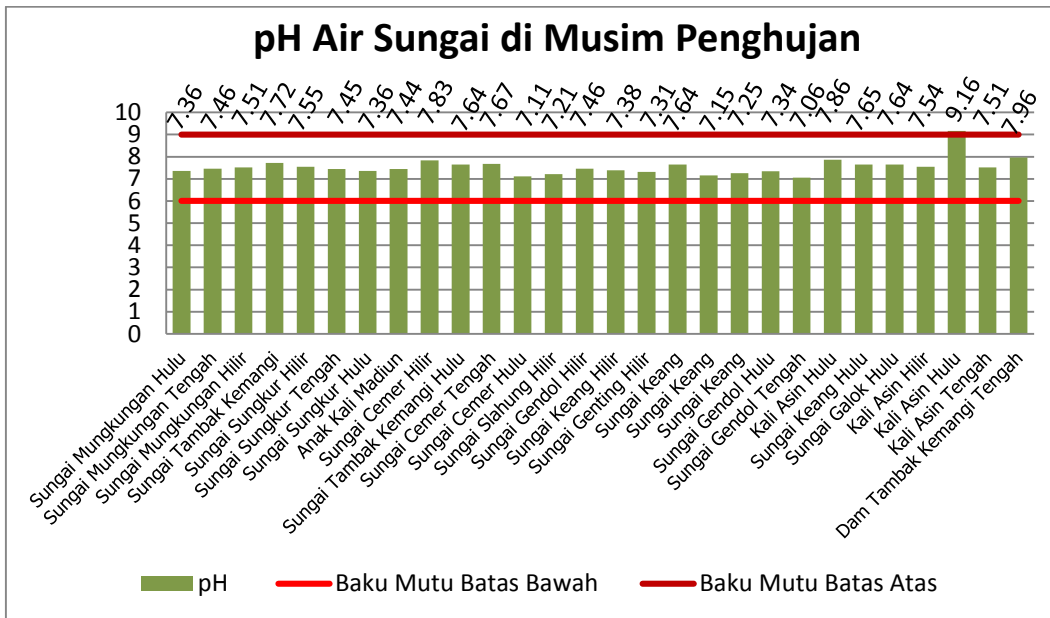
Gambar II-47. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Temperatur



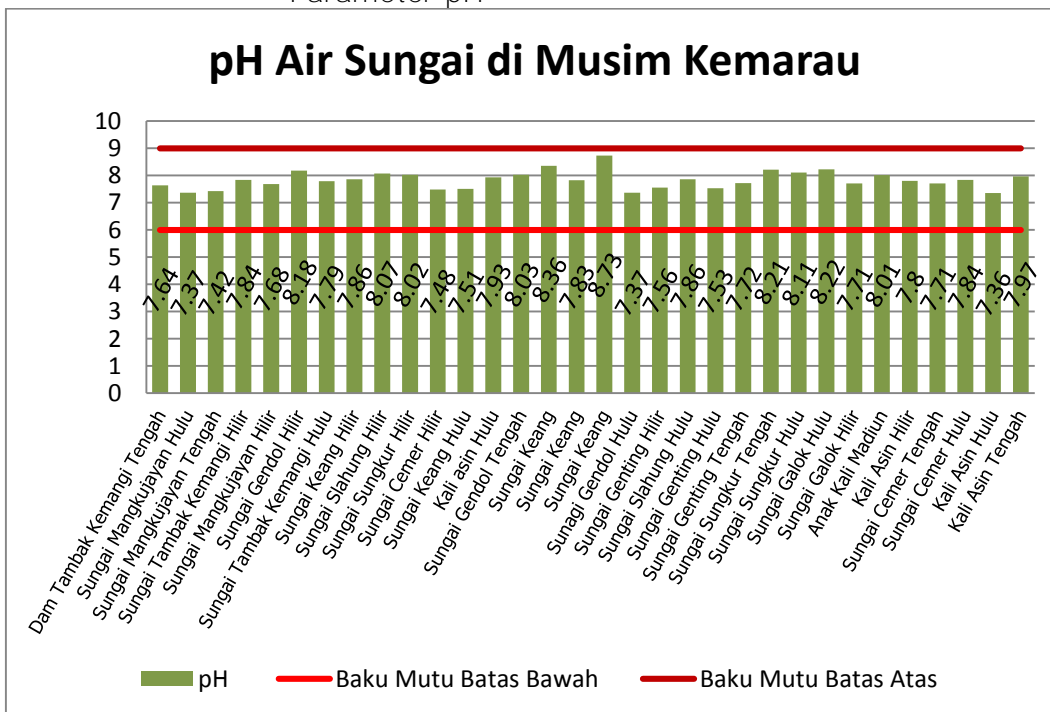
Gambar II-48. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Temperatur

Dari kedua grafik tersebut, dapat diketahui hasil pengujian kualitas air sungai Kabupaten Ponorogo pada musim penghujan dan musim kemarau. Hasil analisa parameter temperatur pada musim kemarau angka temperatur tertinggi adalah sungai sungkur tengah dengan suhu 32,6, sedangkan untuk hasil temperatur pada musim penghujan memiliki angka temperatur tertinggi adalah sungai tambak kemangi dengan temperatur 31,4.

b) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter pH



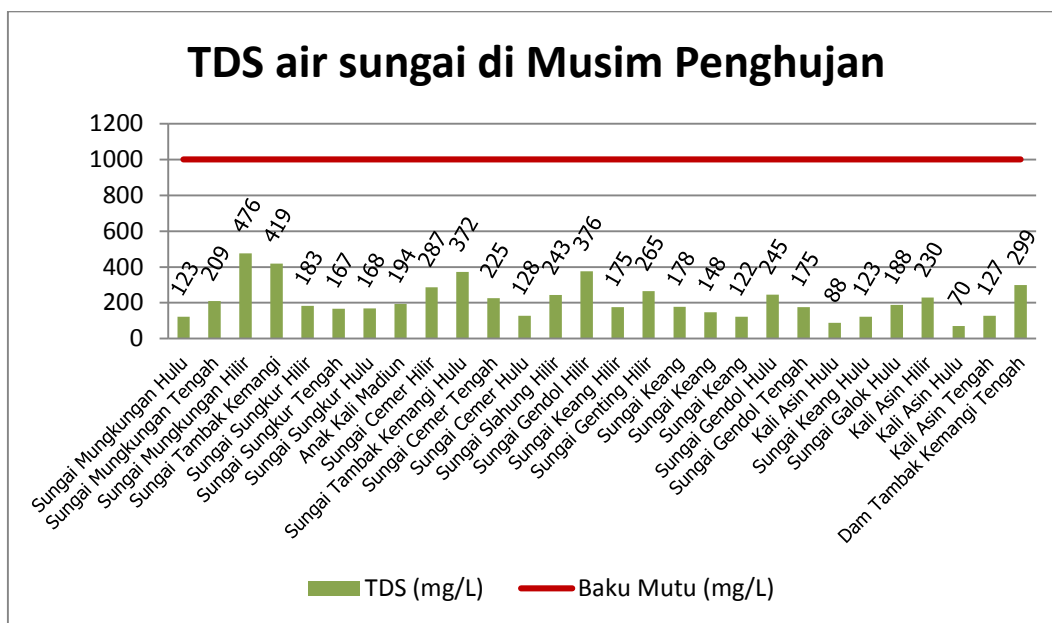
Gambar II-49. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter pH



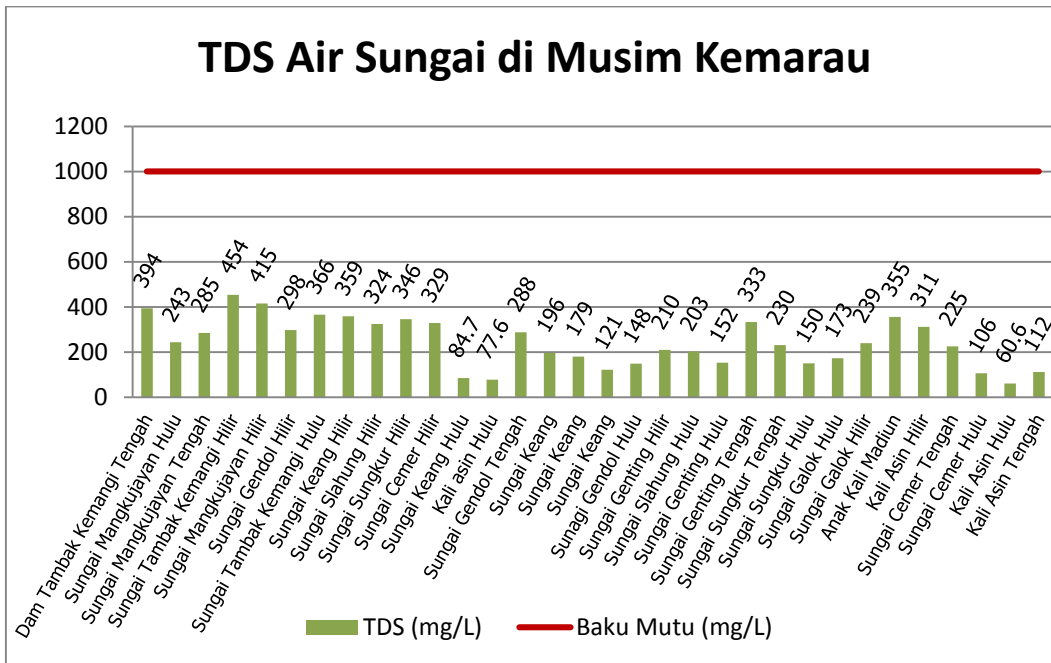
Gambar II-50. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter PH

Hasil dari uji kualitas air parameter pH baik pada musim penghujan (grafik atas) menunjukkan bahwa terdapat salah satu titik pantau sungai yang memiliki pH lebih dari baku mutu air kelas III 6-9 sebesar 9,16, sedangkan pada musim kemarau (grafik bawah) hasil uji menunjukkan bahwa pada masing-masing titik pantau sungai tidak ada yang berada di atas baku mutu air kelas III.

c) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter TDS



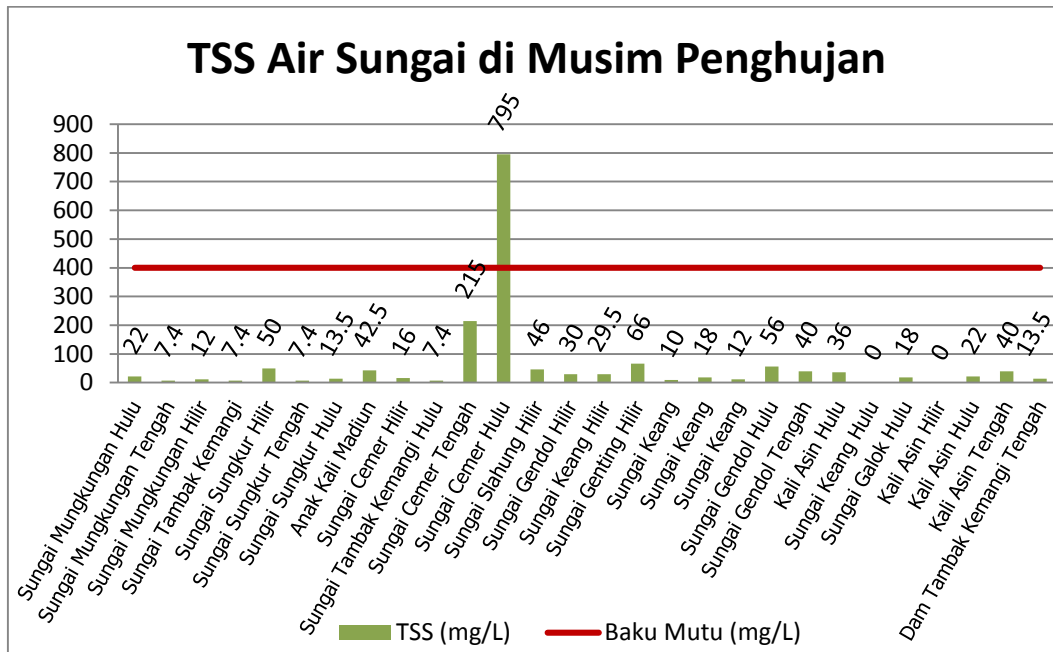
Gambar II-51. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter TDS



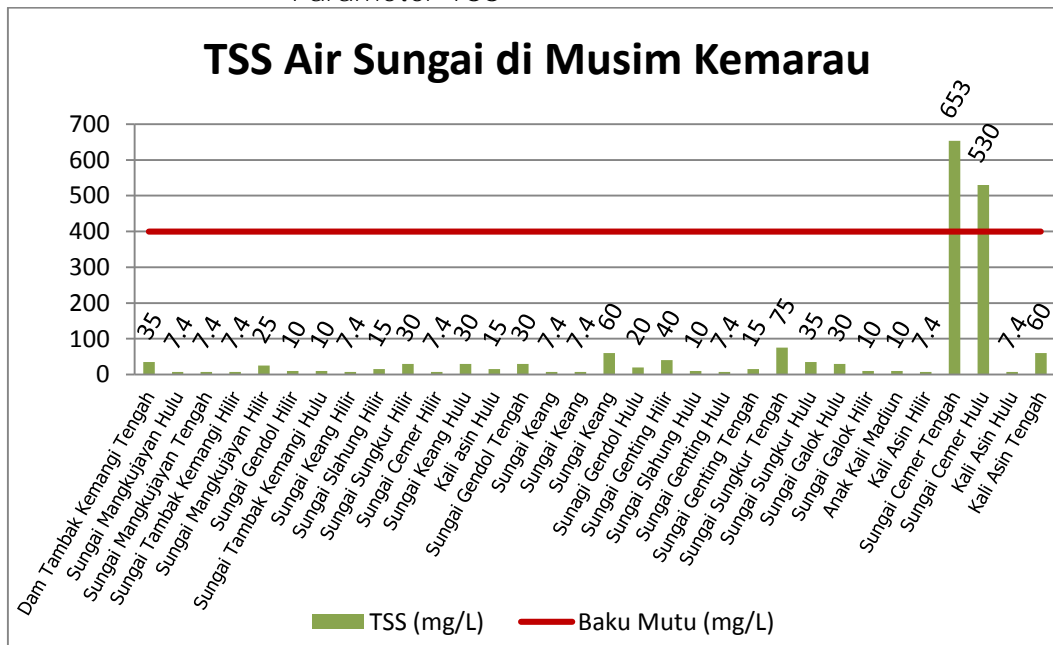
Gambar II-52. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter TDS

TDS (*Total Dissolve Solid*) merupakan ukuran zat terlarut (baik zat organik maupun anorganik) yang terdapat pada sebuah larutan. Umumnya berdasarkan definisi tersebut, seharusnya zat yang terlarut dalam air (larutan) harus dapat melewati saringan yang berdiameter 2 μm . Hasil dari uji kualitas air parameter TDS baik pada musim penghujan maupun musim kemarau seluruh hasil uji menunjukkan bahwa masing-masing angka tidak ada yang berada di atas baku mutu air kelas III. Sehingga secara keseluruhan uji kualitas air parameter TDS telah memenuhi baku mutu.

d) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter TSS



Gambar II-53. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter TSS

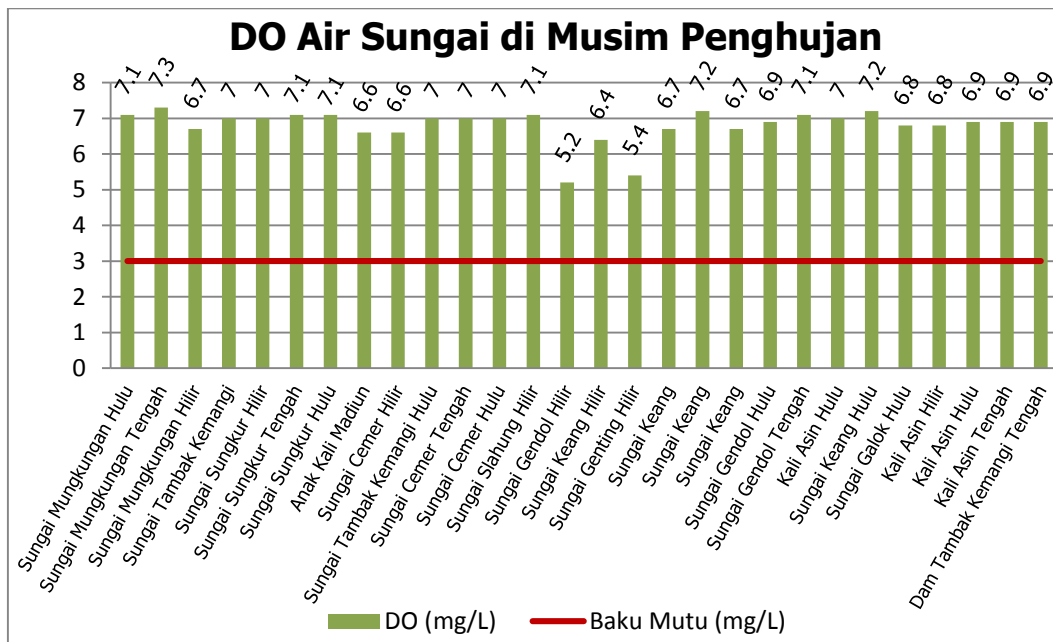


Gambar II-54. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter TSS

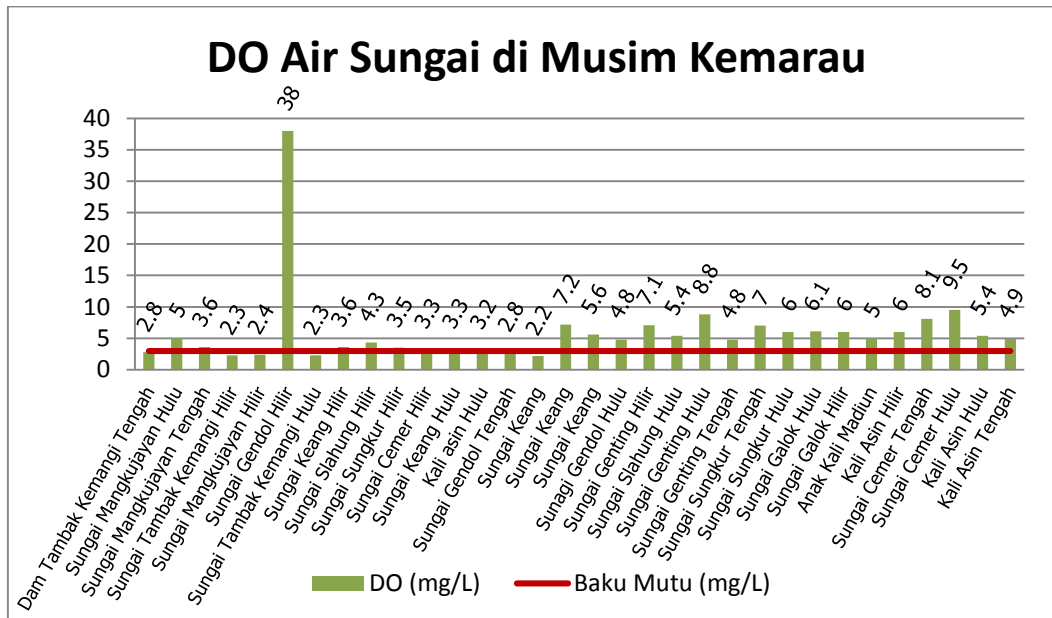
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

TSS merupakan padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan non-organik yang dapat disaring dengan kertas millipore berpori 0.45 µm. Air badan air yang memiliki angka residu tersuspensi melebihi baku mutu yang ditetapkan mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme dalam badan air. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pada musim penghujan terdapat 1 sungai yaitu sungai cemer Hulu yang memiliki hasil uji parameter TSS melebihi baku mutu air kelas III. Sedangkan pada musim kemarau terdapat 2 sungai yaitu sungai cemer tengah dan sungai cemer hulu yang memiliki hasil uji parameter TSS melebihi baku mutu air kelas III.

e) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter DO



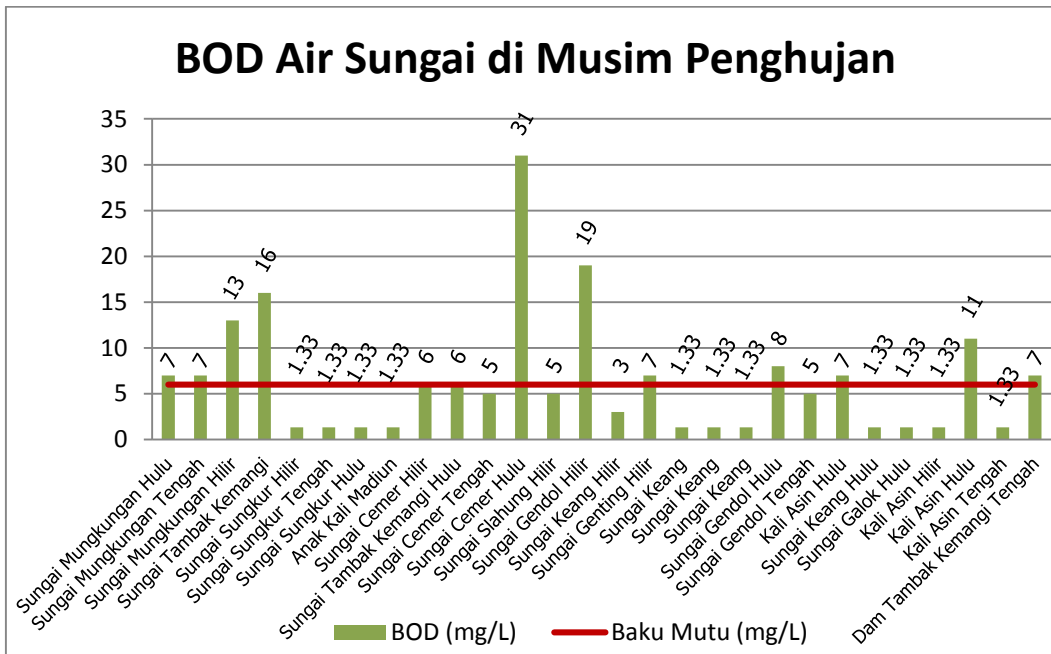
Gambar II-55. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter DO



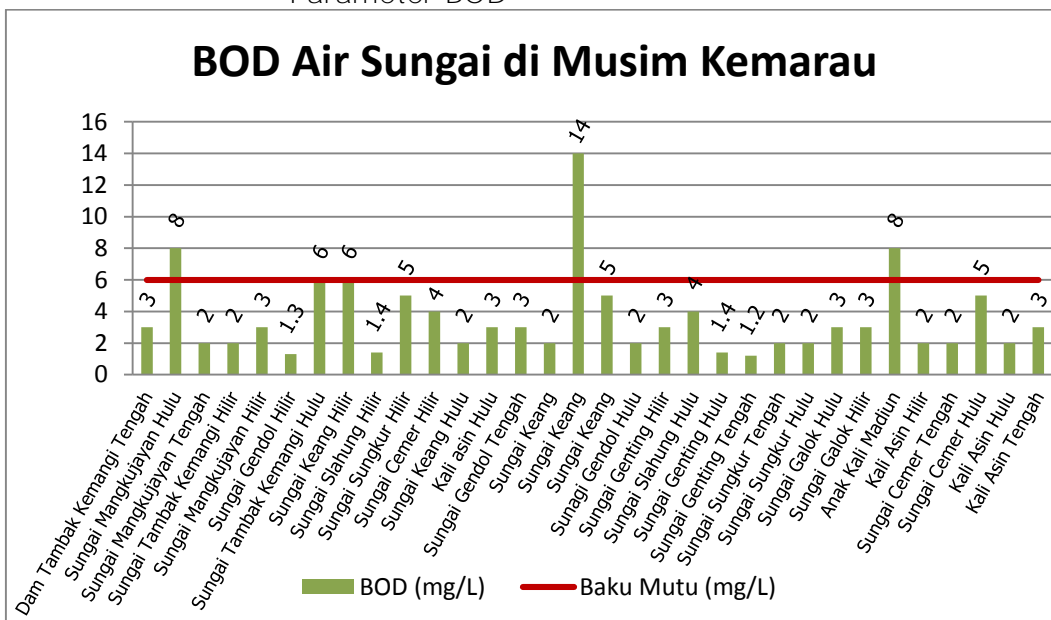
Gambar II-56. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter DO

DO (*Dissolve Oxygen*) atau oksigen terlarut merupakan salah satu parameter yang menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu badan air. Semakin besar nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Hasil dari grafik di atas diketahui bahwa pengujian pada musim penghujan hasil uji kualitas air sungai parameter DO menunjukkan nilai melebihi baku mutu air kelas III. Pada musim kemarau terdapat 3 titik pantau sungai yang memiliki hasil uji kualitas air sungai kurang dari baku mutu air kelas III yaitu sungai mbak kemangi hilir, sungai mangkujayan hilir, dan sungai keyang. Pada uraian di atas diketahui jika pada parameter DO apabila angka yang ditunjukkan melebihi batas yang ditentukan berarti kualitas air semakin bagus dan berlaku sebaliknya.

f) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter BOD



Gambar II-57. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter BOD

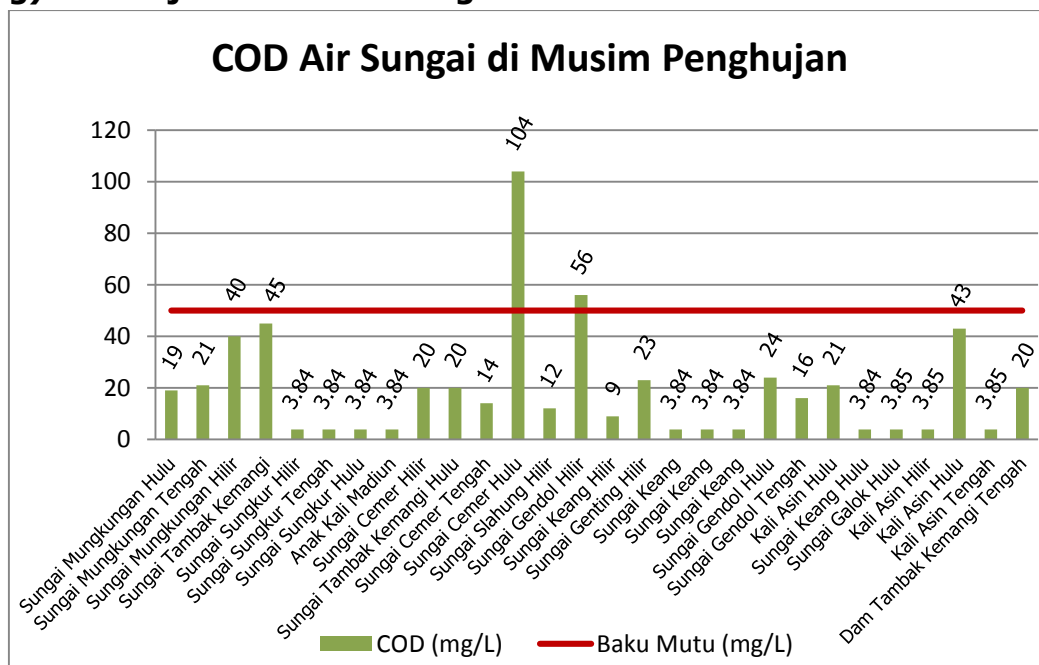


Gambar II-58. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter BOD

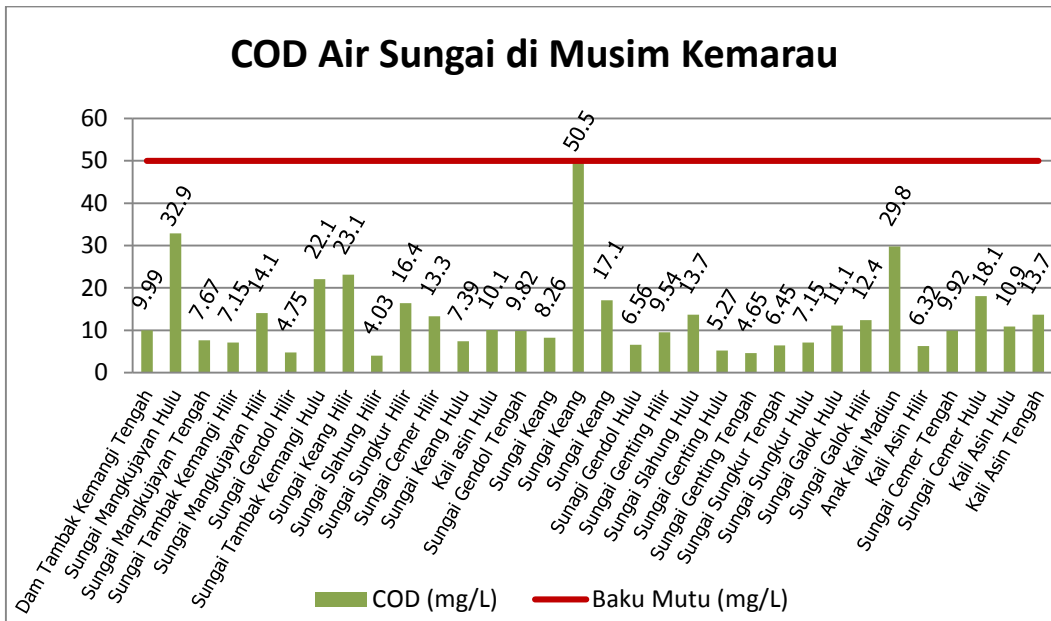
BOD atau Kebutuhan Oksigen Biologis merupakan salah satu parameter yang mengindikasikan terjadinya proses mikrobiologis yang benar – benar terjadi di dalam air. Hal ini berarti BOD merupakan ukuran konsentrasi bahan organik yang dapat dioksidasikan / dibiodegradasikan oleh bakteri. Angka BOD yang melebihi baku mutu yang ditetapkan berarti menunjukkan bahwa air badan air tersebut telah tercemar.

Hasil uji kualitas air sungai parameter BOD menunjukkan bahwa pada musim kemarau terdapat 3 sungai yang melebihi baku mutu air kelas III. BOD tertinggi pada musim kemarau yaitu ada di titik pantau sungai keyang. Pada Musim Penghujan Uji kualitas air sungai parameter BOD juga menunjukkan beberapa titik pantau sungai yang melebihi baku mutu air kelas III. Parameter BOD tertinggi yaitu terdapat di titik pantau sungai Cemer Hulu.

g) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter COD



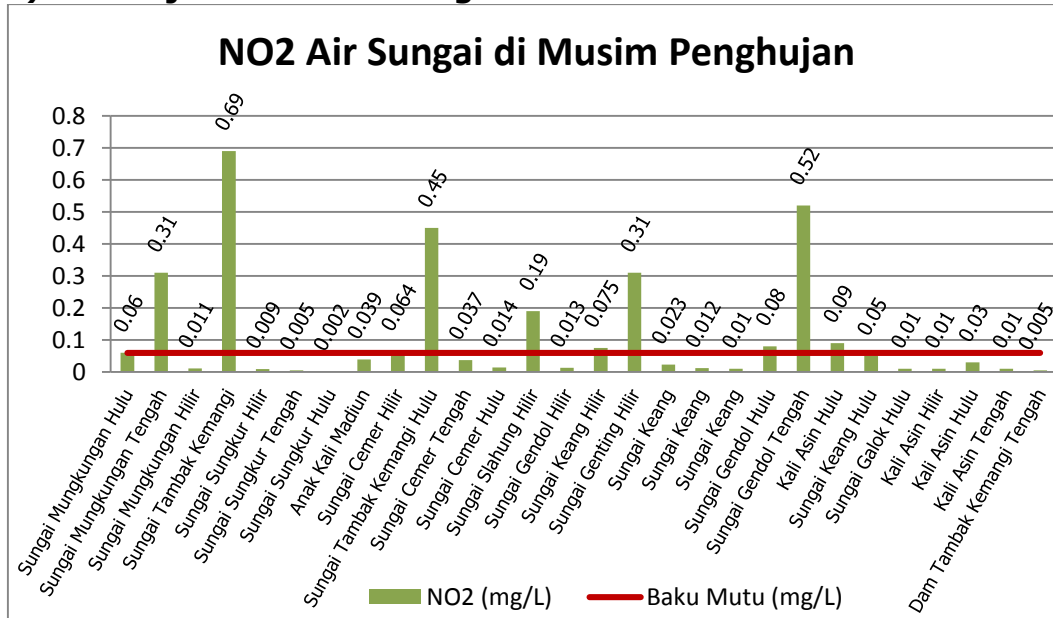
Gambar II-59. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter COD



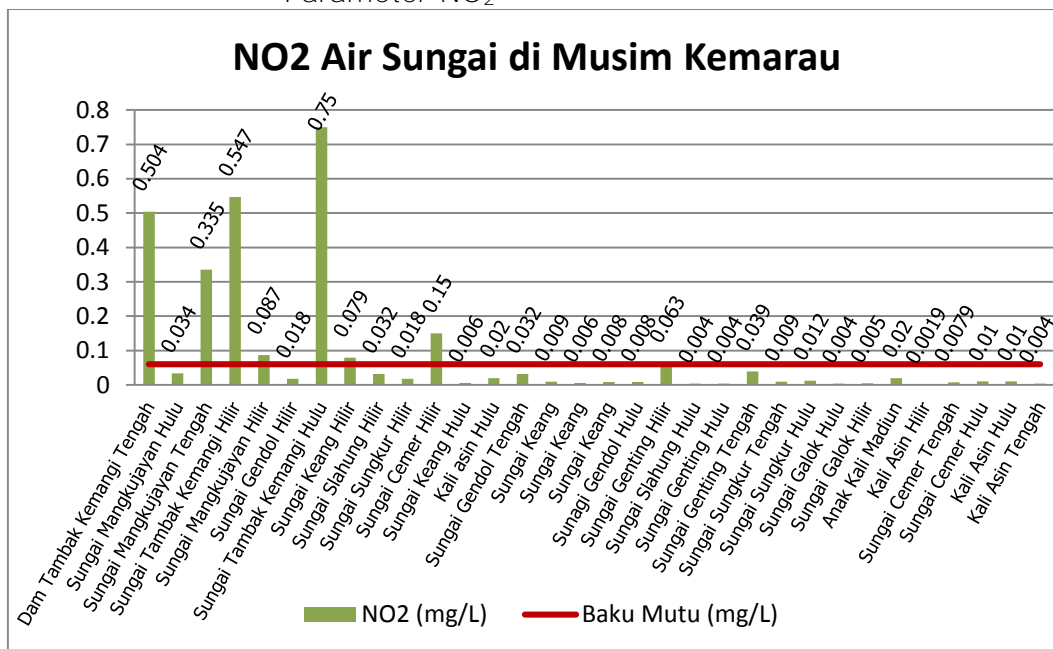
Gambar II-60. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter COD

COD atau Kebutuhan Oksigen Kimiawi merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis, dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Seperti halnya BOD, angka COD yang melebihi baku mutu yang ditetapkan berarti menunjukkan bahwa air badan air tersebut telah tercemar. Hasil dari grafik di atas diketahui bahwa secara keseluruhan pada musim kemarau terdapat 1 sungai dengan COD melebihi Baku Mutu Air air kelas III. Pada musim penghujan parameter COD juga terdapat 2 titik pantau sungai yang melebihi nilai baku mutu air kelas III yaitu terdapat di sungai pantau cemer hulu dan sungai gendol hilir.

h) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter NO₂



Gambar II-61. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NO₂

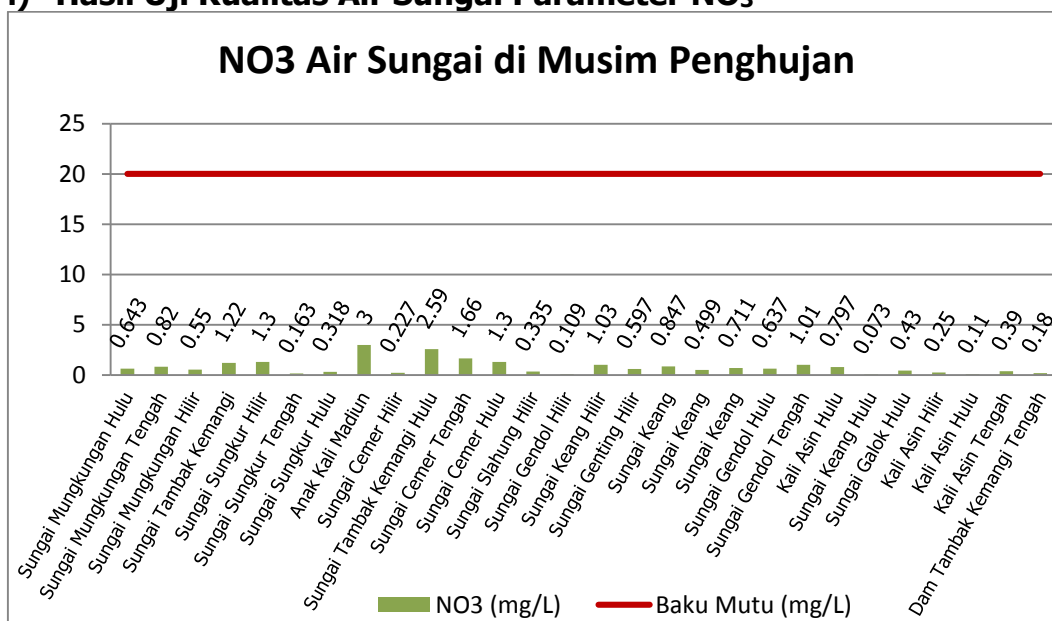


Gambar II-62. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NO₂

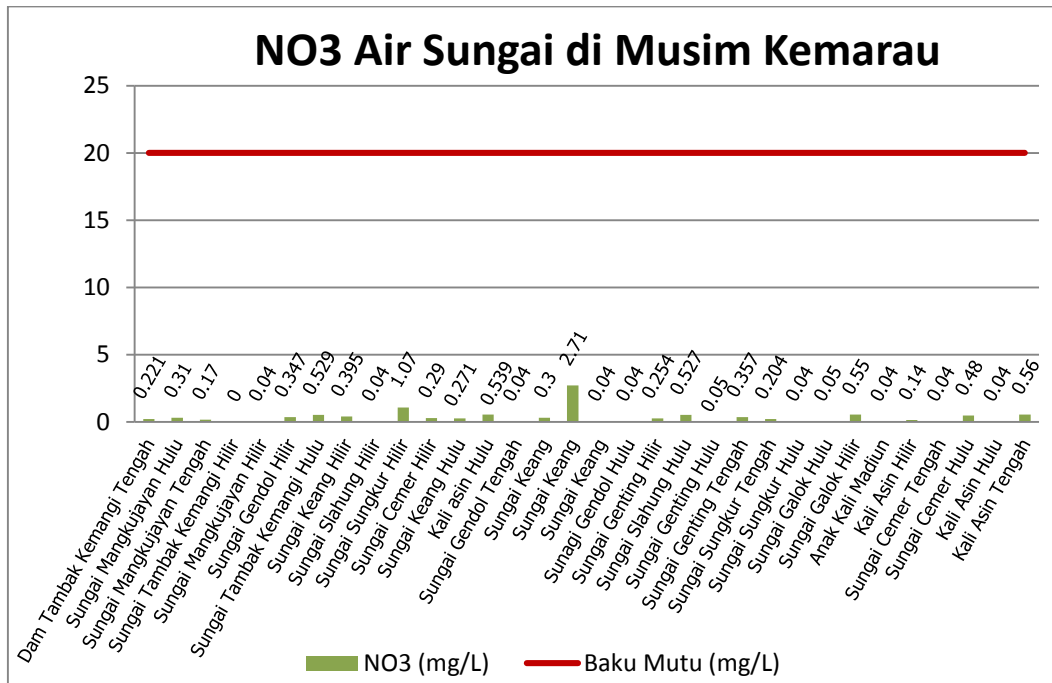
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Pada pengujian parameter NO₂ dilakukan pengujian pada musim penghujan dan musim kemarau. Dari grafik di atas terlihat pada musim penghujan terdapat 9 titik pantau sungai yang memiliki hasil uji kualitas air sungai parameter NO₂ yang melebihi baku mutu air kelas III dengan nilai tertinggi yaitu 0,69 mg/L pada titik pantau sungai Tambak Kemangi. Pada Musim Kemarau terdapat 7 titik pantau sungai yang memiliki parameter NO₂ melebihi baku mutu kelas air III.

i) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter NO₃



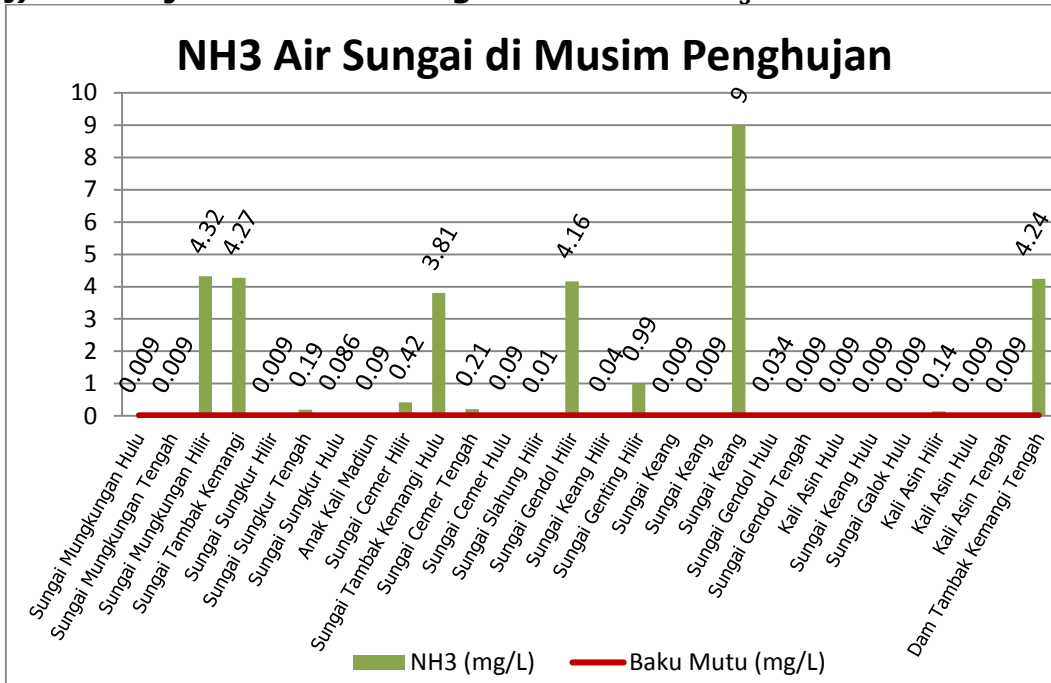
Gambar II-63. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NO₃



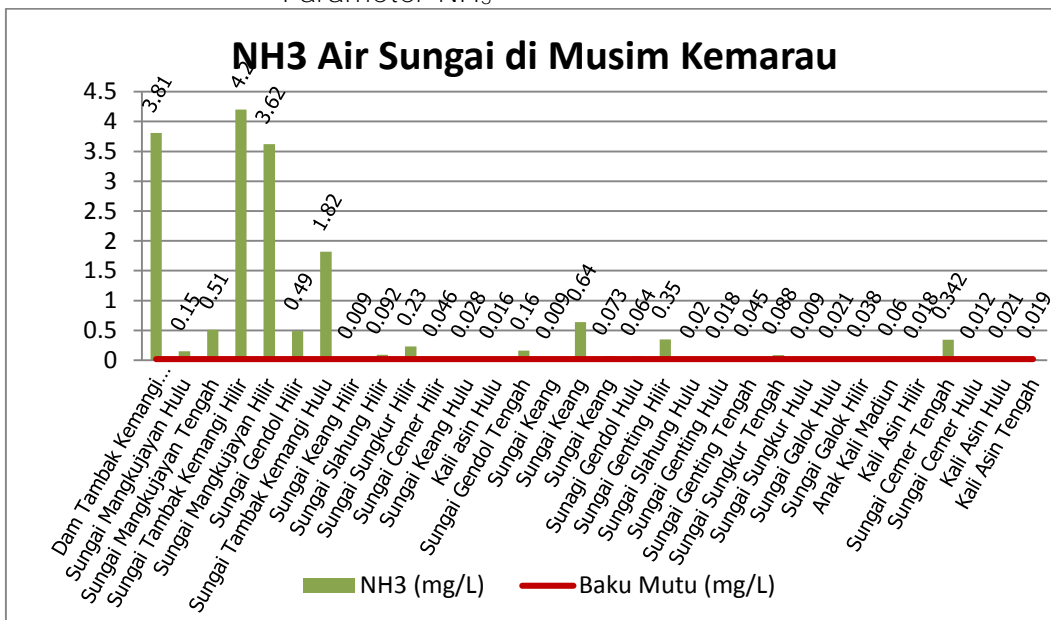
Gambar II-64. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NO₃

Hasil dari grafik di atas diketahui pada musim penghujan secara keseluruhan hasil uji kualitas air sungai parameter NO₃ berada di bawah nilai baku mutu air kelas III dengan nilai tertinggi 3 mg/L yang berada di titik pantau anak kali madiun. Begitu juga pada musim kemarau secara keseluruhan hasil uji kualitas air sungai parameter NO₃ berada di bawah nilai baku mutu air kelas III dengan nilai tertinggi yaitu 2,71 mg/L yang berada di titik pantau sungai keang.

j) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter NH_3



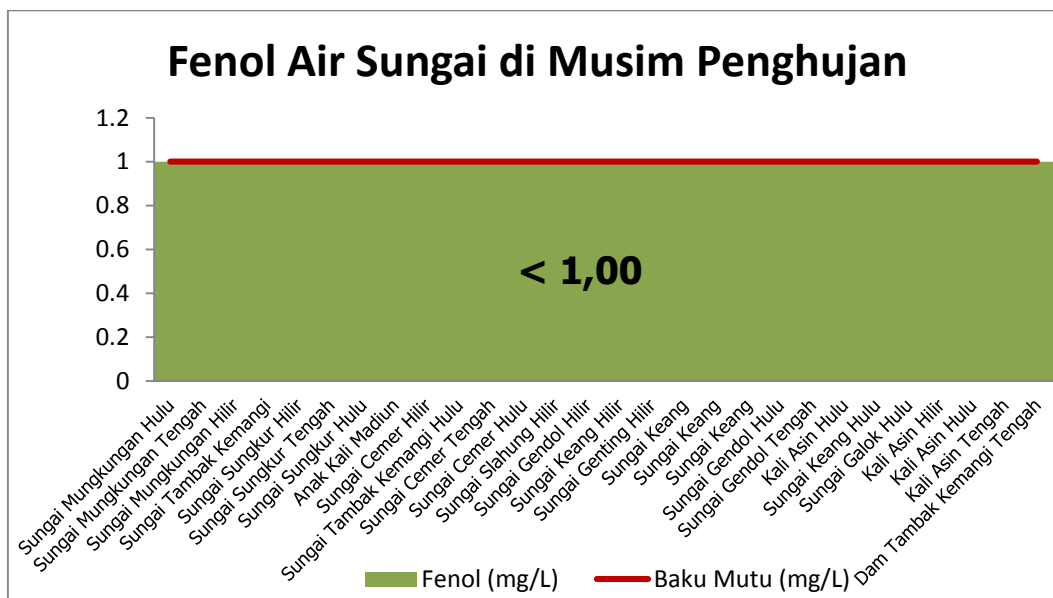
Gambar II-65. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NH_3



Gambar II-66. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter NH_3

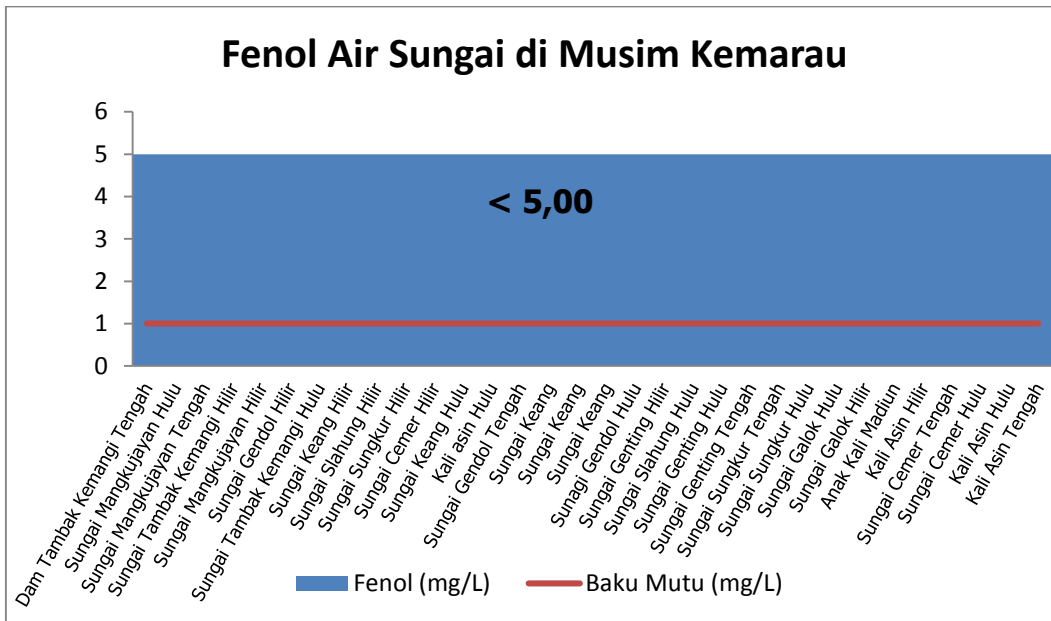
Kandungan NH_3 yang melebihi baku mutu merupakan racun bagi ekosistem perairan, terutama bagi kehidupan ikan, karena adanya NH_3 dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur, kandungan ammonia bebas untuk ikan yang peka adalah $\leq 0,02 \text{ mg/L}$ sebagai NH_3 . Dari grafik di atas sungai yang memiliki hasil uji di atas batas untuk ikan yang peka dengan NH_3 pada musim penghujan rata-rata telah memenuhi baku mutu, hanya terdapat 10 sungai yang kandungan amoniannya diatas $0,02 \text{ mg/L}$ yaitu dengan nilai tertinggi sungai keyang sebesar 9 mg/L . Pada Musim kemarau dari grafik dapat diketahui terdapat 22 titik pantau sungai yang menunjukkan hasil uji dibawah nilai baku mutu $0,02 \text{ mg/L}$.

k) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter Fenol



Gambar II-67. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Fenol

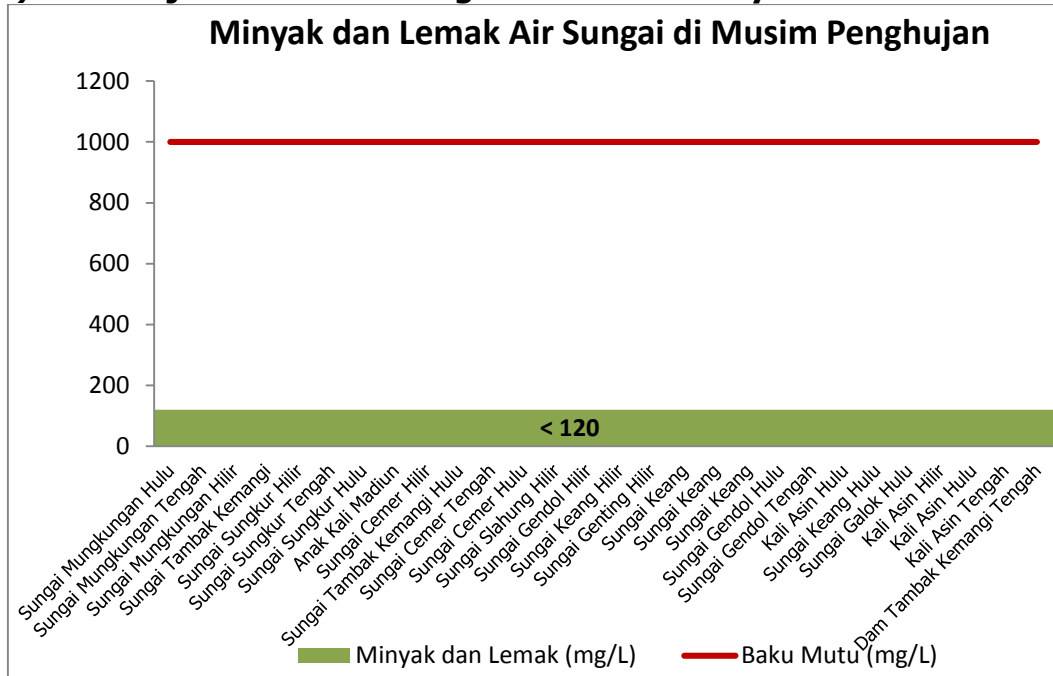
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



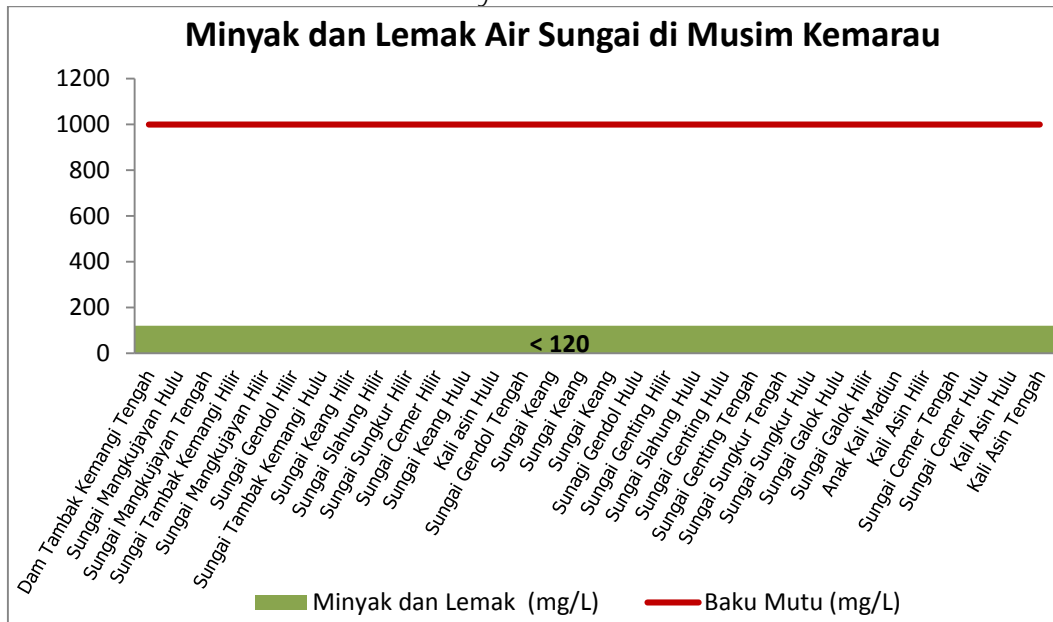
Gambar II-68. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Fenol

Hasil dari grafik di atas diketahui bahwa telah dilakukan pengujian terhadap semua titik pantau sungai pada musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan hasil uji kualitas air sungai parameter Fenol berada di bawah nilai baku mutu air kelas III dengan nilai rata-rata yaitu < 1 mg/L. Pada musim kemarau hasil uji kualitas air sungai parameter Fenol melebihi nilai baku mutu air kelas III dengan nilai rata-rata < 5 mg/L.

I) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter Minyak dan Lemak



Gambar II-69. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Minyak dan Lemak

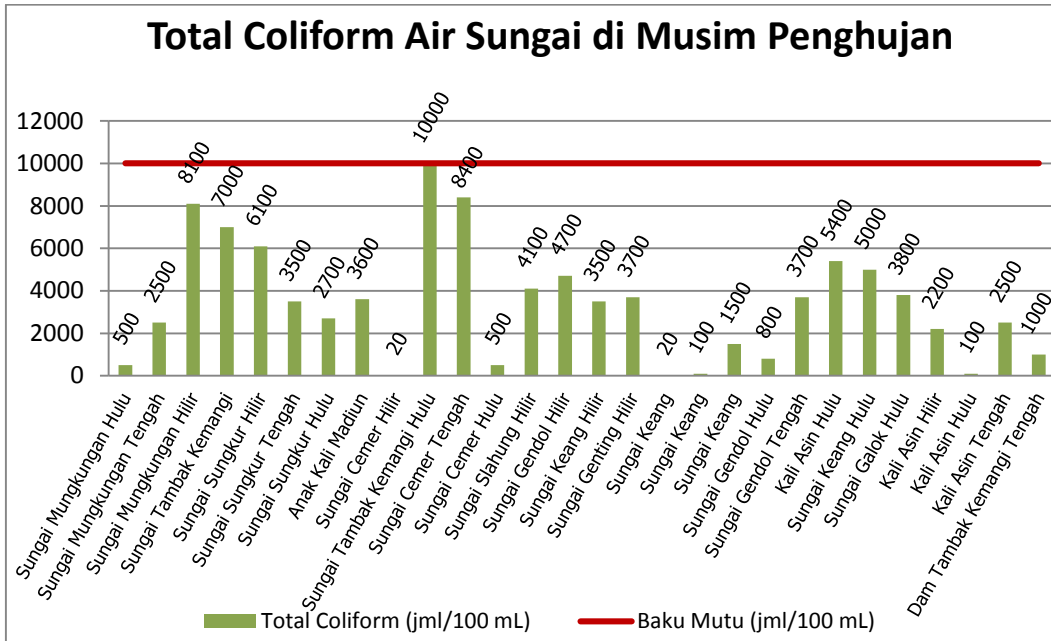


Gambar II-70. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Minyak dan Lemak

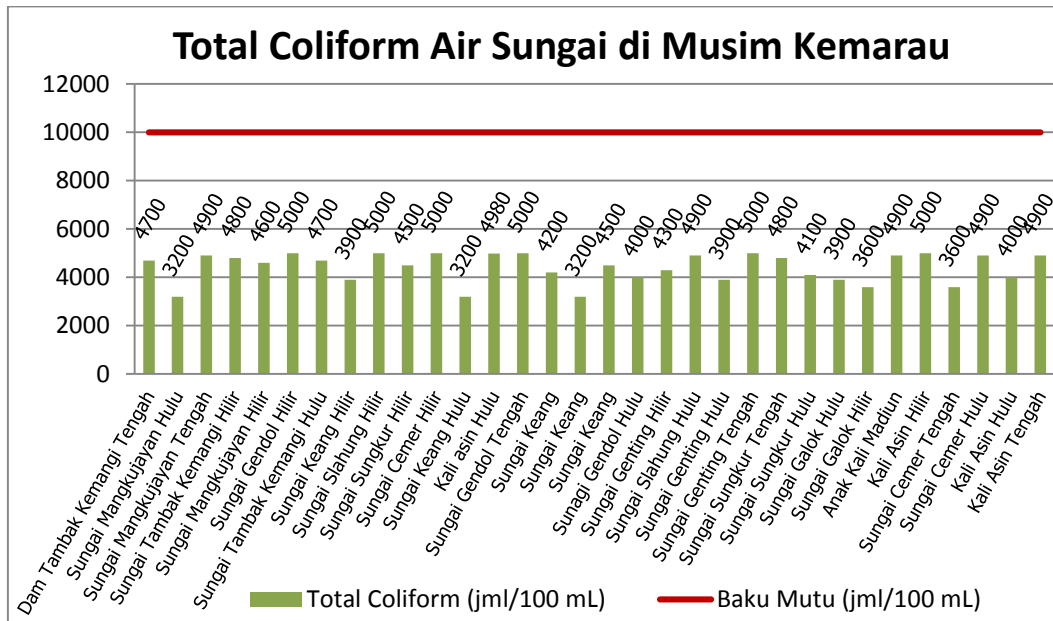
LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Hasil dari grafik di atas diketahui bahwa secara keseluruhan baik pada musim kemarau maupun musim penghujan hasil uji kualitas air sungai parameter Minyak dan Lemak berada di bawah nilai baku mutu air kelas III yaitu 1000 mg/L .

m) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter Total Coliform



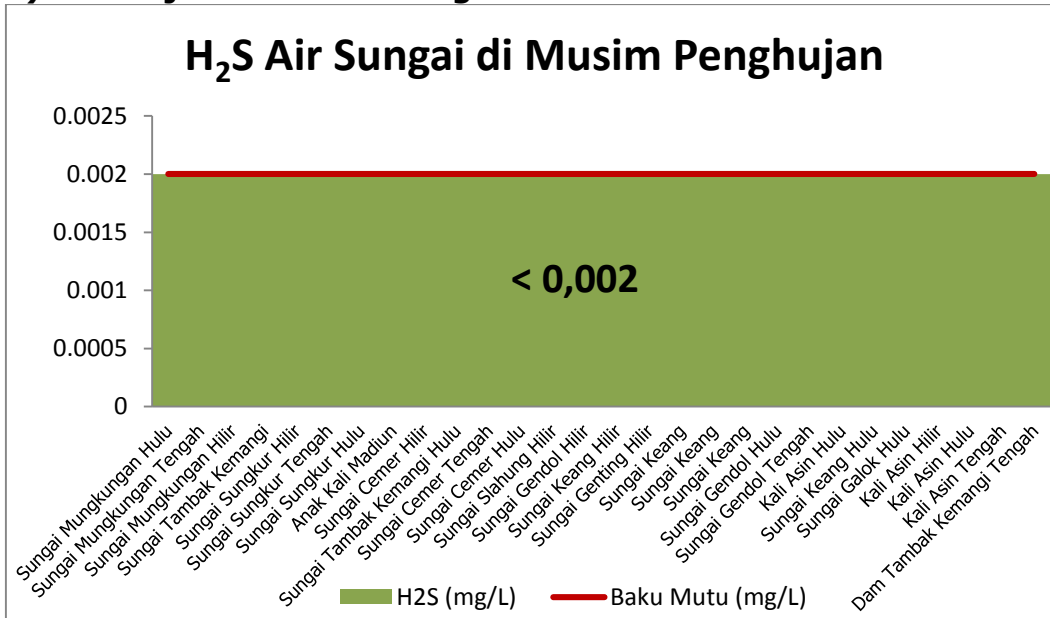
Gambar II-71. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Total Coliform



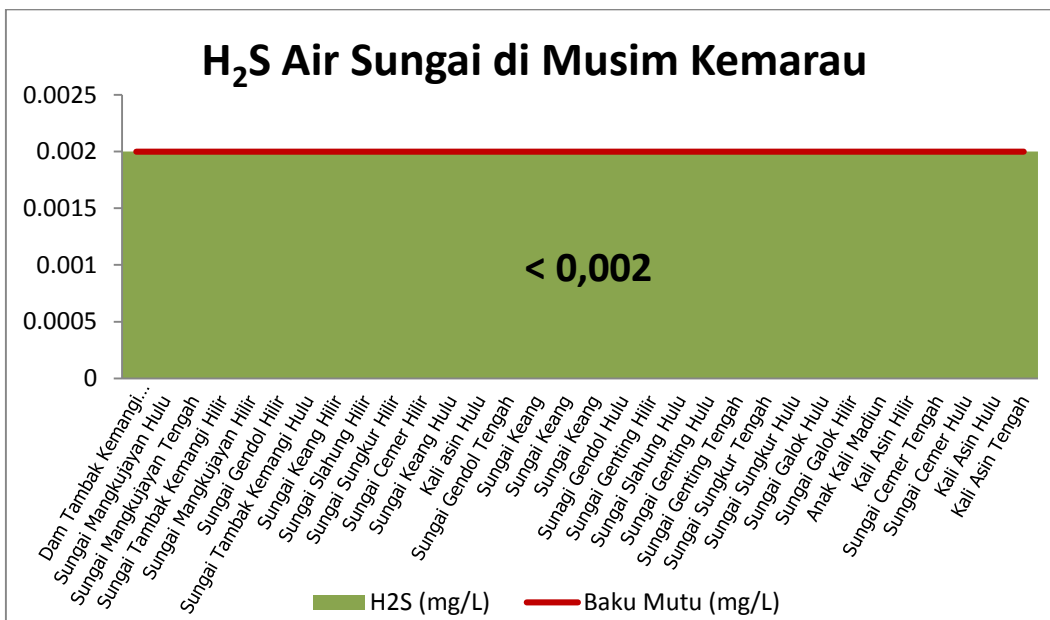
Gambar II-72. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter Total Coliform

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa pada musim Penghujan terdapat 1 sungai yang memiliki hasil uji kualitas air sungai parameter Total Coliform sama dengan baku mutu air kelas III yaitu sungai Tambak Kemangi Hulu sebesar 10000 jml/100 mL. Pada musim kemarau tidak terdapat sungai yang tidak memenuhi baku mutu air kelas III, sebab memiliki nilai kurang dari baku mutu parameter Total Coliform air kelas III sebesar 10.000 jml/100 mL.

n) Hasil Uji Kualitas Air Sungai Parameter H₂S



Gambar II-73. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Penghujan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter H₂S



Gambar II-74. Grafik Hasil Uji Kualitas Air Sungai saat Musim Kemarau di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Parameter H₂S

Hasil dari grafik di atas diketahui bahwa secara keseluruhan baik pada musim penghujan maupun musim kemarau hasil uji kualitas air sungai parameter H₂S berada di bawah nilai baku mutu air kelas III yaitu dengan hasil >0,002 mg/L, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada **lampiran tabel 29**.

e) *Response*

Upaya pemerintah untuk menangani isu-isu terkait kualitas air, yaitu dengan adanya penyelesaian pada pengaduan yang dilakukan masyarakat. Pada **lampiran tabel 50** telah di jelaskan status pengaduan masyarakat rata- rata yaitu terkait industri / pabrik. Hal tersebut dikarena industri / pabrik banyak mengandung limbah sehingga dapat menurunkan kualitas air di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya pengaduan masyarakat tersebut, maka pemerintah mengetahui beberapa pabrik / industri telah mencemari kualitas air. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerima semua pengaduan dan telah dilakukan penyelesaian pengaduan dari masyarakat.

2.3. Kualitas Udara

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di wilayah yuridis Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Udara sebagai komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukungan bagi makhluk hidup untuk dapat hidup secara optimal.

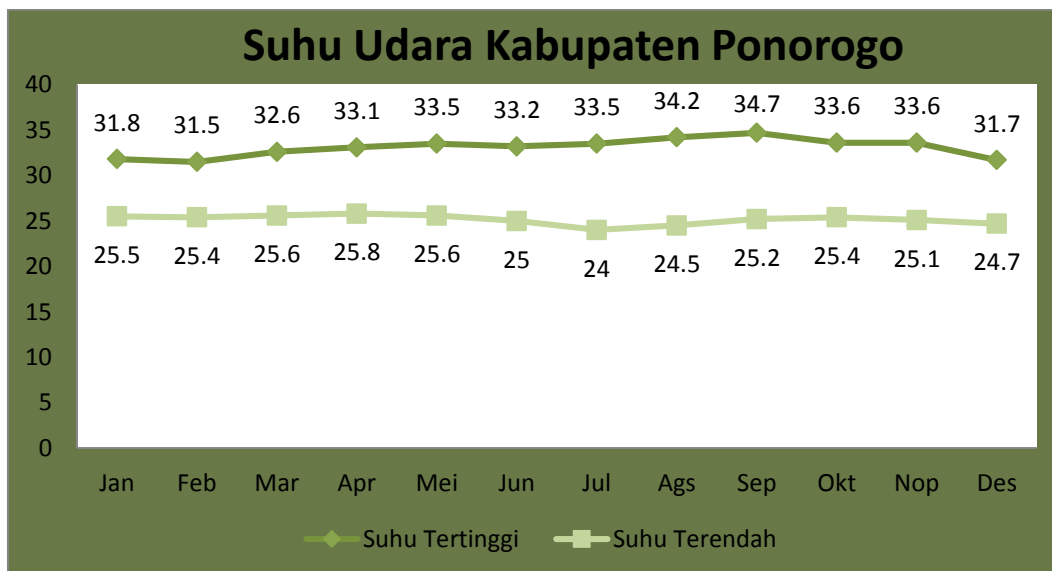
Di dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo telah melakukan uji kualitas udara ambien pada 4 lokasi di Kabupaten Ponorogo. Baku mutu yang digunakan untuk memantau kualitas udara ambien adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.

a) *Driving Force*

Faktor pemicu dari kualitas udara adalah nilai suhu bulanan Kabupaten Ponorogo. Menurut data pengukuran dari *Accuweather*, puncak tertinggi suhu udara rata – rata bulanan terjadi pada bulan september dan Oktober yaitu dengan suhu tertinggi 34 dan suhu terendah 23. (**Lampiran 36**).



Sumber : *Accuweather*

Gambar II-75. Grafik Suhu Udara rata – rata Bulanan

Dari grafik suhu bulanan didapatkan suhu tertinggi dan suhu terendah. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah yaitu 1.371,78 km² dengan total jumlah penduduk sebanyak 978.227 Jiwa. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, diketahui Jumlah penduduk tertinggi yaitu pada Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 77.440 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu dari Kecamatan Pudak yaitu 9.373 jiwa. Kemudian jika dilihat dari luasan wilayahnya wilayah terbesar yaitu kecamatan Ngrayun dengan prosentase 13,47% dari total keseluruhan wilayah di Kabupaten Ponorogo, sedangkan luasan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Ponorogo 1,63%. Jika di dibandingkan luasan wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang krusial pada kecamatan Ponorogo. Karena Kecamatan Ponorogo memiliki luas wilayah terkecil namun dengan jumlah penduduk yang tertinggi. hal ini merupakan tekanan dari kondisi wilayah kabupaten Ponorogo terhadap kualitas airnya yang akan digunakan oleh masyarakat di Wilayah Kabupaten Ponorogo. Rincian jumlah penduduk dan luasan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dengan rinci pada grafik Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan, dan pada (**Lampiran Tabel 45**). Dari data luasan wilayah dan data jumlah penduduk kabupaten Ponorogo merupakan faktor yang menjadi pandangan utama terhadap kualitas udara. Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka akan mempengaruhi kualitas udara juga.

b) *State*

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, panjang jalan dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 – tahun 2020 tidak terdapat penambahan pada kelas jalan kecil, jalan sedang maupun jalan

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

raya. Tidak adanya penambahan panjang pada semua kelas jalan tersebut tentunya juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat yang akan melewati jalan tersebut dengan menggunakan kendaraan. Banyaknya kendaraan yang melintas dengan kondisi yang tidak ada penambahan ruas jalan akan mempengaruhi kualitas udara dan kelancaran lalu lintas di suatu wilayah. Data perubahan penambahan ruas jalan dapat dilihat pada (**lampiran tabel 40**).



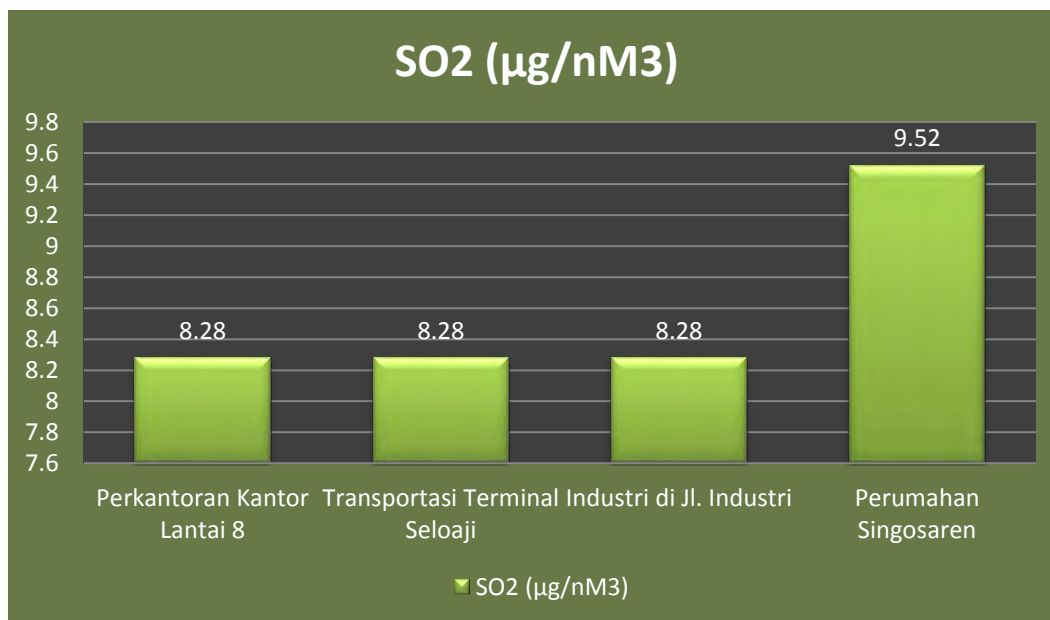
Gambar II-76. Perubahan Panjang Ruas Jalan

c) *Impact*

Udara merupakan unsur yang terpenting di dalam kehidupan makhluk hidup. Karena setiap hari makhluk hidup akan menghirup udara. Dampak yang ditimbulkan akibat kualitas udara di suatu daerah adalah berdampak pada kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Kualitas udara yang buruk akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan di suatu wilayah. Jika dilihat dari sudut kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten

Ponorogo telah mengelompokkan beberapa jenis penyakit yang derita masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dari total jumlah penderita sebanyak 150.967 orang, terbanyak yaitu mengalami Influenza yaitu sebanyak 39.740 orang. Sedangkan penyakit yang paling sedikit diderita yaitu penyakit Arthritis, osteoarthritis. Jenis – Jenis penyakit dapat di lihat dari Grafik Jenis Penyakit Utama yang diderita penduduk Kabupaten Ponorogo dan pada (**Lampiran tabel 33**).

Selain dari sudut kesehatan, beberapa fasilitas umum di Kabupaten Ponorogo memberikan dampak terhadap kualitas udara di sekitar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo telah melakukan Uji Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Ponorogo yaitu dengan Uji SO₂, CO, NO₂ dan PB. Pengukuran dilakukan dalam waktu 1 jam. Hasil Uji dapat dilihat pada (**lampiran tabel 37**).

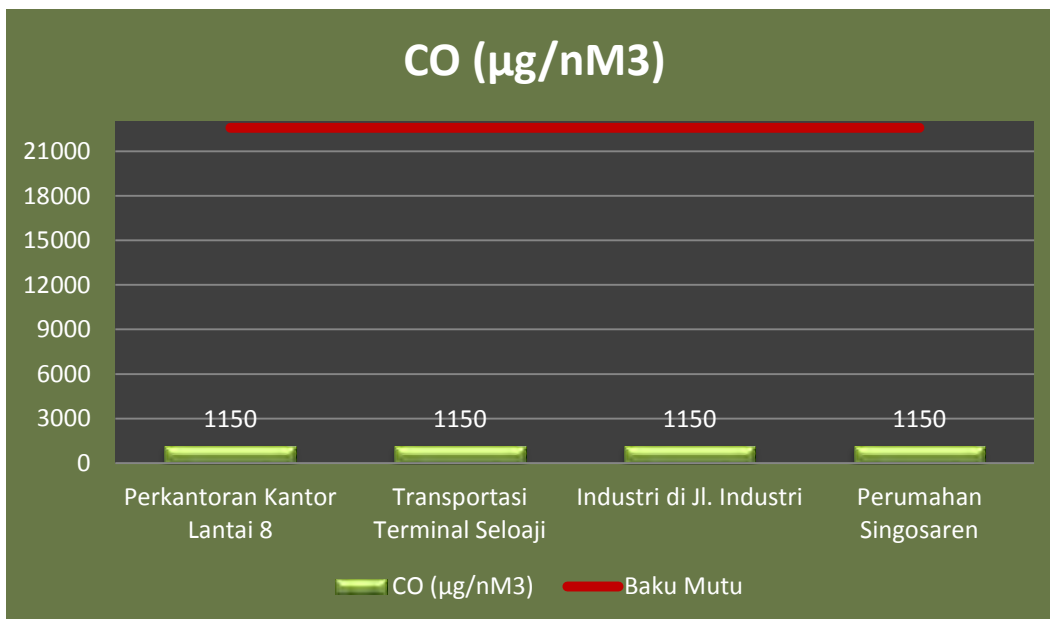


Gambar II-77. Uji Kualitas Udara Ambien pada Parameter SO₂

Sulfur dioksida merupakan gas yang tidak berwarna dan berbau tajam pada konsentrasi tinggi. Sulfur dioksida berasal dari pembakaran

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

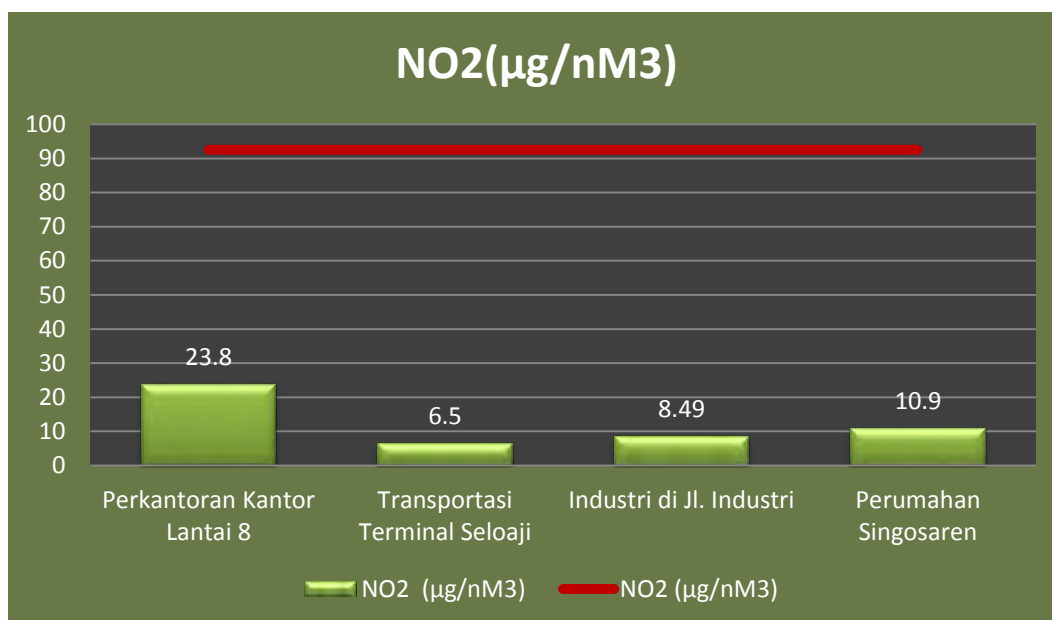
bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batubara serta industri dan kendaraan umum. Oksidasi lain dari sulfur biasanya dikatalisis oleh NO_2 membentuk H_2SO_4 yang terkandung dalam air hujan dan disebut hujan asam. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien parameter SO_2 seluruh hasil uji pada 4 lokasi menunjukkan bahwa masing-masing angka tidak ada yang berada di atas baku mutu parameter SO_2 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 yaitu 262 ($\mu\text{g}/\text{nM}^3$) sehingga secara keseluruhan hasil dari uji kualitas udara ambien parameter SO_2 telah memenuhi baku mutu.



Gambar II-78. Uji Kualitas Udara Ambien pada Parameter CO

Karbon Monoksida adalah suatu gas yang tak berwarna, tidak berbau dan juga tidak berasa. Gas CO dapat berbentuk cairan pada suhu di bawah -1920C . Gas CO sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dengan udara yang berupa gas buangan kendaraan bermotor. Kota besar yang cenderung memiliki lalu lintas yang padat akan banyak menghasilkan gas CO sehingga kadar CO dalam udara relatif tinggi

dibandingkan dengan daerah pedesaan. Selain dari gas buangan kendaraan bermotor gas CO dapat pula terbentuk dari proses industri. Hasil pengukuran kualitas udara ambien parameter CO seluruh hasil uji pada 4 lokasi menunjukkan bahwa masing-masing angka tidak ada yang berada di atas baku mutu parameter CO berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 yaitu 22.600 ($\mu\text{g}/\text{nM}^3$) Sehingga secara keseluruhan hasil dari uji kualitas udara ambien parameter CO telah memenuhi baku mutu.



Gambar II-79. Uji Kualitas Udara Ambien pada Parameter NO₂

Nitrogen Dioksida (NO₂) adalah gas yang beracun berwarna coklat kemerah-merahan dan berbau menyengat seperti asam nitrat. NO₂ berasal dari proses pembakaran pada mesin kendaraan bermotor dan produksi energi. Hasil pengukuran kualitas udara ambien parameter NO₂ seluruh hasil uji pada 4 lokasi menunjukkan bahwa masing-masing angka tidak ada yang berada di atas baku mutu parameter NO₂ berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 yaitu 92,5

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

($\mu\text{g}/\text{nM}^3$) Sehingga secara keseluruhan uji kualitas udara ambien parameter NO_2 telah memenuhi baku mutu.

Tabel II-16. Uji Kualitas Udara Ambien Pada Parameter O_3

Lokasi	O_3 ($\mu\text{g}/\text{nM}^3$)	Baku Mutu O_3 ($\mu\text{g}/\text{nM}^3$)
Perkantoran Kantor Lantai 8	22,5	200
Transportasi Terminal Seloaji	59,9	200
Industri di Jl. Industri	95,7	200
Perumahan Singosaren	43,7	200

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, 2020

O_3 (oksidan) merupakan senyawa di udara selain oksigen yang memiliki sifat sebagai pengoksidasi, selain itu O_3 memiliki bau yang keras dan menyengat. Oksidan adalah komponen atmosfer yang diproduksi oleh proses fotokimia, yaitu suatu proses kimia yang membutuhkan sinar matahari untuk mengoksidasi komponen-komponen yang tak segera dioksidasi oleh oksigen. Senyawa yang terbentuk merupakan bahan pencemar sekunder yang diproduksi karena interaksi antara bahan pencemar primer dengan sinar. Hasil pengukuran kualitas udara ambien parameter O_3 seluruh hasil uji pada 4 lokasi menunjukkan bahwa masing-masing angka berada di bawah angka baku mutu parameter O_3 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 yaitu 200 ($\mu\text{g}/\text{nM}^3$) Sehingga secara keseluruhan uji kualitas udara ambien parameter O_3 telah memenuhi baku mutu.

Tabel II-17. Uji Kualitas Udara Ambien Pada Parameter Pb

Lokasi	Pb ($\mu\text{g}/\text{nM}^3$)	Baku Mutu Pb ($\mu\text{g}/\text{nM}^3$)
Perkantoran Kantor Lantai 8	0,0008	60
Transportasi Terminal Seloaji	0,0008	60

Industri di Jl. Industri	0,0008	60
Perumahan Singosaren	0,0008	60

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, 2020

Plumbum/Timbal (Pb) sebagai gas buang kendaraan bermotor dapat membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Di dalam tubuh Pb dapat menyebabkan keracunan akut maupun kronik. Selain berdampak pada kesehatan, timbal juga berpengaruh pada tanaman dan hewan. Hewan ternak dan hewan liar dapat mencerna timbal saat sedang memakan rumput. Efek timbal yang terasa pada hewan sama seperti yang dialami manusia. Pada tanaman, konsentrasi timbal yang rendah mampu menghambat pertumbuhannya. Hasil pengukuran kualitas udara ambien parameter Pb seluruh hasil uji pada 4 lokasi menunjukkan bahwa masing-masing angka berada di bawah angka baku mutu parameter Pb berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 yaitu 60 ($\mu\text{g}/\text{nM}^3$) Sehingga secara keseluruhan uji kualitas udara ambien parameter Pb telah memenuhi baku mutu.

d) *Responses*

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan beberapa Inovasi pengelolaan Lingkungan hidup daerah dengan berbagai macam inovasi. Inovasi-inovasi tersebut dilakukan dalam rangka upaya penanganan isu – isu yang sedang terjadi pada lingkungan hidup kabupaten ponorogo. Upaya penanganan isu terkait kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup telah mengadakan pengurangan emisi kendaraan bermotor dengan melakukan Pengujian emisi kendaraan bermotor bagi kendaraan angkutan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut diharapkan emisi kendaraan bermotor dapat terkontrol sehingga tidak

memperburuk kualitas udara di wilayah Kabupaten Ponorogo. Inovasi pengelolaan Lingkungan hidup daerah Kabupaten Ponorogo dapat dilihat secara rinci pada (**lampiran tabel 61**).

2.4. Resiko Bencana

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat beencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, kerusakan atau kehilangan data dan sebagainya. Sebagian wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan kawasan hutan. Kawasan hutan yang tidak digunakan sebagaimana fungsi dan statusnya akan menimbulkan resiko bencana. Antara lain bencana tanah longsor, gempa bumi dan korban kerugian.

a) *Driving Force*

Pemicu utama bencana yaitu dari ulah manusia itu sendiri. Jika alam dijaga dengan baik, maka akan meminimalisir timbulnya bencana alam. Resiko bencana dapat dipicu oleh pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, diketahui Jumlah penduduk tertinggi yaitu pada Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 77.440 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu dari Kecamatan Pudak yaitu 9.373 jiwa. Kemudian jika dilihat dari luasan wilayahnya wilayah terbesar yaitu kecamatan Ngrayun dengan prosentase 13,47% dari total keseluruhan wilayah di Kabupaten Ponorogo, sedangkan luasan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Ponorogo 1,63%. Jika di bandingkan luasan wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang krusial pada kecamatan Ponorogo. Karena Kecamatan Ponorogo memiliki luas wilayah

terkecil namun dengan jumlah penduduk yang tertinggi. (**Lampiran 45**).

b) *Pressure*

Gambaran dari penggunaan lahan utama di wilayah kabupaten Ponorogo merupakan tekanan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap resiko bencana yang akan timbul. Berdasarkan Data dari BPN Kabupaten Ponorogo, dapat diketahui Luas wilayah Kabupaten Ponorogo menurut penggunaan lahan utamanya. Dapat di ketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Ponorogo terluas masih berupa lahan sawah dengan luas 36.163,8 Ha. Sementara luas yang paling terkecil yaitu luas lahan badan air memiliki luas 680,95 Ha dari total luas keseluruhan. Berikut diagram penggunaan lahan utama di wilayah Kabupaten Ponorogo. Rincian penggunaan lahan utama dapat dilihat pada (**Lampiran Tabel 2**).

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPDAS HL Solo, kriteria kekritisian lahan pada kabupaten Ponorogo di bagi menjadi 5 kriteria. Jika diamati secara keseluruhan, Kabupaten Ponorogo lahan dengan kriteria agak kritis adalah kriteria yang memiliki lahan terluas dengan luas 56.006,50 Ha dan kriteria dengan luasan terendah yaitu pada lahan kritis (**Lampiran Tabel 6**).

Jika dilihat dari perdagangan satwa dan tumbuhan, Kabupaten Ponorogo memiliki Kayu yang di perdagangkan dengan status Appendix II. Kayu diperoleh dari hasil hutan di wilayah kabupaten Ponorogo. Jika Kayu menjadi bagian yang diperdagangkan, maka akan menjadi tekanan tersendiri pemerintah kabupaten ponorogo terkait resiko bencana hutannya. Tabel perdagangan satwa dan tumbuhan dapat dilihat pada (**Lampiran tabel 20**).

c) *State*

Pada Tabel Luas Hutan Berdasarkan Fungsi diatas dapat di ketahui luas hutan berdasarkan fungsi hutan di Kabupaten Ponorogo ada 3 yaitu hutan lindung dengan luas 16.510,69 Ha, Cagar alam dengan luas 218,4 Ha (**Lampiran Tabel 3**).

Selain itu, luas kawasan lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan lahannya juga akan berpengaruh terhadap resiko bencana. Berdasarkan data Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW maka dapat di ketahui luasan kawasan resapan air dengan luasan kawasan hutan lindung memiliki luasan yang hampir sama yaitu 42.683 dan 16.510,69. Sedangkan kabupaten Ponorogo tidak memiliki luasan sempadan pantai dan luasan kawasan sekitar danau. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dapat dilihat lebih rinci pada (**Lampiran Tabel 1**).

d) *Impact*

Resiko bencana akan sangat berdampak pada status perekonomian di wilayah Kabupaten ponorogo. Karena bencana akan menimbulkan resiko terbanyak berupa materil. Bencana akan menimbulkan kerugian terhadap beberapa sektor terutama jika terjadi resiko bencana yang terjadi pada kawasan hutan. Akan menimbulkan dampak terhadap sektor kehutanan.

Pada **Lampiran tabel 44** tercantum wilayah yang terdampak akibat bencana banjir beserta korban dan kerugiannya. Sepanjang tahun 2020, data yang tercatat pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ponorogo, pada bulan Januari, Februari, Maret, April dan November telah terjadi bencana banjir yang menimbulkan kerugian berupa rumah, badan jalan, plengsengan, lahan pertanian, dan bangunan rumah. Data selengkapnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel II-18. Data bencana alam di Kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
				Jumlah Areal Terdampak	Meninggal	
1	Bungkal	RT 03 RW 04 Dkh. Sumberejo Ds munggu Kec. Bungkal	Tanah Longsor	Satu Rumah	0	0
2	Ngebel	dkh seglagah RT 02 RW 01 Desa Sempu Kecamatan Ngebel	Tanah longsor	2 kamar mandi & emperan belakang rumah rusak		
3	Slahung	Rt/Rw 09/02 Dukuh Genuk Desa Senepo Kecamatan Slahung	Tanah longsor	Rumah belum bisa ditempati dan keluarga mengungsi.		
4	Sooko	rt.1/ rw.3, Dkh. Srayu, Ds. Jurug, kec. Sooko	Tanah longsor	luasan longsor panjang 7 M dengan ketinggian 5 M merusak/ jebolnya dinding dapur (bahan kalsiboard)		
5	Ngebel	dkh.semenok RT 02 RW 02Desa ngebel Kecamatan Ngebel	Tanah longsor	atap kamar mandi rusak		
6	Sawoo	RT 04 RW 01 dkh. Krambil Ds. Pangkal Kec. Sawoo	Tanah Longsor	Satu rumah roboh tertimpa longsor		

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

7	Ngrayun	RT. 02 RW.02 Dukuh Pucung Desa Sendang Ngrayun	Tanah Longsor	Rumah sdr. Tukiran dinding di samping rumah ambrol			
8	Sawoo	RT 04 RW 01 dkh. Krambil Ds. Pangkal Kec. Sawoo	Tanah longsor	Satu rumah roboh tertimpa longsor			
9	Balong	Taman kelinci , dkh. Kates gabro Ds. Pandak Kec. Balong	Banjir Bandang	2 unit kamar mandi bantuan untuk taman kelinci hilang terbawa arus dan sumur			
10	Ngrayun	Rt 03, Rw 05, Dukuh Krajan, Desa Baosan kidul, kecamatan ngrayun	Tanah Longsor	tembok ambrol			
11	Ngrayun	RT 01/01, Dukuh Patuk, Desa Baosan Kidul , Kecamatan ngrayun.	Tanah Longsor	Tembok rumah jebol dan menimpa perabot rumah			
12	Badegan	RT/RW 03/03 Dkh Kliyur Ds Dayakan Kec Badegan kab Ponorogo	Tebing Longsor	dinding rumah jebol sepanjang 6 meter			
13	Slahung	Rt/Rw 02/01 Dukuh Salak Desa Senepo Kec. Slahung Kab. Ponorogo	Tanah Longsor	Ambrolnya tebing mengakibatkan tembok dapur jebol dan peralatan dapur tertimbun material.			

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

14	Slahung	Rt/Rw 02/01 Dukuh Salak Desa Senepo Kec. Slahung Kab. Ponorogo	Tanah Longsor	Ambrolnya tebing mengakibatkan tembok dapur jebol dan peralatan dapur tertimbun material.			
15	Slahung	Mts/Ma Al-Akbar Dukuh Genuk Desa Senepo Kec. Slahung Kab	Tebing Longsor	Dinding perpustakaan jebol dan Asbes terkena material			
16	Ngrayun	Dukuh krajan, RT 01/01 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.	Tanah Longsor	dinding belakang dan samping rumah jebol			
17	Ngebel	Dukuh Krajan ,RT 03 RW 01 Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo	Tanah longsor	Dinding dapur rusak rusak			

Sumber : BPDB Kabupaten Ponorogo, 2020

e) *Responses*

Upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana adalah berupa mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta.

Dalam melakukan mitigasi bencana, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan target-target untuk dilakukannya reboisasi. Pada grafik realisasi kegiatan reboisasi, pemerintah telah menetapkan target luasan untuk dilakukakan reboisasi di masing – masing wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Jika dilihat dari grafik, seluruh Kecamatan telah merealisasikan sesuai dengan jumlah yang di targetkan untuk reboisasi. Grafik realisasi kegiatan reboisasi dapat dilihat secara rinci pada **(Lampiran Tabel 16)**.

Dalam **lampiran tabel 58** dijelaskan produk hukum pada bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Produk tersebut berupa peraturan – peraturan daerah maupun bupati. Pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 tahun 2015 telah diatur tata cara pemotongan pohon ayoman di tepi jalan. Pemotongan pohon merupakan salah satu mitigasi bencana agar tidak menimbulkan bencana yang tidak di inginkan ketika pohon dengan tumbuh lebat.

2.5. Pariwisata

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai satu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah –

wilayah tertentu yang mempunyai objek pariwisata. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Isu – isu lingkungan hidup juga akan berkaitan pada bidang pariwisata, dimana Wilayah Kabupaten Ponorogo mempunyai Telaga Ngebel yang saat ini merupakan salah satu wilayah pariwisata di Kabupaten Ponorogo.

a) *Driving Force*

Kabupaten Ponorogo total mempunyai 8 golongan flora dan fauna yaitu aves, reptil, mamalia, amphibi, ikan, keong, serangga dan flora. Telah disebutkan didalam **lampiran tabel 4** bahwa terdapat beberapa golongan yang dilindungi maupun tidak di lindungi. Kabupaten Ponorogo memiliki beragam spesies yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Hal ini tentunya dapat memicu sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian di suatu wilayah dengan munculnya tempat pariwisata di wilayah Kabupaten Ponorogo. Selain itu, pada **lampiran tabel 5** telah disebutkan jenis satwa yang ditangkarkan yaitu kijang, rusa timor, dan merak hijau. Penangkaran satwa tersebut di bawah naungan perusahaan swasta yang sudah mendapatkan legalisasi dari Pemerintah.

b) *Presurre*

Pada sektor pariwisata juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di kabupaten Ponorogo. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, diketahui Jumlah penduduk tertinggi yaitu pada Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 77.440 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu dari Kecamatan Puduk yaitu 9.373 jiwa. Kemudian jika dilihat dari luasan wilayahnya wilayah terbesar yaitu kecamatan Ngrayun dengan prosentase 13,47% dari total keseluruhan wilayah di Kabupaten Ponorogo, sedangkan luasan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Ponorogo

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

1,63%. Jika di bandingkan luasan wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang krusial pada kecamatan Ponorogo. Karena Kecamatan Ponorogo memiliki luas wilayah terkecil namun dengan jumlah penduduk yang tertinggi. (**Lampiran 45**).

c) *States*

Kabupaten Ponorogo memiliki 14 Wilayah Kecamatan dibawah naungan Perhutani KPH Lawu Ds. Namun jika dilihat pada **lampiran tabel 21** maka belum ada satupun wilayah yang memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata karena tidak adanya legalisasi pemanfaatan wisata selama tahun 2020. Pada **lampiran tabel 28** telah tercantum data luasan telaga ngebel yaitu seluas 150 Ha pada saat ini telaga ngebel merupakan salah satu tempat pariwisata di kabupaten Ponorogo. Adanya tempat pariwisata ini akan menaikkan perekonomian kabupaten Ponorogo dari sektor pariwisata.

d) *Impact*

Jika dihubungkan dengan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo pada **Lampiran tabel 60**, Pada grafik pendapatan asli daerah kabupaten Ponorogo diatas dapat diketahui sumber pendapatan yang paling terbanyak yaitu dari pendapapatan lainnya yang sah dengan prosentase 65,3% dari total jumlah pendapatan asli daerah. Pendapatan lainnya dapat dipicu dari sektor pariwisata melihat adanya potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo.

e) *Response*

Upaya pemerintah dalam menghadapi isu-isu terkait pariwisata, maka pemerintah membuat pengawasan terkait Izin Lingkungan, (Madal, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL). Pada

lampiran tabel 43, belum terdata untuk kawasan pariwisata yang melakukan Izin Lingkungan, (Amdal, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL). untuk selanjutnya akan dilakukan kembali pengawasan yang lebih ketat terkait perijinan terutama pada sektor pariwisata.

2.6. Kelembagaan

Kelembagaan adalah pada umumnya lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan lembaga mencakup kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi. Beberapa unsur penting dalam suatu kelembagaan yaitu institusi yang merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat, norma tingkah laku yang telah diterima di kehidupan masyarakat.

a) Driving Force

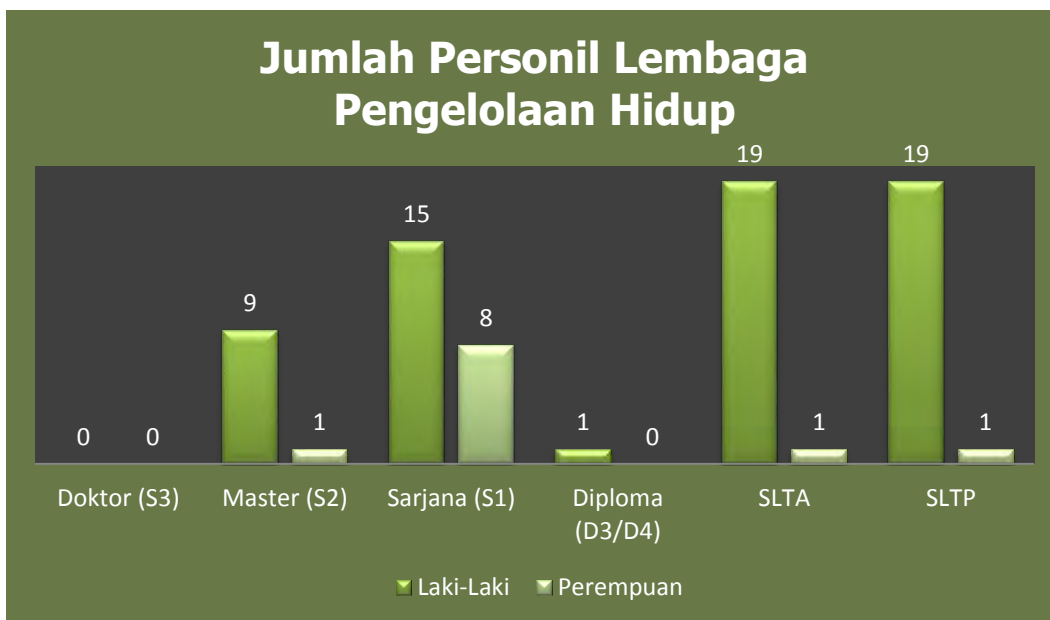
Unsur pemicu dari suatu kelembagaan tidak lain yaitu masyarakat di wilayah tersebut. Karena lembaga akan terbentuk dari kumpulan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Kelembagaan pada Kabupaten Ponorogo dapat diangkat menjadi isu dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, diketahui Jumlah penduduk tertinggi yaitu pada Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 77.440 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu dari Kecamatan Pudak yaitu 9.373 jiwa. Kemudian jika dilihat dari luasan wilayahnya wilayah terbesar yaitu kecamatan Ngrayun dengan prosentase 13,47% dari total keseluruhan wilayah di Kabupaten Ponorogo, sedangkan luasan

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

wilayah terkecil yaitu Kecamatan Ponorogo 1,63%. Jika di bandingkan luasan wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang krusial pada kecamatan Ponorogo. Karena Kecamatan Ponorogo memiliki luas wilayah terkecil namun dengan jumlah penduduk yang tertinggi. (**Lampiran 45**).

b) Pressure

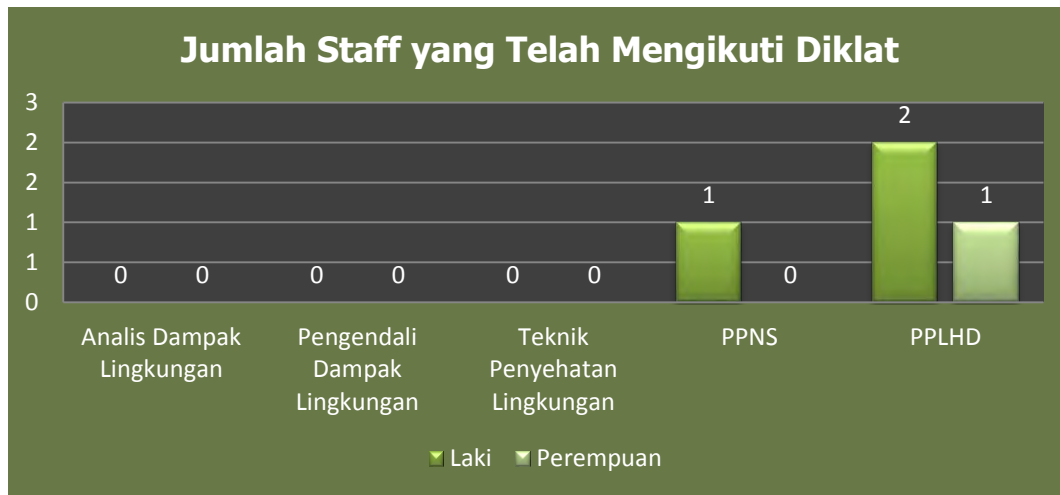
Berdasarkan data jumlah personil lembaga pengelolaan Lingkungan hidup di Kabupaten Ponorogo, pada **lampiran tabel 52** dapat diketahui bahwa jumlah personil terbanyak dari tingkat pendidikan Sarjana dengan jumlah 15 Laki – laki dan 8 perempuan. Sedangkan tingkat pendidikan tertinggi yaitu S2 dengan jumlah 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar II-80 Jumlah Personil Lembaga Pengelolaan Hidup

Setelah diketahui jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup, maka dapat dilihat untuk jumlah staff pada instansi dinas lingkungan hidup yang telah mengikuti diklat lingkungan. Dari data yang

tercatat tahun 2020, terdapat 1 orang dengan jabatan fungsional PPNS dan yang paling banyak mengikuti diklat yaitu dari jawabatan PPLHD sebanyak 3 orang yang terdiri dari 2 orang laki – laki dan 1 orang perempuan. (**Lampiran tabel 53**).



Gambar II-81 Jumlah Staff Yang Mengikuti Diklat

c) *State*

Dari tingkat pendidikan dan jumlah staff yang mengikuti diklat pada tahun 2019, maka Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan Fisik kepada masyarakat. Kegiatan fisik yang dilakukan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa Pelatihan dan bantuan di wilayah Kabupaten Ponorogo. (**Lampiran 49**)

Tabel II-19. Kegiatan Fisik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	C dYfUg]· XUb· DYa Y)\ UFUUb· G]ghYa · 8 fU]bUgY	GUi fUb·XfU]bUgY·6YU_ Ub[· YXi b ·?CFDF=	DYi [Ug· dYa VYfg]\ · gUi fUb· XfU]bUgY· 6]XUb[· ? Uk UgUb· DYfa i _]a Ub
		GUi fUb·XfU]bUgY·UFYU df]b[[]HUb·	
		GUi fUb·XfU]bUgY>·""?<"< Ugn]a ·5gnUf]·	
		GUi fUb·XfU]bUgY>·""Hfi bc'cnc·	
		GUi fUb·XfU]bUgY>·""7U_ fUb]b[fUh	
		GUi fUb·XfU]bUgY>·""5ga cfcXc·	
		GUi fUb·XfU]bUgY>·""?<"NU]bU·'A i gh\ cZU·	
		GUi fUb·XfU]bUgY>·""; UrchGi Vfclrc·	
GUi fUb·XfU]bUgY>·""I f]d'Gi a c\Uf'c·			

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

	GUi fUb 'XfU]bUgY'>'8]dcbY[cfc'	
	GUi fUb 'XfU]bUgY'>'GcY_ Ufbc '< UHU'	
	GUi fUb 'XfU]bUgY'>'5\ a UX'8U 'Ub'	

d) *Impact*

Dalam merealisasikan kegiatan kelembagaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, maka akan berdampak pada anggaran pengelolaan lingkungan hidup. Sumber anggaran dana yang digunakan yaitu dari DAU, DAK, dan DBMCHT. Untuk rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran Tabel 59.**

Tabel II-20. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
1	DAU	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	703.000.000,00	98.305.500,00
2	DAU	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	3.976.776.000,00	3.950.000.000,00
3	DAU	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	1.120.894.000,00	337.850.000,00
4	DAU	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	83.487.949,00	60.000.000,00
5	DAU	Pemeliharaan RTH	970.874.478,00	261.623.025,00
6	DAU	Penataan RTH	718.286.000,00	733.039.000,00
7	DAK	Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	222.957.000,00	
8	DAK	Pengadaan alat angkut sampah Dump Truck	390.000.000,00	
9	DAU	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	465.720.000,00	275.834.600,00

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
10	DAU	Pengembangan data dan informasi lingkungan	61.320.000,00	51.000.000,00
11	DAU	Pengembangan program adiwiyata	92.985.000,00	26.050.000,00
12	DBHCHT	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	54.250.000,00	4.800.000,00
13	DBHCHT	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah Industri	414.667.888,00	466.794.916,00
14	DBHCHT	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah	205.000.000,00	466.794.916,00
15	DBHCHT	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat (pelatihan daur ulang sampah)	346.290.000,00	67.800.400,00
16	DBHCHT	Bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat	736.000.000,00	343.398.999,96
17	DBHCHT	Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri melalui pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan (ABA,Udara Ambien, dan Tanah)	717.000.000,00	817.523.272,04
18		Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri melalui pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan (Air Limbah dan Udara Emisi)	444.310.000,00	3.548.711.300,00
19		Pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi/lembaga resmi	50.000.000,00	0,00

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
		yang diakui oleh pemerintah		
JUMLAH			11.773.818.315	11.509.525.929

e. Responses

Upaya pemerintah untuk memberikan apresiasi atas diklat dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo adalah dengan memberikan penghargaan oleh kelompok/organisasi. Sepanjang tahun 2020 terdapat 19 kelompok organisasi yang menerima penghargaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **lampiran tabel 54.**

Tabel II-21. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ponorogo

No	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	SDN 1 Surodikraman	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
2	SDN Singkil	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
3	SDN 3 Baosan Lor	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
4	SDN 3 Wringinanom	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
5	Sdn 1 Sukosari	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
6	SDN 1 Siman	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
7	SMPN 1 Slahung	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
8	SMPN 1 Sampung	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
9	SMPN 2 Ngrayun	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
10	SMPN 1 Badegan	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
11	SMPN 3 Sambit	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
12	SMPN 1 Ngebel	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
13	SMPN 2 Sampung	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
14	SMPN 1 Sawoo	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
15	SMPN 4 Ngrayun	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
16	SMPN 5 Ngrayun	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
17	SMPAN 1 Sooko	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
18	Ma Ma'arif Klego	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
19	SMP N 1 Sooko	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

2.7. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

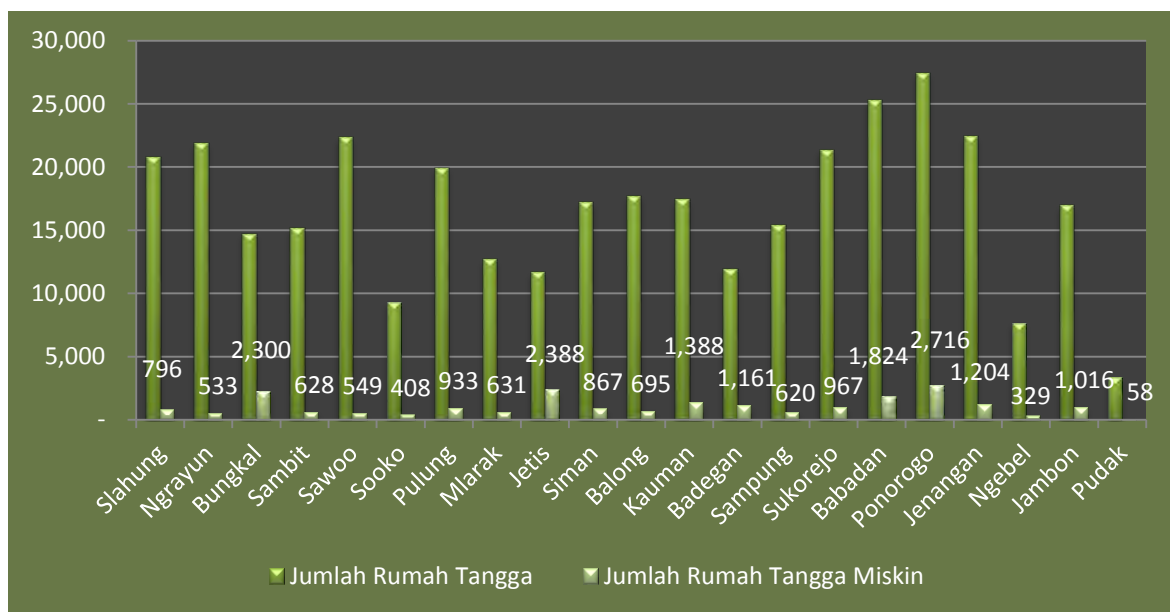
Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Semakin berkembangnya suatu wilayah biasanya semakin banyak pula penumpukan sampah dari limbah padat, maupun dari limbah cair. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pada pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan lahan, dan timbulan sampah.

a. *Driving Force*

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, diketahui Jumlah penduduk tertinggi yaitu pada Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 77.440 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu dari Kecamatan Pudak yaitu 9.373 jiwa. Kemudian jika dilihat dari luasan wilayahnya wilayah terbesar yaitu kecamatan Ngrayun dengan prosentase 13,47% dari total keseluruhan wilayah di Kabupaten Ponorogo, sedangkan luasan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Ponorogo 1,63%. Jika di bandingkan luasan wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang krusial pada Kecamatan Ponorogo karena Kecamatan Ponorogo memiliki luas wilayah terkecil namun dengan jumlah penduduk yang tertinggi. (**Lampiran 45**).

b. *Pressure*

Berdasarkan data dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ponorogo, diketahui jumlah rumah tangga miskin di masing – masing kecamatan. Jumlah rumah tangga miskin terbesar yaitu berada pada kecamatan Ponorogo dengan prosentase 8% dari keseluruhan jumlah rumah tangga di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan prosentase terkecil adalah Kecamatan Pudak yaitu sebanyak 58 rumah tangga. **(lampiran tabel 34).**



Gambar II-82. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Jika dilihat pada **lampiran tabel 42** dapat diketahui beberapa perusahaan yang memiliki Surat Ijin mengelola limbah B3. Dari 14 perusahaan terdapat 7 perusahaan yang memiliki surat ijin mengelola limbah B3 sedangkan 7 lainnya tidak memiliki surat izin mengelola limbah B3.

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Tabel II-22. Izin Mengelola Limbah B3

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
1.	RSU Griya Waluya	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.45/2690/405.26/2016
2.	RSU Muslimat Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.45/2910/405.26/2016
3.	PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk	Pengolahan Tepung Tapioka	Penyimpanan	188.45/2912/405.26/2016
4.	PT. Darmayu Puri Kencana	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.45/1739/405.25/2017
5.	PT. Batara Agro	Pabrik Pupuk	Penyimpanan	188.4/001/405.25/2017
6.	RSU Muhammadiyah Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	
7.	Pabrik Minyak Kayu Putih Sukun	Penyulingan Minyak Atsiri (Minyak Kayu Putih)	Penyimpanan	188.4/10/405.25/2019
8.	PT. Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkit Brantas (PLTA Ngebel)	Ketenagalistrikan	Penyimpanan	188.4/11/405.25/2019
9.	PT. Buanakarya Suryapratama	Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Lpg	Penyimpanan	188.4/12/405.25/2019
10	RSUD Dr. Harjono Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.4/13/405.25/2019
11.	PT. Prima Maesa Putra	Pabrik Es	Penyimpanan	188.4/05/405.25/2020
12	PT. Mitra Pinasthika Mustika, Tbk	Perdagangan sepeda motor baru, suku cadang, dan bengkel sepeda motor honda	Penyimpanan	188.4/04/405.25/2020
13	Yayasan Chania Annabila Zahiroh (Klinik Nazifa)	Aktivitas Poliklinik Swasta	Penyimpanan	503/01/IPLB3/405.16/2020
14	Pabrik Gondorukem dan Terpentin PGT. Sukun	Pabrik Gondorukem dan Terpentin	Penyimpanan	DPMPTSP
15	Klinik Utama Ultra Medica	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyimpanan	DPMPTSP
16	RSU Aisyiah Diponegoro	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	DPMPTSP

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
17	CV. Cahaya Bersama Sukses (Larissa Aesthetic Center)	Klinik Kecantikan	Penyimpanan	DPMPTSP

c. *State*

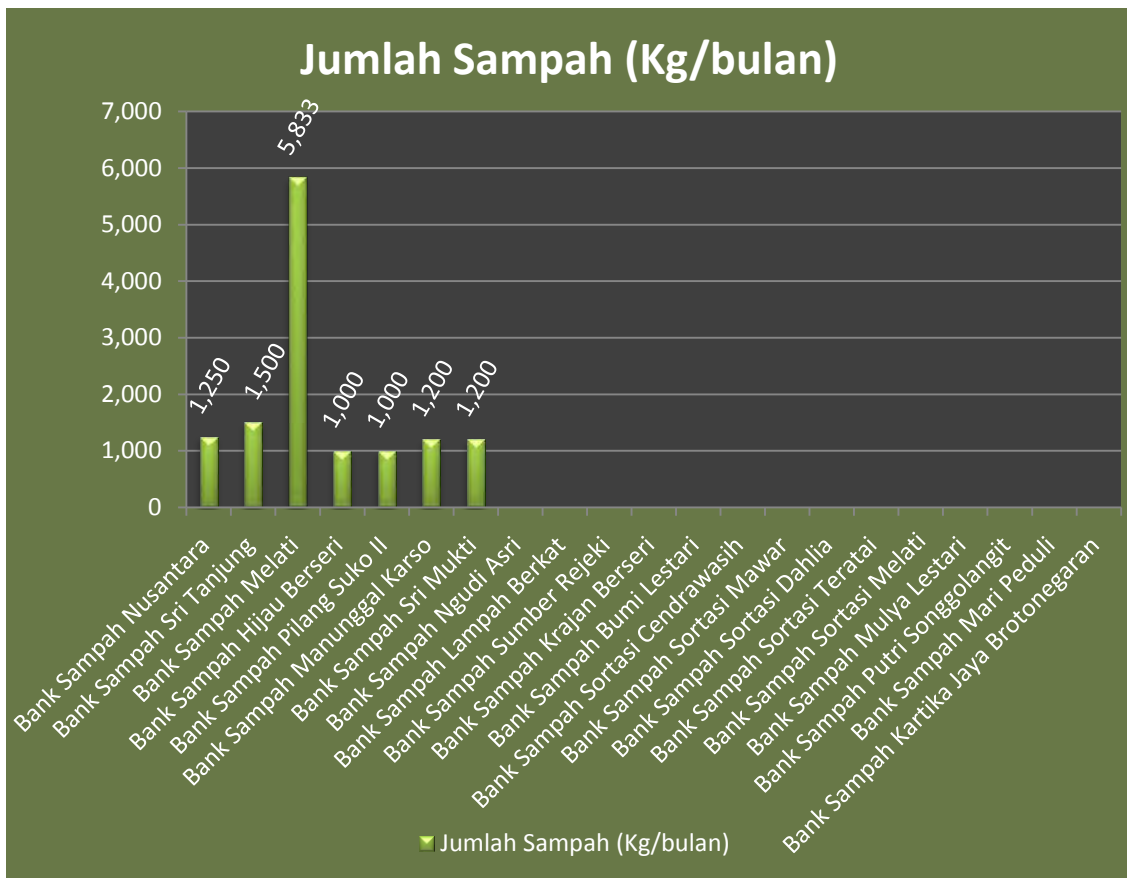
TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Kabupaten Ponorogo memiliki satu TPA yang terletak di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan. Terpilihnya lokasi TPA di Desa Mrican tersebut karena sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Ponorogo yaitu jauh dari pemukiman dan dibangun diatas lahan non produktif. Luas lahan TPA tersebut yakni 1,7 ha. Informasi terkait TPA Mrican tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-23. Jenis TPA Sampah Domestik di Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2020

No.	Kabupaten	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)
1.	Ponorogo	TPA Mrican	<i>Control Lanfield</i>	1,7 Ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Ponorogo memiliki 21 Bank Sampah dengan status semua aktif dan dihitung jumlah sampah dengan jumlah ton/bulan. (**Lampiran tabel 48**).



Gambar II-83. Jumlah Bank Sampah

d. *Impact*

Debit limbah padat, limbah cair, limbah B3 cair, dan limbah B3 padat berdasarkan sumber pencemaran di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada data **lampiran Tabel-35**. Volume limbah Padat paling banyak yaitu dihasilkan oleh RSUD Hardjono dengan jumlah 2,288 m³/hari. Begitu pula volume limbah cair domestik dan limbah B3 padat paling banyak dihasilkan oleh RSUD dr. Hardjono. RSUD dr. Hardjono menghasilkan limbah domestik/debit air limbah sebanyak 170 m³/hari atau kurang lebih

sebanyak 170.000 liter/hari. Sedangkan untuk limbah padat B3 dihasilkan sebanyak 2,288 m³/hari.

Berdasarkan **lampiran tabel 38** diketahui jumlah penggunaan LPG terbanyak yaitu untuk Industri sedang. Sedangkan penggunaan untuk Industri Sedang serta Industri besar masih menggunakan bahan bakar kayu.

Tabel II-24. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga

No	Penggunaan	LPG	Kayu Bakar
A	Industri		
1	a. Industri Kecil		
	b. Industri Sedang	95.361	241.280
	c. Industri Besar	-	62.669
2	Rumah Tangga		

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, 2020

e. Resposes

Upaya pemerintah dalam menanggapi isu pegelolaan limbah B3 adalah dengan adanya memberikan legalisasi kepada para pelaku usaha berupa dokumen Izin Lingkungan. Kemudian setelah izin ligkungan terbit akan dilakukan pengawasan terhadap perizinan tersebut. (**Lampiran Tabel 41 dan lampiran Tabel 43**).

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan inovasi dalam pengeloan lingkungan hidup daerah yang telah tercantum dalam **lampiran tabel 61**. Dalam tabel tersebut tercantum inovasi terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Ponorogo yaitu Pembangunan Pendaaurulangan sampah (PDU) , Kelurahan Purbosuman dan rumah kompos di desa plosojenar kecamatan kauman kegiatannya adalah melakukan pengomposan sampah organik dan mencacah sampah. Kemudian Pemerintah telah menyelesaikan masalah yang diadukan oleh masyarakat terkait

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

perinsutrian dan pertambangan yang tentunya sumber dari limbah B3. Status pengaduan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini. (**lampiran tabel 50**).

Tabel II-25. Status Pengaduan Masyarakat

No.	Pihak Yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progress Pengaduan
1	warga pinggirsari	Bau dan Asap penggorengan Kopi	2020	Terselesaikan
2	warga bungkal	Bau Limbah dari Pabrik Tahu an.Bpk Guntur Bungkal	2020	Terselesaikan
3	Warga Pulung	Penambangan pasir pomahan pulung	2020	Terselesaikan
4	Warga Bedikulon	Bau Limbah dari Pabrik tahu UD.Maju Makmur	2020	Terselesaikan
5	Warga Desa Wotan	Ternak Ayam Desa Wotan Kec.Pulung	2020	Terselesaikan
6	Warga RT.36 RW.12 Dkh.Tampo 2,Desa Trisono Babadan (Widarto)	Debu dari penggilingan padi bpk.Dwi Cahyono (RT.003,RW.009,Dkh Tampo I Desa Trisono,Kec.Babadan)	2020	Terselesaikan
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dampak dari penambangan batu di Desa Temon (Pintu Intake Jaringan irigasi yang tertutup limbah penambangan, longsoran dari penambangan yang menyebabkan penyempitan penampang sungai.	2020	Terselesaikan
8	Warga Kel.Tambakbayan (Bpk.Guspri)	Bau kotoran ayam, dan pandangan yang kurang enak dari ternak ayam jago	2020	Terselesaikan

BAB III

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Terjadinya degradasi atau penurunan kualitas lingkungan dalam suatu wilayah merupakan salah satu dari akibat dari pertambahan populasi dalam suatu wilayah yang dapat berpotensi untuk menimbulkan ketidak mampuan dalam menampung dan mendukung secara optimal berbagai aktivitas manusia untuk kepentingan kehidupan termasuk menyebabkan aktivitas pembangunan di segala bidang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mana pada praktiknya dalam kegiatan pembangunan dilakukan pemanfaatan secara terus-menerus terhadap sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas, baik jumlah maupun dalam kualitas serta permintaan akan sumber daya alam yang makin lama makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam yang mana hal tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting di tengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Selama ini data kualitas lingkungan hidup hanya diperoleh melalui proses laboratorium ataupun sarana berbasis teknologi lainnya, misal citra satelit. Hal ini tentunya akan menyulitkan bagi masyarakat awam untuk mengetahui angka pengukuran karena diperlukan latar belakang berbasis keilmuan teknis. Selain itu indikator lingkungan hidup diukur secara parsial, yaitu berdasarkan media, seperti

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

air, udara dan lahan sehingga sulit mendapatkan gambaran yang dapat mewakili kondisi lingkungan hidup secara utuh dan menyeluruh. Sementara pemahaman akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup sangatlah penting untuk mendorong para pemangku kepentingan melakukan aksi nyata terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena hal tersebut, maka dikembangkanlah indeks kualitas lingkungan hidup yang dapat memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks tersebut diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, cukup atau buruk. Indeks kualitas lingkungan hidup tersebut mencerminkan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Berikut merupakan indeks kualitas dari masing-masing kondisi tersebut. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 sebesar 60,00 atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 57,83 (skala Cukup); nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020 adalah sebesar 93,74 atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 90.60; dan nilai Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITL) tahun 2020 adalah sebesar 82,08 atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 65.04. Sehingga didapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sebesar 78,50 (Skala Baik) atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2019 sebesar 70.54. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo selalu memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah dengan memperhatikan isu prioritas lingkungan hidup daerah dan merencanakan pembangunan berwawasan lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang jika tidak dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya akan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga menyebabkan krisis pangan, air, energi, dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Kabupaten Ponorogo cenderung mengalami penurunan kuantitas dan kualitasnya dari waktu ke waktu. Isu lingkungan hidup di Kabupaten Ponorogo yang membutuhkan penanganan dengan segera meliputi :

- a. Penurunan kualitas air sungai;
- b. Peningkatan timbulan sampah;
- c. Alih fungsi lahan; dan
- d. Penurunan muka air tanah.

3.1 Metode Pengumpulan Data

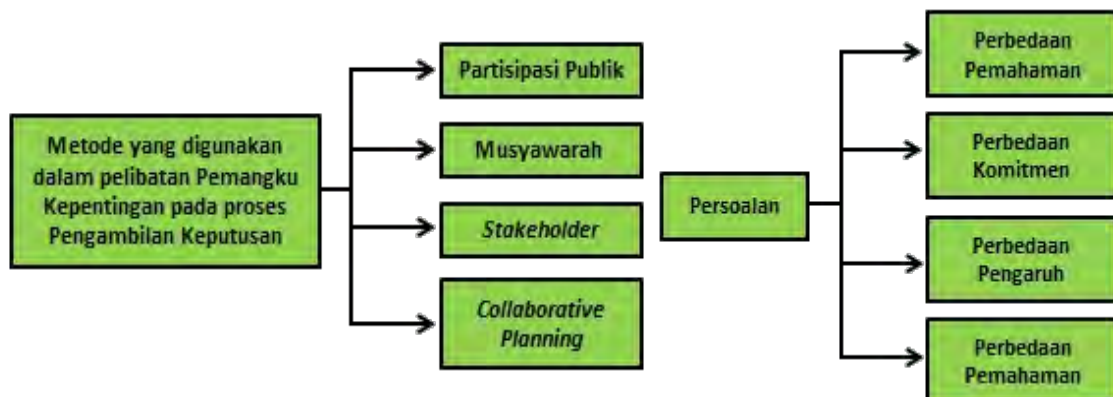
Dalam menetapkan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Ponorogo dilakukan langkah-langkah meliputi :

- a. Melakukan diskusi dengan pihak terkait termasuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Komunitas Pemerhati Lingkungan, dan Pelaku Usaha. Dalam penyusunan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Ponorogo melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal tersebut didasari oleh beberapa landasan hukum yaitu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu ayat (1) dan (2) :

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa :
 - Pengawasan sosial;
 - Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - Penyampaian informasi dan/atau laporan;

Proses pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penetapan isu prioritas lingkungan hidup daerah dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.



Gambar III-1. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Dalam Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Di dalam hal ini, definisi dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu (manusia) yang memiliki hubungan, kepentingan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dari keputusan, kebijakan, dan operasi suatu organisasi atau perusahaan.

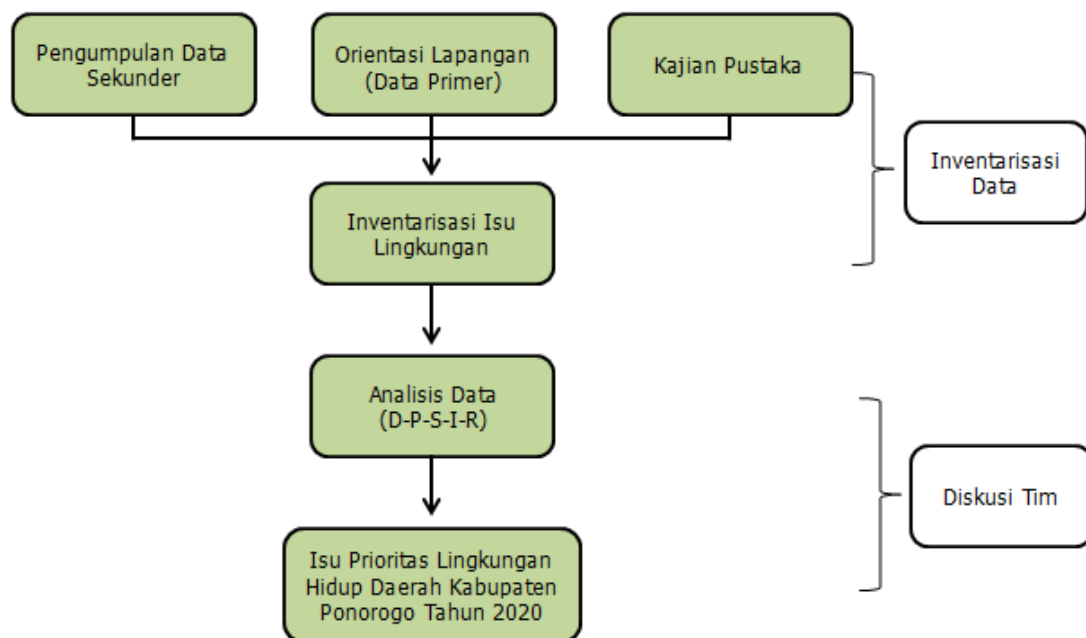
Berikut merupakan fungsi dari proses pelibatan pemangku kepentingan dalam penetapan isu prioritas lingkungan hidup diantaranya :

- Memperoleh pemahaman mengenai informasi terkait lingkungan hidup, termasuk isu dan masalah lingkungan hidup (tahap pelingkupan);
 - Memperoleh masukan mengenai kemungkinan-kemungkinan pemilihan dalam kegiatan mitigasi;
 - Menyeimbangkan antara hak dan manfaat diantara kelompok-kelompok masyarakat guna menghindari potensi konflik sosial-keadilan (tahap pengkajian);
 - Meningkatkan kualitas dalam pembuatan keputusan dengan mempertimbangkan aspek dan pandangan yang berbeda-beda;
 - Membangun kesepahaman dan kesepakatan dalam mencari solusi terbaik untuk semua kalangan;
 - Menjadikan proses pembuatan keputusan lebih transparan dan terbuka.
- b. Melakukan kegiatan pemantauan secara langsung di lokasi/area kegiatan (data primer).
- c. Melakukan kegiatan analisa dan mengambil data sekunder baik data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan Perguruan Tinggi dari hasil kajian yang telah dilakukan terlebih dahulu.

Proses penentuan isu prioritas lingkungan hidup daerah dalam penyusunan Dokumen IKPLHD dilakukan dengan metode *Participatory Approaches and Expert Opinion*. Isu prioritas lingkungan hidup daerah

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

diperoleh melalui pengumpulan informasi yang dilakukan oleh kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pendapat pakar (*expert opinion*) melalui forum *Forum Group Discussion* (FGD). Selanjutnya isu-isu lingkungan hidup yang telah teridentifikasi tersebut dilakukan proses penentuan isu prioritas. Diagram alur penentuan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Gambar III-2 berikut.



Gambar III-2. Diagram Alur Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

3.2 Metode Pengumpulan Data

Informasi yang dibutuhkan sebagai bahan untuk melengkapi DIKPLH Kabupaten Ponorogo 2020 diperoleh dari hasil diskusi berdasarkan data dari dinas terkait di Kabupaten Ponorogo mengenai data

yang mana proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 metode yaitu survei data secara primer dan sekunder. Survei data primer adalah metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara langsung yaitu berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. Sedangkan survei data sekunder merupakan metode pengumpulan data/penggalian informasi dengan memanfaatkan dokumen, laporan, atau informasi tertulis lainnya yang telah tersedia sebelumnya baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Berikut informasi mengenai metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun dokumen ini dapat dilihat pada tabel III-1 dibawah ini.

Tabel III-1. Kebutuhan Data IKPLHD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No.	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber
1	Luasan kawasan lindung dan status hutan	Survei sekunder	Bappeda Kabupaten Ponorogo
2	Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	Survei sekunder	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Luasan kerusakan tanah	Survei Primer	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
4	Luasan wilayah dan perubahan penggunaan lahan pertanian	Survei sekunder	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo
5	Hasil uji kualitas air sumur	Survei sekunder	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo
6	Kegiatan penghijauan dan reboisasi yang dilakukan	Survei sekunder	UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo
7	Data bencana alam, jumlah korban, dan	Survei sekunder	Badan Penanggulangan

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

	kerugian		Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo
8	Hasil uji kualitas air sungai, danau/situ/embung	Survei sekunder	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
9	Data penggunaan bahan bakar di Kab. Ponorogo	Survei sekunder	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
10	Kondisi sungai, danau/waduk/situ /embung	Survei sekunder	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo
11	Jenis pemanfaatan lahan	Survei sekunder	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo
12	Luas areal pertambangan	Survei sekunder	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo
13	Penyakit utama yang banyak diderita penduduk	Survei sekunder	Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
14	Jumlah rumah tangga miskin	Survei sekunder	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15	Volume limbah padat dan cair	Survei sekunder	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
16	Data suhu udara rata-rata bulanan	Survei sekunder	Accuweather
17	Hasil uji kualitas udara ambien	Survei sekunder	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
18	Perubahan penambahan ruas jalan	Survei sekunder	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

			dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo
19	Data dokumen serta pengawasan izin lingkungan	Survei sekunder	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
20	Data perusahaan yang mendapat izin mengelola limbah B3	Survei sekunder	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
21	Jumlah dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Survei sekunder	Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo
22	Data timbulan sampah per hari	Survei sekunder	Dinas Lingkungan Hidup
23	Luas lahan kritis	Survei sekunder	Perum Perhutani Divisi Jawa Timur
24	Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi	Survei sekunder	UPT. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Kab. Ponorogo
25	Penerima penghargaan lingkungan hidup	Survei sekunder	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
26	Produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup	Survei sekunder	Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo
27	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	Survei sekunder	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ponorogo
28	Personil lembaga pengelola lingkungan hidup	Survei sekunder	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tim Penyusun, 2021

3.3 Penyaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Sehubungan dengan pengisian data dan informasi lingkungan hidup dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

(SILHKD), maka agar Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dapat mengakses SILHKD dan diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah (SILKHD) Kabupaten Ponorogo.

Penyaringan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 dilakukan dengan melalui Pembentukan Tim Penyusun Dokumen IKPLHD, proses diskusi dalam bentuk *Forum Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Pembentukan tim penyusun Dokumen IKPLHD sebagaimana ketentuan penyusunan Dokumen IKPLHD terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan melibatkan Perguruan Tinggi.

2. Pembentukan *Forum Group Discussion* (FGD) Dalam Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup membentuk forum diskusi (FGD) dengan melibatkan instansi pemerintahan dan non pemerintahan (LSM dan akademisi) terkait Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ponorogo.

3.4 Analisis Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah kedepannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menjadi titik fokus

dalam prioritas pembangunan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata/riil yang dihadapi dalam pembangunan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan jika dalam hal pemanfaatan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Proses analisa isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 adalah melalui proses forum diskusi/*Forum Group Discussion* (FGD) berdasarkan analisa *Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response* (DPSIR). Kerangka DPSIR yang akan dianalisa yaitu :

a. Indikator pemicu terhadap lingkungan (*driving force*)

Indikator ini menggambarkan faktor pemicu yang berasal dari aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan suatu akibat pada lingkungan dan sumber daya alam.

b. Indikator tekanan terhadap lingkungan (*pressure*)

Indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

c. Indikator kondisi lingkungan (*state*)

Indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan terkait situasi, kondisi, dan pengembangannya.

d. Indikator dampak lingkungan (*impact*)

Indikator ini menggambarkan dari dampak dari faktor pemicu dan berbagai hal yang dapat menekan terjadinya perubahan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

e. Indikator respon terhadap lingkungan (*response*)

Indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian dan aksi dari *stakeholder* terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari kalangan pemerintah, industri, KSM, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum.

Kriteria-kriteria yang diambil untuk menentukan isu prioritas pada penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Kerusakan sumber daya alam (SDA);
- b. Kerusakan keanekaragaman hayati;
- c. Penurunan kualitas lingkungan hidup (pencemaran dan kerusakan);
- d. Besaran dampak terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup;
- e. Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Selanjutnya ditetapkan isu prioritas terkait lingkungan hidup dari beberapa isu strategis tersebut. Berdasarkan hasil dari forum diskusi publik didapatkan isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sebagai berikut :

1. Penurunan Kualitas Air Sungai

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pada pelaku usaha dapat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berimbas pada penurunan kualitas lingkungan hidup yang salah satunya adalah dari menurunnya kualitas air sungai. Salah satu penyebab dari terjadinya penurunan kualitas air ada dari semakin banyaknya pelaku usaha yang mana dalam kegiatannya menghasilkan limbah cair akan tetapi belum memiliki sistem pengolahan air limbah yang sesuai dengan

ketentuan teknis yang berlaku maupun pelaku usaha yang belum memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC) contohnya pada pelaku usaha industri tahu, bidang peternakan, pemurnian pasir, dst. Dampak pencemaran perlu diantisipasi agar sumber daya yang ada masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Berbagai upaya pengendalian dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

2. Peningkatan Timbulan Sampah

Jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo memiliki kecenderungan untuk mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari besar jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo dari tahun 2018 yaitu sebanyak 963.002 jiwa menjadi 971.617 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 0,89 % pada tahun 2019, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 yaitu sejumlah 978.227 atau terjadi kenaikan sebesar 0,68 % yang mana akan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya timbulan sampah jenis domestik/rumah tangga maupun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan domestik maupun operasional pelaku usaha yang menghasilkan limbah. Kondisi pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19 juga cukup mempengaruhi peningkatan timbulan limbah medis secara masif, contohnya dari bekas alat *rapid test*, reagen, masker, APD, dll.

Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha dalam hal pengelolaan sampah menjadi polemik di Ponorogo. Terlebih kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican masuk kedalam status *overload* atau melebihi kapasitas tampung. Keberadaan TPA Mrican yang dibangun

pada tahun 1995 ini menampung sampah sekitar $\pm 5.000 \text{ m}^3$ setiap harinya.

3. Alih Fungsi Lahan

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ponorogo terjadi di setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan lahan hunian dan area lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Alih fungsi lahan menjadi permasalahan yang sulit untuk dihindari jika melihat dari kebutuhan akan area lahan tersebut. Area lahan yang teralih fungsikan menjadi area permukiman maupun area usaha tentunya membutuhkan material bangunan untuk kegiatan konstruksi. Hal tersebut juga mempengaruhi kebutuhan akan material bangunan seperti pasir dan batu yang semakin meningkat yang menimbulkan maraknya penambangan pasir dan batu dari galian C.

4. Penurunan Muka Air Tanah

Penurunan muka air tanah terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah eksploitasi air tanah. Saat ini dalam kegiatan penggunaan air tanah, masyarakat khususnya pelaku usaha telah menggunakan teknologi yang lebih maju yaitu menggunakan pompa sible yang dapat menjangkau sumber air tanah lebih dalam. Di satu sisi masyarakat mendapatkan sumber air yang lebih terjamin ketersediannya, akan tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan dampak penurunan kualitas lingkungan jika dilakukan secara tidak terkontrol. Aplikasi penggunaan pompa sibel pada umumnya digunakan untuk pengairan pada lahan pertanian atau persawahan, kebutuhan industri, dan rumah tangga. Tantangan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan terkait penggunaan air tanah dalam kegiatan pengairan lahan pertanian

dan rumah tangga juga terkendala dengan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Tabel III-2. Analisis DPSIR Berdasarkan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

No.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	Driving Force (Pemicu)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respond (Respon)
1.	Penurunan Kualitas Air Sungai	1. Curah hujan (Lampiran Tabel 24 dan Gambar II-11) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi potensi air tanah dimana secara hidrologi air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian meresap kedalam tanah (air tanah) dan sebagian mengalir menjadi air permukaan (waduk, sungai, danau, rawa dll).	1. Peningkatan jumlah penduduk (Lampiran Tabel 45) pada Tahun 2020 yang berkaitan dengan : - Peningkatan jumlah debit air limbah domestik (<i>tinja/black water</i>) yang berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas buang air besar yang layak (Lampiran tabel 31). - Banyaknya masyarakat yang	1. Kondisi sungai meliputi panjang, kedalaman, dan debit air di Ponorogo yang merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya (Lampiran Tabel 27). 2. Kondisi danau/Waduk/ Embung/Situ di Ponorogo meliputi luas dan volume	1. Hasil uji kualitas air sumur (fisika dan kimia) dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan terdapat 52 titik dengan kriteria status mutu air Memenuhi dan 8 titik dengan status Cemar Ringan	1. Bantuan stimulan sistem pengolahan air limbah domestik dengan melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat di Kab. Ponorogo. 2. Mewajibkan kegiatan/industri yang menghasilkan limbah cair agar memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC) 3. Melakukan pengawasan izin lingkungan

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	<i>Driving Force</i> (Pemicu)	<i>Pressure</i> (Tekanan)	<i>State</i> (Kondisi)	<i>Impact</i> (Dampak)	<i>Respond</i> (Respon)
			<p>membutuhkan air bersih (Lampiran Tabel 25).</p> <p>- Meningkatnya area permukiman warga, area industri, dan perkebunan yang mana dalam kegiatannya menggunakan air tanah (Lampiran Tabel 13).</p>	<p>yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan air baku (Tabel 28).</p>		<p>terhadap pelaku kegiatan/ usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan atau khususnya yang menimbulkan limbah cair.</p> <p>4. Melakukan kegiatan reboisasi guna memperbaiki keseimbangan lingkungan di beberapa area kecamatan (Tabel 16).</p> <p>5. Menerapkan penegakan hukum, pemberian sanksi, dan</p>

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	Driving Force (Pemicu)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Respond (Respon)
						penghargaan (<i>reward</i>) terhadap upaya pengelolaan sampah.
2.	Peningkatan Timbulan Sampah	1. Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo dari tahun 2018 yaitu sebanyak 963.002 jiwa menjadi 971.617 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 0,89 % pada tahun 2019, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 yaitu sejumlah 978.227 atau terjadi kenaikan	1. Nilai prosentase angka keluarga miskin yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 4,65 %, tahun 2019 sebesar 5,15 %, dan tahun 2020 sebesar 6,24 % dari total jumlah rumah tangga di Kab. Ponorogo (Lampiran tabel 34) yang berkaitan dengan	1. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican yaitu dengan luas 1,27 ha dan beroperasi dengan sistem <i>controlled landfill</i> (Lampiran tabel 46).	1. Kabupaten Ponorogo menghasilkan sampah sebesar 2.44,46 m ³ /hari (Lampiran tabel 47). 2. Volume limbah padat B3 yang dihasilkan oleh 5 rumah sakit di Kabupaten Ponorogo (Lampiran tabel 35).	1. Sosialisasi kepada masyarakat desa/ kelurahan terkait kegiatan pengelolaan sampah domestik 2. Melakukan sosialisasi terhadap kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah B3 dengan menerbitkan Izin

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	<i>Driving Force</i> (Pemicu)	<i>Pressure</i> (Tekanan)	<i>State</i> (Kondisi)	<i>Impact</i> (Dampak)	<i>Respond</i> (Respon)
		<p>sebesar 0,68 % yang mana akan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya timbulan sampah jenis domestik/rumah tangga maupun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan domestik maupun operasional pelaku usaha yang menghasilkan limbah</p>	<p>pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan tata cara pengelolaan limbah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pengelolaan sampah yang baik oleh masyarakat dengan pendidikan rendah (tidak sekolah) yaitu 184.085 orang (lampiran tabel 32)</p>			<p>Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Tabel 42) kepada pelaku kegiatan/usaha sesuai standar peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Melakukan pengawasan izin lingkungan terhadap pelaku kegiatan/ usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan atau khususnya yang menimbulkan limbah (Tabel 43).</p>

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	<i>Driving Force</i> (Pemicu)	<i>Pressure</i> (Tekanan)	<i>State</i> (Kondisi)	<i>Impact</i> (Dampak)	<i>Respond</i> (Respon)
						4. Menerapkan penegakan hukum, pemberian sanksi, dan penghargaan (<i>reward</i>) terhadap upaya pengelolaan sampah. 5. Menggiatkan Bank Sampah dan melakukan pembinaan terhadap kader Bank Sampah sehingga dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (<i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i>).

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	<i>Driving Force</i> (Pemicu)	<i>Pressure</i> (Tekanan)	<i>State</i> (Kondisi)	<i>Impact</i> (Dampak)	<i>Respond</i> (Respon)
						<p>Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Ponorogo sebanyak 7 Bank Sampah dan menyerap sampah sebanyak 12,9 ton/bulan (Tabel 48)</p> <p>6. Penyediaan bak sampah terpilah organik dan anorganik di fasilitas umum.</p>
3.	Alih Fungsi Lahan	1. Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo dari tahun 2018 yaitu sebanyak 963.002 jiwa menjadi	1. Angka luasan lahan kritis atau lahan tidak produktif di Kabupaten Ponorogo yaitu	1. Kabupaten Ponorogo memiliki kawasan hutan lindung seluas 16.510,69 ha	1. Penurunan jumlah luasan lahan persawahan dari tahun 2019 yaitu seluas 40.234,84	1. Melakukan pelestarian pada cagar alam yaitu pada aspek flora/tanaman pada khususnya

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	<i>Driving Force</i> (Pemicu)	<i>Pressure</i> (Tekanan)	<i>State</i> (Kondisi)	<i>Impact</i> (Dampak)	<i>Respond</i> (Respon)
		<p>971.617 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 0,89 % pada tahun 2019, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 yaitu sejumlah 978.227 atau terjadi kenaikan sebesar 0,68 % yang mana akan meningkatkan kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha untuk mendapatkan area permukiman dan area usaha.</p>	<p>seluas 1.672,4 ha dan luasan lahan sangat kritis yaitu seluas 14.930,2 ha (Tabel 6).</p>	<p>dan kawasan resapan air seluas 42.683 ha (Tabel 1)</p>	<p>ha menjadi 36.163,8 ha pada tahun 2020 (Tabel 2). 2. Peningkatan jumlah luasan lahan kering dari tahun 2019 seluas 19.427,33 ha menjadi 70896,24 ha pada tahun 2020 (Tabel 2).</p>	<p>di Kabupaten Ponorogo (Tabel 4). 2. Melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi sesuai target pemerintah daerah sebesar 51,8 ha yang dapat direalisasikan sesuai target yaitu 51,8 ha dengan 84.980 batang pohon (Tabel 16). 2. Melakukan pembinaan dan kerjasama dengan masyarakat dan</p>

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	<i>Driving Force</i> (Pemicu)	<i>Pressure</i> (Tekanan)	<i>State</i> (Kondisi)	<i>Impact</i> (Dampak)	<i>Respond</i> (Respon)
						<p>KSM setempat dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan mengenai penghijauan.</p> <p>3. Melakukan pengawasan terkait perusahaan atau kegiatan usaha yang melakukan alih fungsi lahan.</p>
4.	Penurunan Muka Air Tanah	1. Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo dari tahun 2018 yaitu sebanyak 963.002 jiwa menjadi 971.617 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar	1. Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dengan memanfaatkan sumur adalah sejumlah 164.845 rumah tangga dan jumlah tersebut	1. Pada tahun 2020, Kabupaten Ponorogo mengalami curah hujan tertinggi pada bulan Februari dengan jumlah	1. Adanya genangan bahkan potensi terjadinya banjir yang diakibatkan oleh penurunan air tanah (Tabel 44) sehingga dapat	1. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menginisiasi kegiatan yang bernama "Gerak Warog" yang merupakan singkatan dari

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	<i>Driving Force</i> (Pemicu)	<i>Pressure</i> (Tekanan)	<i>State</i> (Kondisi)	<i>Impact</i> (Dampak)	<i>Respond</i> (Respon)
		<p>0,89 % pada tahun 2019, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 yaitu sejumlah 978.227 atau terjadi kenaikan sebesar 0,68 % yang mana akan meningkatkan kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha untuk mendapatkan kebutuhan akan air bersih.</p>	<p>lebih banyak daripada jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dengan memanfaatkan PDAM yaitu sejumlah 71.857 rumah tangga (Tabel 25).</p>	<p>rata-rata 16 hari dan curah hujan terendah pada bulan Agustus (Tabel 24).</p> <p>2. Luas lahan sawah di wilayah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 seluas 36.163,8 ha.</p>	<p>menurunkan kualitas hidup masyarakat karena hal tersebut dapat memicu berkembangbiakan nyamuk yang dapat menimbulkan penyakit (Tabel 33).</p> <p>2. Dapat memicu terjadinya kerusakan pada bangunan/ infrastruktur, fasilitas umum seperti jembatan dan jalan. Hal ini terjadi karena penurunan permukaan</p>	<p>singkatan dari Gerakan Reboisasi, Alam, Kehutanan, & Wilayah Air, Rakyat, Obah Gumregah (Tabel 61).</p> <p>2. Pembuatan sumur resapan untuk menampung air hujan di area rawan.</p> <p>3. Melaksanakan konservasi lingkungan dengan semaksimal mungkin dengan contoh pemanfaatan kembali air hujan</p>

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

No.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	<i>Driving Force</i> (Pemicu)	<i>Pressure</i> (Tekanan)	<i>State</i> (Kondisi)	<i>Impact</i> (Dampak)	<i>Respond</i> (Respon)
					<p>tanah dapat menyebabkan tanah ambles dan tentunya infrastruktur tersebut akan mengalami perubahan posisi. Hal ini tentunya tidak hanya merugikan bangunan saja akan tetapi juga menimbulkan kerugian dalam bidang ekonomi.</p>	<p>untuk diolah kembali menjadi air bersih.</p> <p>4. Menjaga area atau kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana peruntukannya sebagai kawasan resapan alami.</p> <p>5. Membuat regulasi mengenai pengaturan penggunaan air tanah untuk menghindari atau meminimalisir eksploitasi air tanah.</p>

BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas tiap lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas kepada publik). Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan perbaikan kualitas lingkungan, isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menaruh komitmen tinggi di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Ponorogo berusaha dan berupaya untuk melakukan pengelolaan, pelestarian, pengendalian, dan perlindungan di bidang lingkungan hidup di daerah. Untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka diperlukan upaya strategis didalam pengelolaan lingkungan dalam aplikasi kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Beberapa hal yang mendasar yang perlu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan antara lain :

1. Mempertimbangkan wacana lingkungan hidup pada setiap proses pembangunan terutama pada tahap pengambilan keputusan;

2. Proses pembangunan yang berlangsung terus menerus dengan ditopang oleh kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan;
3. Berupaya untuk menekan timbulnya dampak lingkungan hidup dari pada menangani dampak lingkungan hidup;
4. Mengelola sumber daya alam di daerah khususnya air bawah tanah secara efisien dan dipertahankan upaya konservasinya terutama pada sumber daya alam yang tidak diperbaharui;
5. Mengoptimalkan fungsi keanakeragaman hayati di daerah guna meningkatkan dan memberi nilai tambah ekologi bagi ekosistem yang ada maupun nilai ekonomi bagi masyarakat;
6. Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan sehemat mungkin dan dicari sumber daya alternatif lainnya, sehingga dapat digunakan selama mungkin;
7. Mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi lingkungan (*Geographic Information System/GIS* dan Sistem Informasi Lingkungan/ SIL) agar pengelolaan lingkungan berjalan efektif, efisien dan tersistem dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam menghadapi era globalisasi;
8. Pembangunan yang dilakukan memungkinkan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang.

Total anggaran pengelolaan lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup) Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 11.509.525.929,00 yang mana secara keseluruhan terjadi penurunan dibanding dengan anggaran pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 11.773.818.315,00.

4.1 Inovasi Perbaikan Kualitas Lingkungan Berdasarkan Isu Prioritas

Untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ponorogo, beberapa program pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. Gerak Warog
- b. Komunitas Ponorogo Resik Resik
- c. Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- d. Pengadaan Instalasi Sumur Resapan
- e. Penyelenggaraan Adiwiyata
- f. Bantuan Mesin Pencacah Sampah
- g. Program Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang
- h. Program Pengurangan Emisi Kendaraan Bermotor

➤ Gerak Warog

Gerak warog adalah singkatan dari Gerakan Reboisasi, Alam, Kehutanan, & Wilayah Air, Rakyat, Obah Gumregah yang diresmikan oleh Bupati Ponorogo pada 18 Januari 2020. Gerakan ini berawal dari masalah semakin dalamnya sumber air tanah di permukiman, dan semakin luas lahan kering yang bertambah disebabkan oleh perubahan iklim di Ponorogo. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo beserta komunitas pencinta kelestarian alam menginisiasi suatu Gerakan Reboisasi, Alam, Kehutanan & Wilayah Air, Rakyat Obah Gumregah (Gerak Warog).

Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah mengadakan reboisasi di sejumlah titik mata air yang diharapkan mampu menysar minimal ke 75 titik mata air di wilayah Kabupaten Ponorogo. Gerak Warog ini

dalam konsep kerja reboisasi melakukan kemandirian partisipatif dalam hal pengadaan bibit, penanaman, sampai dengan pemeliharaan.

Kegiatan “Gerak Warog” tidak hanya gerakan yang terfokus pada kegiatan penanaman, akan tetapi sampai ke tahapan pemeliharaan sehingga kelestarian alam bisa terjaga.



Gambar IV-1. Kegiatan Launching Program “Gerak Warok”

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

➤ **Komunitas Ponorogo Resik Resik**

Ponorogo Resik Resik merupakan komunitas sosial independen yang memiliki tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih nyaman dengan cara memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat utamanya di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 40 anggota Ponorogo Resik Resik dan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Diharapkan dari kegiatan ini dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat di Kabupaten Ponorogo dalam mengelola sampah sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga.



Gambar IV-2. Kegiatan Komunitas Ponorogo Resik Resik

➤ **Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)**

Sejak beroperasi pada 31 Januari Tahun 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat meliputi Badan Keswadayaan Masyarakat di lingkungan masyarakat Kecamatan Ponorogo, Lembaga Keswadayaan Masyarakat di lingkungan Kecamatan Siman, dan para tokoh di Kabupaten Ponorogo, serta semua pengusaha sedot WC di Kabupaten Ponorogo.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan proses akhir dari pengolahan lumpur tinja di seluruh Kabupaten Ponorogo yang mana pada saat ini beroperasi dengan kapasitas 12,5 m³ per hari volume lumpur tinja yang masuk, maka harapan di Kabupaten Ponorogo lumpur tinja yang telah disedot baik dari warga masyarakat dan pengusaha sedot WC tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, tanah pertanian, dan tidak dibuang secara sembarangan.

Inovasi yang telah dilakukan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yaitu hasil pengolahan lumpur kering yang telah diolah bisa dijadikan pupuk tanaman non-pangan.

➤ **Pengadaan Instalasi Sumur Resapan**

Sumur resapan merupakan salah satu bentuk rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah yang mana hal tersebut cukup efektif untuk meminimalisir dampak kekeringan pada musim kemarau dengan menjaga cadangan air tanah dan banjir ketika musim penghujan sebagai area resapan serta

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

menghindari genangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo telah menjalankan realisasi pengadaan instalasi sumur resapan yang didistribusikan ke beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo berikut sosialisasi dan pembangunan instalasi sumur resapan kepada warga. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat mendorong peningkatan kepedulian masyarakat akan konservasi alam yang ramah lingkungan.



Gambar IV-3. Serah Terima Bantuan Sumur Resapan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

➤ **Penyelenggaraan Adiwiyata**

Program Adiwiyata merupakan kegiatan penghargaan yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo kepada penyedia jasa pendidikan seperti sekolah-sekolah yang memiliki lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tahunan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada insan muda mengenai tanggung jawab akan turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO



Gambar IV-4. Kegiatan Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

➤ **Bantuan Mesin Pencacah Sampah**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo menyerahkan bantuan alat Pencacah sampah kepada Sekolah Adiwiyata dan kelompok tani sebagai penunjang pengolahan sampah bagi penerima bantuan. Mesin pencacah sampah merupakan salah satu mesin pengolah sampah yang berfungsi untuk mencacah berbagai jenis sampah. Untuk mesin yang diperbantukan adalah jenis pengolah sampah organik yang dapat mencacah berbagai macam sampah seperti : rumput, limbah sayur, limbah buah, daun, ranting kecil, dan bahan organik lainnya.

Mesin ini berasal dari Anggaran DHBCT Dinas Lingkungan Hidup TA. 2020 berjumlah 6 buah dan kemudian diberikan kepada 5 Sekolah adiwiyata dan 1 kelompok tani. Pemberian mesin pencacah kepada sekolah adiwiyata tersebut merupakan sekolah yang siap maju dalam Program Adiwiyata Tingkat Provinsi, tujuannya adalah untuk memacu sekolah supaya bertambah semangat untuk maju dalam penilaian Adiwiyata tingkat yang lebih tinggi.



Gambar IV-5. Kegiatan Penyerahan Alat Pencacah Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

➤ **Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang**

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah kering yang telah dilakukan pemilahan yang mana hasil dari pengumpulan sampah tersebut akan disetorkan ke tempat pengrajin atau perusahaan daur ulang sampah.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga aktif dalam pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat yaitu pelatihan daur ulang sampah. Hasil dari daur ulang sampah organik berupa pupuk dan anorganik berupa kerajinan tangan yang diolah industri kecil oleh masyarakat akan dipasarkan melalui pameran industri kecil yang diselenggarakan oleh Dinas Industri, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo juga melakukan upaya untuk meminimalisir atau menekan banyaknya timbulan sampah berdasarkan kegiatan pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan membangun area Pusat Daur Ulang (PDU) Purbosuman. Sampah terpilah akan diolah lebih lanjut yaitu dengan pengomposan untuk mendapatkan atau meningkatkan nilai jual.



Gambar IV-6. Pusat Daur Ulang (PDU) Purbosuman Kabupaten Ponorogo

➤ **Kegiatan Pengawasan Terhadap Aplikasi Pengelolaan Limbah Industri/Usaha**

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Ponorogo sejalan dengan berkembangnya usaha perindustrian yang mana dalam kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan limbah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo berupaya untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku industri dalam hal kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap sampel output/outlet air limbah pada area kegiatan usaha yang dilakukan secara laboratorium.



Gambar IV-7. Kegiatan Pengawasan Air Limbah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

➤ **Program Pengurangan Emisi Kendaraan Bermotor**

Pengujian emisi kendaraan bermotor bagi kendaraan angkutan berupa uji KIR sebagai tanda laik jalan yang ada di Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. Hal ini bertujuan untuk menekan timbulan polusi udara akibat dari keadaan mesin yang sudah tidak mampu untuk menghasilkan emisi dibawah ambang batas yang ditentukan. Pengujian KIR pada kendaraan dilakukan mencapai 120 kendaraan per hari. Uji KIR dilakukan meliputi pengujian kepekatan asap, pemeriksaan bagian bawah kendaraan, suspensi roda, bantalan mesin, transmisi dan body, pengujian lampu utama, pengujian kincup roda depan, pengujian efisiensi rem utama, dan penimbangan berat kendaraan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan tetap mempertahankan kondisi lingkungan hidup yang baik, bukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Lingkungan hidup dengan sumber daya alam di dalamnya merupakan penyedia jasa ekosistem (*ecosystem services*), baik jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) yang mana apabila lingkungan hidup tidak dikelola dengan baik, tidak hanya aspek jasanya yang berkurang, akan tetapi bahkan dapat mengancam keselamatan dan stabilitas lingkungan secara keseluruhan. Dengan demikian, kemampuan lingkungan untuk segera pulih kembali dalam keadaan yang seimbang, jika mengalami perubahan atau gangguan akan menjadi sangat penting. Ancaman perubahan dapat berasal dari peningkatan timbulan limbah, pencemaran air, pencemaran udara, dsb.

Ancaman yang mempengaruhi ketahanan lingkungan hidup akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara ekosistem dan pertumbuhan pembangunan akan menjadi tantangan yang sangat besar. Pada akhirnya pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan akan menjadi suatu kesatuan.

Berdasarkan pembahasan dari Bab II s/d Bab IV Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(DIKPLHD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Isu prioritas utama terkait lingkungan hidup daerah yang dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah (OPD, KSM, dan Perguruan Tinggi) Kabupaten Ponorogo tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Penurunan kualitas air sungai;
 - b. Peningkatan timbulan sampah;
 - c. Alih fungsi lahan; dan
 - d. Penurunan muka air tanah.
2. Analisis DPSIR isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 disajikan pada Tabel III.2.
3. Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting di tengah meningkatnya tekanan dalam proses kehidupan manusia yang dapat berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Sementara pemahaman akan kualitas lingkungan hidup sangatlah penting untuk mendorong para pemangku kepentingan/kebijakan melakukan aksi nyata terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena hal tersebut, maka dikembangkanlah indeks kualitas lingkungan hidup yang dapat memberikan kesimpulan dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks tersebut diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, cukup atau buruk. Indeks kualitas lingkungan hidup tersebut mencerminkan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Berikut merupakan indeks kualitas dari masing-masing kondisi tersebut.

LAPORAN UTAMA
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO

Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 sebesar 60,00 atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 57,83 (skala Cukup); nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020 adalah sebesar 93,74 atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 90.60; dan nilai Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITL) tahun 2020 adalah sebesar 82,08 atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 65.04. Sehingga didapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sebesar 78,50 (Skala Baik) atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2019 sebesar 70.54. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berkomitmen tinggi untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah dengan memperhatikan isu prioritas lingkungan hidup daerah dan merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, rencana dan tindak lanjut termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan Kepala Daerah yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Memperhatikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo.
2. Berupaya untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan yang dapat meningkatkan nilai Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).

3. Memperhatikan dan mempertimbangkan status dan kualitas lingkungan dalam pengambilan kebijakan.
4. Merencanakan pembangunan dengan berwawasan lingkungan.
5. Menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air sungai, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan persampahan dan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
6. Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.
7. Menambah produk hukum bidang lingkungan hidup, kapasitas, dan kompetensi personil lembaga pengelola lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2008). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Sekretariat Provinsi Jawa Timur.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Wajin Bagi Pemerintah Daerah untuk Menyediakan dan atau Menerbitkan Informasi yang Berkaitan dengan Kepentingan Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2009). *Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur*. Surabaya: Sekretariat Provinsi.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara*. Jakarta: Sekretariat Negara.

LAMPIRAN TABEL

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Data : 2020

				Tutupan Lahan				
Nama Kawasan				Luas Kawasan	Vegetasi	Area Terbangun	Tanah	Badan
							Terbuka	Air
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
<i>Kawasan Lindung</i>	<i>Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya</i>	1. <i>Kawasan Hutan Lindung</i>		16510,69				
		2. <i>Kawasan Bergambut</i>		-				
		3. <i>Kawasan Resapan Air</i>		42683,00				
	<i>Kawasan Perlindungan Setempat</i>	1. <i>Sempadan Pantai</i>		2400,50				
		2. <i>Sempadan Sungai</i>		54,23				
		3. <i>Kawasan Sekitar Danau</i>						
		4. <i>Ruang Terbuka Hijau</i>						
	<i>Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya</i>	1. <i>Kawasan Suaka Alam</i>						
		2. <i>Kawasan Suaka Laut dan Perairannya</i>						
		3. <i>Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut</i>						

		4. Cagar Alam						
		5. Kawasan Pantai Berhutan						
		Bakau						
		6. Taman Nasional dan						
		Taman Nasional Laut						
		7. Taman Wisata Alam dan						
		Taman Wisata Alam Laut						
		8. Kawasan Cagar Budaya dan						
		Ilmu Pengetahuan						
	Kawasan Rawan	1. Kawasan Rawan Tanah						
	Bencana	Longsor						
		2. Kawasan Rawan						
		Gelombang Pasang						
		3. Kawasan Rawan Banjir						
	Kawasan Lindung	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan					
	Geologi		Batuan dan Fosil					
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam					
	iii. Kawasan							

..		<i>Keunikan Proses Geologi</i>					
..	<i>Kawasan Rawan Bencana</i>	<i>i. Kawasan Rawan</i>					
..		<i>Letusan Gunung Berapi</i>					
..		<i>ii. Kawasan Rawan</i>					
..		<i>Gempa Bumi</i>					
..		<i>iii. Kawasan Rawan</i>					
..		<i>Gerakan Tanah</i>					
..		<i>iv. Kawasan yang</i>					
..		<i>terletak di Zona Patahan Aktif</i>					
..		<i>v. Kawasan Rawan</i>					
..		<i>Tsunami</i>					
..		<i>vi. Kawasan Rawan</i>					
..		<i>Abrasi</i>					
..		<i>vii. Kawasan Rawan</i>					
..		<i>Gas Beracun</i>					

		<i>Kawasan yang Memberikan</i>	<i>i. Kawasan Imbuhan Air Tanah</i>					
		<i>Perlindungan Terhadap Air Tanah</i>	<i>ii. Sempadan Mata Air</i>					
			<i>Air</i>					
		<i>1. Cagar Biosfir</i>						
		<i>2. Ramsar</i>						
		<i>3. Taman Buru</i>						
		<i>4. Kawasan Perlindungan</i>						
	<i>Kawasan Lindung Lainnya</i>	<i>Plasma Nutfah</i>						
		<i>5. Kawasan Pengungsian</i>						
		<i>Satwa</i>						
		<i>6. Terumbu Karang</i>						
		<i>7. Kawasan Koridor Bagi</i>						
		<i>Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi</i>						
<i>Kawasan</i>								
<i>Budidaya</i>								
<i>Keterangan :</i>								

Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Kabupaten : Ponorogo

Tahun : 2020

No.	Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ponorogo	0	36163,8	70896,24	0	10432,06	680,95

Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
Kabupaten : Ponorogo
Tahun 2020

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	2	3
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	0,00
2.	Hutan Lindung	16510,69
3.	Taman Nasional	0,0
4.	Taman Wisata Alam	0,0
5.	Taman Buru	-
6.	Cagar Alam	218,4
7.	Suaka Margasatwa	-
8.	Taman Hutan Raya	-
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	-
2.	Hutan hak/hutan rakyat	0,000
3.	Hutan Kota	0,00
4.	Taman Hutan raya	0
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	0,0

Keterangan :) = Tidak Ada Luasan

*Sumber : *= PUPKP Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 **= BPKH*

Tabel 4 Keadaan Flora dan Fauna
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Hewan Menyusui	<i>Macaca nemestrina</i>	Beruk Sumatera	Ya	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Axis axis</i>	Rusa Tutul				
	<i>Rousa Timorensis</i>	Rusa Timor	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Kijang</i>	Muntiacus muntjak	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Macaca facicularis</i>	Kera ekor panjang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Hystrix javanica</i>	Landak	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Pteropus SP</i>	Kalong	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Hyllobates moloch</i>	Owa Jawa	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Symphalangus syndactylus</i>	Owa Siamang	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Hylobates agilis</i>	Owa Ungko	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Nycticebus coucang</i>	Kukang	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing Hutan	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Viverricula malacensis</i>	Musang Rase	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Musang Pandan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	2. Burung	<i>Amblonyx cinerea</i>	Linsang/Berang berang	Ya	Ya	Ya
<i>Herpestes javanicus</i>		Musang ayam/garangan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
<i>Pteromyini</i>		Tupai terbang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
<i>Manis javanicus</i>		Trenggiling	Ya	Ya	Ya	Tidak
<i>Arctictis binturong</i>		Binturong	Ya	Ya	Ya	Tidak
<i>Pavo muticus</i>		Merak Hijau	Ya	Ya	Ya	Tidak
<i>Cacatua galerita</i>		Kakatua jambul kuning	Ya	Ya	Ya	Tidak
<i>Cacatua sulphurea</i>		Kakatua jambul kuning kecil	Ya	Ya	Ya	Tidak
<i>Cacatua goffiniana</i>		Kakatua goffin	Ya	Ya	Ya	Tidak
<i>Cacatua alba</i>	Kakatua Putih	Ya	Ya	Ya	Tidak	

	<i>Casuarina Sp.</i>	Kaswari	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Splomis chela</i>	Elang Bido	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Spizaetus cirhatus</i>	Elang Brontok	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Haliastur Indus</i>	Elang Bondol	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Falconidae</i>	Alap-alap	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Accipiter soloensis</i>	Alap-alap Cina	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Bucerotidae</i>	Kangkareng	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Rhyticerus undulatus</i>	Julang Emas	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Leucopsar rothschildii</i>	Jalak (Curik) Bali	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Acridotheres melanopterus</i>	Jalak Putih	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Lorius domicella</i>	Kasturi Tengkek-ungu	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Eos bornea</i>	Nuri Merah	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Pseudeos fuscata</i>	Nuri Dusky	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Tricchoglossus haematosus</i>	Nuri Pelangi	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Eclectus roratus</i>	Nuri Bayan Merah	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Eclectus roratus</i>	Nuri Bayan Hijau	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Lorius lory</i>	Kasturi Kepala Hitam	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Chloropsis sonnerati</i>	Cica Daun Besar (CucaK Hijau)	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Ciconia episcopus</i>	Bungau Sendang-lawe	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Aethopyga mystacalis</i>	Burung Madu Jawa	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Hydromis guajanus</i>	Paok pancawarna-jawa	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Tanygnathus spp.</i>	Batet-Kelapa	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Perkici Pelangi	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Zosterops flavus</i>	Kacamata Jawa	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Egretta spp</i>	B. Kuntul	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Numenius spp</i>	B. Gajahan	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecukular Asia	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Basilornis celebensis</i>	B Raja Perling	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

	<i>Psittacula alexandri</i>	B Betet Biasa	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Agapornis</i>	B Love bird	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Padda (Lonchura) oryziwora</i>	B Glatik	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Ploceus manyar</i>	B Manyar	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	<i>Bubo sumatranus</i>	B Hantu Bobu	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Otus angelina</i>	B Hantu Clepuk Jawa	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Tyto albae</i>	B Hantu Serak Jawa	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	B Takur Api	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oriolus chinensis</i>	B Kepodang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Centropus sinensis</i>	B Bubut	Ya	Ya	Ya	Ya
	<i>Centropus nigrorufus</i>	Bubut Jawa	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Corvus enca</i>	B Gagak	Ya	Ya	Ya	Ya
	<i>Corvus splendens</i>	Gagak Rumah	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Guena fowl</i>	Ayam Mutiara	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
3. Reptil	<i>Phython molurus</i>	Sanca Bodo	Ya	Ya	Ya	Ya
	<i>Python reticulatus</i>	Sanca Kembang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara	Ya	Ya	Ya	Ya
	<i>Varanus salvator nebulus</i>	Biawak	Ya	Ya	Ya	Ya
	<i>Varanus salvator</i>	Biawak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Manouria emys emys</i>	Kura-kura kaki gajah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Carattochelys insculpta</i>	Labi-labi	Ya	Ya	Ya	Tidak
	<i>Iguana iguana</i>	Iguana Hijau Elsafador	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Iguana iguana</i>	Iguana Merah Peru	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Naja sputatrix</i>	Ular Kobra	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Ptyas mucosus</i>	Ular Jali (Rat snake)	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Homalopsis buccata</i>	Ular Kadut Belang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

	<i>Coelognatus/ Elaphe raditus</i>	Ular Terawang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Acrocordus javanicus</i>	Ular Karung	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Gecko gecko</i>	Tokek	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
4. Amphibi	<i>Fejervarya cancrivora</i>	Katak Hijau	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Salamandra sp</i>	Salamander	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
5. Ikan	<i>Clarias</i>	Lele	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Oreochromis niloticus</i>	Nila	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Osphronemus goramy</i>	Gurami	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
6. Keong	<i>Pila ampullacea</i>	Keong sawah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
7. Serangga	<i>Oecophylla</i>	Semut rangrang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
8. Tumbuh-tumbuhan	<i>Tectona grandis</i>	Jati	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Albizia chinensis</i>	Sengon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Acacia</i>	Akasia	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Switenia mahagoni</i>	Mahoni	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>Java palisander/ Dalbergia latifolia</i>	Sono keling	Ya	Ya	Tidak	Tidak

Sumber: BBKSDA Jatim-Bidang KSDA Wilayah I Madiun,2020

Tabel 5 Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
Provinsi/Kabupaten/Kota: Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020

No	Nama Perusahaan/Perorangan	SK	Jenis Satwa yang Ditangkarkan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Soegeng Prawoto	SK.43/K.2/BIDTEK.1/KSA/5/2019	Rusa Timor (<i>Russa timorensis</i>)
2	Sapto Djatmiko	SK.17/K.2/BIDTEK.1/KSA/1/2018	Rusa Timor (<i>Russa timorensis</i>)
3	IM.Subaweh	SK/K.2/BIDTEK.1/KSA/1/2018	Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>)
4	Yayasan Reyog Ponorogo	Proses Perijinan	Merak Hijau (<i>Pavo muticus</i>)

Tabel- 6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

Kabupaten : Ponorogo

Tahun : 2020

Kabupaten/Kec	Tidak Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)	
	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kab. Ponorogo	50.214,10		9.885,90		56.006,50		1.672,40		14.930,20	
Total	50.214,10		9.885,90		56.006,50		1.672,40		14.930,20	

Sumber : BPDASHL Solo Kementerian LHK

Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Kabupaten : Ponorogo
Tahun : 2020

No	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/ Tidak
1	2	3	4	5

Keterangan : Ponorogo Tidak memiliki Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Kabupaten : Ponorogo
Tahun : 2020

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/ Tidak
1	2	3	4	5
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	35 - 100 cm	Tidak Melebihi
2	Ketebalan Permukaan	< 40 %	0%	Tidak Melebihi
3.A	Komposisi Koloid	< 18 %	27,38 - 53,89 %	Tidak Melebihi
3.B	Komposisi Pasir Kuarsatik	> 80 %	14,48 - 33,03 %	Tidak Melebihi
4	Berat Volume	> 1,4 g/cm ³	0,92 - 1,39 cm	Tidak Melebihi
5	Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	33,68 - 57,94 %	Tidak Melebihi
6	Derajat Pelulusan Air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	12,97 cm	Melebihi
			0,46 cm	Melebihi
			8,10 cm	Melebihi
			0,69 cm	Melebihi
			11,58 cm	Melebihi
			15,05 cm	Melebihi
			0,69 cm	Melebihi
			16,21 cm	Melebihi
			15,75 cm	Melebihi
			0,46 cm	Melebihi
			0,23 cm	Melebihi
			0,35 cm	Melebihi
0,46 cm	Melebihi			
7	pH (H ₂ O) 1:2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,76 - 7,42	Tidak Melebihi
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0,10 - 0,62	Tidak Melebihi
9	Redoks	< 200 mV	138 - 187 mV	Melebihi
		< 200 mV	275 - 384 mV	Tidak Melebihi
10	Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	< 10 ² cfu/g tanah	Tidak Melebihi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah
Kabupaten: Ponorogo
Tahun : 2019

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/ Tidak
1	2	3	4	5
1	Subdensi gambut diatas pasir kuarsa	< 20 cm	0	-
2	Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah	<25cm dengan pH ≤2,5	0	-
3.	Kedalaman air tanah dangkal	>25 cm	0	-

Keterangan : - evaluasi kerusakan lahan yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo termasuk evaluasi kerusakan tanah di lahan kering (Kabupaten Ponorogo tidak memiliki lahan basah/gambut)

- Kosong : Tidak Ada luasan

Sumber Data : Dinas Lingkungan hidup kabupaten ponorogo

Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Kabupaten : Ponorogo
Tahun : 2020

No	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Presentase Tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Keterangan : Kabupaten Ponorogo tidak memiliki tutupan mangrove

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo

Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Kabupaten: Ponorogo
Tahun : 2019

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase Kerusakan (%)
1	2	3	4
-	-	-	-

Keterangan : Kabupaten Ponorogo tidak memiliki padang lamun

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
Kabupaten: Ponorogo
Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-			

Keterangan : Kabupaten Ponorogo tidak memiliki terumbu karang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo

Tabel-13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian
Kabupaten : Ponorogo
Tahun : 2020

No.	Jenis penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
1	2	3	4
1	Permukiman	164	179.268
2	Industri	3.5	4.975
3	Tanah Kering	9713.665	9713.665
4	Perkebunan	28172.84	31378.84
5	Semak Belukar	10022.45	10022.45
6	Tanah Kosong	9713.665	9713.665
7	Perairan/ Kolam	794.41	794.41
8	Lainnya (Sebutkan)	-	-

Keterangan : (-) Tidak ada data

Sumber : BPN Ponorogo

Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan
Kabupaten :Ponorogo
Tahun : 2020

No	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Tambang		Besar	-	
			Menengah	-	
			Kecil	-	
		14	Rakyat	121.8123	
2.	Perkebunan		Besar	-	
			Menengah	-	
			Kecil	-	
			Rakyat	7757.9000	
3.	Pertanian		Besar	-	
			Menengah	-	
			Kecil	-	
			Rakyat	34801.0000	
4.	Pemanfaatan Hutan		Besar	-	
			Menengah	-	
			Kecil	-	
			Rakyat	-	

Keterangan : - tidak ada data

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan menurut Jenis Bahan Galian
Kabupaten: Ponorogo
Tahun : 2020

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Pertambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Sirtu	Hendig Mustofa Yusi Anoriza	6.76		
2	Sirtu	CV.Suna Tambang Sejahtera	5.02		
3	Sirtu	Hasim	9.42		
4	Trass	Harmono	7.5		
5	Trass	Sujarno	5.04		
6	Trass	Heru Agus Setyo Herlambang	22.82		
7	Sirtu	Kholid Isnani	6.76		
8	Sirtu	Supratman	6.67		
9	Trass	Karyono	11.1		
10	Sirtu	Dariman	62.24		
11	Andesit	Dwi Siswanto	5.15		
12	Sirtu	Gieta Rieza Andriawan	5.83		
13	Trass	Yuli Setyo Sybagyo	5		
14	Sirtu	Sugeng Hariyanto	6.38		

Keterangan : 0 = tidak ada nilai

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tabel 16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kabupaten Ponorogo
Tahun : 2020

No	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Lokasi Penanaman	Penghijauan				Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SIMAN	40B/B	-	-	-	-	10,0	10,0	16.660
2	BADEGAN	126A2	-	-	-	-	5,0	5,0	16.670
3	BADEGAN	127A2	-	-	-	-	5,0	5,0	16.670
4	SAMPUNG	93A	-	-	-	-	24,9	24,9	27.390
5	PULUNG	111A2	-	-	-	-	0,5	0,5	550
6	BADEGAN	125C	-	-	-	-	4,6	4,6	5.060
7	PULUNG	73C-3	-	-	-	-	0,9	0,9	990
8	PULUNG	74A	-	-	-	-	0,9	0,9	990

Tabel-17 Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
Kabupaten : Ponorogo
Tahun : 2020

No	Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	Luas (Ha)	Kedalaman (M)	Prosentasi Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6

Tabel 18. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kabupaten Ponorogo
Tahun: 2020

No	Provinsi/Kab/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6
1	BADEGAN	SOMOROTO	36,431	28,400	
2	JENANGAN	SUKUN	133,930	-	
3	MLARAK	BONDRANG	148,056	14,900	
4	PULUNG	PULUNG	277,942	23,500	
		SUKUN	62,520	-	
5	SAMPUNG	SAMPUNG	69,605	18,300	
		SOMOROTO	1.779,754	93,300	
6	SAWOO	BONDRANG	-	25,000	
7	SIMAN	SUKUN	5,330	10,000	
8	SOOKO	PULUNG	315,315	9,400	
9	SUKOREJO	SAMPUNG	72,535	17,500	

Tabel 19. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kabupaten Ponorogo
Tahun :2020

No.	Provinsi/Kab/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	BADEGAN	1	119,8	Pungutan DKP
2	JENANGAN	1	911,4	
3	MLARAK	1	269,4	
4	PULUNG	1	1290,5	
5	SAMPUNG	1	22,9	
6	SAWO	1	49,1	
7	SIMAN	1	639,7	
			3302,8	
1	SAMPUNG	1	42,3	Agro jenis Cabai
2	BADEGAN	1	77,589	Agro jenis Jagung
3	JENANGAN	1	578,21	
4	MLARAK	1	337,6313333	
5	PULUNG	1	1055,536	
6	SAMPUNG	1	131,283	
7	SAWOO	1	241,7456667	
8	SIMAN	1	527,8	
9	SOOKO	1	51,205	
10	SUKOREJO	1	54	
			3097,3	

Tabel 20 Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Ponorogo
Tahun Data: 2020

No	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>)	Kayu	Appendix II
2	Reptil (Ular, biawak, tokek)	Daging, Kulit	Appendix II, Non Appendix
3	Aves (Burung)	Satwa, Bulu	Appendix II, Non Appendix

Tabel -21 Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata

Provinsi / Kab./Kota : Ponorogo

Tahun Data : 2019

No	Kec.	Jenis IUPJLWA							SK
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan dan Keaneekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BADEGAN	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	80.90	117.50	1,272.40	
2	BALONG	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	739.60	33.30	1,032.40	
3	BUNGKAL	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	1,055.10	56.20	2,165.70	
4	JAMBON	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	1,446.10	29.80	2,258.50	
5	NGEBEL	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	1,509.10	47.50	2,472.40	
6	NGRAYUN	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	828.00	423.30	8,214.80	
7	PUDAK	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	3,988.20	199.60	4,932.60	
8	PULUNG	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	2,523.20	13.70	3,238.20	
9	SAMBIT	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	788.60	67.90	1,455.70	
10	SAWOO	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	1,547.10	113.60	2,931.80	
11	SLAHUNG	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	1,641.30	89.50	3,441.60	

12	SOOKO	Perhutani KPH Lawu Ds	-	-	-	15.30	175.70	1,400.00	
13	BALONG	BUMDES Karang Patihan Bangkit	-	-	2.90	-	-	-	16/044.6
14	NGEBEL	CV Warnamarta	-	-	2.10	-	-	-	01/044.6
JUMLAH			-	-	5.00	16,162.50	1,367.60	34,816.10	

Keterangan : Kolom 9 merupakan Total Luas Kawasan Hutan di Kab. Ponorogo

Tabel-22. Kualitas Air Sumur
Kabupaten Ponorogo
Tahun Data : 2020

No	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°c)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	bau	TDS
			Lintang	Bujur							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menur	30-06-2020	-7.866558°	111.476781°	30	6,5	0,77	-	tdk berasa	tdk berbau	273
2	Polorejo	08-12-2020	-7.835894°	111.484698°	27	7,0	0,69	-	tdk berasa	tdk berbau	234
3	Pijeran Siman	30-09-2020	-7.885081°	111.511661°	28	7,0	2,55	-	tdk berasa	tdk berbau	264
4	Stadion	27-02-2020	-7.864235°	111.476720°	30	6,9	1,31	-	tdk berasa	tdk berbau	606
5	Keniten	29-01-2020	-7.843511°	111.474213°	29	6,8	0,00	-	tdk berasa	tdk berbau	206
6	Badegan Depan SMP	27-02-2020	-7.873636°	111.335905°	29	6,8	0,83	-	tdk berasa	tdk berbau	157
7	Bungkal	21-10-2020	-7.991235°	111.454772°	29	6,8	2,40	-	tdk berasa	tdk berbau	259
8	Slahung	29-01-2020	-8.042388°	111.413463°	28	6,5	0,24	-	tdk berasa	tdk berbau	269
9	Babadan Kantor	30-09-2020	-7.817048°	111.509953°	28	7,0	2,09	-	tdk berasa	tdk berbau	315
10	PlosoJenar	27-02-2020	-7.870214°	111.419242°	30	6,7	1,27	-	tdk berasa	tdk berbau	299
11	Semanding	24-11-2020	-7.889174°	111.406964°	29	7,0	0,00	-	tdk berasa	tdk berbau	553
12	Simo	08-12-2020	-7.839113°	111.549768°	28	6,8	0,46	-	tdk berasa	tdk berbau	204

13	Trenceng	08-12-2020	-7.857125°	111.549532°	28	6,8	0,65	-	tdk berasa	tdk berbau	201
14	Suren	27-07-2020	-7.902546°	111.549938°	32	6,5	0,00	-	tdk berasa	tdk berbau	221
15	Candi	27-07-2020	-7.913907°	111.564836°	32	6,5	0,00	-	tdk berasa	tdk berbau	223
16	Totokan	30-03-2020	-7.910038°	111.553286°	28,5	6,8	2,78	-	tdk berasa	tdk berbau	155
17	Balong	29-01-2020	-7.956186°	111.443221°	29	6,8	0,44	-	tdk berasa	tdk berbau	286
18	Prayungan	27-07-2020	-7.966903°	111.562285°	33	7,0	0,0	-	tdk berasa	tdk berbau	266
19	Wotan 1	25-08-2020	-7.870002°	111.620533°	26	6,8	1,54	-	tdk berasa	tdk berbau	120
20	Gokalang	25-08-2020	-7.818587°	111.552383°	29	6,5	0,81	-	tdk berasa	tdk berbau	227
21	Tajug	30-09-2020	-7.867142°	111.521896°	28	7,0	2,61	-	tdk berasa	tdk berbau	264
22	Mrican	21-10-2020	-7.861355°	111.534049°	29	6,8	3,60	-	tdk berasa	tdk berbau	122
23	Jenangan Sampung	27-02-2020	-7.806250°	111.332135°	30	6,8	0,75	-	tdk berasa	tdk berbau	256
24	Plunturan 1	25-08-2020	-7.847832°	111.606645°	30	6,8	0,58	-	tdk berasa	tdk berbau	170
25	Sumber Banjarejo	30-09-2020	-7.880385°	111.708669°	28	7,0	0,04	-	tdk berasa	tdk berbau	143
26	Ngemplak Sawoo	30-03-2020	-7.982793°	111.576745°	28,5	6,8	0,58	-	tdk berasa	tdk berbau	168
27	Bungkal	21-10-2020	-7.990570°	111.454888°	29	6,8	2,40	-	tdk berasa	tdk berbau	259

No	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO3 sebagai N (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrid sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)	Total coliform (jml/100ml)
1	13	14	15	16	17	26	27	28	29	34	35	36	37	40
1	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,9	0,0	-	0,0	-
2	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,9	0,0	-	0,0	-
3	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,8	0,01	-	0,0	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,9	0,0	-	0,0	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	0,0	-	0,1	-	0,01	0,8	0,0	-	0,0	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	0,0	-	0,1	-	0,0	1,0	0,0	-	0,0	-
13	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1,0	0,0	-	0,0	-
14	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,6	0,0	-	0,0	-
15	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1,4	0,0	-	0,0	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,6	0,0	-	0,0	-
19	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1,1	-	-	-	-
20	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1,2	0,0	-	-	-
21	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,9	0,0	-	0,0	-
22	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1,0	0,0	-	0,0	-
23														
24	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	1,0	0,0	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
27	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,9	0,0	-	0,0	-

Tabel-23. Kualitas Air Laut

Kabupaten : Ponorogo

Tahun 2020

No	Nama Lokasi	Waktu Sampling (tgl/ bln/th)	Loka-si sampling	W ar n a	Ba u	Kecerahan	Kekeruhan	TSS (mg/ L)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur	pH	Sianida	DO (mg/ L)	BOD5 (mg/L)	COD (mg/L)	Amoni a Total (mg/L)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Keterangan : Kabupaten Ponorogo tidak memiliki laut

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tabel 24 Curah Hujan Rata-rata Bulanan
Kabupaten/Kota : Ponorogo
Tahun Data: 2020

No	Nama Stasiun	Lokasi	Titik Koordinat		BULAN											
			LAT	LONG	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	St Hjn Bangunsari	Bangunsari, Ponorogo	-7,870959	111,4743 9	9	23	8	2	5	0	0	0	0	3	5	10
2	St Hjn Babadan	Pondok, Babadan	-7,813819	111,5008 8	5	10	10	3	4	1	1	1	0	4	9	11
3	St Hjn Bollu	Jenangan, Jenangan	-7,820887	111,5440 9	7	11	11	2	2	1	1	1	0	3	9	13
4	St Hjn Kesugihan	Kesugihan, Pulung	-7,843892	111,6138	11	12	10	7	11	2	0	1	0	4	16	13
5	St Hjn Ngebel	Ngebel, Ngebel	-7,805252	111,6324 3	11	15	14	10	15	0	1	0	0	8	14	12
6	St Hjn Talun	Talun, Ngebel	-7,817169	111,6560 5	11	13	15	11	10	0	0	0	-	3	15	16
7	St Hjn Pulung	Plunturan, Pulung	-7,857944	111,6165	10	10	11	5	9	5	0	0	0	6	14	11
8	St Hjn Pudak	Pudak Kulon, Pudak	-7,871161	111,7130 1	12	17	17	13	13	3	2	0	5	7	15	10
9	St Hjn Sooko	Jurug, Sooko	-7,909147	111,6701 3	12	15	13	6	12	2	1	0	1	14	13	9
10	St Hjn S Bangun	Biting, Badegan	-7,869812	111,3113 3	9	12	10	5	5	0	-	0	0	1	9	8
11	St Hjn Sungkur	Blembem, Jambon	-7,878411	111,3746 7	6	16	7	6	3	0	-	0	-	1	8	7
12	St Hjn Badegan	Badegan	-7,872235	111,3313 3	6	15	12	5	4	0	-	0	0	2	7	10
13	St hjn Kauman	Kauman, Sumoroto	-7,865038	111,4047 7	4	17	8	4	4	-	-	0	-	2	7	6
14	St Hjn Jenangan	Jenangan, Sampung	-7,807853	111,3333	5	15	9	5	5	-	-	1	-	2	9	10
15	St Hjn Menggare	Menggare, Slahung	-8,022878	111,4152	10	13	17	3	3	1	0	0	0	2	5	9
16	St Hjn Balong	Jalen, Balong	-7,95001	111,4299 7	7	16	13	1	2	0	0	0	-	3	7	9
17	St Hjn Ngilo-ilo	Bulu Kidul, Balong	-7,96598	111,4094 4	9	16	9	1	2	1	0	0	-	5	5	10

No	Nama Stasiun	Lokasi	Titik Koordinat		BULAN											
			LAT	LONG	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
18	St Hjn Ngrayun	Ngrayun	-8,072811	111,4467	12	17	14	2	3	3	0	-	-	1	2	9
19	St Hjn Sawoo	Prayungan, Sawoo	-7,969149	111,5693	6	18	14	2	4	2	-	-	1	4	10	5
20	St Hjn Wilangan	Wilangan, Sambit	-7,953885	111,5284 4	11	23	11	4	5	2	0	0	0	3	12	11
21	St Hjn Kori	Kori, Sawoo	-7,949631	111,5499 9	4	17	12	3	7	2	0	0	1	4	11	9
22	St Hjn Sewatu	Siwalan, Mlarak	-7,925788	111,5224 1	10	21	9	2	7	1	1	-	0	2	6	8
Jumlah Rata-Rata																
Sumber Data: Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo																

Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum

Provinsi/Kabupaten/Kota : Ponorogo

Tahun : 2020

No	Kabupaten /Kota	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Ponorogo	8.459	71.857	164.845	-	54	9.684	12.768

Tabel-26. Kualitas Air Hujan
Kabupaten: Ponorogo
Tahun : 2020

Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO ₄	NO ₃	Cr	NH ₄	Na	Ca ²⁻	Mg ²⁺
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan : -

Sumber :

Tabel 27: Kondisi Sungai
Kabupaten/Kota: Kabupaten Ponorogo
Tahun Data 2020

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Lebar		Kedalaman (m)	Debit	
			Permukaan (m)	Dasar (m)		maks	min
1	Sungai Asin	36,80		31,15	11,2	1.960	0,90
2	Sungai Cemer	36,00		11,30	4,18	3.879	0,25
3	Sungai Gendol	33,20		14,57	4,08	803	0,10
4	Sungai Keyang	49,00		41,10	4,3	1.913	0,20
5	Sungai Bedingin	4,00				105	
6	Sungai Nambang	6,00		12,20	3,82	155	
7	Sungai Slahung	35,90		42,00	6	1.752	0,02
8	Sungai Mayong	13,70		11,00	1,45	636	0,30
9	Sungai Pelem	18,00				394	0,20
10	Sungai Munggu	7,70				201	0,20
11	Sungai Domas	12,40		15,70	3,5	105	0,10
12	Sungai Ireng	7,00		7,00	3,86	192	
13	Sungai Sungkur	58,10		84,50	5,07	4.063	0,20
14	Sungai Galok	29,70		20,00	6	1.264	0,14
15	Sungai Pucang	15,00		12,50	6	236	0,20
16	Sungai Nglorok	-				392	0,15

Sumber Data :

Bid. Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ponorogo,

Tabel 28 : Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Kabupaten/Kota : Ponorogo
Tahun Data : 2020

NO	Jenis Inventarisasi	Nama	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Telaga	Ngebel	150	24.220.000
2	Embung	Dayakan		
		Mriwong		

Sumber Data :

Bid. Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo

Tabel 29 Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Ponorogo
Tahun : 2020

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Pantau		Waktu Sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
			Lintang	Bujur									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sungai Mungkungan Hulu	Hulu	-7,873303611	111,5088942	09/11/2020	30,80	7,36		123,00	22,000	7,100	7,000	19,000
2	Sungai Mungkungan Tengah	Tengah	-7,874916111	111,4930969	09/11/2020	30,40	7,46		209,00	<7,5	7,300	7,000	21,000
3	Sungai Mungkungan Hilir	Hilir	-7,878019167	111,4614606	09/11/2020	30,60	7,51		476,00	12,000	6,700	13,000	40,000
4	Sungai Tambak Kemangi	Hilir	-7,877734167	111,4615003	09/11/2020	30,20	7,72		419,00	<7,5	7,000	16,000	45,000
5	Sungai Sungkur Hilir	Hilir	-7,887728056	111,46152	09/11/2020	30,60	7,55		183,00	50,000	7,000	<1,34	<3,85
6	Sungai Sungkur Tengah	Tengah	-7,878466389	111,3771	09/11/2020	30,70	7,45		167,00	<7,5	7,100	<1,34	<3,85
7	Sungai Sungkur Hulu	Hulu	-7,869253333	111,3096094	09/11/2020	30,90	7,36		168,00	13,500	7,100	<1,34	<3,85
8	Anak Kali Madiun		-7,7909	111,4474281	09/11/2020	30,60	7,44		194,00	42,500	6,600	<1,34	<3,85
9	Sungai Cemer Hilir	Hilir	-7,857026389	111,4585867	09/11/2020	30,60	7,83		287,00	16,00	6,60	6,000	20,000
10	Sungai Tambak Kemangi Hulu	Hulu	-7,855710833	111,4973597	09/11/2020	31,10	7,64		372,00	<7,5	7,00	6,00	20,00
11	Sungai Cemer Tengah		-7,842648611	111,5043086	09/11/2020	30,40	7,67		225,00	215,00	7,00	5,00	14,00
12	Sungai Cemer Hulu	Hulu	-7,820369167	111,5518572	09/11/2020	30,60	7,11		128,00	795,00	7,00	31,00	104,00
13	Sungai Slahung Hilir	Hilir	-7,873900278	111,4468706	09/11/2020	30,70	7,21		243,00	46,00	7,10	5,00	12,00
14	Sungai Gendol Hilir	Hilir	-7,897846389	111,4729831	10/11/2020	30,40	7,46		376,00	30,00	5,20	19,00	56,00

15	Sungai Keang Hilir	Hilir	-7,872988333	111,45	11/10/2020	30,60	7,38		175,00	29,50	6,40	3,00	9,00
16	Sungai Genting Hilir	Hilir	-7,90222	111,4541797	11/10/2020	30,60	7,31		265,00	66,00	5,40	7,00	23,00
17	Sungai Keang	Sungai	-7,97901	111,5775314	11/10/2020	30,70	7,64		178,00	10,00	6,70	<1.34	<3.85
18	Sungai Keang		-7,953533889	111,5287639	11/10/2020	30,80	7,15		148,00	18,00	7,20	<1.34	<3.85
19	Sungai Keang		-7,940186667	111,5681056	11/10/2020	31,30	7,25		122,00	12,00	6,70	<1.34	<3.85
20	Sungai Gendol Hulu	Hulu	-7,920855556	111,5611186	11/10/2020	31,40	7,34		245,00	56,00	6,90	8,00	24,00
21	Sungai Gendol Tengah		-7,917961111	111,4823028	11/10/2020	30,60	7,06		175,00	40,00	7,10	5,00	16,00
22	Kali Asin Hulu	Hulu	-7,868669167	111,6557408	11/10/2020	29,20	7,86		88,00	36,00	7,00	7,00	21,00
23	Sungai Keang Hulu	Hulu	-7,9095375	111,6731672	11/10/2020	29,80	7,65		123,00	<7.5	7,20	<1.34	<3.85
24	Sungai Galok Hulu	Hulu	-7,798041111	111,3638917	11/10/2020	30,10	7,64		188,00	18,00	6,80	<1.34	<3.85
25	Kali Asin Hilir	Hilir	-7,783014722	111,453775	11/10/2020	29,90	7,54		230,00	<7.5	6,80	<1.34	<3.85
26	Kali Asin Hulu	Hulu	-7,792548611	111,5699294	11/10/2020	28,40	9,16		70,00	22,00	6,90	11,00	43,00
27	Kali Asin Tengah	Tengah	-7,802816111	111,5234697	11/10/2020	30,50	7,51		127,00	40,00	6,90	<1.34	<3.85
28	Dam Tambak Kemangi Tengah	Tengah	-7,904152222	111,4862983	11/10/2020	30,40	7,96		299,00	13,50	6,90	7,00	20,00
29	Dam Tambak Kemangi Tengah	Tengah	-7,870816667	111,4862983	07/06/2020	27,80	7,64		394,00	35,00	2,80	3,00	9,99
30	Sungai Mangkujayan Hulu	Hulu	-7,873303611	111,5088942	07/06/2020	28,00	7,37		243,00	<7.5	5,00	8,00	32,90
31	Sungai Mangkujayan Tengah	Tengah	-7,874916111	111,4930969	07/06/2020	26,10	7,42		285,00	<7.5	3,60	2,00	7,67
32	Sungai Tambak Kemangi Hilir	Hilir	-7,877734167	111,4615003	07/06/2020	28,10	7,84		454,00	<7.5	2,30	2,00	7,15
33	Sungai Mangkujayan Hilir	Hilir	-7,878019167	111,4614606	07/06/2020	27,80	7,68		415,00	25,00	2,40	3,00	14,10
34	Sungai Gendol Hilir	Hilir	-7,897846389	111,4729831	07/06/2020	27,40	8,18		298,00	10,00	38,00	1,30	4,75
35	Sungai Tambak Kemangi Hulu	Hulu	-7,855710833	111,4973597	07/06/2020	27,80	7,79		366,00	10,00	2,30	6,00	22,10

36	Sungai Keang Hilir	Hilir	-7,872988333	111,45	07/06/2020	27,10	7,86		359,00	<7.5	3,60	6,00	23,10
37	Sungai Slahung Hilir	Hilir	-7,873900278	111,4468706	07/06/2020	27,90	8,07		324,00	15,00	4,30	1,40	4,03
38	Sungai Sungkur Hilir	Hilir	-7,887728056	111,46152	07/06/2020	27,50	8,02		346,00	30,00	3,50	5,00	16,40
39	Sungai Cemer Hilir	Hilir	-7,857026389	111,4585867	07/06/2020	26,30	7,48		329,00	<7.5	3,30	4,00	13,30
40	Sungai Keang Hulu	Hulu	-7,9095375	111,6731672	07/07/2020	22,50	7,51		84,70	30,00	3,30	2,00	7,39
41	Kali asin Hulu	Hulu	-7,868669167	111,6557408	07/07/2020	22,10	7,93		77,60	15,00	3,20	3,00	10,10
42	Sungai Gendol Tengah	Tengah	-7,917961111	111,4823028	07/07/2020	28,10	8,03		288,00	30,00	2,80	3,00	9,82
43	Sungai Keang		-7,97901	111,5775314	07/07/2020	28,80	8,36		196,00	<7.5	2,20	2,00	8,26
44	Sungai Keang		-7,953533889	111,5287639	07/07/2020	26,80	7,83		179,00	<7.5	7,20	14,00	50,50
45	Sungai Keang		-7,940186667	111,5681056	07/07/2020	26,80	8,73		121,00	60,00	5,60	5,00	17,10
46	Sunagi Gendol Hulu	Hulu	-7,920855556	111,5611186	07/07/2020	25,50	7,37		148,00	20,00	4,80	2,00	6,56
47	Sungai Genting Hilir	Hilir	-7,90222	111,4541797	07/08/2020	25,30	7,56		210,00	40,00	7,10	3,00	9,54
48	Sungai Slahung Hulu	Hulu	-8,040639444	111,3924336	07/08/2020	25,80	7,86		203,00	10,00	5,40	4,00	13,70
49	Sungai Genting Hulu	Hulu	-8,0390225	111,4561628	07/08/2020	27,20	7,53		152,00	<7.5	8,80	1,40	5,27
50	Sungai Genting Tengah	Tengah	-7,981933889	111,4505392	07/08/2020	27,00	7,72		333,00	15,00	4,80	1,20	4,65
51	Sungai Sungkur Tengah	Tengah	-7,878466389	111,3937667	07/08/2020	32,60	8,21		230,00	75,00	7,00	2,00	6,45
52	Sungai Sungkur Hulu	Hulu	-7,869253333	111,3096094	07/08/2020	28,70	8,11		150,00	35,00	6,00	2,00	7,15
53	Sungai Galok Hulu	Hulu	-7,798041111	111,3638917	07/08/2020	27,3	8,22		173,00	30,00	6,10	3,00	11,1
54	Sungai Galok Hilir	Hilir	-7,801717778	111,4393547	07/09/2020	25	7,71		239,00	10,00	6,00	3,00	12,4
55	Anak Kali Madiun		-7,7909	111,4474281	07/09/2020	27,3	8,01		355,00	10,00	5,00	8,00	29,8
56	Kali Asin Hilir	Hilir	-7,783014722	111,453775	07/09/2020	25,8	7,8		311,00	<7.5	6,00	2,00	6,32

57	Sungai Cemer Tengah		-7,842648611	111,5043086	07/09/2020	26,5	7,71		225,00	653,00	8,10	2,00	9,92
58	Sungai Cemer Hulu	Hulu	-7,820369167	111,5518572	07/09/2020	25,6	7,84		106,00	530,00	9,50	5,00	18,1
59	Kali Asin Hulu	Hulu	-7,792548611	111,5699294	07/09/2020	25,5	7,36		60,60	<7.5	5,40	2,00	10,9
60	Kali Asin Tengah		-7,802816111	111,5234697	07/09/2020	26,6	7,97		112,00	60,00	4,90	3,00	13,7
61			0	0									
62			0	0									

Keterangan : 0 = tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

No	Nama Sungai	NO ₂ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	NH ₃ (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	TP (mg/L)	Fenol (mg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (mg/L)	Fecal Coliform (jml/100 mL)	Total Coliform (jml/100mL)	Sianida (mg/L)	H ₂ S (mg/L)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Sungai Mungkungan Hulu	0,060	0,643	<0,01	0,120		<1	<120	<60	10,00	500,00	0,004	<0,002
2	Sungai Mungkungan Tengah	0,310	0,820	<0,01	0,080		<1	<120	<60	100,00	2500,00	<0,004	<0,002
3	Sungai Mungkungan Hilir	0,011	0,550	4,320	<0,04		<1	<120	<60	500,00	8100,00	<0,004	<0,002
4	Sungai Tambak Kemangi	0,690	1,220	4,270	0,100		<1	<120	<60	100,00	7000,00	<0,004	<0,002
5	Sungai Sungkur Hilir	0,009	1,300	<0,01	0,080		<1	<120	<60	100,00	6100,00	<0,004	<0,002
6	Sungai Sungkur Tengah	<0,005	0,163	0,190	0,040		<1	<120	<60	100,00	3500,00	<0,004	<0,002
7	Sungai Sungkur Hulu	<0,002	0,318	0,086	<0,04		<1	<120	<60	100,00	2700,00	<0,004	<0,002
8	Anak Kali Madiun	0,039	3,000	<0,01	0,050		<1	<120	<60	100,00	3600,00	<0,004	<0,002
9	Sungai Cemer Hilir	0,064	0,227	0,420	0,050		<1	<120	<60	10,00	20,00	<0,004	<0,002
10	Sungai Tambak Kemangi Hulu	0,450	2,590	3,81	0,08		<1	<120	<60	100,00	10000,00	<0,004	<0,002
11	Sungai Cemer Tengah	0,037	1,660	0,21	0,11		<1	<120	<60	100,00	8400,00	<0,004	<0,002
12	Sungai Cemer Hulu	0,014	1,300	<0,01	0,17		<1	<120	<60	10,00	500,00	<0,004	<0,002
13	Sungai Slahung Hilir	0,190	0,335	0,01	0,06		<1	<120	<60	100,00	4100,00	<0,004	<0,002
14	Sungai Gendol Hilir	0,013	0,109	4,16	0,13		<1	<120	<60	100,00	4700,00	<0,004	<0,002
15	Sungai Keang Hilir	0,075	1,030	0,04	0,08		<1	<120	71,00	100,00	3500,00	<0,004	<0,002
16	Sungai Genting Hilir	0,310	0,597	0,99	0,06		<1	<120	<60	100,00	3700,00	<0,004	<0,002
17	Sungai Keang	0,023	0,847	<0,01	<0,04		<1	<120	<60	10,00	20,00	<0,004	<0,002
18	Sungai Keang	0,012	0,499	<0,01	<0,04		<1	<120	80,00	10,00	100,00	<0,004	<0,002
19	Sungai Keang	0,01	0,711	<0,01	<0,04		<1	<120	<60	100,00	1500,00	<0,004	<0,002
20	Sungai Gendol Hulu	0,08	0,637	<0,035	<0,04		<1	<120	<60	10,00	800,00	<0,008	<0,002
21	Sungai Gendol Tengah	0,52	1,010	<0,01	<0,04		<1	<120	<60	500,00	3700,00	0,00	<0,002
22	Kali Asin Hulu	0,09	0,797	<0,01	0,20		<1	<120	<60	100,00	5400,00	0,02	<0,002
23	Sungai Keang Hulu	0,05	0,073	<0,01	<0,04		<1	<120	<60	100,00	5000,00	0,01	<0,002
24	Sungai Galok Hulu	0,01	0,43	<0,01	<0,04		<1	<120	<60	100,00	3800,00	0,01	<0,002
25	Kali Asin Hilir	0,01	0,25	0,14	<0,04		<1	<120	<60	100,00	2200,00	0,00	<0,002
26	Kali Asin Hulu	0,03	0,11	<0,01	<0,04		<1	<120	66,00	10,00	100,00	0,01	<0,002
27	Kali Asin Tengah	0,01	0,39	<0,01	<0,04		<1	<120	<60	100,00	2500,00	0,01	<0,002
28	Dam Tambak Kemangi Tengah	<0,005	0,18	4,24	<0,04		<1	<120	<60	100,00	1000,00	0,01	<0,002
29	Dam Tambak Kemangi Tengah	0,504	0,221	3,81	<0,04		<5	<120	175	600,00	4700,00	<0,004	<0,002
30	Sungai Mangkujayan Hulu	0,034	0,31	0,15	<0,04		<5	<120	189	1000,00	3200,00	0,004	<0,002
31	Sungai Mangkujayan Tengah	0,335	0,17	0,51	<0,04		<5	<120	171	600,00	4900,00	<0,004	<0,002
32	Sungai Tambak Kemangi Hilir	0,547	<0,05	4,20	<0,04		<5	<120	<60	890,00	4800,00	0,004	<0,002

33	Sungai Mangkujayan Hilir	0,087	<0.05	3,62	<0.04		<5	<120	69	780,00	4600,00	<0.004	<0.002
34	Sungai Gendol Hilir	0,018	0,347	0,49	<0.04		<5	<120	133	980,00	5000,00	<0.004	<0.002
35	Sungai Tambak Kemangi Hulu	0,75	0,529	1,82	<0.04		<5	<120	111	870,00	4700,00	0,007	<0.002
36	Sungai Keang Hilir	0,079	0,395	<0.01	<0.04		<5	<120	158	690,00	3900,00	<0.004	<0.002
37	Sungai Slahung Hilir	0,032	<0.05	0,092	<0.04		<5	<120	105	980,00	5000,00	<0.004	<0.002
38	Sungai Sungkur Hilir	0,018	1,07	0,23	<0.04		<5	<120	82	780,00	4500,00	<0.009	<0.002
39	Sungai Cemer Hilir	0,15	0,29	0,046	<0.04		<5	<120	169	990,00	5000,00	<0.004	<0.002
40	Sungai Keang Hulu	0,006	0,271	0,028	<0.04		<5	<120	190	780,00	3200,00	0,005	<0.002
41	Kali asin Hulu	0,02	0,539	0,016	<0.04		<5	<120	153	990,00	4980,00	<0.004	<0.002
42	Sungai Gendol Tengah	0,032	<0.05	0,16	<0.04		<5	<120	196	890,00	5000,00	0,008	<0.002
43	Sungai Keang	0,009	0,300	<0.01	<0.04		<5	<120	150	650,00	4200,00	<0.004	<0.002
44	Sungai Keang	0,006	2,71	0,64	<0.04		<5	<120	174	480,00	3200,00	<0.004	<0.002
45	Sungai Keang	0,008	<0.05	0,073	<0.04		<5	<120	153	450,00	4500,00	0,006	<0.002
46	Sungai Gendol Hulu	0,008	<0.05	0,064	<0.04		<5	<120	176	390,00	4000,00	<0.004	<0.002
47	Sungai Genting Hilir	0,063	0,254	0,35	<0.04		<5	<120	182	760,00	4300,00	<0.004	<0.002
48	Sungai Slahung Hulu	<0.005	0,527	0,02	<0.04		<5	<120	144	950,00	4900,00	<0.004	<0.002
49	Sungai Genting Hulu	<0.005	<0.05	0,018	<0.04		<5	<120	156	780,00	3900,00	<0.004	<0.002
50	Sungai Genting Tengah	0,039	0,357	0,045	<0.04		<5	<120	76	890,00	5000,00	<0.004	<0.002
51	Sungai Sungkur Tengah	0,009	0,204	0,088	<0.04		<5	<120	179	790,00	4800,00	<0.004	<0.002
52	Sungai Sungkur Hulu	0,012	<0.05	<0.01	<0.04		<5	<120	59	790,00	4100,00	<0.004	<0.002
53	Sungai Galok Hulu	<0.005	<0.05	0,021	<0.04		<5	<120	62	690,00	3900,00	<0.004	<0.002
54	Sungai Galok Hilir	<0.005	0,55	0,038	<0.04		<5	<120	56	460,00	3600,00	<0.004	<0.002
55	Anak Kali Madiun	0,02	<0.05	0,06	<0.04		<5	<120	163	780,00	4900,00	<0.004	<0.002
56	Kali Asin Hilir	<0.002	0,14	0,018	<0.04		<5	<120	128	890,00	5000,00	<0.004	<0.002
57	Sungai Cemer Tengah	<0.008	<0.05	0,342	<0.04		<5	<120	179	500,00	3600,00	<0.004	<0.002
58	Sungai Cemer Hulu	0,01	0,48	0,012	<0.04		<5	<120	193	890,00	4900,00	0,01	<0.002
59	Kali Asin Hulu	0,01	<0.05	0,021	<0.04		<5	<120	<60	860,00	4000,00	<0.004	<0.002
60	Kali Asin Tengah	<0.005	0,56	0,019	<0.04		<5	<120	<60	980,00	4900,00	0,01	<0.002

Keterangan : 0 = tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung

Kabupaten: Ponorogo

Tahun : 2020

No	Nama Sungai	Waktu Sampling (tgl/bln/th)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO ₂ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	NH ₃ (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	TP (mg/L)	Fenol (mg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)
			Lintang	Bujur																	
1	2	6	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Telaga Ngebel	09/07/2020	07°47'33.175"	111°34'11.746"	25,5	60,60	<7,5	7,36	-	60,6	<7,5	5,4	2	10,9	0,006	<0,05	0,021	<0,04	0,036	<5	<120
2	Telaga Ngebel	10/11/2020	07°47'33.175"	111°34'11.746"	28,4	70,00	22,00	9,16	-	70,0	22,0	6,9	11	43,0	0,025	0	<0,01	<0,04	0,023	<0,01	<120

No	Nama Sungai	Waktu Sampling (tgl/bln/th)	Titik Koordinat		Deterjen (mg/L)	Fecal Coliform (Jml/100 ml)	Total Coliform (Jml/100 ml)	sianida	H ₂ S
			Lintang	Bujur					
1	2	6	4	5	24	25	26	27	28
1	Telaga Ngebel	09/07/2020	07°47'33.175"	111°34'11.746"	<60	860	4000	<0,004	<0,002
2	Telaga Ngebel	10/11/2020	07°47'33.175"	111°34'11.746"	66	10	100	0,013	<0,002

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Kabupaten: Ponorogo
Tahun : 2020

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
1	2	3	4	5	6	7
1	BABADAN	20.848	20.003	845	-	-
2	BADEGAN	9.726	9.238	488	-	-
3	BALONG	16.789	16.341	448	-	-
4	BUNGKAL	13.926	13.586	340	-	-
5	JAMBON	16.029	15.427	602	-	-
6	JENANGAN	20.943	20.084	859	-	-
7	JETIS	10.902	10.595	307	-	-
8	KAUMAN	15.436	14.971	465	-	-
9	MLARAK	11.255	9.941	1.314	-	-
10	NGEBEL	6.516	5.187	1.329	-	-
11	NGRAYUN	17.766	15.318	2.448	-	-
12	PONOROGO	23.940	23.652	288	-	-
13	PUDAK	2.955	2.915	40	-	-
14	PULUNG	15.975	14.880	1.095	-	-
15	SAMBIT	11.853	10.528	1.325	-	-
16	SAMPUNG	13.668	12.822	846	-	-
17	SAWOO	20.186	19.278	908	-	-
18	SIMAN	14.684	14.340	344	-	-
19	SLAHUNG	17.573	17.113	460	-	-
20	SOOKO	7.527	6.859	668	-	-
21	SUKOREJO	16.439	12.716	3.723	-	-
	JUMLAH	304.936	285.794	19.142	-	-

Tabel 32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan

Kabupaten : Ponorogo Provinsi Jawa Timur

Tahun Data : Desember 2020

No.	Kecamatan	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SLAHUNG	3.868	4.649	11.321	11.767	6.058	5.602	5.530	4.866
2	NGRAYUN	5.580	6.442	15.377	14.680	6.984	6.525	3.388	2.796
3	BUNGKAL	3.029	3.399	7.486	8.456	4.220	4.010	3.904	3.306
4	SAMBIT	3.842	4.375	8.088	8.190	4.365	4.331	3.558	3.139
5	SAWOO	7.750	8.764	14.088	13.601	6.153	6.112	3.543	3.005
6	SOOKO	1.992	2.143	5.376	5.733	2.788	2.816	1.897	1.625
7	PULUNG	4.297	4.927	11.622	11.956	5.828	5.836	4.534	3.802
8	MLARAK	3.710	3.747	6.287	6.568	3.645	3.548	3.463	3.176
9	JETIS	2.564	2.640	5.366	5.712	3.168	3.006	4.069	3.597
10	SIMAN	4.009	4.278	8.041	8.242	4.822	4.697	5.635	5.147
11	BALONG	4.151	4.781	9.186	9.517	5.135	4.925	4.876	4.492
12	KAUMAN	4.385	4.775	8.108	8.416	5.384	5.124	4.838	4.363
13	BADEGAN	3.417	3.958	7.168	7.180	3.707	3.541	2.415	1.908
14	SAMPUNG	3.492	3.803	8.028	8.332	4.434	4.295	3.661	3.381
15	SUKOREJO	5.809	6.153	10.718	10.800	6.661	6.600	5.157	4.801
16	BABADAN	6.354	6.424	10.904	11.355	6.910	7.110	8.670	7.762
17	PONOROGO	6.382	6.511	9.071	9.963	6.687	6.629	11.681	10.819
18	JENANGAN	5.865	6.344	10.486	11.093	6.139	6.130	6.784	5.758
19	NGEBEL	1.812	1.946	5.280	5.487	2.191	2.058	1.393	1.144
20	JAMBON	4.863	5.308	9.848	9.568	5.457	5.313	3.069	2.645
21	PUDAK	735	812	2.292	2.341	1.100	1.013	470	426
JUMLAH		87.906	96.179	184.141	188.957	101.836	99.221	92.535	81.958

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, diolah

No.	Kecamatan	Diploma		S1		S2		S3	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SLAHUNG	201	252	809	910	47	27	2	-
2	NGRAYUN	111	123	447	411	20	5	-	-
3	BUNGKAL	137	230	612	673	30	19	1	1
4	SAMBIT	134	223	613	609	27	22	-	-
5	SAWOO	98	122	377	414	14	6	1	-
6	SOOKO	76	92	273	288	14	4	1	-
7	PULUNG	157	206	637	685	27	17	-	-
8	MLARAK	121	217	772	899	103	47	10	-
9	JETIS	176	252	862	998	65	39	1	2
10	SIMAN	229	355	1.201	1.304	133	78	9	1
11	BALONG	158	216	711	789	35	23	2	-
12	KAUMAN	171	314	755	847	41	20	2	-
13	BADEGAN	49	98	236	305	17	9	-	-
14	SAMPUNG		157		483	11	13		

		99		447				-	1
15	SUKOREJO	110	224	616	739	26	12	2	-
16	BABADAN	376	604	1.838	1.923	159	92	11	-
17	PONOROGO	722	1.120	3.647	3.697	315	183	7	1
18	JENANGAN	238	336	1.055	1.085	70	40	1	2
19	NGEBEL	51	74	146	176	3	3	-	-
20	JAMBON	82	157	366	442	18	7	1	1
21	PUDAK	17	23	62	76	5	1	-	-
JUMLAH		3.513	5.395	16.482	17.753	1.180	667	51	9

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020, diolah

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang diderita Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Ponorogo
Tahun : 2021

No	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	2	3	4
1	Ponorogo	Influenza	39.740
2		Gastritis	27.279
3		Artritis reumatoid	26.736
4		Hipertensi esensial	24.244
5		Dermatitis kontak alergi	10.968
6		Polimialgia reumatik	6.466
7		Rinitis akut	5.512
8		Diabetes Mellitus Tipe 1	5.158
9		Diabetes Mellitus Tipe 2	4.864
10		Artritis, osteoartritis	4.011

Tabel 34 Jumlah Rumah Tangga Miskin
Kabupaten : Ponorogo Provinsi Jawa Timur
Tahun Data : Desember 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin *	Prosentase Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Slahung	20.813	796	3,82%
2	Ngrayun	21.887	533	2,44%
3	Bungkal	14.711	2.300	15,63%
4	Sambit	15.186	628	4,14%
5	Sawoo	22.350	549	2,46%
6	Sooko	9.317	408	4,38%
7	Pulung	19.933	933	4,68%
8	Mlarak	12.700	631	4,97%
9	Jetis	11.671	2.388	20,46%
10	Siman	17.208	867	5,04%
11	Balong	17.713	695	3,92%
12	Kauman	17.428	1.388	7,96%
13	Badegan	11.954	1.161	9,71%
14	Sampung	15.384	620	4,03%
15	Sukorejo	21.352	967	4,53%
16	Babadan	25.308	1.824	7,21%
17	Ponorogo	27.437	2.716	9,90%
18	Jenangan	22.417	1.204	5,37%
19	Ngebel	7.673	329	4,29%
20	Jambon	16.923	1.016	6,00%
21	Pudak	3.367	58	1,72%
JUMLAH		352.732	22.011	6,24%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, diolah

* Kategori keluarga miskin berdasarkan data pekerjaan Kepala Keluarga

Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran
Kabupaten: Ponorogo
Tahun Data : 2020

No.	Sumber Pencemar	Lokasi	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m ³ /hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/hari)	Jumlah Limbah B3 Cair (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	a. Tidak Bergerak :							
	1. RSUD Dr. Harjono Ponorogo	Jl. Raya Ponorogo-Pacitan Kel.Pakunden, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Rumah Sakit	6.3 Ha	1.5 m ³ /Hari	179.9	261 Kg/Hari	
	2. RSU Aisyiah Diponegoro	Jl. Dr. Sutomo No. 18-24 Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Rumah Sakit	8.081 m ²	0.906m ³ /Ha ri	80		
	3. RSU Muhammadiyah Ponorogo	Jl. Diponegoro No. 50, Kel.Mangkujayan, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Rumah Sakit	5.227 m ²				
	4. PT. Darmayu Puri Kencana	Jl. DR. Sutomo No. 44,RT.02 RW.05, Kel.Bangunsari,	Rumah Sakit	7.637 m ²	33,3 Kg/Hari	144	33,3 Kg/Hari	

		Kec.Ponorogo, Kab. Ponorogo						
5. RSU Muslimat Ponorogo	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 155, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Rumah Sakit	7.632 m ²	200 kg/Hari	55.36	26,66 Kg/Hari		
6. RSU Griya Waluya	Jl. Sultan Agung No. 68, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Rumah Sakit	14.02 m ²					
7. Yayasan Chania Annabila Zahiroh (Klinik Nazifa)	Dukuh Ngambakan RT/RW 01/03 Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab.Ponorogo	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	740 m ²					
8. Klinik Utama Ultra Medica	Jl. Batoro Katong No. 187A, Kel.Patih Wetan, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	635 m ²					
9. PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk	Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo	Pengolahan Tepung Tapioka	105.9230 m ²					
10. Pabrik Minyak Kayu Putih Sukun	Desa Sukun, Kec. Pulung, Kab.Ponorogo	Penyulingan Minyak Atsiri (Minyak Kayu Putih)	20.000 m ²					
11. Pabrik Gondorukem dan Terpentin	Jl. Raya Pulung Ponorogo	Pabrik Gondorukem dan Terpentin						

	PGT. Sukun							
	12. PT. Prima Maesa Putra	Jl. Arif Rahman Hakim No.09, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo	Pabrik Es	6.971,73 m ²				
	13. PT. Mitra Pinasthika Mustika, Tbk	Jl. Soekarno Hatta No. 339, Kel.Keniten, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Perdagangan sepeda motor baru, suku cadang, dan bengkel sepeda motor honda	1779 m ²				
	14. PT. Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkit Brantas (PLTA Ngebel)	Ds. Wagir Lor, Kec. Ngebel, Kab. Ponorogo	Ketenagalistrikan	42.587,98 m ²				
	15. PT. Batara Agro	Jl. Industri Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo	Pabrik Pupuk	5500 m ²				
	16. PT. Buanakarya Suryapratama	Jl. D.I Panjaitan, Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo	Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Lpg	17,50 m ²				

17. CV. Cahaya Bersama Sukses (Larissa Aesthetic Center)	Jl. Raden Saleh No.39, Kel.Mangkujayan, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Klinik Kecantikan	695,25 m ²				

Tabel-36 Suhu Udara Rata-rata Bulanan
Kabupaten : Ponorogo
Tahun 2020

No	Nama dan Lokasi Stasiun		Suhu Udara Rata-rata Bulanan (°C)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Kabupaten Ponorogo	Suhu Tertinggi	31,8	31,5	32,6	33,1	33,5	33,2	33,5	34,2	34,7	33,6	33,6	31,7
		Suhu Terendah	25,5	25,4	25,6	25,8	25,6	25,0	24,0	24,5	25,2	25,4	25,1	24,7
		Suhu Rata-rata	28,7	28,5	29,1	29,5	29,6	29,1	28,8	29,4	30,0	29,5	29,4	28,2

Sumber: Accuweather.com

Tabel 37 Kualitas Udara Ambien
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020

No	Lokasi	Latitude	Longitude	Lama Pengukuran (Jam)	SO ₂ (µg/nM ³)	CO (µg/nM ³)	NO ₂ (µg/nM ³)	O ₃ (µg/nM ³)	HC (µg/nM ³)	PM ₁₀ (µg/nM ³)	PM _{2,5} (µg/nM ³)	Pb (µg/nM ³)	Dustfall (µg/nM ³)	Total Fluorides sebagai F (µg/nM ³)	Fluor Index (µg/nM ³)	Khlorine dan Khlorine Dioksida (µg/nM ³)	Sulphat Index (µg/nM ³)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Perkantoran Kantor Lantai 8	-7,9012	111,46	1	8,28	1150	23,8	22,5	27,3	-	-	-	0,022	-	-	-	-
2	Transportasi Terminal Seloaji	-7,8369	111,49	1	8,28	1150	6,5	59,9	27,3	-	-	-	0,025	-	-	-	-
3	Industri di Jl. Industri	-7,8292	111,49	1	8,28	1150	8,49	95,7	27,3	-	-	-	0,017	-	-	-	-
4	Perumahan Singosaren	-7,8569	111,5	1	9,52	1150	10,9	43,7	27,3	-	-	-	0,035	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tabel-38 Penggunaan Bahan Bakar di Kabupaten Ponorogo
Tahun : 2020

No	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
-1	-2											
A	Industri :											
1	Industri Kecil						95361		241280			
2	Industri Sedang								62669			
3	Industri Besar											
B	Rumah Tangga :											

Tabel-39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan
Provinsi/Kabupaten/Kota

Tahun : 2020

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sepeda Motor	456.500	456.500	-	-
2	Mobil Penumpang	38.163	29.656	8.507	-
3	Mobil Bus	935	-	935	-
4	Mobil Barang	18.463	9.257	9.206	-
5	Kendaraan Khusus	-	-	-	-

Tabel - 40 Perubahan Penambahan Ruas Jalan
Kabupaten : Ponorogo
Tahun : 2021

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan Dua Tahun Terakhir (Km)	
		Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jalan Bebas Hambatan	-	-
2	Jalan Raya	13.650	13.650
3	Jalan Sedang	4.900	4.900
4	Jalan Kecil	897.560	897.560
5	Jalan Nasional	-	-
6	Jalan Provinsi	-	-

Keterangan :

Ket: Sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 31 ayat 3

menyatakan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan atas

jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil.

Tabel 41 Dokumen Izin Lingkungan
Provinsi/Kabupaten/Kota :Kabupaten Ponorogo
Tahun : 2020

Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Review UKL-UPL	Klinik Kesehatan		SUMARSIH	
2	UKL-UPL	Gedung Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI		HENDRYA WIJAYA, A.MD.IM., SH	
3	UKL-UPL	Pabrik Playwood		MUJEK TOHID	
4	UKL-UPL	Budidaya Ayam Petelur "USAHA MILIK BAPAK RIYANTO		RIYANTO	
5	Review UKL-UPL	Reparasi, Perawatan, dan Penjualan Suku Cadang Sepeda Motor "PT. CEMPAKA USAHA NUSANTARA"		SUGENG SANTOSO	
6	UKL-UPL	Peternakan Ayam Petelur "UD. POJOK JAYA POULTRY SHOP"		NOVAN GILAN PRADICA	
7	DPLH	Gudang Penyimpanan Peralatan dan Bahan Bangunan Perumahan		SYARIFUDDIN	
8	UKL-UPL	Pecah Batu "UD. RASA TANI"		DARIYONO	
9	Review UKL-UPL	Pecah Batu (Stone Crusher), Pemurnian Pasir, Paving Multiblock, Persewaan Alat Berat, dan Batching Plant CV. Mandiri Perkasa Utama		SUCIPTO	
10	DPLH	Penggilingan Padi "UD.LUSIA"		ERIK PRANATA	
11	DPLH	Penggilingan Padi "UD.SABAR SUBUR II"		DEBY SOLEHA SARI	
12	UKL-UPL	Klinik Rumah Sehat Muhammadiyah		Dr. BARUNANTO ASHADI	
13	UKL-UPL	Pabrik Plastik UD. Sumber Wahana Plastik		Setijo Eko Wahono	
14	UKL-UPL	Bengkel Fiberglass "CV. PITA DELAPAN ABADI"		FERI HERU NARUKIYAN	
15	UKL-UPL	Pabrik Mainan Stimulasi "PT. GIAT BERSAMA USAHA"		IKA RATNA DEWI	
16	UKL-UPL	Gudang Pupuk "UD SUMBER URIP"		KASIYATUN	
17	UKL-UPL	Toko Dan Gudang UD. BARU MUNCUL		JEMIRAN	

18	DPLH	Swalayan “ Surya” PT. DAYA SURYA SEJAHTERA		Imam kurdi	
19	DPLH	Swalayan “ Surya” PT. DAYA SURYA SEJAHTERA		Imam kurdi	
20	UKL-UPL	Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. BUANAKARYA SURYAPRATAMA		H. Soegeng Prawoto	
21	UKL-UPL	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.634.02 PT. SETYA BUANA KHARISMA		H. Soegeng Prawoto	
22	DPLH	Pabrik Hasil Tembakau (Pabrik Rokok) PR. Berkah Nalami		Sugiyati, SE	
23	UKL-UPL	Budidaya Ayam Pedaging “ Usaha Milik Bapak Amin “		H. Amin, S.H	
24	UKL-UPL	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) “UD. BANGUN KARYA MANDIRI”		Diyah Qoiriani, S.E	
25	UKL-UPL	Vulkasinir Ban “UD. PONOROGO JAYA”		Tan Lukman Soetanto	
26	UKL-UPL	Klinik Rumah Sehat ERVIN		E. Syuhairi Fardian, A.Md.,Kep	
27	UKL-UPL	Pembuatan Asap Cair “CV. AGROJAN BERKAH NUSANTARA”		Sugianto	
28	UKL-UPL	Rumah Kos KUSUMA MILLENIO		Ir. Hadi Hardoyo	
29	UKL-UPL	PECAH BATU CV. RAJA PERKASA		Hadi Susanto	
30	DPLH	Pemurnian Pasir “CV. PUTRA ANUGERAH”		Frits Yohanes	
31	UKL-UPL	Klinik Kesehatan “KLINIK IDOLA MEDICAL CENTER”		Fery Arie Nugroho	
32	UKL-UPL	Rumah Sakit “RS. YASIFIN DARUSSALAM GONTOR”		Suwito, S.Pd. I	
33	DPLH	Toko dan Bengkel “Shop & Drive” PT. ASTRA OTOPARTS, TBK		Indra Nugraha Wisuda	
34	DPLH	Pencucian Mobil “MUSTIKA” USAHA MILIK BPK. SISWOKO, ST		Siswoko, ST	
35	DPLH	Peternakan Ayam Petelur Usaha Milik “SRI HANDAYANI”		Sri Handayani	

36	DPLH	Peternakan Ayam Petelur Usaha Milik "LINDA ANJAR WULAN"		Linda Anjar Wulan	
37	UKL-UPL	Penggergajian Kayu "UD. MULYO RAHAYU"		Mulyono	
38	DPLH	Penggilingan Padi "UD. DWI MAKMUR"		Sunaryo	
39	UKL-UPL	Pembangunan dan Operasional Pergudangan Air Minum (AMDK) dan Makanan Dalam Kemasan "PT. DAYA SURYA SEJAHTERA"		Imam Kurdi	
40	UKL-UPL	Toko Swalayan (Minimarket) "ALFAMIDI" PT. MIDI UTAMA INDONESIA, TBK"		WIDODO	

Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3
Provinsi/Kabupaten/Kota : Ponorogo
Tahun Data : 2020

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	TGL SK	Nomor Rekom	TGL Rekom
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1	2016	RSU Griya Waluya	Jl. Sultan Agung No. 68, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.45/2690/405.26/2016	03/10/2016		
2	2016	RSU Muslimat Ponorogo	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 155, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.45/2910/405.26/2016	04/11/2016		
3	2016	PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk	Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo	Pengolahan Tepung Tapioka	Penyimpanan	188.45/2912/405.26/2016	04/11/2016		
4	2017	PT. Darmayu Puri Kencana	Jl. DR. Sutomo No. 44,RT.02 RW.05, Kel.Bangunsari, Kec.Ponorogo, Kab. Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.45/1739/405.25/2017	06/06/2017		
5	2017	PT. Batara Agro	Jl. Industri Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo	Pabrik Pupuk	Penyimpanan	188.4/001/405.25/2017	20/10/2017		

6		RSU Muhammad iyah Ponorogo	Jl. Diponegoro No. 50, Kel.Mangkujayan , Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan				
7	2019	Pabrik Minyak Kayu Putih Sukun	Desa Sukun, Kec. Pulung, Kab.Ponorogo	Penyulingan Minyak Atsiri (Minyak Kayu Putih)	Penyimpanan	188.4/10/405.25/2019	25/07/2019		
8	2019	PT. Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkit Brantas (PLTA Ngebel)	Ds. Wagir Lor, Kec. Ngebel, Kab. Ponorogo	Ketenagalistrikan	Penyimpanan	188.4/11/405.25/2019	19/11/2019		
9	2019	PT. Buanakarya Suryaprata ma	Jl. D.I Panjaitan, Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo	Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Lpg	Penyimpanan	188.4/12/405.25/2019	19/11/2019		
10	2019	RSUD Dr. Harjono Ponorogo	Jl. Raya Ponorogo-Pacitan Kel.Pakunden, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	188.4/13/405.25/2019	11/12/2019		

11	2020	PT. Prima Maesa Putra	Jl. Arif Rahman Hakim No.09, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo	Pabrik Es	Penyimpanan	188.4/05/405.25/2020	22/01/2020		
12	2020	PT. Mitra Pinasthika Mustika, Tbk	Jl. Soekarno Hatta No. 339, Kel. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo	Perdagangan sepeda motor baru, suku cadang, dan bengkel sepeda motor honda	Penyimpanan	188.4/04/405.25/2020	22/01/2020		
13	2020	Yayasan Chania Annabila Zahiroh (Klinik Nazifa)	Dukuh Ngambakan RT/RW 01/03 Desa Bangunrejo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo	Aktivitas Poliklinik Swasta	Penyimpanan	503/01/IPLB3/405.16/2020	09/04/2020	660.1/32/405.23/2020	06-Apr-2020
14	2020	Pabrik Gondorukem dan Terpentin PGT. Sukun	Jl. Raya Pulung Ponorogo	Pabrik Gondorukem dan Terpentin	Penyimpanan	DPMPTSP		660.1/48/405.23/2020	11-Jun-2020
15	2020	Klinik Utama Ultra Medica	Jl. Batoro Katong No. 187A, Kel. Patihan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyimpanan	DPMPTSP		660.1/71/405.23/2020	#####

			Wetan, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo						
16	2021	RSU Aisyiah Diponegoro	Jl. Dr. Sutomo No. 18-24 Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Rumah Sakit Umum	Penyimpanan	DPMPTSP		660.1/08/40 5.23/2021	27/01/20 21
17	2021	CV. Cahaya Bersama Sukses (Larissa Aesthetic Center)	Jl. Raden Saleh No.39, Kel.Mangkujayan , Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo	Klinik Kecantikan	Penyimpanan	DPMPTSP		660.1/10/40 5.23/2021	02/02/20 21

Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
Provinsi/Kabupaten/Kota:Ponorogo
Tahun Data : 2020

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan / Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Maguwan, Kec. Sambit	2020	Tambang An.Bpk Teguh Wibowo	19/02/2020	belum melaporkan pengelolaan lingkungan tiap 6 bulan sekali, belum melakukan uji lab sebagai pelengkap laporan (terjadi ledakan di bangunan gudang)
2	Jl. Raya Ngebel-Ponorogo RT 1 RW 2, Semanding, Kec. Jenangan	2020	Pencucian Pasir An.Bpk Suntoyo/ Dia Herianingsih	27/02/2020	Proses pengajuan riview dokumen, Ganti Pemilik
3	Tanjungsari, Kec. Jenangan	2020	Tambang an.Bpk Hasim	27/02/2020	belum melaporkan pengelolaan lingkungan tiap 6 bulan sekali, belum melakukan uji lab sebagai pelengkap laporan
4	Tanjungsari, Kec. Jenangan	2020	Tambang An.Bpk Heru	27/02/2020	belum melaporkan pengelolaan lingkungan tiap 6 bulan sekali, belum melakukan uji lab sebagai pelengkap laporan
5	Pulung	2020	Pemurnian Pasir An.KUD Pulung	08/06/2020	belum bisa menunjukkan dokumen perijinan
6	Pulung	2020	Tambang An.Boyadi(Bpk.Sutoyo)	22/07/2020	belum memiliki ijin Lingkungan
7	Pomahan, Kec.Pulung	2020	Tambang An.Bpk Sarno	23/07/2020	belum melaporkan pengelolaan lingkungan tiap 6 bulan sekali (Tambang berada diwilayah titik koordinat tambang Bp.Tardji)
8	Pomahan, Kec.Pulung	2020	Tambang An.Bpk Wahono/Bu Sunarti	23/07/2020	belum melaporkan pengelolaan lingkungan tiap 6 bulan sekali (Tambang berada diwilayah titik koordinat tambang Bp.Tardji)
9	Pomahan, Kec.Pulung	2020	Tambang An.Bpk Tardji	23/07/2020	belum melaporkan pengelolaan lingkungan tiap 6 bulan sekali, belum melakukan uji lab

					sebagai pelengkap laporan
10	Desa Wringinanom, Kec. Sambit	2020	Tambang An.Boyadi	06/08/2020	belum memiliki ijin Lingkungan
11	Desa Nglewan, Kec. Sambit	2020	Tambang An.Bpk Wasito dan Bpk Aziz	06/08/2020	belum memiliki ijin Lingkungan
12	Desa Kupuk, Kec.Bungkal	2020	Tambang An.Bpk Bangun Samudra	12/08/2020	belum memiliki ijin Lingkungan
13	Sumoroto, Kec.Kauman	2020	Pabrik Tahu An.Bpk Daman	20/10/2020	belum memiliki ijin Lingkungan
14	Kresek Biting, Kec. Badegan	2020	Tambang Uruk / Pak Cipto	20/10/2020	belum memiliki ijin Lingkungan

Tabel-44. Kebencanaan

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kabupaten Ponorogo

Tahun : 2020

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
				Terdampak	Mengungsi	Meninggal	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	BUNGKAL	RT 03 RW 04 Dkh. Sumberejo Ds munggu Kec. Bungkal	Tanah Longsor	Satu Rumah	0	0	
2	NGEBEL	dkh seglagah RT 02 RW 01 Desa Sempu Kecamatan Ngebel	Tanah longsor	2 kamar mandi & emperan belakang rumah rusak			
3	SLAHUNG	Rt/Rw 09/02 Dukuh Genuk Desa Senepo Kecamatan Slahung	Tanah longsor	Rumah belum bisa ditempati dan keluarga mengungsi.			
4	SOOKO	rt.1/ rw.3, Dkh. Srayu, Ds. Jurug, kec. Sooko	Tanah longsor	luasan longsor panjang 7 M dengan ketinggian 5 M merusak/ jebolnya dinding dapur (bahan kalsiboard)			
5	NGEBEL	dkh.semenok RT 02 RW 02Desa ngebel Kecamatan Ngebel	Tanah longsor	atap kamar mandi rusak			
6	SAWOO	RT 04 RW 01 dkh. Krambil Ds. Pangkal Kec. Sawoo	Tanah Longsor	Satu rumah roboh tertimpa longsor			

7	NGRAYUN	RT. 02 RW.02 Dukuh Pucung Desa Sendang Ngrayun	Tanah Longsor	Rumah sdr. Tukiran dinding di samping rumah ambrol			
8	SAWOO	RT 04 RW 01 dkh. Krambil Ds. Pangkal Kec. Sawoo	Tanah longsor	Satu rumah roboh tertimpa longsor			
9	BALONG	Taman kelinci , dkh. Kates gabro Ds. Pandak Kec. Balong	Banjir Bandang	2 unit kamar mandi bantuan untuk taman kelinci hilang terbawa arus dan sumur			
10	NGRAYUN	Rt 03, Rw 05, Dukuh Krajan, Desa Baosan kidul, kecamatan ngrayun	Tanah Longsor	tembok ambrol			
11	NGRAYUN	RT 01/01, Dukuh Patuk, Desa Baosan Kidul , Kecamatan ngrayun.	Tanah Longsor	Tembok rumah jebol dan menimpa perabot rumah			
12	BADEGAN	RT/RW 03/03 Dkh Kliyur Ds Dayakan Kec Badegan kab Ponorogo	Tebing Longsor	dinding rumah jebol sepanjang 6 meter			
13	SLAHUNG	Rt/Rw 02/01 Dukuh Salak Desa Senepo Kec. Slahung Kab. Ponorogo	Tanah Longsor	Ambrolnya tebing mengakibatkan tembok dapur jebol dan peralatan dapur tertimbun material.			

14	SLAHUNG	Rt/Rw 02/01 Dukuh Salak Desa Senepo Kec. Slahung Kab. Ponorogo	Tanah Longsor	Ambrolnya tebing mengakibatkan tembok dapur jebol dan peralatan dapur tertimbun material.			
15	SLAHUNG	Mts/Ma Al-Akbar Dukuh Genuk Desa Senepo Kec. Slahung Kab	Tebing Longsor	Dinding perpustakaan jebol dan Asbes terkena material			
16	NGRAYUN	Dukuh krajan,RT 01/01 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.	Tanah Longsor	dinding belakang dan samping rumah jebol			
17	NGEBEL	Dukuh Krajan ,RT 03 RW 01 Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo	Tanah longsor	Dinding dapur rusak rusak			

Tabel 45. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan

Kabupaten : Ponorogo Provinsi Jawa Timur

Tahun Data : Desember 2020

No.	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk (WNI+WNA)	Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Slahung	90,34	55.942	2,02	619
2	Ngrayun	184,76	62.889	3,84	340
3	Bungkal	54,01	39.513	0,84	732
4	Sambit	59,83	41.516	0,76	694
5	Sawoo	124,71	64.050	2,71	514
6	Sooko	55,33	25.118	0,60	454
7	Pulung	127,55	54.531	2,70	428
8	Mlarak	37,2	36.653	1,33	985
9	Jetis	22,41	32.525	1,25	1.451
10	Siman	37,95	48.204	0,98	1.270
11	Balong	56,96	48.997	0,53	860
12	Kauman	36,61	47.543	(0,26)	1.299
13	Badegan	57,48	34.008	(0,49)	592
14	Sampung	52,35	40.638	(0,68)	776
15	Sukorejo	86,61	58.428	(0,39)	675
16	Babadan	59,58	70.499	(1,11)	1.183
17	Ponorogo	22,31	77.440	(0,90)	3.471
18	Jenangan	43,93	61.444	(0,80)	1.399
19	Ngebel	59,44	21.767	0,46	366
20	Jambon	59,01	47.149	0,50	799
21	Pudak	48,92	9.373	(0,05)	192
TOTAL		1377,29	978.227	0,68	710

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, diolah

Tabel 46 Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Kabupaten: Ponorogo
Tahun 2020

No	Provinsi/Kota/Kab	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)
1	Jawa Timur/ Ponorogo	Desa Mrican Kecamatan Jenangan	TPA MRICAN	control landfil	1,7

Tabel-47. Perkiraan Jumlah Sampah per hari
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kabupaten Ponorogo
Tahun : 2020

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Lokasi	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (M ³ /hari)
1	Slahung		55.909,00	139,77
2	Ngrayun		62.889,00	157,22
3	Bungkal		39.513,00	98,78
4	Sambit		41.516,00	103,79
5	Sawoo		64.048,00	160,12
6	Sooko		25.118,00	62,80
7	Pulung		54.531,00	136,33
8	Mlarak		36.313,00	90,78
9	Jetis		32.517,00	81,29
10	Siman		48.181,00	120,45
11	Balong		48.997,00	122,49
12	Kauman		47.543,00	118,86
13	Badegan		34.008,00	85,02
14	Sampung		40.637,00	101,59
15	Sukorejo		58.428,00	146,07
16	Babadan		70.492,00	176,23
17	Ponorogo		77.435,00	193,59
18	Jenangan		61.426,00	153,57
19	Ngebel		21.764,00	54,41
20	Jambon		47.145,00	117,86
21	Pudak		9.373,00	23,43
JUMLAH			977.783,00	2.444,46

Tabel - 48 Jumlah Bank Sampah
Provinsi / Kabupaten / Kota : Jawa Timur / Ponorogo
Tahun 2021

No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
1	Ds. Tanjungsari Jenangan	2019	Bank Sampah Nusantara	188.45/ /405.32.2.16/2019	1.250,00	AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten	40 orang	4 orang	300.000
2	Ds. Tanjungsari Jenangan	2019	Bank Sampah Sri Tanjung	141/20/405.32.2.16/2019	1.500,00	AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten	45 orang	8 orang	400.000
3	Ds. Purwosari Babadan	2018	Bank Sampah Melati	440/48/405.30.3/14/2018	5.833,00	AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten	118 orang	14 orang	1.500.000
4	Kel. Purbosuman Ponorogo	2019	Bank Sampah Hijau Berseri	188.45/58/405.25/2019	1.000,00	AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten	60 orang	7 orang	600.000
5	Kel. Surodikraman Ponorogo	2012	Bank Sampah Pilang Suko II	12 tahun 2012	1.000,00	AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten	50 orang	3 orang	600.000
6	Kel. Paju Ponorogo	2013	Bank Sampah Manunggal Karso	01 tahun 2013	1.200,00	AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten	60 orang	4 orang	1.000.000
7	Kel. Keniten Ponorogo		Bank Sampah Sri		1.200,00	AKTIF	Hanya Wilayah	70 orang	5 orang	1.500.000

			Mukti				Ibukota Kabupaten			
8	Ds. Campursari Sambit		Bank Sampah Ngudi Asri			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
9	Kel. Surodikraman Ponorogo		Bank Sampah Lampah Berkat			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
10	Ds. Tulung Sampung		Bank Sampah Sumber Rejeki			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
11	Kel. Patihan Wetan Babadan		Bank Sampah Krajan Berseri			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
12	Ds. Crabak Slahung		Bank Sampah Bumi Lestari			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
13	Ds. Manuk Siman Ponorogo		Bank Sampah Sortasi Cendrawasih			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
14	Ds. Ronosentanan Siman Po		Bank Sampah Sortasi Mawar			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
15	Ds. Brahu Siman Ponorogo		Bank Sampah Sortasi Dahlia			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			

16	Ds. Ronosentanan Siman Po		Bank Sampah Sortasi Teratai			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
17	Ds. Ronosentanan Siman Po		Bank Sampah Sortasi Melati			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
18	Sampung Ponorogo		Bank Sampah Mulya Lestari			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
19	Kel. Paju Ponorogo		Bank Sampah Putri Songgolangit			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
20	Ds. Nongkodono Kauman		Bank Sampah Mari Peduli			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			
21	Kel. Brotonegaran Ponorogo		Bank Sampah Kartika Jaya Brotonegaran			TDK AKTIF	Hanya Wilayah Ibukota Kabupaten			

Tabel - 49 . Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi Kabupaten Ponorogo
Provinsi/Kabupaten/Kota : Provinsi Jawa Timur
Tahun : 2020

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Saluran drainase Belakang gedung - KORPRI - Saluran drainase area pringgitan - Saluran drainase Jl. KH. Hasyim Asyari - Saluran drainase Jl. Trunojoyo - Saluran drainase Jl. Cakraningrat - Saluran drainase Jl. Asmorodo Saluran drainase Jl. KH. Zainal - Musthofa - Saluran drainase Jl. Gatot Subroto - Saluran drainase Jl. Urip Sumoharjo - Saluran drainase Jl. Diponegoro - Saluran drainase Jl. Soekarno Hatta - Saluran drainase Jl. Ahmad Dahlan 	Petugas pembersih saluran drainase Bidang Kawasan Permukiman

Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat
Provinsi/Kabupaten/Kota : Ponorogo
Tahun Data : 2020

No.	Pihak Yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progress Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	warga pinggirsari	Bau dan Asap penggorengan Kopi	2020	Terselesaikan
2	warga bungkal	Bau Limbah dari Pabrik Tahu an.Bpk Guntur Bungkal	2020	Terselesaikan
3		Penambangan pasir pomahan pulung	2020	Terselesaikan
4	Warga Bedikulon	Bau Limbah dari Pabrik tahu UD.Maju Makmur	2020	Terselesaikan
5	Warga Desa Wotan	Ternak Ayam Desa Wotan Kec.Pulung	2020	Terselesaikan
6	Warga RT.36 RW.12 Dkh.Tampo 2,Desa Trisono Babadan (Widarto)	Debu dari penggilingan padi bpk.Dwi Cahyono (RT.003,RW.009,Dkh Tampo I Desa Trisono,Kec.Babadan)	2020	Terselesaikan
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dampak dari penambangan batu di Desa Temon (Pintu Intake Jaringan irigasi yang tertutup limbah penambangan, longsoran dari penambangan yang menyebabkan penyempitan penampang sungai.	2020	Terselesaikan
8	Warga Kel.Tambakbayan (Bpk.Guspri)	Bau kotoran ayam, dan pandangan yang kurang enak dari ternak ayam jago	2020	Terselesaikan

Tabel 51 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup
Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

No	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
0	0	0	0

Keterangan :

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo

Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Master (S2)	9	1	10
3	Sarjana (S1)	15	8	23
4	Diploma (D3/D4)	1	0	0
5	SLTA	19	1	20
6	SLTP	19	1	
	Jumlah	63	11	53

Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat di Kabupaten Ponorogo
Tahun : 2020

No	Nama Intansi	Staf fungsional			Staf yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Analisis Dampak Lingkungan	0	0	0	0
2	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan	1	0	0	0
3	Dinas Lingkungan Hidup	Teknik Penyehatan Lingkungan	0	0	0	0
4	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS	0	0	1	0
5	Dinas Lingkungan Hidup	PPLHD	0	0	2	1

Keterangan : 0 = tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo

Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Ponorogo
 Propinsi / Kabupaten / Kota : Ponorogo
 Tahun 2020

No	Nama Orang/Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan	Nama Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	2	3	4	5
1	SDN 1 Surodikraman	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
2	SDN Singkil	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
3	SDN 3 Baosan Lor	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
4	SDN 3 Wringinanom	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
5	Sdn 1 Sukosari	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
6	SDN 1 Siman	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
7	SMPN 1 Slahung	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
8	SMPN 1 Sampung	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
9	SMPN 2 Ngrayun	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
10	SMPN 1 Badegan	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
11	SMPN 3 Sambit	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
12	SMPN 1 Ngebel	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
13	SMPN 2 Sampung	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
14	SMPN 1 Sawoo	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
15	SMPN 4 Ngrayun	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
16	SMPN 5 Ngrayun	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
17	SMPAN 1 Sooko	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
18	Ma Ma'arif Klego	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	2020
19	SMP N 1 Sooko	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	2020

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tabel 55. Kegiatan / Program Yang Diinisiasi Masyarakat
 Propinsi / Kabupaten / Kota : Ponorogo
 Tahun Data : 2020

No	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan / Tahun)
1	Kepedulian Ponorogo Resik Resik Terhadap Kebersihan Alun Alun Ponorogo	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dan komunitas sosial independen	Alun-alun Ponorogo	28 Desember 2020
2	Pelatihan daur ulang sampah pembuatan pupuk organik	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	Masyarakat	24 November 2020
3	Sosialisasi Sekolah Adiwiyata	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	sekolah di kabupaten ponorogo	17 November 2020
4	Gerakan Reboisasi, Alam, Kehutanan & Wilayah Air, Rakyat Obah Gumregah (Gerak Warog)	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo	Masyarakat	21 Januari 2020

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo

Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota : Ponorogo

Tahun Data : 2020
(dalam miliar rupiah)

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya*	Satu Tahun Sebelumnya**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN	5.399,00	5.497,12
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian	435,55	457,58
3	Industri Pengolahan	1.376,31	1.502,80
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	33,09	35,79
5	Bangunan	1.895,54	2.036,23
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.376,24	3.683,19
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.665,28	1.829,44
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.813,14	1.962,77
9	Jasa-Jasa	3.187,36	3.493,98
PRODUK DOMESTIK BRUTO		19.181,51	20.498,90
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		19.148,42	20.463,11

Keterangan :

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber : Ponorogo Dalam Angka 2020

Badan Pusat Statistik

Tabel-57. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Ponorogo
Tahun Data : 2020

(dalam miliar rupiah)

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya*	Satu Tahun Sebelumnya**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN	3.416,53	3.410,71
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian	309,95	317,66
3	Industri Pengolahan	993,51	1.063,79
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	25,65	27,49
5	Bangunan	1.306,12	1.402,81
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.515,06	2.685,83
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.479,52	1.599,70
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.289,72	1.369,64
9	Jasa-Jasa	2.283,52	2.424,16
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	13.619,58	14.301,79
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	13.593,93	14.274,30

Keterangan :

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber :

Ponorogo Dalam Angka 2020 Badan Pusat Statistik

Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Ponorogo
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Ponorogo
Tahun : 2020

No	Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Peraturan Daerah		Nomor 7 Tahun 2020 Tgl : 10 Juli 2020	Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	
2	Keputusan Bupati		188.45/ 409 /405.23/2020 6 Januari 2020	Pembentukan Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020	
3	Keputusan Bupati		188.45/ 418 /405.23/2020 6 Januari 2020	Pembentukan Tim Seleksi Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020	
4	Keputusan Bupati		188.45/ 695 /405.23/2020 13 Januari 2020	Penetapan Sekolah-Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020	

Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ponorogo
Tahun Data : 2020

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
1	2	3	4	5
1	DAU	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	703.000.000,00	98.305.500,00
2	DAU	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	3.976.776.000,00	3.950.000.000,00
3	DAU	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	1.120.894.000,00	337.850.000,00
4	DAU	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	83.487.949,00	60.000.000,00
5	DAU	Pemeliharaan RTH	970.874.478,00	261.623.025,00
6	DAU	Penataan RTH	718.286.000,00	733.039.000,00
7	DAK	Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	222.957.000,00	
8	DAK	Pengadaan alat angkut sampah Dump Truck	390.000.000,00	
9	DAU	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	465.720.000,00	275.834.600,00
10	DAU	Pengembangan data dan informasi lingkungan	61.320.000,00	51.000.000,00
11	DAU	Pengembangan program adiwiyata	92.985.000,00	26.050.000,00
12	DBHCHT	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	54.250.000,00	4.800.000,00
13	DBHCHT	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah Industri	414.667.888,00	466.794.916,00
14	DBHCHT	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah	205.000.000,00	466.794.916,00
15	DBHCHT	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat (pelatihan daur ulang sampah)	346.290.000,00	67.800.400,00
16	DBHCHT	Bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat	736.000.000,00	343.398.999,96
17	DBHCHT	Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri melalui pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan (ABA,Udara Ambien, dan Tanah)	717.000.000,00	817.523.272,04

18		Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri melalui pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan (Air Limbah dan Udara Emisi)	444.310.000,00	3.548.711.300,00
19		Pelatihan dan/atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah	50.000.000,00	0,00
JUMLAH			11.773.818.315,00	11.509.525.929,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Ponorogo
Tahun Data : 2020

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	90.424.462.672,61
2	Retribusi	13.718.556.188,00
3	Laba BUMD	1.137.262.727,20
4	Pendapatan lainnya yang sah	198.050.733.860,46
5	Jumlah	303.331.015.448,27

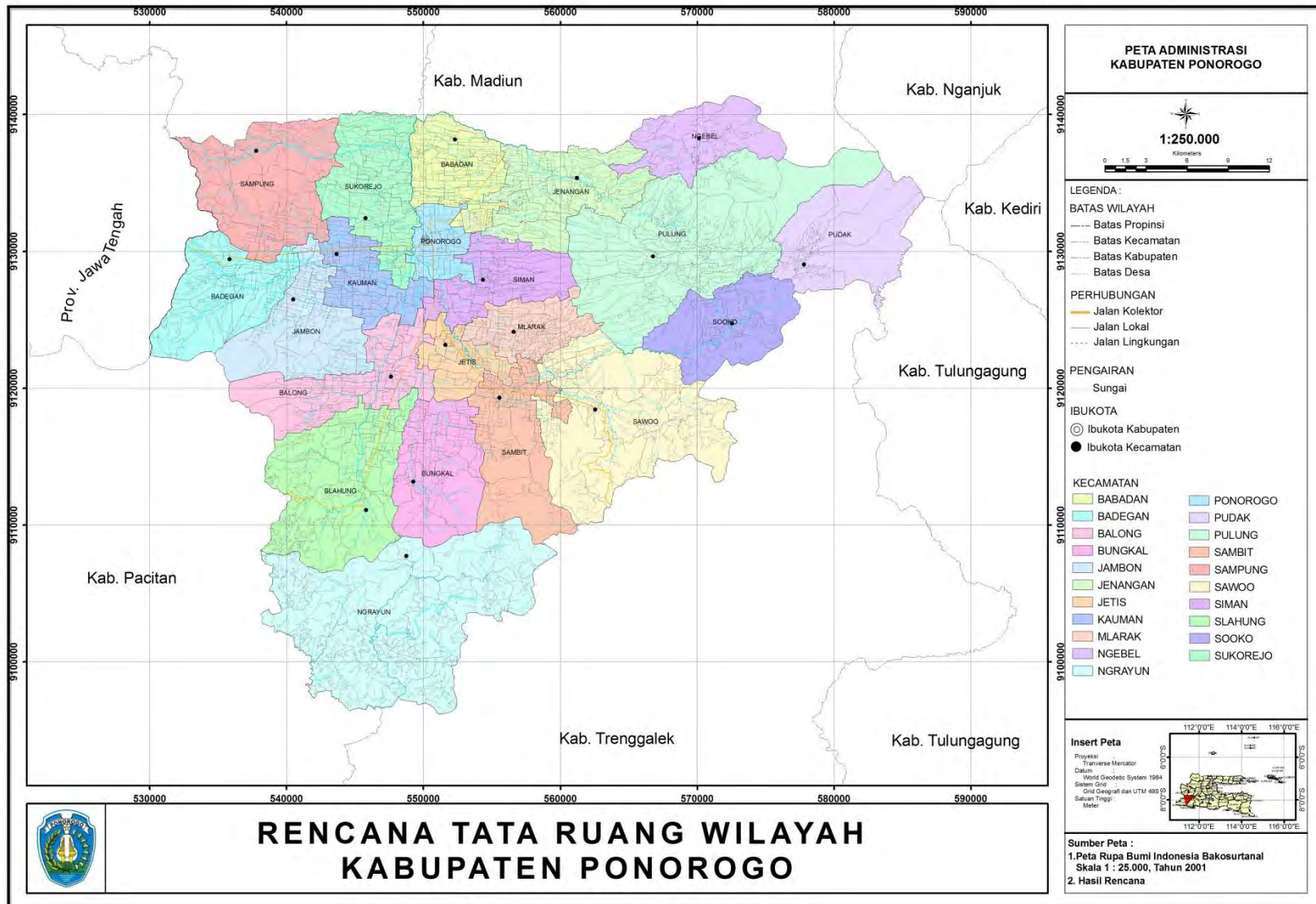
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Ponorogo Tahun 2020 un-Audited
data diambil per tanggal 13 April 2021

Tabel - 61 . Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Timur / Ponorogo
Tahun : 2020

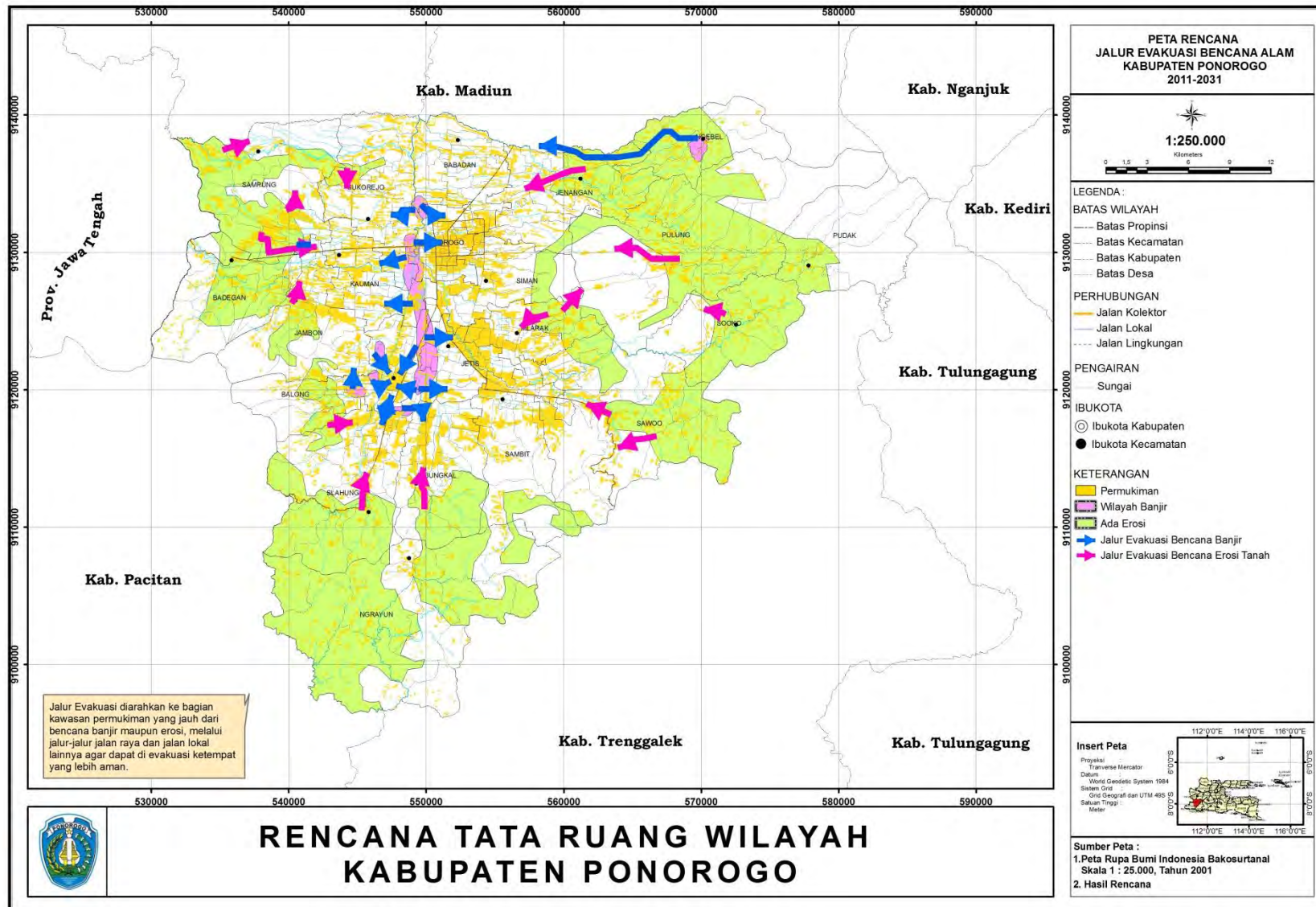
No	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	Purbosuman	PDU	Untuk mendaur ulang sampah	UU Nomor 18 Tahun 2008
2	Plosojenar	Rumah Kompos	Untuk mengolah sampah organik	UU Nomor 18 Tahun 2008

LAMPIRAN PETA SPATIAL

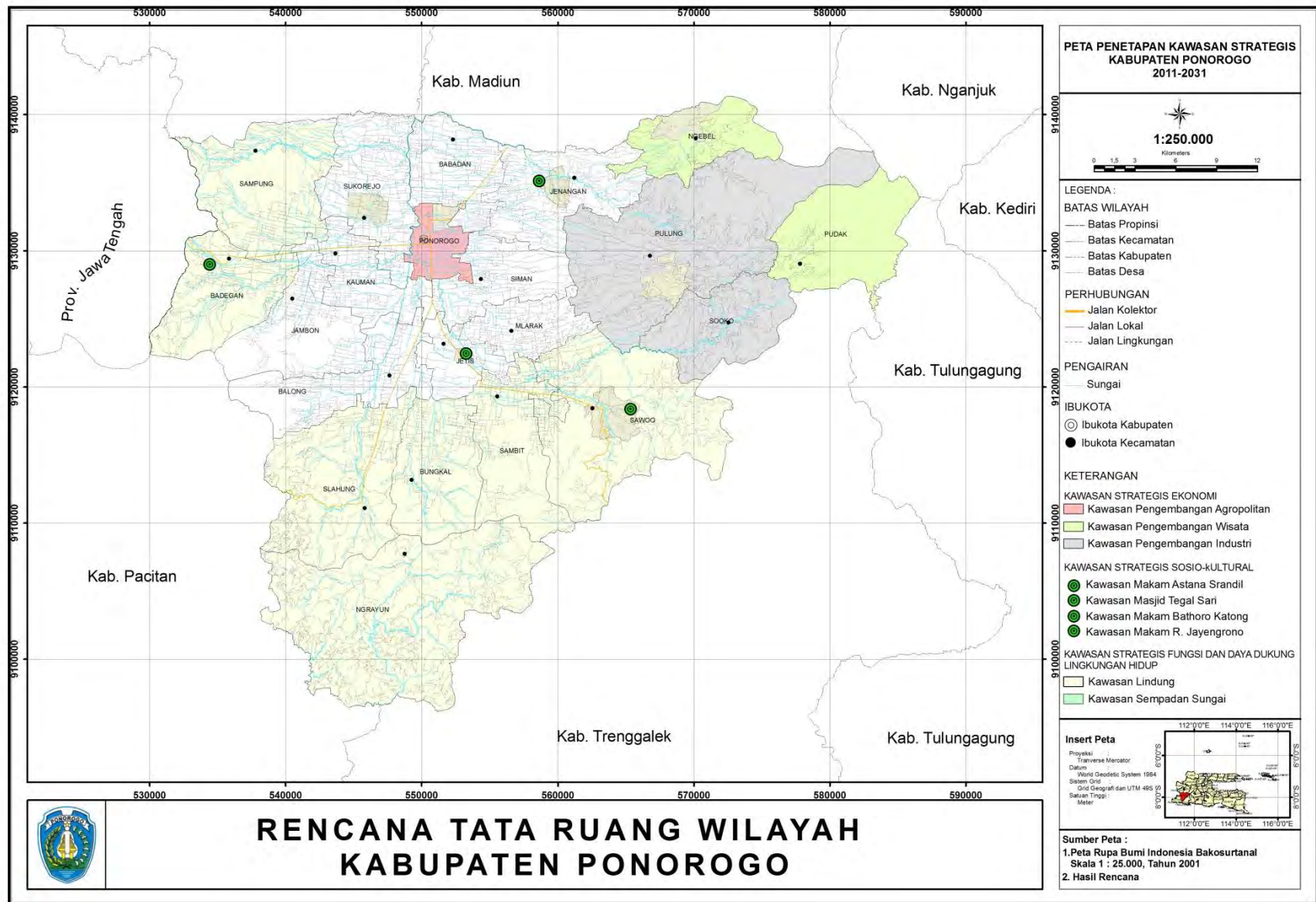
**SUMBER : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KAB. PONOROGO**



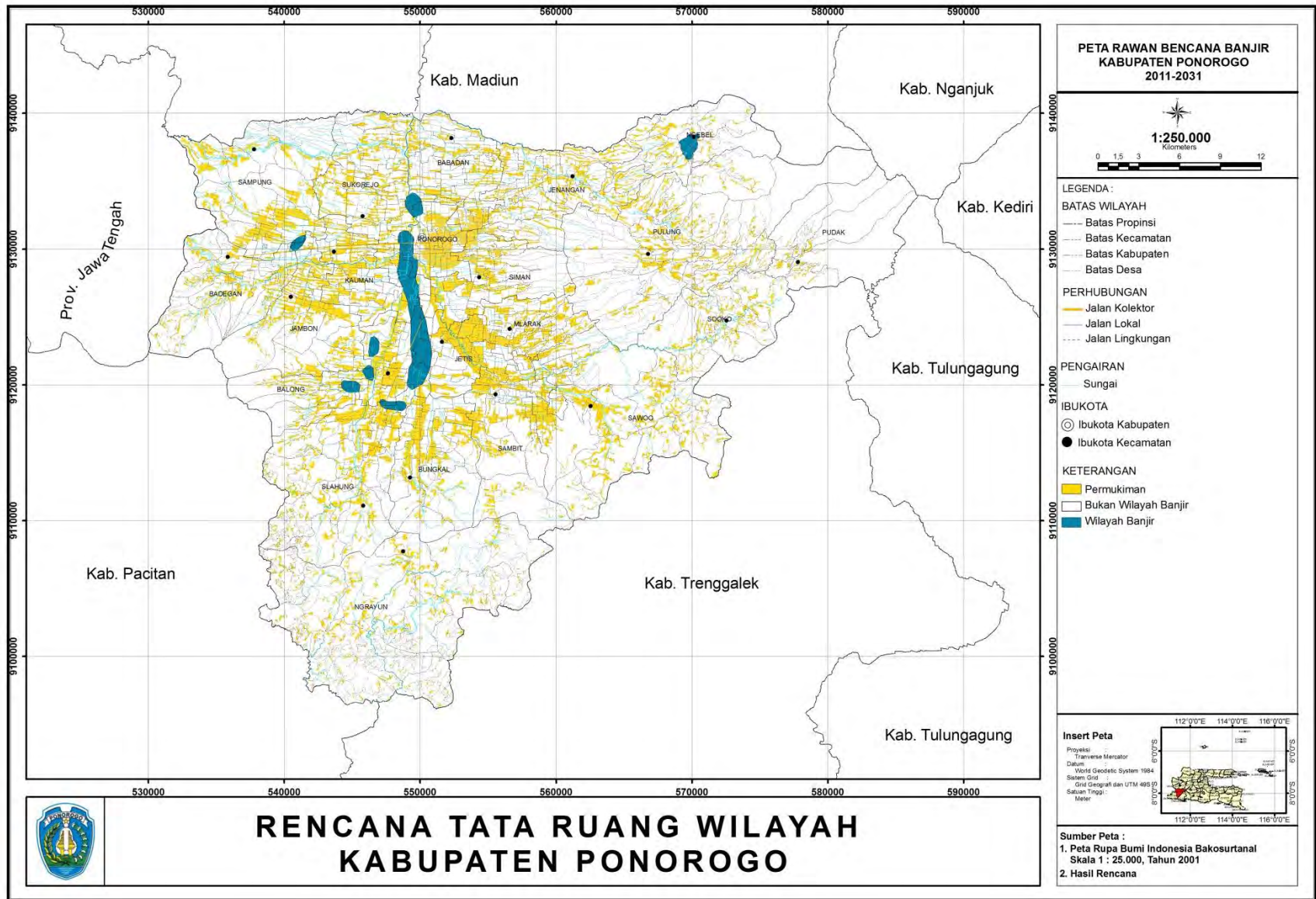
Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Ponorogo



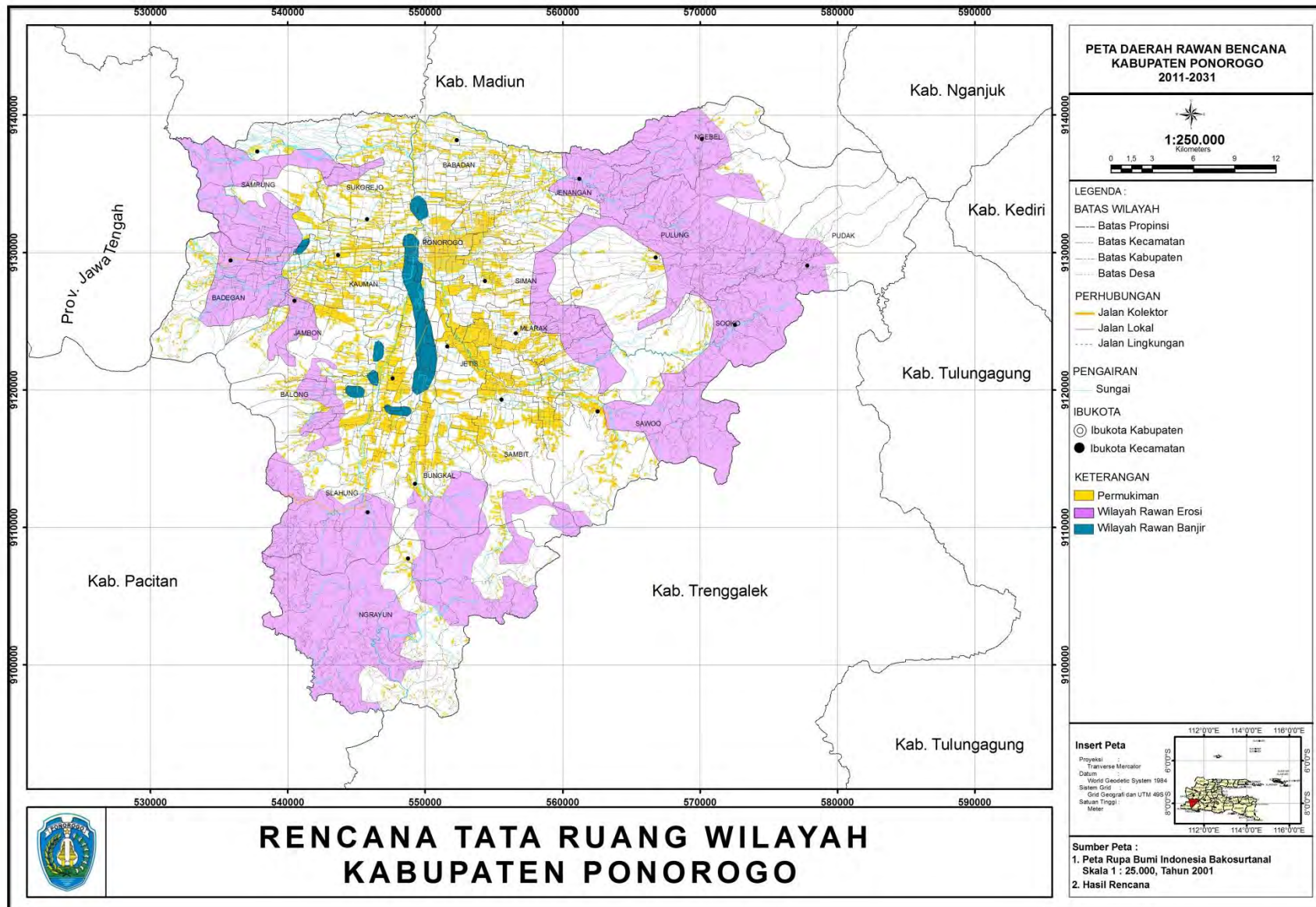
Gambar 2. Peta Rencana Jalur Evakuasi Bencana Alam Kabupaten Ponorogo 2011-2031



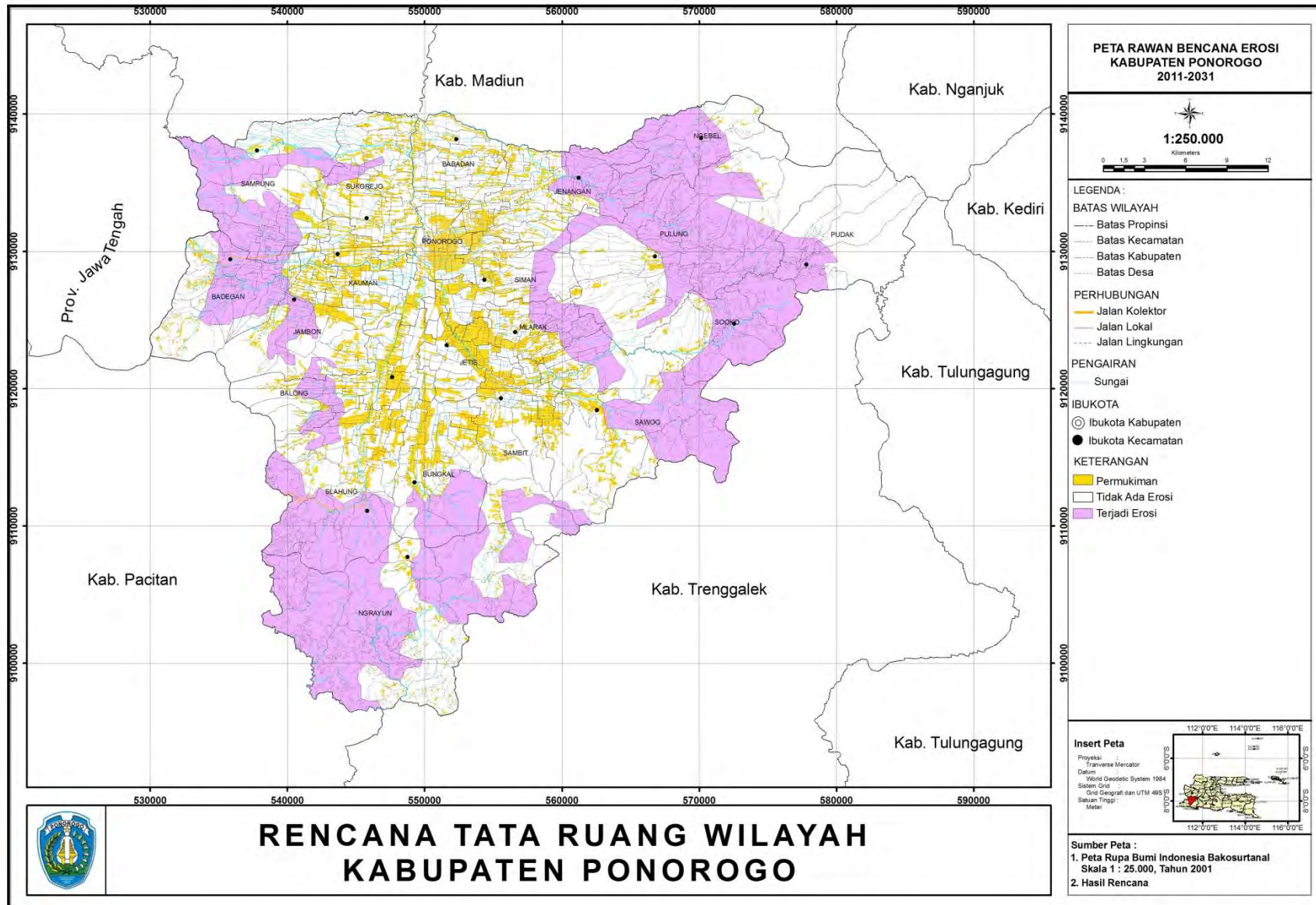
Gambar 3. Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Ponorogo 2011-2031



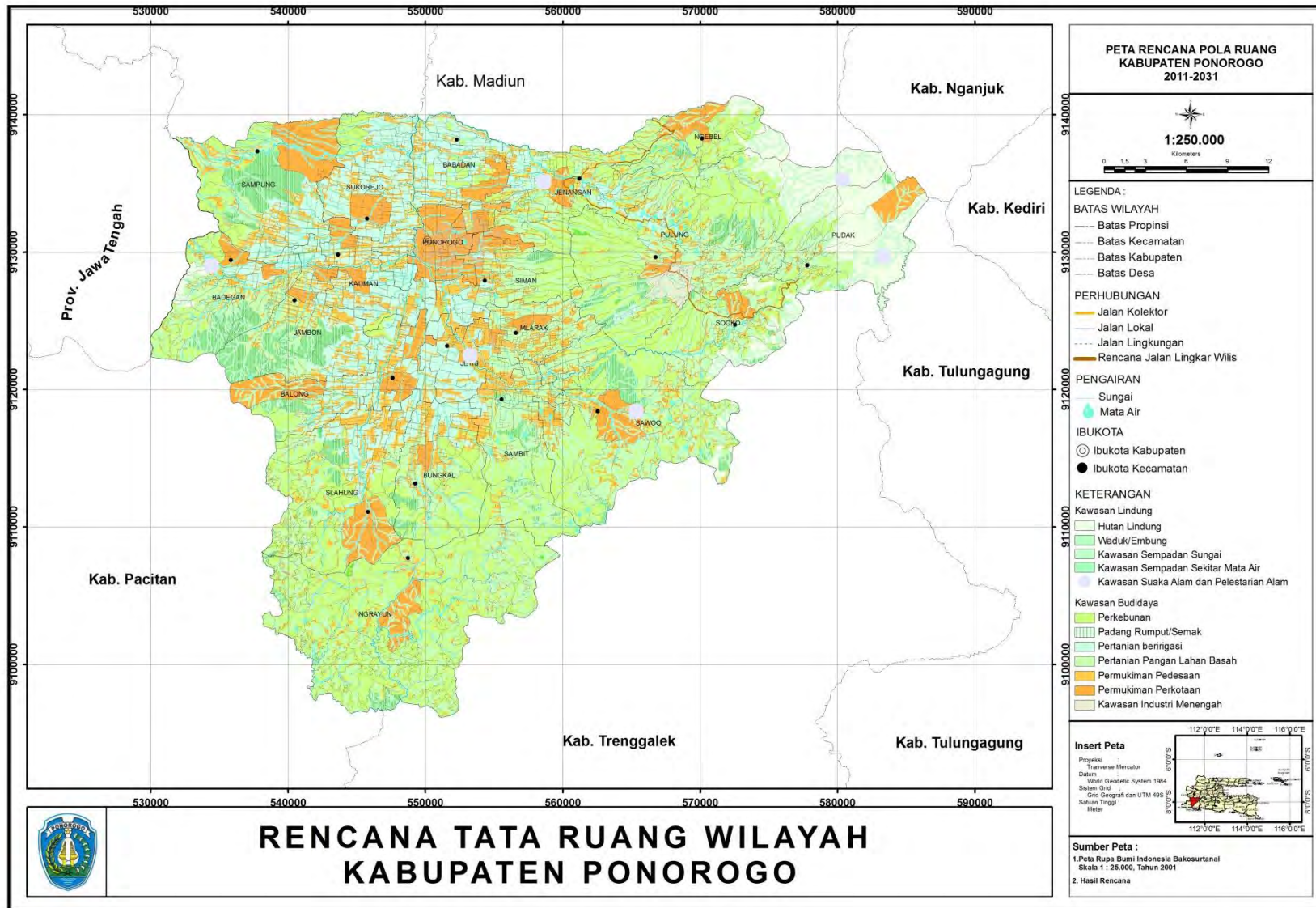
Gambar 4. Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Ponorogo 2011-2031



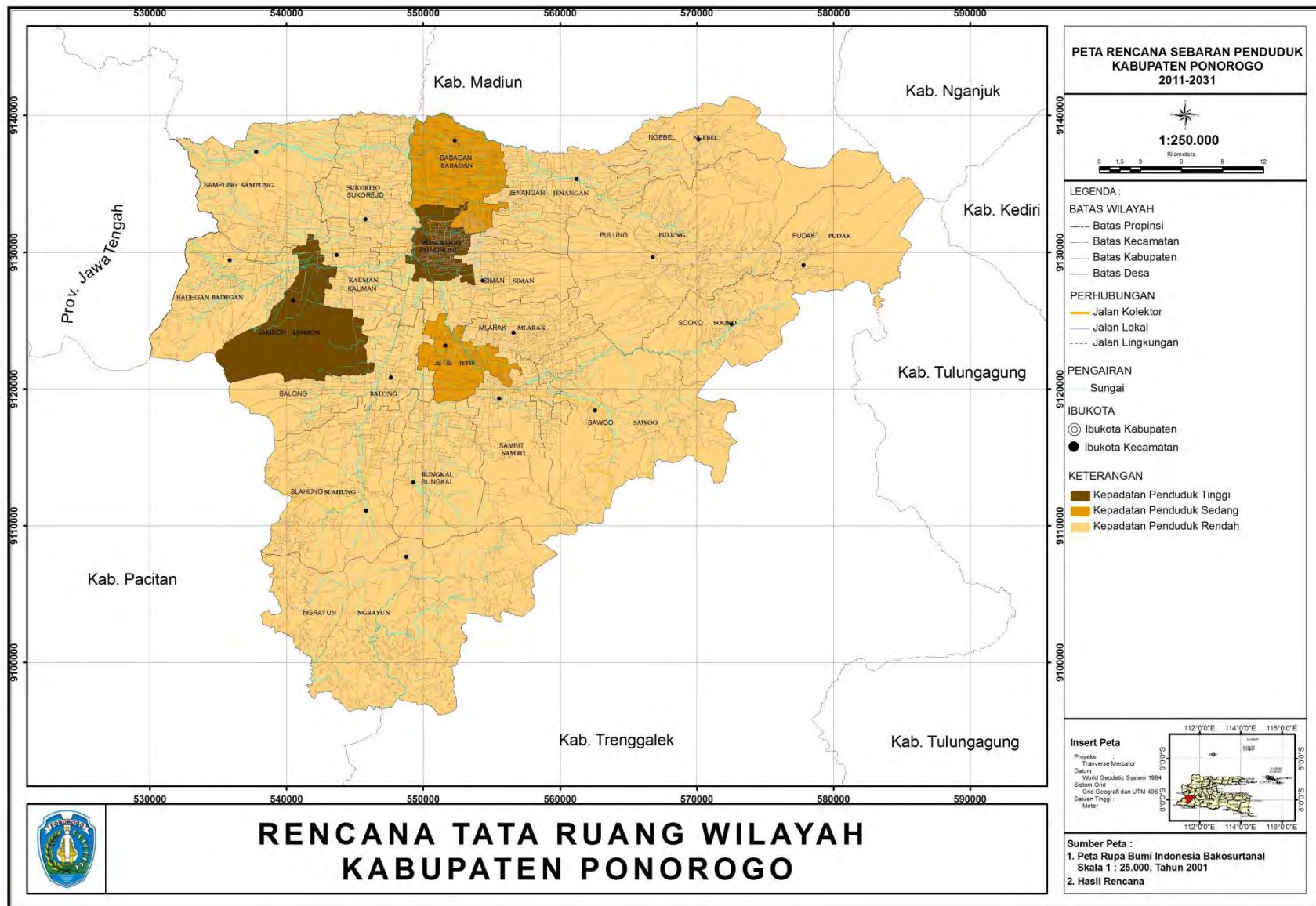
Gambar 5. Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Ponorogo 2011-2031



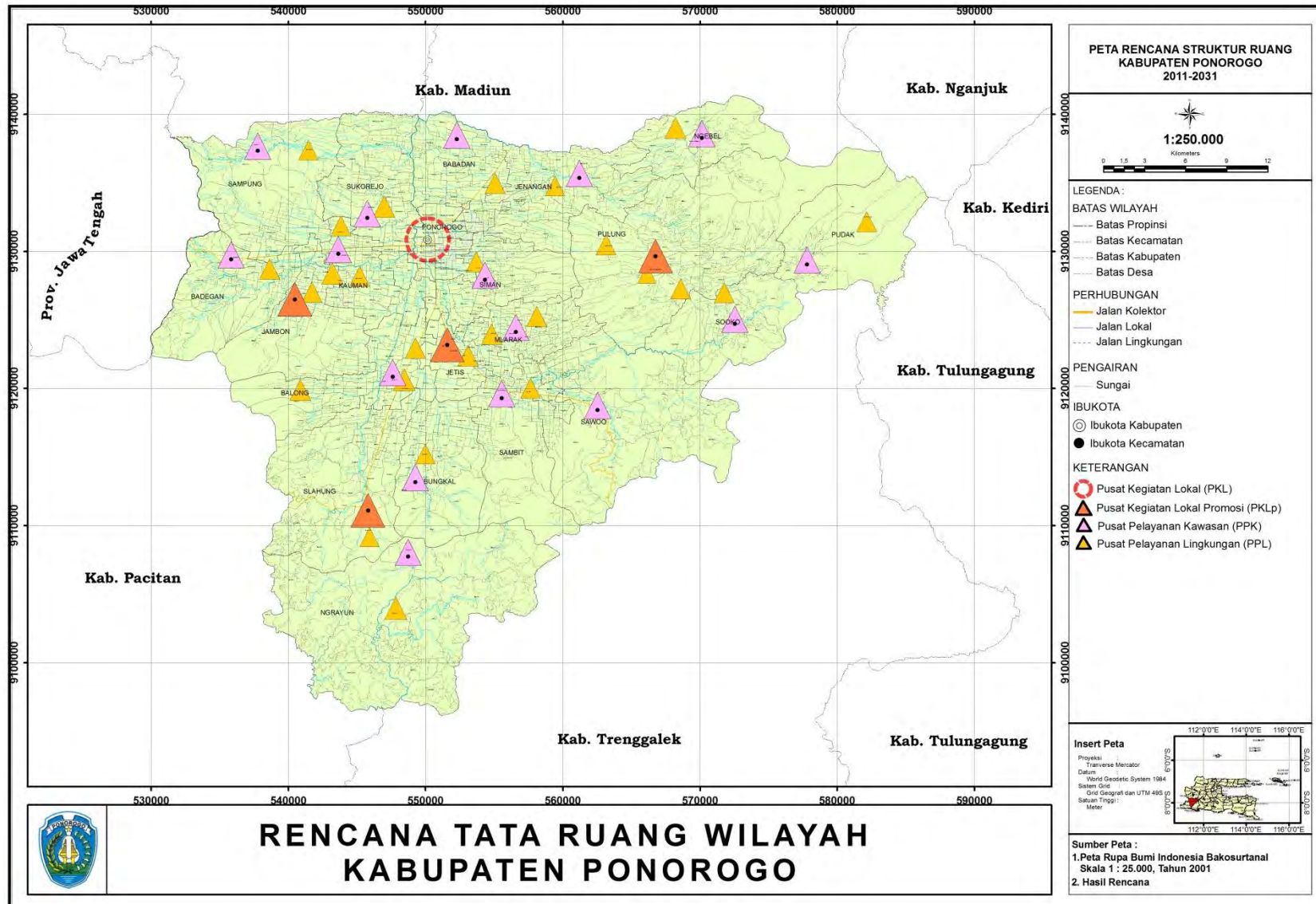
Gambar 6. Peta Rawan Bencana Erosi Kabupaten Ponorogo 2011-2031



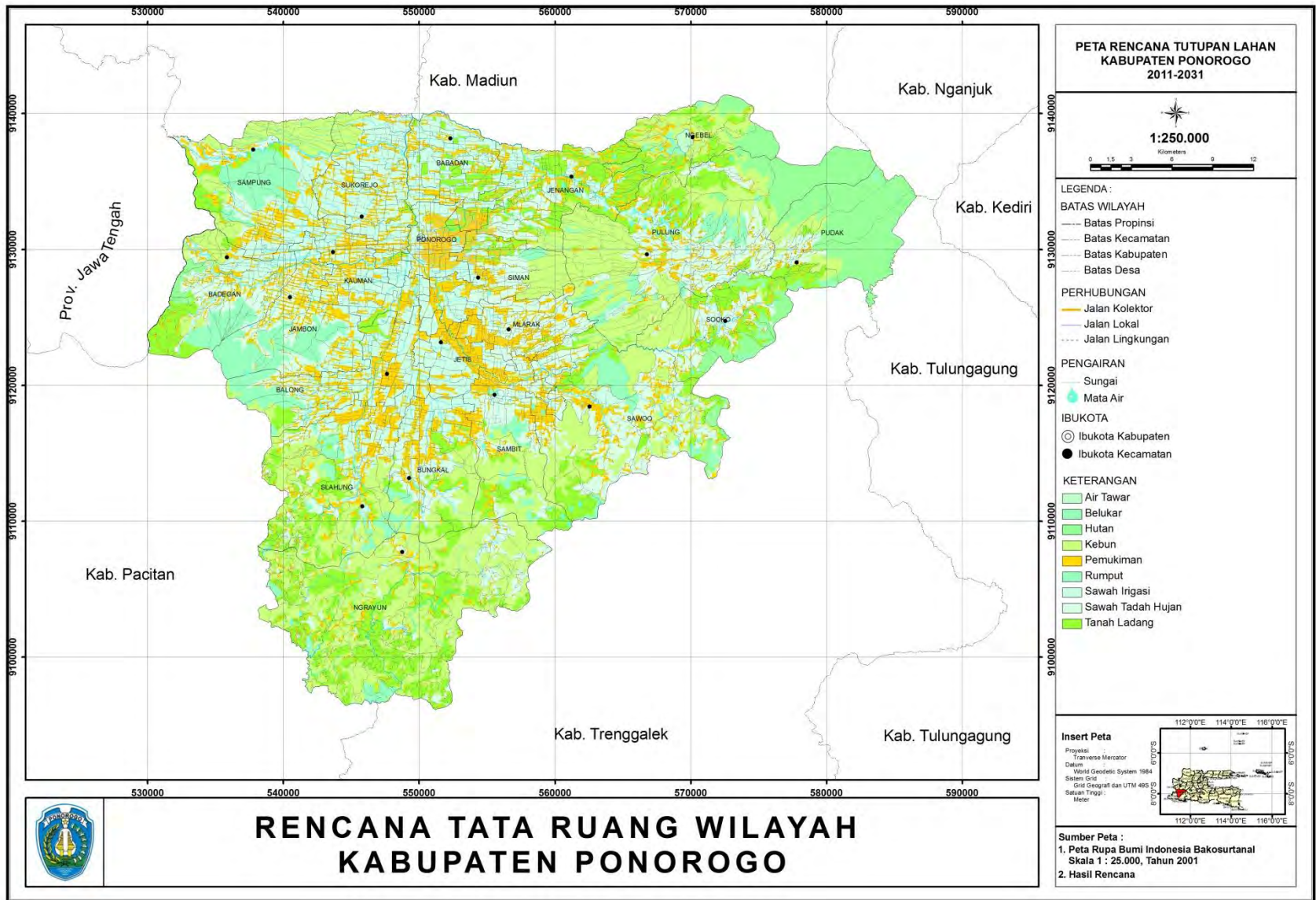
Gambar 7. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ponorogo 2011-2031



Gambar 8. Peta Rencana Sebaran Penduduk Kabupaten Ponorogo 2011-2031



Gambar 9. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Ponorogo 2011-2031



Gambar 10. Peta Rencana Tutupan Lahan Kabupaten Ponorogo 2011-2031

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **620** /405.23/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD) KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PONOROGO,

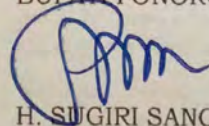
- Menimbang : a. bahwa penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Ponorogo merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai badan publik dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- b. bahwa ketersediaan laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang di dalamnya terdapat data dan informasi mengenai lingkungan hidup, merupakan salah satu dasar dalam menilai dan menentukan prioritas masalah serta membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah kabupaten dalam pengelolaan lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengumpulan data/atau informasi yang di perlukan dalam penyusunan laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
 - b. meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
 - c. melakukan validasi data atau informasi dan mengupayakan adanya data atau informasi tambahan serta menghitung data indeks kualitas lingkungan;
 - d. menyusun buku laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dan Executive Summary;
 - e. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Ponorogo.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 16 MAR 2021
BUPATI PONOROGO,



H. SUGIRI SANCOKO

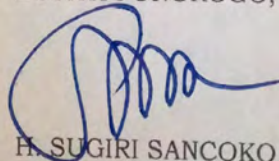
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 188.45/620/405.23/2021
 TANGGAL : 16 MAR 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	HENRY INDRAWARDANA, S.E., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
2.	Ketua	Drh. SAPTO DJATMIKO, TR, M.M.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
3.	Wakil Ketua	WAHYUDI, S.H., M.M.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
4.	Sekretaris	Drs. H. SULISRIANTO	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
5.	Anggota	- JAMUS KUNTO, S.T., M.Si.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo
		- SENI, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA dan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
		- Drs. PURWANTO, M.M.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingku- ngan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
		- JOKO SUSILO, S.E.	Kepala Seksi Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
		- RETNO WAHYUNI, S.Hut.	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
		- JOKO HARTONO, S.Sos., M.Si.	Kepala Seksi Persampahan, Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Domestik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

1	2	3	4
		- MAREM, S.Sos., M.Si.	Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo
		- BASYORI, S.P., M.Sc	Staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur
		- GADING YUPITERS, S.E.	Staf UPT PBB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
		- DINA TRISIANA ISKANDAR, S.T., MAP.	Staf pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
		- ANWAR TAUFIQ, S. Kom.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupa-ten Ponorogo
		- ROFIQUL HUDA, SKM.	Staf Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
		- ABDUL KHOLIL, S.P.	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
		- WIJAYA SITA RASMI, S.T.	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
		- DYAH ASMANING AYU, S.T.	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
		- MUHAMMAD ZAINUL MUTAQIN, S.T.	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
		- SUSENO HADISANTOSA, S.P.	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
		- SAMUJI HADISISWANTO	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
		- IKE SURENI, SKM, M.Kes.	Dosen STIKES Buana Husada
		- RR. UMMU HANIASSALIMAH S.Sos.	LSM Gempa Adventure

BUPATI PONOROGO,



H. SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN BIODATA

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)**

A. IDENTITAS DIRI

Nama : RONI MULYANTO, A.Md.
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 16 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
NIP : 19850116 201903 1 001
SKPD : Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Alamat Rumah : Dk. Semak Rt. 02/06 Desa Karangmojo, Kecamatan Weru,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Alamat Email : ronny.phoole@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Jenjang	Nama Sekolah / Perguruan Tinggi	Jurusan
1997	Sekolah Dasar	SD Karangmojo II	-
2000	Sekolah Menengah Pertama	SLTP N 1 Weru	-
2003	Sekolah Menengah Atas	SMU N 1 Tawang Sari	IPS
2017	Diploma III	AMIK Bina Sarana Informatika Tangerang	Manajemen Informatika

C. PELATIHAN

Tahun	Pelatihan/Diklat	Penyelenggara

D. PENGALAMAN PEKERJAAN

Pekerjaan	Tahun	Jabatan/Unit
Karyawan Swasta	2014 – 2019	Staf Administrasi
PNS	2019 – sekarang	Pengelola Database

E. PENGHARGAAN

Tahun	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggung jawabkannya.

Ponorogo, 12 April 2021

(Roni Mulyanto, A.Md.)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

A. IDENTITAS DIRI

Nama : BASYORI, S.IP., M.Sc
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 16 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (ASN)
NIP : 19750816 200003 1 004
Instansi : Bidang KSDA Wilayah I Madiun (BBKSDA Jatim)
Alamat Rumah : Jl. Demak, Rt 05 / Rw 03 Desa Ngariboyo, Kec. Ngariboyo, Magetan
Nomor Handphone : 082112585775
E-MAIL : basyori.forester@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Jenjang	Nama Sekolah / Perguruan Tinggi	Jurusan
1987	SD	SDN Ngariboyo II Magetan	-
1990	SLTP	SMP 1 Magetan	-
1993	SLTA	SMA 1 Magetan	-
1998	S1	UGM Yogyakarta	HI
2014	S2	UGM Yogyakarta	MPRK

C. PELATIHAN

Tahun	Pelatihan / Diklat	Penyelenggara
1999	Diklat Polhut	Secapa Polri Sukabumi
2000	Diklatsar Kehutanan	Pusdiklat Kehutanan Bogor
2003	Asistensi CITES	KKH Dephut
2006	Pengenalan Jenis TSL	BLK Kadipaten

D. PENGALAMAN PEKERJAAN

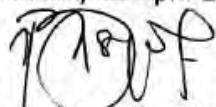
Pekerjaan	Tahun	Jabatan /Unit
PNS	2000	Polhut / BKSDA Jatim I
PNS	2007	Polhut Penyelia / BBKSDA Jatim
PNS	2015	Polhut Muda / BBKSDA Jatim

E. PENGHARGAAN

Tahun	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggung jawabkannya.

Madiun, 12 April 2021


Basyori, S.IP., M.Sc

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURICULUM VITAE)**

A. IDENTITAS DIRI

Nama : GADING YUPITERS, SE
Tempat Tanggal Lahir : PONOROGO, 06 APRIL 1963
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS
NIP : 19630406 200701 1 007
SKPD : UPT PPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV JATIM -
PONOROGO
Alamat Rumah : PULUNG
Alamat Email :

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

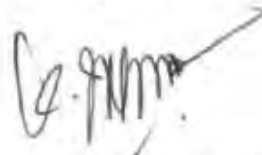
C. PELATIHAN

D. PENGALAMAN PEKERJAAN

E. PENGHARGAAN

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (Curiculum Vitae) ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggung jawabkannya.

Ponorogo, 09 April 2021
Kepala Seksi Pendataan
dan Penetapan



GADING YUPITERS, SE
NIP. 19630406 200701 1 007

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)**

A. IDENTITAS

Nama : ANWAR TAUFIQ, S.Kom
 Tempat Tanggal lahir : Situbondo, 27 Juli 1984
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 NIP : 19840727 200903 1 004
 SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Alamat Rumah : Dukuh Blembem RT/RW 003/001 Desa Blembem Kecamatan
 Jambon Kabupaten Ponorogo
 Alamat Email : anfi27@yahoo.com
 No. Handphone : 08564981909

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Jenjang	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Jurusan
1997	SD	SDN Blembem	
2000	SMP	MTSN Ponorogo	
2003	SLTA	MAN 2 Ponorogo	IPA
2008	S-1	Universitas Brawijaya	Ilmu Komputer

C. PELATIHAN

Tahun	Pelatihan/Diklat	Penyelenggara
2009	Pembekalan Teknis Administrator Database SIAK	Dirjend. Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri
23 Agustus 2010	Diklat PRAJAB III BANDIKLAT Prov. JATIM	Badan Diklat Propinsi Jawa Timur
28 Nopember 2010	Pembekalan Teknis Sinkronisasi Database Kependudukan untuk Petugas Administrator Database SIAK Kabup	Dirjend Dukcapil Kemendagri
13 Maret 2012	Bimtek Operator dalam rangka penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional (KTP-el)	Konsorsium PNRI
30 Maret 2012	Pelatihan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LPPKM Universitas Airlangga
05 Mei 2012	Ahli Pengadaan Nasional	LKPP
10 September 2014	Bimtek Administrator Database Kependudukan Petugas Daerah	Dirjend Dukcapil Kemendagri
13 Nopember 2015	Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Diponegoro Smart Solution Surakarta
18 Mei 2016	Bimtek Administrator Database Kependudukan Kabupaten Kota	Dirjend Dukcapil Kemendagri

D. PENGALAMAN KERJA

Pekerjaan	Tahun	Jabatan/Unit

E. PENGHARGAAN

Tahun	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan

Saya menyatakan bahwa keterangan dalam daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae) ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Ponorogo, 07 April 2021
Yang Bersangkutan



ANWAR TAUFIQ, S.Kom
19840727 200903 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Dina Trisiana Iskandar, ST, MAP
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 16 Maret 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
NIP : 19860316 201001 2 020
SKPD : Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Puspa Raya Regency Blok A/8 Jl. Prajurit, Kel. Mangkujayan
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
Alamat Email : perindustrianponorogo@gmail.com / d_trisiana03@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Jenjang	Nama Sekolah / Perguruan Tinggi	Jurusan
1991 – 1997	Sekolah Dasar	SD Putra Wijaya IV Surabaya	-
1997 – 2000	Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 16 Surabaya	-
2000 – 2003	Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 18 Surabaya	IPA
2003 – 2007	Sarjana (S1)	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	Teknik Lingkungan
2015 – 2016	Pasca Sarjana (S2)	Universitas Brawijaya	Ilmu Administrasi Publik

C. PELATIHAN

No	Jenis Pelatihan	Taggal	Lama	Kota
1.	Pendidikan dan Pelatihan Prajab III Angkatan 333 Tahun 2010	07 s/d 27 November 2010	21 hari	Pasuruan
2.	Pendidikan dan Pelatihan Sistem Industri I	10 s/d 22 Juni 2013	13 hari	Surabaya
3.	Pendidikan dan Pelatihan Sistem Industri II	06 s/d 18 Oktober 2014	13 hari	Surabaya
4.	JICA Training Program for Young Leaders: SME Development and Promotion Course	07 s/d 21 November 2014	15 hari	Ehime, Japan
5.	Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Dasar Bagi Penyuluh Fungsional Perindustrian dan Perdagangan (PFPP)	08 s/d 20 Maret 2015	13 hari	Surabaya
6.	Diklat AMT Bagi Aparatur	21 s/d 22 Februari 2017	2 hari	Batu
7.	Diklat CEFE Bagi Aparatur	23 s/d 24 Februari 2017	2 hari	Batu
8.	Pelatihan Pembentukan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	22 s/d 27 April 2019	6 hari	Bogor

PENGALAMAN PEKERJAAN

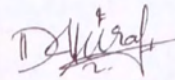
Pekerjaan	Tahun	Jabatan Unit
PNS	2010 - sekarang	Staf Bidang Industri Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

E. PENGHARGAAN

Tahun	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
-	-	-

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini adalah benar dan apabila terdapat eksalahan, saya bersedia mempertanggung jawabkannya.

Ponorogo, April 2021



Dina Trisiana Iskandar, ST, MAP

NIP. 19860316 201001 2 020

